PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA TAHUN 2025-2029



KEEROM SEBAGAI MUTIARA HIJAU DI BUMI PAPUA







KWEMBO KENTKEI GIRGURA KENSUWRI

Tuhan Menciptakan Kita yang Membangun

"Keerom Maju yang
Transformatif, Mandiri,
Bermartabat dan Berkelanjutan"



BUPATI KEEROM
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penjabaran visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 263 ayat (3), Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Nasional

ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Keerom tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggunjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara Penyusun, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833), sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041),
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahunn 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323),
21. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Papua;
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
23. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

25. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor);
30. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 Nomor 2).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Keerom Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2013 Nomor 29);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Keerom 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten

Keerom Tahun 2025 Nomor 98);
34. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.2/ 4075/Bangda tanggal 12 Juni 2024 Tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025- 2029;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
36. Keputusan Gubernur Papaua Nomor 100.3.3.1/KEP.301/2025 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KEEROM
Dan
BUPATI KEEROM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Keerom.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Keerom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Keerom.
5. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah rencana strategi 5 (Lima) tahunan Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Keerom untuk 1 (satu) tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pemabngunan Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
9. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluar, dan hasil terhadap rencana dan standar.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan dan Sasaran adalah arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
18. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
19. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
20. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 2

(1) RPJMD disusun berasaskan :
   a. transparansi;
   b. responsif;

c. efesien;
d. efektif;
e. akuntabel;
f. partisipatif;
g. terukur;
h. berkeadilan;
i. berwawasan lingkungan; dan
j. berkelanjutan..

(2) RPJMD disusun secara sistematis, sinergis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RPJPD dan RTRW.

(4) RPJMD disusun berorientasi pada proses dengan pendekatan
a. teknokratik;
b. partisipatif;
c. politis; dan
d. atas bawah dan bawah atas.
e. holistik-tematik;
f. integratif; dan
g. spasial;

Pasal 3

(1) RPJMD bertujuan sebagai pedoman dasar pemecahan permasalahan daerah melalui:
a. koordinasi antar pelaku pembangunan;
b. integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
c. partisipasi masyarakat; dan
d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

(2) Program partisipatif lintas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu perangkat daerah untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.

(3) Rencana kerja yang terukur dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, sebagai dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

(4) Rencana kerja yang berkeadilan dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

(5) Uraian secara rinci RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang teridiri dari :
a. Pendahuluan : latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen

perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan;

b. Gambaran Umum Daerah :
   Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum; Subbab Gambaran Keuangan Daerahdan Subbab Permasalahan dan Isu Strategis.
c. Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Sub Bab Visi Misi, Tujuan dan Sasaran. Subbab Strategi, Arah, Kebijakan, dan ProgramPrioritas Pembangunan Daerah;
d. Program Perangkat Daerah dan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan;
e. Penutup.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kebijakan Perencanaan RPJMD;
   b. Pelaksanaan RPJMD; dan
   c. Hasil RPJMD.
3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana terhadap pelaksanaan dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala PD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DPRK melakukan pengawasan sesuai dengan fungsinya.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
   a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
   b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan- undangan;

c. Terjadi perubahan mendasar ditingkat daerah dan nasional, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan kebijakan tingkat daerah yang mempengaruhi subtansi RPJMD secara langsung serta perubahan kebijakan nasional merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RPKD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, perubahan capaian sasaran tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah lainnya yang terkait dengan rencana pembangunan daerah.

Pasal 9

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Keerom 2025-2045 dan mengacu pada RPJMN 2025-2029.

(2) Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan berikutnya.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

(4) Apabila sampai dengan tahun kedua sejak habisnya masa jabatan Bupati sebagaimana diatur pada ayat (2) belum terpilih Bupati untuk masa jabatan berikutnya, RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipergunakan pada tahun berikutnya sampai terpilih Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2021 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 17 November 2025

BUPATI KEEROM,

CAP/TTD

PITER GUSBAGER

Diundangkan di Arso
pada tanggal 18 November 2025

PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM,

CAP/TTD

STENLY N. MONINGKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2025
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM, PROVINSI PAPUA NOMOR : 07/2025

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

PREGUSTINA DUMA
NIP. 19810314 200605 2 002

Prinsip:
KWEMBO KENTKEI GIRGURA KENSUWRI
[Tuhan Menciptakan Kita yang Membangun]

Motto:
Keerom sebagai Mutiara Hijau di Bumi Papua



PITER GUSBAGER, S.Hut.,MUP
BUPATI KABUPATEN KEEROM



Drs. DAUD, M.Si

WAKIL BUPATI KABUPATEN KEEROM

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Keerom Provinsi Papua Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan Baik. Dokumen ini merupakan pedoman Strategis Pembangunan Daerah dalam lima tahun ke depan, yang memuat Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan, serta Program-Program Unggulan yang disusun secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Dokumen RPJMD ini menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), serta menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan pembangunan dalam mengarahkan sumber daya, baik dari pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Dengan demikian, sinergi dan kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan target-target pembangunan telah ditetapkan.

Kami menyampaikan Apresiasi dan Ucapan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Keerom, DPRK Keerom, Tokoh Masyarakat, Akademisi, Dunia Usaha, serta seluruh Pihak yang telah memberikan dukungan, masukan dan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Harapan kami, RPJMD ini dapat menjadi Instrumen Pembangunan yang responsif terhadap dinamika zaman, serta menjawab kebutuhan masyarakat dengan tetap berpijak pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal.

Akhirnya, dengan prinsip **“Kwembo Kentkei Girgura Kensuwri”**, [Tuhan Menciptakan Kita yang Membangun], dan di bawah motto ”Keerom sebagai Mutiara Hijau di Bumi Papua”, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Keerom Provinsi Papua Tahun 2025-2029. Dengan Kebersamaan, semangat Gotong Royong dan Kerja Keras, kita yakin dapat mewujudkan Kabupaten Keerom yang lebih Maju, Mandiri dan Sejahtera

Arso, November 2025

BUPATI KEEROM

PITER GUSBAGER, S.Hut., MUP

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PRINSIP DAN MOTTO	ii
FOTO BUPATI KABUPATEN KEEROM	iii
FOTO WAKIL BUPATI KABUPATEN KEEROM	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	I.1
1.2.Landasan Hukum Penyusunan	I.2
1.3.Pendekatan Penyusunan Dokumen RPJMD	I.4
1.3.1.Tahap Penyiapan dan Persiapan	I.4
1.3.2.Analisis Situasi dan Isu Strategis	I.5
1.3.3.Formulasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Serta Penyusunan Program dan Kegiatan	I.5
1.3.4.Konsultasi Publik dan Musrenbang	I.6
1.3.5.Penyusunan Rancangan Akhir & Reviu/Verifikasi	I.6
1.3.6.Penetapan dan Pengesahan	I.7
1.4.Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I.7
1.4.1.Hubungan dengan RPJPN, PRJMN, RPJPD dan RPJMD Provinsi Papua, RPJPD, KLHS RTRW Kabupaten Keerom	I.8
1.4.2.Hubungan dengan Renstra, RKPD, dan SDG's	I.26
1.5.Maksud dan Tujuan	I.28
1.6.Sistematika Dokumen	I.29
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1.Aspek Geografi dan Demografi	II.1
2.1.1.Posisi dan Peran Strategis Daerah	II.1
2.1.2.Potensi Sumber Daya Alam	II.6
2.1.3.Daya Dukung dan Tampung Lingkungan Hidup	II.12
2.1.4.Aksesibiltas Transportasi dan Daya Dukung Lingkungan	II.16
2.1.5.Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	II.18
2.1.6.Lingkungan Hidup Berkualitas	II.22
2.1.7.Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II.24
2.1.8.Demografi	II.28
2.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II.30
2.2.1.Kesejahteraan Ekonomi	II.31
2.2.2.Kesehatan Untuk Semua	II.37
2.2.3.Pendidikan Berkualitas yang Merata	II.39
2.2.4.Perlindungan Sosial Yang Adaptif	II.44
2.2.5.Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II.45
2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyakat Inklusif	II.49
2.3. Aspek Daya Saing	II.52
2.3.1.Daya Saing Sumber Daya Manusia	II.56
2.3.2.Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi	II.57
2.3.3.Penerapan Ekonomi Hijau	II.58

2.3.4.Transformasi Digital	II.60
2.3.5.Integrasi Ekonomi	II.61
2.3.6.Perkotaan dan Perkampungan Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II.62
2.3.7.Stabilitas Ekonomi Makro	II.63
2.4.Aspek Pelayanan Umum	II.64
2.4.1.Regulasi dan Tata Kelola Berintegritas dan Adaptif	II.64
2.4.2.Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II.64
2.4.3.Hukum, Keamanan dan Demokrasi	II.66
2.4.4.Ketangguhan Diplomasi, Pertahanan Berdaya Kawasan	II.67
2.4.5.Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	II.68
2.5.Gambaran Keuangan Daerah	II.76
2.5.1.Realisasi APBD	II.76
2.5.2.Neraca Daerah	II.80
2.5.3.Proyeksi APBD	II.84
2.5.4.Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah	II.90
2.5.5.Proyeksi Kerangka Pendanaan	II.92
2.6.Permasalahan dan Isu Strategis	II.95
2.6.1.Permasalahan Pembangunan Daerah	II.95
2.6.2.Isu-Isu Strategis	II.132

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
3.1. Visi	III.1
3.2. Misi	III.10
3.3. Tujuan dan Sasaran	III.15
3.4. Strategi dan Arah Kebijakan	III.31
3.4.1. Strategi	III.31
3.4.2. Arah Kebijakan	III.36
3.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah	III.58

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH	
4.1. Program Perangkat Daerah	IV.1
4.2. Penetapan Indikator Kinerja	IV.40

BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	V.1
5.1.1. Umum	V.1
5.1.2. Fokus Khusus	V.2
5.2. Kaidah Pelaksanaan	V.5
5.2.1. Prinsip Pelaksanaan	V.5
5.2.2. Mekanisme Implementasi RPJMD	V.8
5.3. Pengendalian dan Evaluasi	V.8
5.3.1. Pengendalian Pelaksanaan RPJMD	V.9
5.3.2. Evaluasi Kinerja dan Pelaporan	V.10

DAFTAR TABEL

Nomor:		Halaman:
Tabel 1.1.	Keselarasan antara RPJPN dan RPJMN Dengan RPJMD Kabupaten Keerom	I.9
Tabel 1.2.	Keselarasan antara RIPPP, RPJPD Provinsi Papua Dengan RPJMD Kabupaten Keerom	I.13
Tabel 1.3.	Keselarasan Dokumen RPJPD Kabupaten Keerom dengan RPJMD Kabupaten Keerom	I.17
Tabel 1.4.	Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Keerom dengan RPJPD Kabupaten Keerom, RTRW dan KLHS Kabupaten Keerom	I.21
Tabel 1.5.	Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Keerom dengan Kota Jayapura dan Provinsi Papua	I.23
Tabel 1.6.	Hubungan Hirarkis Dokumen RPJMD Kabupaten Keerom dengan Renstra OPD dan RKPD dan SDG's	I.27
Tabel 1.7.	Hubungan Fungsional Dokumen RPJMD Kabupaten Keeromdengan Renstra OPD dan RKPD dan SDG's	I.27
Tabel 1.8.	Hubungan Substantif Dokumen RPJMD Kabupaten Keeromdengan Renstra OPD dan RKPD	I.28
Tabel 2.1.	Nama Distrik dan Kampung Kabupaten Keerom	II.1
Tabel 2.2.	Kerentanan Geografis Kabupaten Keerom	II.5
Tabel 2.3	Penggunaan Lahan Kabupaten Keerom	II.8
Tabel 2.4	Lokasi, Jenis, Estimasi Kunjungan Wisata di Kabupaten Keerom	II.11
Tabel 2.5.	Estimasi Kemungkinan Daya Dukung Karbon Di Kabupaten Keerom	II.13
Tabel 2.6.	Estimasi Kondsi Jalan dan Jembatan per Distrik Kabupaten Keerom	II.17
Tabel 2.7.	Kondsi Jalan dan Tutupan Hutan Tersisa Per Distrik di Kabupaten Keerom	II.18
Tabel 2.8.	Akses & Estimasi Konsumsi Listrik Kabupaten Keerom, 2021-2024	II.18
Tabel 2.9.	Persentase Akses Listrik Rumahtangga dan Kapasitas Pasokan Per Distrik di Kabupaten Keerom, Tahun 2024	II.19
Tabel 2.10	Perbandingan Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak Provinsi Papua dan Kabupaten Keerom Tahun 2020-2023	II.20
Tabel 2.11	Persentase Akses Air Bersih Rumahtangga dan Kapasitas PasokanPer Distrik di Kabupaten Keerom, Tahun 2024	II.20
Tabel 2.12	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024	II.21
Tabel 2.13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom	II.23
Tabel 2.14	Proyeksi Potensi Pengurangan Deforestasi dan Rehabilitasi Lahan KritisDi Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029	II.23
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024	II.25
Tabel 2.16	Kepadatan Penduduk Kabupaten Keerom Tahun 2024	II.26
Tabel 2.17	Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur Kabupaten Keerom Tahun 2024	II.27
Tabel 2.18	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Keerom	II.28

Nomor:		Halaman:
Tabel 2.19	Akses Infrastuktur dan Tingkat Kesejahteraan Per Distrik Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029	II.30
Tabel 2.20	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut PengeluaranKabupaten Keerom Tahun 2020-2024	II.32
Tabel 2.21	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Keerom Tahun 2024	II.33
Tabel 2.22	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024	II.35
Tabel 2.23	Indikator Kemiskinan Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024	II.36
Tabel 2.24	Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Keerom Tahun 2020-2023	II.38
Tabel 2.25	Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tahun 2022-2025	II.38
Tabel 2.26	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Keerom Tahun 2020-2023	II.41
Tabel 2.27	Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Keerom Tahun 2019-2023	II.41
Tabel 2.28	Angka Melek Huruf di Kabupaten Keerom, 2022-2024	II.42
Tabel 2.29	Persentase Kabupaten Keerom Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Tahun 2023-2024	II.42
Tabel 2.30	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Tahun 2023-2024	II.43
Tabel 2.31	Ancangan Perkembangan Aspek dan Indikator Capaian Keberagamaan dan Berkebudayaan MajuKabupaten Keerom Tahun 2025–2030	II.45
Tabel. 2.32	Jumlah Penduduk dan Jumlah Tempat Peribadatan Kabupaten Keerom, 2024	II.46
Tabel. 2.33	Dimensi dan skor IPK Kabupaten Keerom, 2024	II.47
Tabel. 2.34	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif di Kabupaten Keerom	II.49
Tabel. 2.35	Indikator Capaian Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif di Kabupaten Keerom Tahun 2024	II.49
Tabel. 2.36	Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Keerom	II.50
Tabel. 2.37	Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Keerom 2020-2024	II.51
Tabel. 2.38	Komparasi Indikator Utama Antar Kabupaten/Kota	II.54
Tabel 2.39	Perkembangan IPM dan Laku Pertumbuhan PDRB PerkapitaKabupaten Keerom Tahun 2019-2024	II.56
Tabel 2.40	Perkembangan Rasio PDRB, UMKM, IID dan TPK Kabupaten Keerom, 2019-2024	II.57
Tabel 2.41	Perkembangan Bauran Energi Terbarukan di Kabupaten Keerom, 2019-2024	II.59
Tabel 2.42	Indeks SPBE Kabupaten Keerom, 2019-2024	II.60
Tabel 2.43	Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2019-2023	II.61
Tabel 2.44	Kondisi Perkotaan dan Perkampungan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Keerom	II.62
Tabel 2.45	Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Keerom Tahun 2019-2024	II.63
Tabel 2.46	Capaian Indikator Kinerja Regulasi dan Tata Kelola Berintegritas dan Adaptif Kabupaten Keerom	II.64

Nomor:		Halaman:
Tabel 2.47	Kondisi Dasar Capaian SPM Kabupaten Keerom Tahun 2024 Untuk infrastuktur Jalan, Air Minum, Drainase, dan Perumahan	II.64
Tabel 2.48	Target Capaian SPM Kabupaten Keerom Tahun 2024 Untuk infrastuktur Jalan, Air Minum, Drainase dan Perumahan	II.65
Tabel 2.49	Capaian Indikator Kinerja Hukum, Keamanan dan Demokrasi Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024	II.66
Tabel 2.50	Capaian Indikator Kinerja Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Kawasan Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024	II.67
Tabel 2.51	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024	II.68
Tabel 2.52	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024	II.69
Tabel 2.53	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Pilihan Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024	II.72
Tabel 2.54	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Pendukung Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024	II.73
Tabel 2.55	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Penunjang Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024	II.74
Tabel 2.56	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Pengawasan Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024	II.75
Tabel 2.57	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Kewilayahan Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024	II.75
Tabel 2.58	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Umum Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024	II.76
Tabel 2.59	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2019-2023	II.78
Tabel 2.60	Sumber Pembiayaan Program	II.79
Tabel 2.61	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2019-2023	II.81
Tabel 2.62	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029	II.85
Tabel 2.63	Sumber Pendanaan Program Sektoral Dalam Proyeksi APBD Kabupaten Keerom Tahun 2025–2029	II.88
Tabel 2.64	Dana Sektoral Program Prioritas Transformasi Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan di Kabupaten Keerom	II.89
Tabel 2.65	Jenis, Bentuk, dan Mekanisme Kemitraan Potensial di Kabupaten Keerom	II.90
Tabel 2.66	Tren Kinerja Keuangan (Indikatif) di Kabupaten Keerom	II.91
Tabel 2.67	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Keerom	II.94
Tabel 2.68	Alokasi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan DaerahKabupaten Keerom Tahun 2025-2029	II.94
Tabel 2.69	Pemetaan Permasalahan Urusan Pendidikan	II.96
Tabel 2.70	Pemetaan Permasalahan Urusan Kesehatan	II.97
Tabel 2.71	Pemetaan Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II.98
Tabel 2.72	Pemetaan Permasalahan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	II.99

Nomor:		Halaman:
Tabel 2.73	Pemetaan Permasalahan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	II.100
Tabel 2.74	Pemetaan Permasalahan Urusan Sosial	II.101
Tabel 2.75	Pemetaan Permasalahan Urusan Tenaga Kerja	II.103
Tabel 2.76	Pemetaan Permasalahan Urusan Pemberdayaan perempuan	II.104
Tabel 2.75	Pemetaan Permasalahan Urusan Ketahanan Pangan	II.105
Tabel 2.76	Pemetaan Permasalahan Urusan Pertanahan	II.106
Tabel 2.77	Pemetaan Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup	II.107
Tabel 2.78	Pemetaan Permasalahan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II.108
Tabel 2.79	Pemetaan Permasalahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II.109
Tabel 2.80	Pemetaan Permasalahan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II.110
Tabel 2.81	Pemetaan Permasalahan Urusan Perhubungan	II.111
Tabel 2.82	Pemetaan Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika	II.112
Tabel 2.83	Pemetaan Permasalahan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	II.113
Tabel 2.84	Pemetaan Permasalahan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	II.114
Tabel 2.85	Pemetaan Permasalahan Urusan Kepemudaan dan olahraga	II.115
Tabel 2.86	Pemetaan Permasalahan Urusan Statistik	II.116
Tabel 2.87	Pemetaan Permasalahan Urusan Persandian	II.117
Tabel 2.88	Pemetaan Permasalahan Urusan Kebudayaan	II.118
Tabel 2.89	Pemetaan Permasalahan Urusan Perpustakaan	II.119
Tabel 2.90	Pemetaan Permasalahan Urusan Kearsipan	II.120
Tabel 2.91	Pemetaan Permasalahan Urusan Pilihan	II.122
Tabel 2.92	Pemetaan Permasalahan Urusan Pendukung	II.126
Tabel 2.93	Pemetaan Permasalahan Urusan Penunjang, Pengawasan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum	II.127
Tabel 2.94	Analisis SWOT Perencanaan Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029	II.132
Tabel 2.95	Isu Kewilayahan RPJPN Wilayah Papua	II.148
Tabel 2.96	Perumusan Isu-Isu Strategis Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029 Berdasarkan Isu Global, Nasional, RIPPP, Provinsi Papua dan Kewilayahan	II.166
Tabel 3.1	Pokok dan Penjabaran Visi RPJMD Keerom Tahun 2025-2029	III.2
Tabel 3.2	Keterkaitan Indikator Umum Program RPJPD 2025-2045 Dengan RPJMD Keerom Tahun 2025-2029	III.3
Tabel 3.3	Sinergitas Asta Cita Nasional Dengan Transformasi Keerom	III.7
Tabel 3.4	Deskripsi Indikator Transformatif Pembangunan Keerom Menurut Bidang	III.8
Tabel 3.5	Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Keerom dalam Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029	III.15
Tabel 3.6	Tujuan dan Sasaran Misi 1 RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029	III.17

Nomor:		Halaman:
Tabel 3.7	Tujuan dan Sasaran Misi 2 RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029	III.18
Tabel 3.8	Tujuan dan Sasaran Misi 3 RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029	III.20
Tabel 3.9	Tujuan dan Sasaran Misi 4 RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029	III.22
Tabel 3.10	Tujuan dan Sasaran Misi 5 RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029	III.24
Tabel 3.11	Tujuan dan Sasaran Misi 6 RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029	III.26
Tabel 3.12	Tujuan dan Sasaran Misi 7 RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029	III.29
Tabel 3.13	Peta tematik lokasi prioritas pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Keerom Basis kebijakan Nasional, Provinsi dan kabupaten	III.32
Tabel 3.14	Peta Tematik Lokasi Prioritas Pembangunan Infrastruktur Per Distrik Di Kabupaten Keerom Basis Kebijakan Nasional, Provinsi & Kabupaten	III.33
Tabel 3.15.	Keterhubungan Program Prioritas dan Isu Strategis Kabupaten Keerom	III.39
Tabel 3.16	Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Keerom dalam Pencapaian Sasaran Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029	III.41
Tabel 3.17	Tema dan Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Keerom	III.47
Tabel 3.18	Program Prioritas Utama Bupati dan Wakil Bupati Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029	III.60
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2025-2030	IV.2
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Keerom Tahun 2025-2030	IV.41
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2025-2030	IV.43
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Keerom Tahun 2025-2030	IV.45

DAFTAR GAMBAR

Nomor:		Halaman:
Gambar 1.1	Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I.7
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Keerom	II.3
Gambar 2.2	Peta Tutupan Lahan	II.7
Gambar 2.3.	Peta Lokasi Dan Estimasi Kujungan Wisata Di Kabupaten Keerom	II.10
Gambar 2.5	Perubahan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Keerom	II.22
Gambar 2.6	Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Keerom	II.22
Gambar 2.7	Piramida Penduduk Kabupaten Keerom Tahun 2024	II.28
Gambar 2.8	Piramida Penduduk Kabupaten Keerom Tahun 2029	II.29
Gambar 2.9	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024	II.32
Gambar 2.10	Laju Inflasi Deflator Kabupaten Keerom Tahun 2021-2023	II.33
Gambar 2.11	PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2020-2024	II.34
Gambar 2.12	Indeks Gini Rasio Kabupaten Keerom Tahun 2020-2023	II.34
Gambar 2.13	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020-2023	II.36
Gambar 2.14	Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Keerom	II.39
Gambar. 2.15	Persentase Penduduk yang Menerima Jaminan Sosial Menurut Jenis Jaminan Sosial di Kabupaten Keerom Tahun 2023	II.44
Gambar 3.1	Skenario Strategi Pembangunan Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029	III.31
Gambar 3.2	Strategi Operasional dan Teknis Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029	III.32
Gambar 3.3	Kerangka Perumusan Strategi Pembangunan Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029	III.34
Gambar 3.4	Tematik Membangun Fondasi Transformasi dan Kebijakan Umum Kabupaten Keerom Tahap 1 Tahun 2025-2029	III.37
Gambar 3.5	Tematik Membangun Fondasi Transfo5masi dan Kebijakan Umum Provinsi Papua Tahap 1 Tahun 2025-2029	III.38
Gambar 3.6	Tahapan Pembangunan Tematik Fondasi Transformasi Kabupaten Keerom, Tahun 2025-2029	III.39
Gambar 3.7	Peta Pengembangan Wilayah Mamta	III.55
Gambar 3.8	Lokasi Prioritas Arah Kebijakan Provinsi Papua Untuk Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029	III.56
Gambar 3.9	Lokasi Prioritas Arah Kebijakan Nasional Untuk Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029	III.57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (selanjut nya disingkat RPJMD) Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, merupakan pentahapan periode-I RPJPD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2045. Disusun berdasarkan prinsip dan kaidah pembangunan daerah dengan acuan utama Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan dokumen berdasarkan acuan tahapan, tata cara, sistematika, substansi dan penyela-rasan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana ditindak-lanjuti di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Memuat materi utama tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan anggaran, prioritas pembangunan 5 tahun, sinkronisasi program prioritas, dan ukuran kinerja pembangunan. Ber-pedoman pada RPJPN dan RPJMN, RIPPP, RPJPD dan RPJMD Provinsi Papua, RPJPD Kabupaten Keerom. Sebagaimana implikasi penegasan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah berke-wajiban menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Nasional.

Hal tersebut seiring dengan tuntasnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Keerom. Pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah tersebut, telah lebih dahulu disusun dokumen Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 sebelum Kepala Daerah dan Wakil Daerah dilantik. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Keerom berkewajiban RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sehubungan dengan itu, dokumen RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, sebagai bagian integral dan bersifat strategis dalam mewujudkan pencapaian Indonesia Emas, dan prioritas RPJMN. Mencakup Asta Cita, 17 Prioritas dan 8 proyek hasil ter-baik cepat *(Quick Wins)*, sebagaimana dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJP Nasional 2025-2045. Mempedomani pula Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Peme-rintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2021 tentang Penyelesaian Tumpang Tindih antara RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota, RTRW dengan Kawasan Hutan dan RTRW dengan Perijinan.

Selain itu, diperhatikan pula tentang MRPN (Manajemen Risiko Pembangunan Nasional) dalam rangka pengendalian risiko yang terintegrasi di berbagai tingkatan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, mendorong pro-aktivitas entitas, dan memberi keyakinan atas solusi ketidakpastian melalui penerapan sistem manajemen risiko. Sehubungan dengan itu, manajemen risiko pembangunan daerah dimaksudkan sebagai proses identifikasi, analisis, evaluasi,

penanganan dan pemantauan ketidakpastian yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan di daerah ini.

RPJMD ini, disusun dengan metode pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, *bottom-up* dan *top-down,* holistik-tematik, integratif dan spasial. Disemangati dengan prinsip *Kwembo Kentkei Girgura Kensuwri* [Tuhan Menciptakan Kita yang Membangun] dan motto *“”Keerom sebagai mutiara hijau di Bumi Papua”*, telah dirumuskan pernyataan Visi pembangunan yang diemban adalah**:**

Keerom Maju yang Transformatif, Mandiri,
Bermartabat Dan Berkelanjutan

Visi pembangunan itu, memuat 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan terintegrasi dan melayani;
2. Memantapkan mutu sumber daya manusia putra-putri papua yang berkualitas, menguasai iptek, berintegritas, kreatif dan inovatif, berdaya saing global dan inovatif;
3. Memantapkan sistem demokrasi, hukum dan hukum adat;
4. Meningkatkan moda transportasi, konektivitas antara wila-yah dan infrastruktur dasar;
5. Memantapkan inovasi dan daya saing;
6. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis potensi unggul an yang berkelanjutan;
7. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan kawasan khusus.

Selanjutnya terdapat 8(delapan) aspek transformasi Keerom maju yang transformatif, mandiri, bermartabat dan berkelanjut- an, yaitu:

1. Transformasi Spiritualitas;
2. Transformasi Tata Kelola;
3. Transformasi Sosial;
4. Transformasi Ekonomi;
5. Transformasi Budaya;
6. Transformasi IPTEK;
7. Transformasi Ekologi-Lingkungan;
8. Transformasi Demokrasi.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, memperhatikan dan mempedomani dasar hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Papua, dan Peraturan Daerah Kabupaten Keerom sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pemben-tukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegu-nungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabu-paten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlin-dungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6697);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oi7 Nomor 206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang RPJMD 2020-2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2i Nomor 172)
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksa-naan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 53);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 459);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 No 21);
21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Orang Asli Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor 5)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2023 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 93);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2025 Nomor 98).

1.3. Pendekatan Penyusunan Dokumen RPJMD

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, dilakukan dengan menggunakan metode pende-katan kombinasi “Teknis dan Normatif” dan mengacu pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Pendekatannya bersifat *komprehensif, terukur, dan sinergis* dengan kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi Papua, serta memperhatikan kompa-rasi kebijakan pembangunan beberapa kabupaten terdekat. Penerapan pendekatan teknis-normatif tersebut sesuai dengan pentahapan penyusunannya, yaitu:

1. Penyiapan dan Persiapan
2. Analisis Situasi dan Isu Strategis
3. Formulasi Visi, Misi, Tujuan & Sasaran
4. Penetapan Strategi dan Arah Kebijakan
5. Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan
6. Konsultasi Publik & Musrenbang
7. Penyusunan Rancangan Akhir & Reviu / Verifikasi
8. Penetapan dan Pengesahan

1.3.1. Tahap Penyiapan dan Persiapan

Pada tahapan ini, secara teknis dibentuk tim penyusunan RPJMD sesuai Keputusan Bupati Keerom Nomor 45 Tahun 2025 Tanggal 3 Maret 2025. Tugas awal Tim melakukan penyamaan persepsi [sosialisasi internal] tentang pedoman Inmendagri Nomor

2 Tahun 2025 dan peraturan perundangan lainnya. Selanjutnya, secara normatif, Tim mengumpulan data dasar, dengan menggunakan instrumen studi literatur berupa dokumen perencanaan terdahulu yang relevan dan menelaah dokumen statistik dari BPS Kabupaten Kerom, BPS Provinsi Papua, dan BPS Nasional serta dokumen lainnya dari berbagai Kementerian dan lembaga. Selain itu, dilakukan analisis ter-hadap dokumen peren-canaan terdahulu untuk memperoleh deskripsi awal tentang kinerja pembangunan periode sebelum nya dan melakukan inventarisasi potensi dan permasalahan daerah di Kabupaten Keerom.

1.3.2. Analisis Situasi dan Isu Strategis

Dengan memanfaatkan data sekunder yang telah dikum-pulkan, termasuk hasil inventarisasi potensi Kabupaten Keerom, maka selanjutnya dilakukan analisis menggunakan SWOT untuk memetakan kecenderungan potensi sectoral dan spasial dan model dan proyeksi ekonomi makro daerah untuk mendapatkan isu strategis. Dalam hal ini, melibatkan pende-katan teknokratik dan pendekatan partisipatif secara optimal. Diperoleh drat awal kajian teknokratik dan dikontribusi oleh semua pihak melalui konsultasi publik yang melibatkan kom-ponen masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat, akade-misi, LSM, serta komisi-komisi DPRK dan dan OPD dan unsur distrik/kampung di lingkungan Pemda Kabupaten Keerom.

1.3.3. Formulasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan serta Penyusunan Program dan Kegiatan

Pada tahapan kegiatan ini diterapkan pendekatan kom-binasi dari aspek politik, bottom-up, spasial, dan partisipatif, di mana seluruh rangkaian kegiatan dilakukan secara gradual yang terkoodinasikan dengan baik. Diawali dengan pertemuan formal bersama Bupati dan Wakil Bupati untuk mendiskusi-kan tentang dokumen visi dan misi yang telah dikampanyekan serta berbagai arahan kebijakan dan tata teknis lainnya. Pertemuan formal tersebut terlaksana sebanyak 7(tujuh) kali, pada Bulan Maret – Agustus 2025.

Hal ini dimaksudkan untuk memastikan terjemahan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pemba-ngunan secara jelas dan nyata. Dipandang sangat penting untuk melakukan penyelarasan janji kampanye dan arah politik pembangunan dengan dokumen teknokratis serta memastikan kebijakan dan program strategis daerah sesuai dengan platform pemerintahan dan pembangunan.

Selanjutnya, Tim Kerja melakukan sinkronisasi dengan perencanaan nasional [RPJPN, RPJMD, RIPPP], perencanaan Provinsi Papua [RPJPD, dan kebijakan lainnya], dengan kebu-tuhan Pembangunan Kabupaten Keerom [RTRW, RKPD, dan input rencana program OPD]. Dalam hal ini, dikedepankan juga pendekatan untuk menilai dan merencanakan pemba-ngunan berdasarkan wilayah dan tata ruang. Di mana dilakukan analisis berbasis peta dan data geospasial, integrasi dokumen KLHS RTRW dan KLHS RPJMD, termasuk dalam hal identifikasi kawasan prioritas seperti pusat pertumbuhan, kawasan tertinggal, pesisir, atau perbatasan). Secara keselu-ruhan, kegiatan ini berlangsung selama 2(dua) bulan.

1.3.4. Konsultasi Publik dan Musrenbang

Setelah diperoleh draf awal dokumen RPJMD Kabupaten Keerom, masih dibutuhkan masukan publik, sehingga dilaku-kan konsultasi publik dan musrenbang RPJMD. Pada forum konsultasi publik dilaksanakan 1(satu) kali pada tanggal 2 Juni 2025 dengan peserta sebanyak 121 orang yang dihadiri oleh komponen masyarakat terdiri dari unsur OPD termasuk perwakilan distrik, komisi-komisi DPRK, akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan pers.

Acara konsultasi publik dibuka resmi oleh Bupati Kabu-paten Keerom sekaligus memberikan arahan, kemudian hadir pula memberikan materi perwakilan Baperinda Provinsi Papua dan Kepala Baperinda Kabupaten Keerom. Terdapat kesem-patan luas bagi peserta untuk mengajukan aspirasinya dan diakhiri dengan penandatanganan berita acara sesuai daftar hadir yang ada.

Konsultasi publik tersebut dilanjutkan pada kesempatan berikutnya dengan teknik “couching clinik” pada tanggal 22 dan 23 Juli 2025 yang diikuti oleh semua OPD di lingkungan Pemda Kabupaten Keerom sebanyak 170 orang. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati dan dihadiri oleh Tim Baperinda Kabupaten Keerom mendampingi Tim Asistensi sebanyak 5(lima) orang. Dimaksud kan agar diperoleh tambahan data dan informasi dengan melakukan “cascading” data lintas OPD.

Semenara itu, kegiatan Musrenbang RPJMD, dilaksana-kan pada tanggal 29 Juli 2025, dihadiri sebanyak 196 orang dari unsur OPD, perwakilan distrik, komisi-komisi DPRK, akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan pers. Kegiata ini dibuka resmi oleh Bupati Kabupaten Keerom sekaligus memberikan arahan. Bertindak sebagai pemateri adalah perwakilan Baperinda Provinsi Papua dan Kepala Baperinda Kabupaten Keerom, dan Tim Asistensi. Banyak masukan yang diperoleh secara partisipatif dari peserta musrembang ini. Dan, berhasil menyepakati draf dokumen Ranwal dengan catatan masukan baru dan ditandatangani dalam dokumen berita acara oleh perwakilan peserta [DPRK, Asisten Sekda, 10 OPD dan Distrik, Dewan Adat Keerom, Yayasan KIPPRa dan Intsia Papua, Akademisi, dan Pers.

Setelah proses ini selesai, maka Tim Kerja mengajukan dokumen Draf Ranwal RPJMD ke Pemerintah Provinsi Papua Cq. Bapperinda untuk dievaluasi dalam rangka penyelaasan, sinkronisasi, dan integrasi dokumen. Juga disampaikan ke DPRK dan Inspektorat Kabupaten Keerom. Melalui meeting bersama pada tanggal 15 Juli 2025 yang dihadiri oleh OPD Keerom sebanyak 37 orang, diperolah masukan berupa bebe-rapa catatan perbaikan sebagaimana surat tanggapan tentang Hasil Konsultasi Ranwal RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029 dari Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Nomor 0007.2.2.2/7834/Set Tanggal 17 Juli 2025.

1.3.5. Penyusunan Rancangan Akhir & Reviu / Verifikasi

Berdasarkan masukan revisi dari Pemerintah Provinsi Papua, DPRK, Inspektorat Kabupaten Keerom, dan aspirasi publik dalam Musrenbang, Tim Kerja melakukan perbaikan untuk menghasilan Rancangan Akhir Dokumen RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029. Dokumen ini, selanjut-nya disampaikan lagi ke Pemerintah Provinsi Papua Cq. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dan telah

dilakukan meeting kedua dalam rangka penyelarasan kembali pada 26 September 2025 yang diikuti oleh peserta sebanyak 28 orang. Setelah Kepala Baperinda Kabupaten Keerom menyampaikan presentasinya, dilanjutkan dengan diskusi masukan tim evaluator Beperinda Provinsi Papua. Ternyata masih ada hal-hal penting yang haru disesuaikan kembali sebagaimana surat tanggapan tentang Hasil Konsul-tasi Ranwal RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029 dari Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

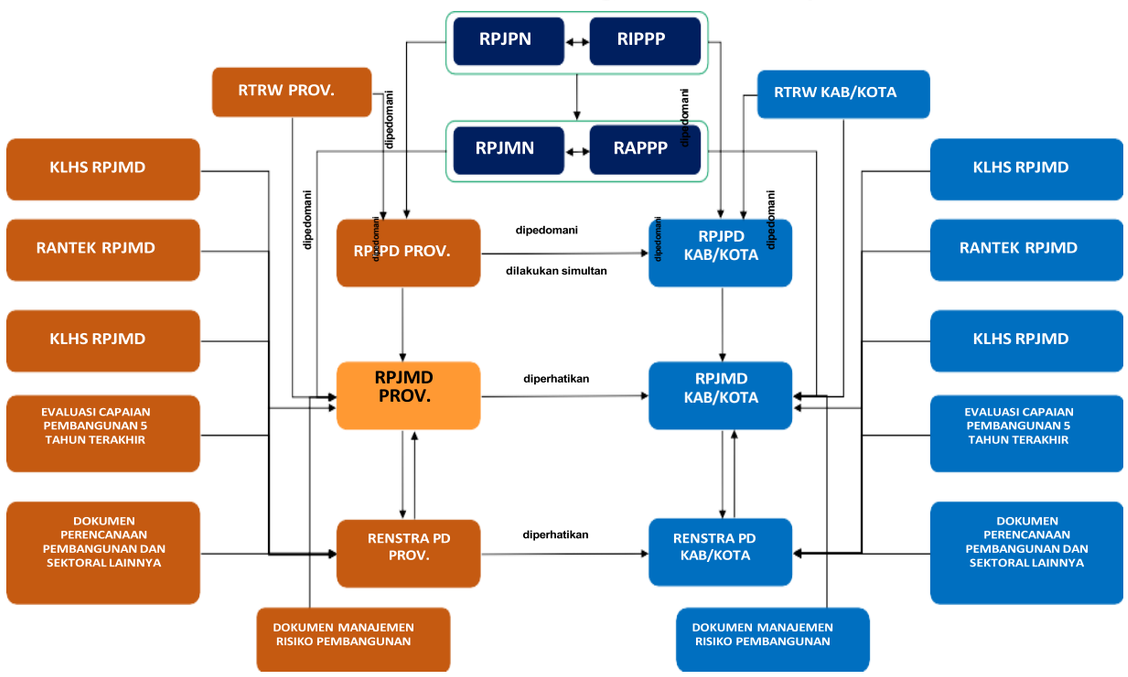
1.3.6. Penetapan dan Pengesahan

Setelah semua proses sesuai pentahapan di atas, maka dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029 diajukan ke DPRK untuk dibahas dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Dokumen ini ditunjang pula dengan Naskah Akademik.

1.4. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, memiliki keterkaitan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Substansi utama, RPJMD Kabupaten Keerom berpedoman pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Papua dan Keerom Tahun 2025-2045. Selain itu, substansi RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029, melalui penyela-rasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah. Juga memperhatikan Kabupaten/Kota yang memiliki potensi dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Keerom. Adapun hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen peren-canaan pembangunan lainnya, sebagaimana diatur di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 ditun-jukkan pada gambar berikut.

Gambar 1.1
Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Penyusunan RPJMD ini memperhatikan dan mempedomani :
1. Mempedomani RPJPN dan Mempedomani RPJMN
2. Mempedomani RIPPP dan RAPPP
3. Mempedomani RPJPD dan RPJMD Provinsi Papua.
4. Memperhatikan RPJPD Kabupaten Keerom.
5. Memperhatikan RTRW Kabupaten Keerom
6. Mengacu hasil evaluasi RPJMD Kab. Keerom periode lalu.
7. Menggunakan masukan teknis pembangunan berkelan-jutan berdasarkan KLHS-RJMD.
8. Memperhatikan dokumen Analisis Risiko Pembangunan Daerah Kabupaten Keerom.
9. Rekomendasi RTRW Provinsi Papua tentang teknis lokasi pelaksanaan program prioritas dan perangkat daerah.
10. Dipedomani untuk penyusunan dokumen RKPD, RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah.
11. Sebagai acuan perumusan tema dan prioritas perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025-2029.
12. Menjadi pedoman bagi dokumen spasial atau a-spasial lainnya 5 tahun mendatang.
13. Menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan tingkat lokal, nasional dan internasional.

1.4.1. Hubungan dengan RPJPN, PRJMN, RPJPD dan RPJMD Provinsi Papua, RPJPD, KLHS RTRW Kabupaten Keerom

Keselarasan antar dokumen penting di atas dengan RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029 dijabarkan dengan susunan sebagai berikut.
1. Keselarasan antara RPJPN dan RPJMN Dengan RPJMD Kabupaten Keerom;
2. Keselarasan antara RIPPP, RPJPD Provinsi Papua Dengan RPJMD Kabupaten Keerom;
3. Keselarasan Dokumen RPJPD Kabupaten Keerom dengan RPJMD Kabupaten Keerom;
4. Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Keerom dengan RPJPD Kabupaten Keerom, RTRW dan KLHS Kabupaten Keerom;
5. Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Keerom dengan Kota Jayapura dan Provinsi Papua;

Tabel 1.1.
Keselarasan antara RPJPN dan RPJMN Dengan RPJMD Kabupaten Keerom

RPJPN 2025-2045	RPJMN 2025-2029	RPJMD KEEROM 2025-2029
	V I S I	
Menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Keerom Maju yang Transformatif, Mandiri,Bermartabat dan Berkelanjutan
	M I S I	
1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.	Misi-4 Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta peran perempuan, pemuda (generasi millenial, Gen-Z), dan penyandang disabilitas.	Misi-2 Memantapkan mutu SDM putra-putri Papua yang berkualitas, menguasai IPTEK, berintegritas, kreatif dan inovatif, berdaya saing global dan inovatif. Misi-5 Memantapkan inovasi dan daya saing
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas	Misi-3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta agro maritim industri di sentra produksi. Misi-5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembang kan industri berbasis SDA untuk tingkat kan nilai tambah di dalam negeri.	Misi-6 Percepatan pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan berkelanjutan.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.	Misi-7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pen-cegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Misi-1 Memantapkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan terintegrasi dan melayani.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia	Misi-2 Memantapkan sistem pertahanan kea-manan dan mendorong kemandirian	Misi-3 Memantapkan sistem demokrasi, hukum dan hukum adat.

RPJPN 2025-2045	RPJMN 2025-2029	RPJMD KEEROM 2025-2029
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketang guhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan 6. Pembangunan kewilayahan diwujud- kan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan 7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.	Misi-8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat Misi-6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemera-taan, dan pemberantasan kemiskinan.	Misi-2 Memantapkan mutu SDM putra-putri Papua yang berkualitas, menguasai IPTEK, berintegritas, kreatif dan inovatif, berdaya saing global dan inovatif. Misi-7 Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan kawasan khusus. Misi-4 Meningkatkan moda transportasi, konek-tivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar.
8. Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas.	Misi-1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demo-krasi, dan Hak Asasi Manusia.	Misi-6 Percepatan pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan berkelanjutan.
ARAH KEBIJAKAN		

• mewujudkan regulasi yang adaptif dan taat asas difokuskan pada penataan hubungan/restrukturisasi kelembagaan dan kewenangan antar instansi pemerintah (K/L/D) dan BUMN serta peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola • mewujudkan proses bisnis yang adaptif difokuskan pada penyederhanaan proses bisnis yang kolaboratif dan terintegrasi melalui re-engineering proses bisnis pemerintahan • penguatan manajemen talenta ASN di seluruh instansi pemerintah (K/L/D) • mewujudkan meritokrasi dan integritas • mendukung sektor/bidang strategis difokuskan pada penataan manajemen ASN sektor pelayanan dasar • mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan inklusif difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik terpadu (fisik dan non fisik) • mewujudkan pelayanan strategis yang berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi tata kelola, antara lain proses bisnis, kelembagaan, dan regulasi bidang strategis • mewujudkan transformasi digital pemerintahan, difokuskan pada (i) transformasi layanan pemerintahan berbasis digital dan percepatan kesiapan digital • optimalisasi peran dan tatakelola parpol • mewujudkan relasi pemerintah dan masyarakat sipil, difokuskan pada penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil	Transformasi perlindungan sosial menuju perlindungan sosial yang adaptif diarahkan untuk meningkatkan cakupan perlindungan sosial, bansos berdasarkan status kerentanan, jamsos, dan kesempatan kerja dan berwirausaha kepada seluruh masyarakat baik pada kondisi tanpa bencana maupun dengan bencana. • Satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi • Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (S|SN) • Pengembangan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim • Integrasi penentuan target, manfaat, dan pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat • Peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap kelompok rentan • Peningkatan usia pensiun bertahap dengan memastikan kesiapan sosial dan ekonomi selama pensiun Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat • Peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam angkatan kerja • Inovasi pembiayaan untuk memperkuat dan memperluas cakupan integrasi perlinsos berkesinambungan utamanya *social impact bonds, social impact investment*, dan optimalisasi dana jamsos • Penyelarasan peraturan perlindungan sosial • Penyempurnaan metodE penghitungan angka kemiskinan	Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi terdiri dari: • Kawasan Perkotaan Arso; • Kawasan Pariwisata Yowong; • Kawasan Ekonomi Senggi; • Kawasan Batas Negara Waris-Towe; Pengembangan Kawasan Strategis berupa kawasan budaya Waris, untuk mewujudkan Kawasan Budaya Waris sebagai warisan budaya di Provinsi Papua dengan melibatkan masyarakat adat setempat terdiri dari: • Pengembangan kawasan budaya Waris sebagai kawasan Cagar Budaya; • Pengembangan desa wisata budaya; Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri dari: • Pemantapan kawasan; • Pembentukan lembaga pengelola/unit; • Penyelenggaraan pengelola kawasan; • Program kemitraan; • Pemberdayaan masyarakat adat.

Adenda Pembangunan RPJPN 2025-2045	Asta Cita Nasional RPJMN Tahun 2025-2029	Transformasi Keerom RPJMD Tahun 2025-2029
1. Transformasi sosial 2. Transformasi ekonomi 3. Transformasi tata kelola	1. Penguatan ideologi pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia 2. Penguatan pertahanan dan keamanan nasional.	1. Spritualitas, Sosial, Budaya dan Demokrasi. 2. Tatakelola, Sosial dan Budaya. 3. Sosial, Ekonomi dan Iptek.
4. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia 5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi 6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan 7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan 8. Kesinambungan pembangunan	3. Penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pengembangan kewirausahaan. 4. Pengembangan SDM dan kesetaraan gender. 5. Hilirisasi dan industrialisasi untuk nilai tambah ekonomi. 6. Pembangunan dari desa untuk pemera-taan ekonomi. 7. Reformasi politik, hukum dan birokrasi dan berantas korupsi dan narkoba. 8. Harmoni lingkungan, budaya dan toleransi beragama.	4. Sosial dan Ekonomi. 5. Ekonomi, Iptek dan Ekologi Lingkungan. 6. Tatakelola, Sosial, Ekonomi dan Budaya. 7. Tatakelola, Sosial, Iptek dan Demokrasi. 8. Spritualitas, Sosial, Budaya dan Ekologi Lingkungan.

Sumber: Dokumen RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029

Tabel 1.2.
Keselarasan antara RIPPP, RPJPD Provinsi Papua Dengan RPJMD Kabupaten Keerom

RIPPP 2022-2041	RPJPD PROVINSI PAPUA 2025-2045	RPJMD KEEROM 2025-2029
	V I S I	
Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera.	Papua Yang Mandiri Secara osial,Budaya, Ekonomi, Dan Politik	Keerom Maju yang Transformatif, Mandiri, Bermartabat dan Berkelanjutan
	M I S I	
Misi-1 Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat. Misi-2 Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama menuju Papua Cerdas.	1. Mewujudkan Kemandirian Sosial: meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua yang sehat, cerdas, berbahagia, dan berinovasi tinggi. 2. Mewujudkan Kemandirian Budaya; pengembang an lembaga adat, agama, dan perempuan, ter-integrasi ke dalam sistem formal; jati diri masya-rakat dan kebanggaan menjadi orang Papua; serta peningkatan budaya berprestasi dan inovatif.	Misi-2. Memantapkan mutu SDM Putra-Putri Papua yang berkualitas, menguasai IPTEK, berintegritas, kreatif dan inovatif, berdaya saing global dan inovatif. Misi-5. Memantapkan Inovasi Dan Daya Saing. Misi-2. Memantapkan Mutu Sumber Daya Manusia Putra-Putri Papua yang Berkualitas, Menguasai IPTEK, Berintegritas, Kreatif dan Inovatif, Berdaya Saing Global dan Inovatif. Misi-3. Memantapkan Sistem Demokrasi, Hukum dan Hukum Adat. Misi-5. Memantapkan Inovasi Dan Daya Saing.
Misi-3 Meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif.	3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pe-ngembangan Wilayah; pemenuhan kecukupan kebutuhan dan kualitas hidup masyarakat Papua berbasis kekuatan lokal; infrastruktur; kebutuhan berbasis aset alam lokal berke-lanjutan pengelolaan dan penataan ruang dan wilayah; peningkatan dan pemerataan akses dan kemampuan masyarakat. 4. Mewujudkan Kemandirian Politik; peningkatan peran masyarakat yang demokratis, kualitas aparatur, kesadaran dan komitmen masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa serta imple-mentasi kelembagaan dan hukum adat ke dalam sistem formal. 5. Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Asli Papua	Misi-4. Meningkatkan Moda Transportasi, Konektifitas Antara Wilayah dan Infrastruktur Dasar. Misi-6. Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan yang Berkelanjutan. Misi-7. Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Kawasan Khusus. Misi-1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Terintegrasi dan Melayani. Misi-2. Memantapkan Sistem Demokrasi, Hukum dan Hukum Adat.

RIPPP 2022-2041	RPJPD PROVINSI PAPUA 2025-2045	RPJMD KEEROM 2025-2029
	yang berperan utama dalam kepemimpinan dan pelaksanaan pembangunan di Papua berdasarkan jati diri masyarakat asli Papua.	
ARAH KEBIJAKAN		

Papua Sehat 1. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat. 2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. 3. Membudayakan perilaku hidup sehat dan tata kelola pelayanan kesehatan, 4. Meningkatkan pembudayaan dan prestasi olahraga. **Papua Cerdas** Menumbuhkan budaya belajar serta menjamin akses dan kuatitas pelayanan pendidikan Papua secara merata. **Papua Produktif** 1. Meningkatkan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja, 2. Meningkatkan daya saing indurtri, perdagangan dan realisasl investasi pada sektor-sektor unggulan daerah. 3. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan yang adil dan merata. 4. Mengembangkan pemerataan kawasan ekonoml, Arah kebijakan percepatan pembangun an wilayah adat Tabi yaitu: pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan wilayah adat Tabi sebagai sentra per-kebunan, peternakan, tanaman pangan, hortikultura, kelautan dan perikanan, ekowisata berkelanjutan dan berorien-tasi global, pusat industri, perdagangan, jasa, serta perkotaan berkelanjutan.	Mewujudkan Kemandirian Sosial melalui: 1. peningkatan Kualitas SDM 2. Pemanfaatan dan Pengembangan iptek Mewujudkan Kemandirian Budaya 1. Pembangunan agama 2. Pengembangan jatidiri 3. Budaya berprestasi dan inovatif Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pengembangan Wilayah 1. Pembangunan perekonomian dengan menyiapkan sarana dan prasarana ekonomi berbasis keunggul an masing-masing wilayah 2. Infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang mendorong peningkatan kemandirian daerah 3. Pengembangan wilayah untuk meningkatkan kese-jahteraan masyarakat hingga ke kawasan perba-tasan, keseimbangan perkotaan dan perdesaan, kesenjangan antar wilayah, pemekaran wilayah. Mewujudkan Kemandirian Politik 1. Mewujudkan masyarakat demokratis 2. Mewujudkan masyarakat Papua aman dan damai yang berdasarkan hukum Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Asli Papua 1. Pengakuan eksistensi nilai-nilai adat dan budaya Asli Papua 2. Percepatan peningkatan kualitas hidup dan ke-mampuan masyarakat Asli Papua untuk berperan pada pembangunan 3. Percepatan penguatan ekonomi selaras dengan kearifan tradisional masyarakat Asli Papua 4. Pengembangan dan peningkatan inovasi iptek berbasis budaya Asli Papua dan sumberdaya lokal 5. Penguatan politik orang Asli Papua	Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuh an Ekonomi terdiri dari: • Kawasan Perkotaan Arso; • Kawasan Pariwisata Yowong; • Kawasan Ekonomi Senggi; • Kawasan Batas Negara Waris-Towe; Pengembangan Kawasan Strategis berupa kawasan budaya Waris, sebagai warisan budaya di Provinsi Papua dengan melibatkan masya-rakat adat setempat terdiri dari: • Pengembangan kawasan budaya Waris sebagai kawasan cagar budaya; • Pengembangan desa wisata budaya; Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri dari: • Pemantapan kawasan; • Pembentukan lembaga pengelola/ unit; • Pengelolaan kawasan; • Program kemitraan; • Pemberdayaan masyarakat adat.
TAHAPAN PEMBANGUNAN		

Tahap-I : Penataan Pembangunan Papua [peningkatan kualitas SDM serta peningkatan ekonomi berbasis sektor unggulan wilayah] Tahap-II : Pemerataan Pembangunan Papua [peningkatan kualitas SDM serta pengembang an ekonomi berbasis sektor unggulan wilayah Tahap-III : Percepatan pemerataan Pembangunan Papua [peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing serta optimalisasi ekonomi berbasis sektor unggulan wilayah Tahap-IV : Pemantapan Pembangunan Papua [pemantapan kualitas SDM yang berdaya saing serta struktur perekonomian wilayah berlandaskan keunggulan kompetitif Tahap V : Mewujudkan masyarakat Papua yang mandiri, adil dan Sejahtera yang didukung oleh pencapaian SDM yang berdaya saing serta struktur perekonomian wilayah yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif	Tahap-I : Meningkatkan kesejahteraan, pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur Tahap-II : Memantapkan dan meningkatkan kesejahteraan dan penguatan daya saing lokal yang berkelanjutan Tahap-III : Memantapkan pembangunan yang didukung SDM yang berkualitas dan kemapanan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, lingkungan Tahap-IV : Mewujudkan masyarakat Papua yang mandiri di segala bidang dalam tata kehidupan yang harmonis selaras dengan alam	**Tahun 2025. Konsolidasi** Kelanjutan pembangunan kesehatan dan pendidikan, sosial dan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan lingkungan hidup **Tahun 2026. Peningkatan** pembangunan kesehatan dan pendidikan, sosial dan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan lingkungan hidup **Tahun 2027. Pengembangan mutu** pembangunan kesehatan dan pendidikan, sosial dan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan lingkungan hidup **Tahun 2028. Pemantapan dayasaing** pembangunan kesehatan dan pendidikan, sosial dan ekonomi, pengembangan infrastruktur dan lingkungan hidup **Tahun 2029. Perwujudan transformasi** pembangunan kesehatan dan pendidikan, sosial dan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan lingkungan hidup

Sumber: Dokumen RIPPP 2022-2041 dan RPJMD Provinsi Papua 2025-2045

Tabel 1.3.
Keselarasan Dokumen RPJPD Kabupaten Keerom dengan RPJMD Kabupaten Keerom

RPJPD KABUPATEN KEEROM TAHUN 2025-2045	RPJMD KABUPATEN KEEROM 2025-2029
VISI	
Kabupaten Keerom Sebagai Gerbang Timur NKRI yang Maju, Makmur, Merata, Berdaya Saing/Mandiri, Transformatif dan Berkelanjutan Berbasis Agroindustri dan Ekonomi Kreatif	Keerom Maju yang Transformatif, Mandiri, Bermartabat dan Berkelanjutan
MISI	
1. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan inklusif:	Misi-2 Memantapkan mutu SDM Putra-Putri Papua yang berkualitas, menguasai iptek, berintegritas, kreatif dan inovatif, berdaya saing global dan inovatif.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, efisien, dan bebas dari korupsi	Misi-1 Memantapkan tata kelola pemerintah an dan pembangunan terintegrasi dan melayani.
3. Mewujudkan perekonomian yang kokoh melalui pembangunan dan pemerataan ekonomi berbasis iptek.	Misi-6 Percepatan pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan yang ber-kelanjutan.
4. Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh dan tercapainya demokrasi Substansial.	Misi-3 Memantapkan sistem demokrasi, hukum dan hukum adat.
5. Mewujudkan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial budaya dan kesadaran ekologi yang tinggi.	
6. Mewujudkan pembangunan perbatasan dan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Misi-7 Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan kawasan khusus.
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.	Misi-4 Meningkatkan moda transportasi, konektifitas antara wilayah dan infrastruktur dasar.
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.	Misi-6 Percepatan pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan yang berkelanjutan.
ISU STRATEGIS	
1 Kapasitas dan kualitas SDM aparatur dalam menjalankan roda pemerintahan masih relatif masih rendah, dan belum mampu memberi layanan optimal ke masyarakat.	1. Belum optimal reformasi birokrasi, kualitas dan akses pelayanan publik.
2 Kantor pemerintahan kampung dan distrik belum semua tersedia permanen, ada yang rusak, sehingga layanan pemerintahan dan pembangunan belum terlaksana optimal.	

RPJPD KABUPATEN KEEROM TAHUN 2025-2045		RPJMD KABUPATEN KEEROM 2025-2029	
3	Kepastian penetapan lokasi ibu kota kabupaten.		
4	Kondisi Arso-Arso Barat-Skanto-Arso Timur-Mannem yang merupakan dataran banjir.		
5	Mempertimbangkan kerawanan bencana dalam pembangunan wilayah.		
6	Pengembangan kota terpadu mandiri di Senggi.		
7	Memantapkan peran Keerom dalam mewujudkan penetapan Arso sebagai pusat sistem perkotaan nasional.		
8	Penyelenggaraan pembangunan daerah belum konsisten dengan dokumen perencana an pembangunan, terutama RTRW.		
9	Struktur umur tenaga kerja yang tersedia di daerah ini pada umumnya berada pada usia antara 15 - 44 tahun,	2. Struktur tenaga kerja masih dominan pada sektor dengan tingkat upah rendah	
10	Angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) sebagai indikator capaian kinerja layanan pendidikan, masih rendah	3. Akses pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan gender belum memadai	
11	Tingkat pendidikan formal tenaga kerja yang telah ada dalam bursa kerja pada umumnya masih rendah, yakni hanya sampai SMP/MT sederajat.	4. Melambatnya peningkatan kualitas pembangunan manusia	
12	Sebaran sarana pendidikan setingkat SLTP (SMP/MTs) dan SLTA (SMA/MA/ SMK) di masing-masing distrik belum memadai, sehingga layanan pendidikan dasar 9 tahun dan 12 tahun belum dapat terlaksana secara memadai;		
13	Sebaran guru dan tenaga kependidikan ke semua kampung dan distrik belum tertata baik, sehingga masih sangat timpang.		
14	Angka harapan hidup masih relatif rendah.		
15	Tenaga medis (perawat-bidan) belum tersebar di tiap kampung (Pustu maupun Polindes).		

RPJPD KABUPATEN KEEROM TAHUN 2025-2045		RPJMD KABUPATEN KEEROM 2025-2029	
16	Angka IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan, masih rendah;	5. Akses pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan gender belum memadai 6. Melambatnya peningkatan kualitas pembangunan manusia 7. Rendah daya beli rumah tangga 8. Tinggi ketimpangan distribusi pendapatan 9. Belum optimalnya penurunan angka kemiskinan 10. Tingginya tingkat kriminalitas	
17	Daya dukung infrastruktur dasar irigasi dalam pembangunan dan pengembangan aktivitas usaha pada areal persawahan teknis belum memadai.	11. Ketimpangan pembangunan antar wilayah yang tinggi	
18	Dinamika masyarakat Keerom dibentuk atas keberadaan masyarakat asli Keerom, pendatang dari daerah lain di Papua, serta transmigran.		
19	Adanya hubungan kekerabatan kuat antara masyarakat Keerom dan PNG yang terbina secara historis, menjadikan tingginya pelintas batas tradisional terkait dengan hak ulayat, kekerabatan, dan ekonomi.		
20	Ketersediaan sarana transportasi darat yang menghubungkan antar kampung, antar distrik dan antar wilayah pusat pertumbuhan ekonomi masih tak memadai.		
21	Sebagai wilayah perbatasan negara merupakan kawasan strategis nasional, beranda depan negara sekaligus berpotensi rawan gangguan keamanan.		
22	Kemudahan pencapaian menuju bandara sentani dan pelabuhan Jayapura merupakan potensi pengembangan sistem koneksi distribusi.	12. Pertumbuhan ekonomi melambat	
23	Keterkaitan antar sektor ekonomi, utamanya antara sektor pertanian dengan sektor industri masih sangat rendah,		
24	Pusat distribusi komoditi unggulan daerah yang berbasis komoditi pertanian dan kehutanan belum tersedia.		
25	Belum mampu berperan sebagai daerah penyangga Kota Jayapura dan Kota Sentani secara optimal.		
26	Sebagian besar wilayah merupakan kawasan hutan, mesti dipertahankan kelestariannya sekaligus sebagai SDA yang dibutuhkan masyarakat.		
27	Memiliki potensi dalam sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. potensi wilayah yang dimiliki tersebut mengakibatkan banyaknya minat yang besar dari investor, baik nasional maupun internasional.		

RPJPD KABUPATEN KEEROM TAHUN 2025-2045		RPJMD KABUPATEN KEEROM 2025-2029	
28	Adanya kebijakan yang telah berkembang berupa pemberian akses terhadap pengelolaan dana pembangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kepada masyarakat kampung.	13. Kemandirian fiskal daerah yang masih rendah	**PENTAHAPAN PEMBANGUNAN**
Tahap I **(2025-2029): Penguatan Fondasi Transformasi** Tahap II (2030-2034): Percepatan Transformasi tahap III (2035-2039): Ekspansi Pembangunan Tahap IV (2040-2045): Perwujudan Visi, Keerom makmur, merata, berdaya saing/ mandiri, transformatif dan berkelanjutan berbasis agroindustri dan ekonomi kreatif.		**Tahun 2025. Konsolidasi** Kelanjutan pembangunan kesehatan dan pendidikan, sosial dan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan lingkungan hidup **Tahun 2026. Peningkatan** pembangunan kesehatan dan pendidikan, sosial dan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan lingkungan hidup **Tahun 2027. Pengembangan mutu** pembangunan kesehatan dan pendidikan, sosial dan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan lingkungan hidup **Tahun 2028. Pemantapan dayasaing** pembangunan kesehatan dan pendidikan, sosial dan ekonomi, pengembangan infrastruktur dan lingkungan hidup **Tahun 2029. Perwujudan transformasi** pembangunan kesehatan dan pendidikan, sosial dan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan lingkungan hidup	

Sumber : Dokumen RPJP Kabupaten Keerom Tahun 2025-2045

Tabel 1.4.
Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Keerom dengan RPJPD Kabupaten Keerom, RTRW dan KLHS Kabupaten Keerom

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN KEEROM		RPJMD KABUPATEN KEEROM 2025-2029
KLHS RTRW	**KLHS RPJMD**	
ISU STRATEGIS		
1. Pemerataan akses infrastruktur dasar 2. Sampah dan limbah 3. Kepastian hukum hak atas tanah (HAT) 4. Ketahanan dan adaptasi terhadap bencana 5. Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat 6. Konflik sosial 7. Kemiskinan 8. Pencemaran air dan krisis air bersih 9. Bencana banjir 10. Penggunaan energi 11. Pemanfaatan lahan yang bijak 12. Pengembangan ekonomi Berkelanjutan 13. Pembangunan perkotaan berkelanjutan 14. Pengelolaan tanaman pangan guna pemenuhan kebutuhan pokok 15. Alih fungsi lahan 16. Perubahan iklim 17. Degradasi lahan dan hutan 18. Kehilangan keanekaragaman hayati 19. Pencemaran udara 20. Pariwisata	1. Masih tingginya angka kemiskinan ekstrem dan kesenjangan akses layanan dasar antara wilayah perkotaan dan pedalaman 2. Rentannya ketahanan pangan di distrik terpencil dan tingginya prevalensi *stunting* akibat pola konsumsi tidak seimbang. 3. Terbatasnya akses air minum layak dan buruknya kondisi sanitasi 4. Belum termanfaatkannya lahan produktif serta tekanan alih fungsi lahan untuk permukiman. 5. Tingginya angka putus sekolah dan kurangnya kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan ketrampilan lokal. 6. Meningkatnya frekuensi bencana dan dampak perubahan iklim. 7. Berkurangnya jasa ekosistem hutan serta belum berkembangnya potensi ekonomi hijau berbasis kearifan lokal. 8. Pengendalian Lahan & Konflik Sumber Daya 9. Tata Kelola Perbatasan. 10. Terbatasnya infrastruktur digital dan rendahnya literasi digital masyarakat.	1. Pertumbuhan ekonomi melambat 2. Tingginya ketimpangan distribusi pendapatan 3. Belum optimalnya penu- runan angka kemiskinan 4. Melambatnya peningkat an kualitas pembangun an manusia 5. Struktur tenaga kerja masih dominan pada sektor-sektor dengan tingkat upah yang rendah 6. Kemandirian fiskal dae-rah yang masih rendah 7. Perkembangan investasi daerah yang rendah 8. Rendah daya beli rumah tangga 9. Tingginya tingkat krimi-nalitas 10. Akses pelayanan pendi-dikan, kesehatan, infra-struktur, dan pember-dayaan gender belum memadai 11. Ketimpangan pemba-ngunan antar wilayah yang tinggi 12. Belum optimal reformasi birokrasi, kualitas dan akses pelayanan publik.
ARAH KEBIJAKAN		
1. Kebijakan penataan struktur ruang wilayah Kabupaten Keerom, meliputi: • pengembangan manajemen resiko bencana • pemantapan peran pusat kegiatan sesuai dengan struktur dan hirarkinya	1. **Berdasarkan Capaian TPB SS (Sudah dikerjakan dan tercapai)**, mencakup upaya tambahan pada aspek: kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, kepen-dudukan dan KB, pariwisata, kelistrikan, perbankan dan lembaga keuangan non-bank, industri	Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi terdiri dari: • Kawasan Perkotaan Arso; • Kawasan Pariwisata Yowong;

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN KEEROM		RPJMD KABUPATEN KEEROM 2025-2029
KLHS RTRW	**KLHS RPJMD**	
• peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan jaringan fasilitas trans-portasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air dan pengelolaan lingkungan dalam rangka menun-jang pengembangan pusat kegiatan 2. Kebijakan Penataan Pola Ruang Wila-yah Kabupaten Keerom, meliputi: • pengembangan potensi pertanian, kehutanan, dan perikanan berlan-daskan pada keragaman budaya • pengendalian fungsi kawasan lindung • pengembangan dan peningkatan kawasan budidaya untuk mendu-kung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan • peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara. 3. Kebijakan penataan ruang kawasan strategis Kabupaten Keerom, meliputi: • pengembangan potensi ekonomi dan sosial budaya kawasan perbatasan • pengembangan kawasan yang di-prioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial dan daya dukung lingkungan hidup	manufaktur, telekomuni-kasi, data statistik, air bersih, DAS, kawasan hijau, pengelolaan hutan, pelaporan keuangan, reformasi birokrasi, keterwakilan perempuan, keterbukaan informasi publik, 2. **Berdasarkan Capaian TPB SB (Sudah dikerjakan dan belum Selesai)** mencakup upaya tambahan pada aspek: kependu-dukan, layanan imunisasi, layanan air minum layak, sanitasi, rumah tangga kumuh pedesaan, APM dan APK (Paud, SD, SLTP, SLTA), pelayanan kesehatan, mutasi penduduk, mitigasi bencana, nilai tambah pertanian, elektrifikasi, bauran energi terbarukan, laju pertumbuhan PDB perkapita, Laju pertumbuhan PDB indus-tri manufaktur, UMKM, wisatawan manca negara, industri pariwisata, Proporsi ang-garan riset pemerintah terhadap PDRB, Rasio penerimaan pajak terhadap PDB, Proporsi individu yang menguasai telepon genggam, Proporsi individu menggunakan Internet, Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas, proporsi penduduk terlayani *mobile broadband.* Rata-rata institusi yang berperan aktif dalam forum dialog peren-canaan pembangunan kota berkelanjutan, Persentase sampah perkotaan tertangani, Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan, Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM	• Kawasan Ekonomi Senggi; • Kawasan Batas Negara Waris-Towe; Pengembangan kawasan strategis berupa kawasan budaya Waris, untuk mewujud-kan kawasan budaya Waris sebagai warisan budaya di Provinsi Papua dengan melibatkan masyarakat adat setempat terdiri dari: • Pengembangan kawasan budaya Waris sebagai kawasan Cagar Budaya; • Pengembangan desa wisata budaya; Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri dari: • Pemantapan kawasan; • Pembentukan lembaga pengelola/unit; • Penyelenggaraan pengelola kawasan; • Program kemitraan; • Pemberdayaan masyarakat adat.

Sumber : Dokumen KLHS RTRW dan KLHS RPJMD, 2025

Tabel 1.5.
Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Keerom dengan Kota Jayapura dan Provinsi Papua

RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029	RPJMD Kota Jayapura 2025-2029	RANTEK RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029
VISI		
Keerom Maju yang Transformatif, Mandiri, Bermartabat dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kota Jayapura Sebagai Kota Jasa Yang Berbudaya, Religius, Maju, Mandiri, Dan Sejahtera Menuju Jayapura Emas	
MISI		
1. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan terintegrasi dan melayani. 2. Memantapkan mutu SDM putra-putri Papua yang berkualitas, menguasai IPTEK, berintegritas, kreatif dan inovatif, berdaya saing global dan inovatif. 3. Memantapkan sistem demokrasi, hukum dan hukum adat. 4. Meningkatkan moda transportasi, konekti-fitas antara wilayah dan infrastruktur dasar. 5. Memantapkan inovasi dan daya saing. 6. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan yang berkelanjutan. 7. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan kawasan khusus.	1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan sejahtera dengan memegang teguh nilai–nilai keagamaan menjaga keluhuran adat istiadat. 2. Mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi, sosial yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. 3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang bertumpu pada sektor jasa perda-gangan, ekonomi kreatif, pariwisata, dan kelestarian budaya lokal. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan berwibawa melalui transfor-masi digital dengan reformasi birokrasi. 5. Memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan kesehatan untuk melahirkan SDM unggul, produktif, dan berkarakter. 6. Mengejawantahkan daerah berdasar-kan Asta Cita.	
ISU STRATEGIS		
1. Pertumbuhan ekonomi melambat 2. Tingginya ketimpangan distribusi pendapatan 3. Belum optimalnya penurunan tingkat kemiskinan 4. Melambatnya peningkatan kualitas pembangunan manusia 5. Struktur tenaga kerja masih dominan pada sektor-sektor dengan tingkat upah yang rendah 6. Kemandirian fiskal daerah yang masih rendah 7. Perkembangan investasi daerah yang rendah	1. Penguatan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan 2. Peningkatan kualitas SDM unggul dan penguatan modal sosial 3. Pemenuhan infrastruktur dan konek-tivitas 4. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam berkelanjutan 5. Pengurangan kesenjangan dan pening-katan pemerataan pembangunan 6. Penguatan tata kelola pemerintahan dan partisipasi	1. Pengentasan kemiskinan, dan pembangunan inklusif 2. Demografi, urbanisasi dan keterkaitan kota-kampung 3. Potensi Sumber Daya Pembangunan 4. Mempertahankan dan menghormati budaya masyarakat 5. Perdagangan antardaerah dan

RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029	RPJMD Kota Jayapura 2025-2029	RANTEK RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029
8. Rendah daya beli rumah tangga 9. Tingginya tingkat kriminalitas 10. Akses pelayanan pendidikan, kese-hatan, infrastruktur, dan pember-dayaan gender belum memadai 11. Ketimpangan pembangunan antar wilayah yang tinggi 12. Belum optimalnya reformasi birokrasi, kualitas dan akses pelayanan publik.	publik 7. Mewujudkan kota yang resilensi terha-dap bencana dan perubahan iklim	global 6. Ekonomi daerah dan ketenagakerjaan 7. Pendidikan dan kesehatan 8. Disrupsi teknologi dan inovasi 9. Pengelolaan SDA dan pembangunan berkelanjutan 10. Transformasi tata kelola pemerintahan, birokrasi dan manajemen ASN
PRIORITAS PROGRAM KERJA		
1. Penguatan sistem perencanaan, penganggar an, dan pelayanan publik berbasis digital 2. Reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan secara adaptif dan fungsional 3. Peningkatan kapasitas aparatur dan pene-rapan sistem merit ASN 4. Perluasan akses layanan dasar di distrik perbatasan dan daerah tertinggal 5. Peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, dan gizi masyarakat 6. Perluasan jaminan sosial dan pemberdayaan pok rentan (perempuan, anak, disabilitas) 7. Peningkatan literasi digital, vokasi, dan pendidikan karakter 8. Penguatan pelayanan dasar berbasis kampung dan distrik 9. Pembangunan jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan internet hingga wilayah 3T 10. Pemantapan infrastruktur transportasi umum dan fasilitas logistik daerah 11. Penyediaan hunian layak dan sanitasi ber-basis kawasan 12. Pengembangan ruang publik hijau dan utilitas kawasan perkotaan	1. Pemulihan ekonomi, pembukaan lapangan kerja 2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk SDM Unggul 3. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang berorientasi pada preventif 4. Penguatan produktivitas, pertanian dan perikanan 5. Penguatan Sektor UMKM dan Pariwisata 6. Penguatan keberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas 7. Percepatan pemerataan infrastruktur dengan memperhatikan daya dukung lingkungan 8. Pemantapan ekosistem sosial, keagamaan, dan kerukunan warga 9. Pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi dengan transformasi digital	

RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029	RPJMD Kota Jayapura 2025-2029	RANTEK RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029
13. Penguatan ketahanan pangan dan pengembangan sentra pertanian terpadu 14. Peningkatan kapasitas dan akses pembiaya an UMKM serta promosi ekonomi kreatif 15. Hilirisasi produk unggulan berbasis desa dan digitalisasi UMKM 16. Penguatan koperasi, pasar rakyat, dan ke-wirausahaan 17. Penguatan ekosistem inovasi daerah melalui riset dan teknologi tepat guna 18. Penerapan prinsip ekonomi hijau dan energi terbarukan di sektor publik dan swasta 19. Integrasi data sektoral dan layanan publik berbasis satu data daerah 20. Transformasi pelayanan publik digital secara terstandar dan terintegrasi 21. Peningkatan kemandirian ekonomi kawasan perbatasan melalui sektor pangan dan energi 22. Penguatan ketangguhan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim 23. Penyediaan layanan dasar universal di wilayah terpencil		

Sumber : Dokumen RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029 dan Rantek RPJMD Provinsi Papua Tahun 2024.

Sinkronisasi dan penyelarasan dokumen antara RPJMD Provinsi Papua dengan RPJMD Kabupaten Keerom, belum dapat diuraikan karena Dokumen RPJMD Provinsi Papua belum memiliki Peraturan Daerah. Tetapi, untuk kepentingan tersebut, digunakan laporan rancangan teknokratis yang sangat terbatas, dan rekomendasi hasil evaluasi rancangan awal dan rancangan akhir dokumen RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029. Sementara itu, sinkronisasi dan penyelarasan dokumen dengan dokumen RPJPN, RPJMN, RIPPP, RPJPD Provinsi Papua serta RPJPD Kabupaten Keerom, dilakukan melalui kajian literatur yang diperoleh dari berbagai sumber resmi yang ter*update*.

Adapun sinkronisasi dan penyelarasan dokumen dengan KLHS [RTRW dan RPJMD], dilakukan melalui penyamaan persepsi di dalam forum konsultasi publik dan FGD yang melibatkan beberapa pihak terkait dari unsur-unsur DPRK Keerom, OPD, para pemangku kepentingan dan dihadiri oleh utusan Bapperinda Provinsi Papua. Pada konteks tersebut, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, telah dapat diintegrasikan masukan KLHS [RTRW dan RJPMD] secara optimal. Termasuk berkenaan dengan aspek strategi mitigasi perubahan iklim, pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah berke-lanjutan, perlindungan dan restorasi ekosistem hutan, serta pro-mosi transportasi rendah emisi. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan proses pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan di Kabupaten Keerom sejalan dengan komitmen nasional (NDC) dan global serta mendukung pencapaian SDG's. Dengan demikian, maka proses pembangun an yang komprehensif dan berkelanjutan dimaksud, memberikan jaminan keterpaduan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta keseimbangan sosial, mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

1.4.2. Hubungan dengan Renstra, RKPD dan SDG's

Terkait dengan Renstra OPD dan RKPD, di dalam doku-men RPKMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, dijelaskan keterhubungannya secara hirarkis, fungsional, dan substantial, sebagai berikut:

1. **Hubungan Hirarkis menurut Tata Urutan Perencanaan**
   Tersusun secara bertingkat dan berjenjang, menggambarkan alur perencanaan dari visi kepala daerah hingga implementasi tahunan, di mana:
   - RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029 memuat materi sebagai dokumen utama perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun, sejalan dengan masa jabatan Bupat/Wakil Bupati Keerom. Menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, strategi, program prioritas, dan indikator kinerja pembangunan daerah.
   - Renstra OPD merupakan dokumen turunan langsung dari RPJMD di tingkat perangkat daerah. Memuat sasaran dan program yang menjadi kontribusi OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD.
   - RKPD merupakan dokumen tahunan yang menjembatani antara RPJMD (rencana 5 tahunan) dengan penganggaran daerah (APBD). Mmemuat prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja tahunan OPD yang disusun berdasarkan Renstra OPD.

- RAD SDGs memastikan sejalan dengan 17 tujuan SDGs (ekonomi, sosial, lingkungan, tata kelola). Renstra OPD menurunkan kontribusi tiap dinas terhadap target-target SDGs sesuai kewenangannya. RKPD kemudian menyusun prioritas dan kegiatan tahunan agar capaian SDGs bisa diukur secara bertahap melalui APBD.

Tabel 1.6.
Hubungan Hirarkis Dokumen RPJMD Kabupaten Keerom dengan Renstra OPD dan RKPD dan SDG's

Dokumen	Fungsi Utama	Horizon Waktu	Disusun oleh
RPJMD	Menjabarkan visi, misi, dan program Bupati/ Wakil Bupati Keerom dalam arah pemba-ngunan	5 tahun (periode kepemimpinan kepala daerah)	Pemda Kab Kerom
Renstra OPD	Menjabarkan sasaran, program-kegiatan OPD Kab Keerom yang men-dukung target RPJMD	5 tahun (selaras RPJMD)	Tiap OPD di lingkungan Pemda Kab Keerom
RKPD	Rencana kerja tahunan yang mengacu pada RPJMD dan Renstra OPD	Per tahun selama 5 tahun	Pemda Kab Kerom
RAD SDGs	Koordinasi, implementasi, dan pemantauan capaian SDGs di Kab Keerom	Per tahun selama 5 tahun	Tiap OPD di lingk Pemda Kab Keerom

Sumber: Data diolah, Tahun 2025

Sesuai dengan hubungan hirarkis tersebut, Tim Kerja telah melakukan berbagai tindak lanjut seperti "couching clinic" selama 2 hari yang menghasilkan input data sectoral dan spasial serta menyusun draf awal dokumen Rentra sebagai penjabaran dari dokumen RPJMD. Selanjutnya, dengan mengacu pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, mekanisme penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Keerom per tahun, difasilitasi untuk menentukan program dan kegiatan per OPD dengan indikator kinerja, lokasi, target, dan pagu indikatif, disertai dengn penetapan prioritas pembangunan, matriks pagu indikatif, indikator kinerja daerah. Pada prinsipnya, semua dokumen perencanaan di Kabupaten Keerom menjadikan *SDGs* sebagai *mainstreaming*.

2. Hubungan Fungsional (Peran dan Tugas)

Secara fungsional dokumen RPJMD sebagai pedoman arah pembangunan, ditejemahkan dengan *roadmap* yang jelas di dalam dokumen Renstra OPD. Kemudian, jadi acuan dalam RKPD sebagai kerja tahunan yang konkret dan terukur.

Tabel 1.7.
Hubungan Fungsional Dokumen RPJMD Kabupaten Keerom dengan Renstra OPD dan RKPD dan SDG's

Dokumen	Fungsi Utama	Peran dalam Siklus Pembangunan
RPJMD	Menentukan arah dan tujuan pembangunan dalam RPJMD Keerom	Sebagai pedoman strategis bagi seluruh OPD
Renstra OPD	Menjabarkan tujuan-sasaran RPJMD ke dalam konteks tugas dan fungsi	Sebagai panduan strategis OPD dalam penyusunan program/kegiatan

Dokumen	Fungsi Utama	Peran dalam Siklus Pembangunan
	tiap OPD	
RKPD	Menentukan prioritas tahunan dan sinkronisasi program lintas-OPD	Sebagai dasar penyusunan RKA dan APBD tahunan
SDG's	Menjadi dokumen pendukung tematik yang memastikan prinsip dan target SDGs masuk ke dalam RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD.	Sebagai acuan integrasi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, tata kelola dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah.

Sumber: Data diolah, Tahun 2025

3. Hubungan Substantif (Isi dan Keterpaduan Materi)

Secara substantif, memiliki keterkaitan isi mana substansi kebijakan pembangunan yang harus konsisten dan saling menguatkan.

Tabel 1.8.
Hubungan Substantif Dokumen RPJMD Kabupaten Keerom dengan Renstra OPD dan RKPD

Aspek Substansi	RPJMD	Renstra OPD	RKPD
Visi-Misi	Menjadi dasar seluruh arah pembangunan Kab. Keerom	Diterjemahkan menjadi tujuan strategis OPD	Menjadi rujukan dalam prioritas tahunan
Tujuan dan Sasaran	Ditetapkan pada level daerah (lintas sektor)	Diturunkan sesuai tugas OPD	Dijabarkan menjadi target kinerja tahunan
Program Prioritas	Program utama pembangunan Kab Keerom	Disesuaikan dengan program OPD	Dirinci menjadi kegiatan dan subkegiatan tahunan
Indikator Kinerja	Indikator makro Pembangunan Kab Keerom	Indikator kinerja OPD (output & outcome)	Indikator kinerja tahunan (target tahun berjalan)

Sumber: Data diolah, Tahun 2025

Selanjutnya, strategi tematik berkelanjutan (ekonomi, sosial, lingkungan, tata kelola), diterjemahkan ke dalam RAD SDGs memantau dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan daerah berkontribusi pada capaian SDGs mencakup 17 Tujuan dan 169 Target capaian, dengan menggunakan indikator SDGs (nasional–global-lokal Keerom).

1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, untuk memastikan adanya solusi dari permasalahan yang dihadapi secara inovatif dan berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak terkait secara partisipatif. Secara spesifik, terkait dengan dimensi-dimensi sektoral dan parsial-ekologis.

a. Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang disertai

indikator kinerja pembangunan daerah. Digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan RKPD, RENSTRA, RENJA dan APBD tahun anggaran 2025-2029. Dan, menjawab permasalahan spesifik di Kabupaten Keerom.

b. Tujuan

1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kabupaten Keerom dengan Provinsi Papua selama kurun waktu 2025-2029.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Pusat, Provinsi Papua dengan Pemerintah Kabupaten Keerom.
3. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom yang tertuang dalam RENSTRA PD, RKPD.
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya inovatif secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5. Menjabarkan visi dan misi ke dalam kerangka tujuan dan sasaran pembangunan dipedomani dalam penyusunan kebi-jakan pembangunan yang partisipatif.

1.6. Sistematika Dokumen

Sistematika RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, tersusun secara deskriptif per Bab yang memiliki alur logis antar bab yang saling terkait, sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan. Memuat latar belakang yang mendes-kripsikan tentang dimensi latar penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Diawali dengan motivasi konversi visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih menjadi visi dan misi pemba-ngunan daerah Kabupaten Keerom. Termasuk di dalamnya, inspirasi yang mengedepankan karakter spesifik sebagai pengungkit gerakan membangun. Selanjutnya, dikemukakan dasar hukum penyusunannya agar memiliki *justifikasi* formal sebagai landasan konstitusional dan landasan kerja dalam implementasinya. Oleh karena dokumen ini, tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan signifikan dengan perencanaan lainnya secara hirarkis dan horizontal, maka dijelaskan pula hubungan antar dokumen dengan RPJPN, RPJMN, RIPPP, RPJPD dan RPJMD Provinsi Papua, RPJPD dan RTRW Kabupaten Keerom, serta tindak lanjutnya ke Renstra OPD dan RKPD. Hal ini dimaksudkan agar materi penyusunan dokumen RPJMD ini dapat memastikan adanya desain solusi dari permasalahan sektoral dan parsial-ekologis yang dihadapi secara inovatif, komprehensif, integral, dan berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak terkait secara partisipatif.

BAB II Gambaran Umum Daerah. Berlatar dari deskripsi pada Bab Pendahuluan, maka pada Bab ini, didetailkan profil seluruh aspek pembangunan di Kabupaten Keerom. Memuat sejumlah data dan informasi yang layak dan *uptodate.* Ditampilkan secara naratif, tabulasi tunggal-silang, atau grafik yang relevan dan logis. Beberapa aspek yang diungkapkan adalah kondisi atau kinerja makro daerah Kabu-paten Keerom, terdiri dari aspek-aspek seperti: geografi dan

demografi, kesejahteraan masya-rakat, daya saing, pelayanan umum, gambaran keuangan daerah serta permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah. Dengan memanfaatkan profil (kondisi eksisting) Kabu-paten Keerom kurun waktu 5 tahun sebelumnya, dipandang layak dijadikan rujukan dalam melakukan konversi visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program yang diusung oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih. Oleh karena itu, Bab ini sangat sarat dengan muatan interpretasi dan analisis tentang kondisi Kabupaten Keerom sebagai acuan rumusan tindak lanjutnya dalam 5 tahun ke depan. Hal ini, digambarkan dalam rumusan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Keerom, yang disertai dengan penetapan tujuan, sasaran, program prioritas, strategi dan arah kebijakan

BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelengga-raan Pemerintah Daerah. Gambaran Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Keerom, yang disertai dengan penetapan tujuan, sasaran, program prioritas, strategi dan arah kebijakan sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya, menjadi acuan utama dalam mengidentifikasi dan memberikan bobot riil ke dalam program perangkat daerah, pagu indikatif dan target kinerja. Selanjutnya, menginformasikan Indikator Kinerja IKU dan IKD Kabupaten Keerom.

BAB V Penutup. Pada tahapan akhir dokumen ini, dijelaskan perlunya ada tindak lanjutnya secara konsisten perihal substansial, mencakup kaidah, pengendalian dan evaluasi, pedoman transisi dan acuan RPJMD Kabupaten Keerom terhadap dokumen lainnya. Di dalamnya, juga menjelaskan secara imperatif agar menjadi dokumen publik yang harus dijadikan sebagai acuan dalam menerapkan sistem manajemen pembangunan di Kabupaten Keerom.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kondisi geografi dan demografi di Kabupaten Keerom, diuraikan dalam beberapa aspek yang mencakup karakteristik lokasi wilayah, letak geografis dan batas wilayah, serta fungsi dan kontribusi daerah terhadap wilayah sekitarnya. Fungsi dan kontribusi dimaksud seperti kontribusi ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, wilayah rawan bencana, dan aspek lainnya. Terkait aspek demografi, dipaparkan tentang kondisi kependudukan dan pemerintahan.

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

a. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Keerom, berada dala wilayah MAMTA, kini telah memasuki usianya ke-23 tahun. Terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, Sebagai bagian dari Provinsi Papua, Kabupaten Keerom berada di dalam wilayah adat MAMTA. Secara administratif, Kabupaten Keerom terdiri dari 11 Distrik dan 91 Kampung yang tersebar pada areal seluas 9.478,18 km^2. Distrik Senggi yang berada di sisi barat daya merupakan wilayah terluas yaitu 2.675,52 km^2 [28,23 %], sedangkan wilayah terkecil adalah Distrik Arso Barat seluas 160,98 km^2 [1,70%].

Posisi Kabupaten Keerom sebagai daerah perbatasan dengan Papua Nugini membawa peluang strategis (perdagangan lintas batas, pengembangan ekonomi lokal, diplomasi sub-nasional, dan akses sumber daya) sekaligus risiko signifikan (keamanan, penyelun-dupan, tekanan layanan publik, penyakit menular lintas batas, degradasi lingkungan, dan ketidakstabilan sosial). Dampak itu bersifat multi dimensional (ekonomi, sosial-kultural, keamanan, lingkungan, tata kelola, dan infrastruktur), sehingga perlu strategi lintas-sektor yang terpadu, berbasis data, dan melibatkan aktor lokal, provinsi, pusat, serta mitra internasional.

Hingga saat ini, Ibukota Kabupaten masih berada di Distrik Arso, tetapi ke depan, direncanakan akan dipindahkan ke Distrik Waris sebagaimana dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002. Adapun rincian nama distrik dan kampung, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Nama Distrik dan Kampung Kabupaten Keerom

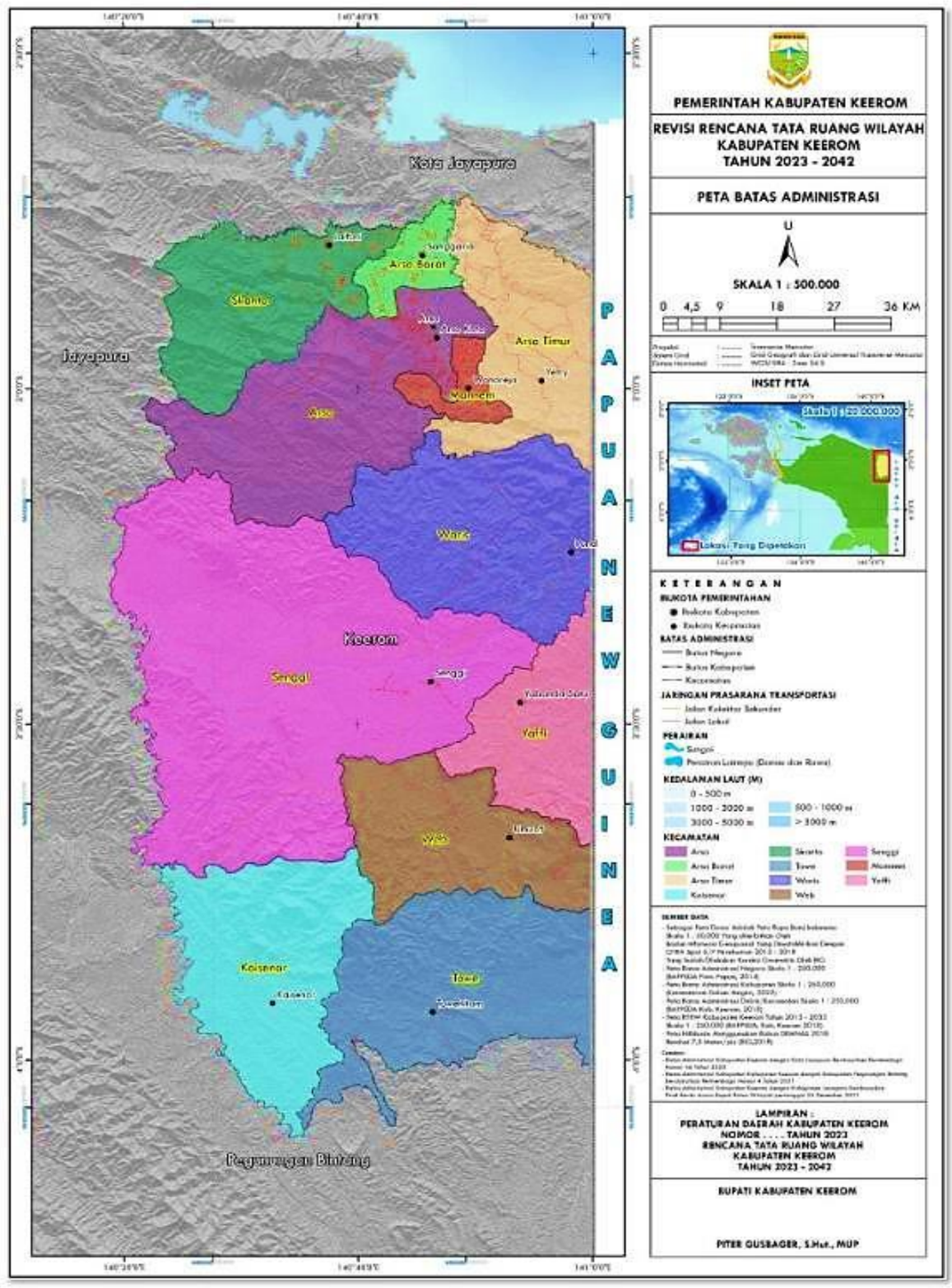
No.	Nama Distrik dan Kampung	No	Nama Distrik dan Kampung
1	**Distrik Arso**	**6**	**Distrik Waris**
	1. Arso Kota		1. Banda
	2. Workwana		2. Pund
	3. Kwimi		3. Kalifam
	4. Ubiyau		4. Kalimo
	5. Sawanawa		5. Yuwainda
	6. Yanamaa		6. Ampas
	7. Yuwanain		7. Bompay
	8. Asyaman		8. Sack
	9. Yamta	**7**	**Distrik Yafii**
	10. Bagia		1. Yabanda
	11. Bibiosi		2. Yuruf
	12. Sawabuum		3. Amgotro

No.	Nama Distrik dan Kampung	No	Nama Distrik dan Kampung
2	**Distrik Arso Barat**		4. Jifanggry
	1. Dukwia		5. Monggoafi
	2. Sanggaria		6. Fanfunumbu
	3. Yaturaharja		7. Akarinda
	4. Warbo	**8**	**Distrik Senggi**
	5. Yammua		1. Senggi
	6. Ifia-fia		2. Warief
	7. Baburia		3. Usku
	8. Yowong		4. Molof
3	**Distrik Arso Timur**		5. Namla
	1. Yetty		6. Waley
	2. Kriku		7. Woslay
	3. Skofro	**9**	**Distrik Kaisenar**
	4. Kibay		1. Kaisenar
	5. Sangke		2. Kiambra
	6. Suskun		3. Liket
	7. Amyu		4. Onma
	8. Pikere		5. Tefanma Satu
	9. Petewi	**10**	**Distrik Web**
4	**Distrik Mannem**		1. Dubu
	1. Yamara		2. Umuaf
	2. Wembi		3. Semografi
	3. Wonorejo		4. Embi
	4. Pyawi		5. Yamraf Dua
	5. Sawyatami		6. Tatakra
	6. Wambi	**11**	**Distrik Towe**
	7. Uskwar		1. Towe Hitam
5	**Distrik Skanto**		2. Towe Atas
	1. Skanto		3. Terfones
	2. Jaifuri		4. Terfalma
	3. Arsopura		5. Lules
	4. Wiantre		6. Bias
	5. Intaimelyan		7. Milky
	6. Traimelyan		8. Jember
	7. Naremben		9. Nitili
	8. Wulukubun		10. Pris
	9. Gudang Garam		
	10. Saefe Empat Dua		
	11. Walma		
	12. Alang-alang Raya		

Sumber: Kepmendagri No: 300.2.2-2138, Tahun 2025

Distrik Arso, Distrik Arso Barat, dan Distrik Skanto merupakan distrik terdekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Keerom [jarak ± 2,40 Km], sedangkan distrik terjauh, adalah Distrik Towe [jarak ± 185,40 Km]. Distrik Web, Yaffi, dan Senggi merupakan wilayah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan dengan jarak masing-masing lebih dari 100 Km dengan kondisi jalan yang belum cukup memadai. Adapun Distrik Towe telah dapat diakses melalui jalur darat dengan menggunakan kendaraan bermotor roda-4, sedangkan Distrik Kaisenar hanya dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor roda-2.

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Keerom



Sumber: RTRW Kabupaten Keerom Tahun 2023-2042

Terdapat 5 (lima) distrik yang berbatasan langsung dengan negara PNG, yakni Distrik Waris, Yaffi, Web, Arso Timur, dan Towe. Guna memudahkan pengawasan arus lalu lintas manusia dan barang keluar dan masuk dari PNG, di perbatasan negara telah dibangun beberapa Pos Lintas Batas (PLB), yakni di Distrik Waris, Yaffi, Web, Towe dan Arso Timur. Dalam penerapan aspek keamanan, dikoor-dinasikan secara simultan dan integratif bersama para pihak yang berkepentingan, melibatkan instansi terkait di tingkat Nasional dan Provinsi Papua.

Posisi perbatasan memberi Keerom peran strategis sebagai penjaga kedaulatan sekaligus peluang ekonomi regional. Namun manfaat ini hanya akan tercapai bila pendekatan pembangunan bersifat komprehensif, lintas-sektor, dan berbasis masyarakat, dengan tata kelola yang kuat, data yang andal, dan kemitraan luas (provinsi, pusat, internasional). Prioritaskan langkah konkret: (1) pengamanan dan legalisasi perdagangan, (2) penguatan layanan dasar (kesehatan, pendidikan, irigasi), (3) pembangunan infra-struktur logistik dan digital, dan (4) pelibatan aktif komunitas adat sebagai pemegang kunci keberlanjutan. Beberapa dampak ikutan yang perlu diantisipasi dari posisi strategis itu, antara lain adalah:

1. Dampak Ekonomi
   - Fasilitasi legalisasi perdagangan (zona pasar terkontrol, SIPB/izin dagang lintas batas) dan integrasi UMKM ke rantai pasok formal.
   - Kembangkan "sentra agregasi" (gudang, cold storage, koperasi eksport) di titik strategis untuk menambah nilai lokal.
   - Beri insentif dan regulasi untuk mengalihkan ekonomi informal ke formal (pelatihan kapasitas, akses pembiayaan mikro).
2. Dampak Keamanan dan Ketertiban
   - Bangun sistem intelijen lokal terintegrasi (polres, kodim, bea cukai, imigrasi) dan early-warning community policing.
   - Program mitigasi konflik berbasis masyarakat (forum lintas budaya, mediasi adat).
   - Kaitkan penguatan keamanan dengan program kesejahteraan (mengurangi insentif ekonomi untuk kegiatan ilegal).
3. Dampak Kesehatan & Kesejahteraan Sosial
   - Perkuat surveilans penyakit di titik masuk dan kampung perbatasan, serta kapasitas puskesmas sebagai garda terdepan.
   - Mekanisme rujukan lintas-sektor untuk penanganan epidemi dan program gizi (stunting) di wilayah perbatasan.
   - Sistem registrasi penduduk migran sementara yang melindungi hak layanan dasar tanpa memicu eksklusi legal.
4. Dampak Sosial-Budaya dan Identitas
   - Integrasikan kearifan lokal dalam kebijakan pembangunan (pengelolaan sumber daya, tata ruang, pariwisata).
   - Program penguatan kapasitas adat untuk ikut mengelola sumber daya dan menyelesaikan sengketa.
5. Dampak Lingkungan dan Sumber Daya Alam
   - Terapkan perlindungan kawasan sensitif dan rencana zonasi yang selaras dengan tata ruang provinsi dan pusat.
   - Penguatan patroli lingkungan berbasis masyarakat (community forest monitoring) dan satuan tugas lingkungan bersama.
6. Dampak Infrastruktur dan Konektivitas
   - Prioritaskan infrastruktur multi-fungsi (jalan produksi dan akses kesehatan-pendidikan).
   - Rancang pemeliharaan berbasis komunitas dan dana pemeliha-raan teralokasi dalam APBD jangka menengah.
   - Kembangkan konektivitas digital untuk layanan publik dan pemasaran produk lokal.
7. Dampak Tata Kelola, Hukum, dan Diplomasi Sub-nasional
   - Bentuk forum koordinasi perbatasan yang melibatkan kabupaten, provinsi, kementerian terkait, dan masyarakat adat.
   - Program *capacity building* OPD (manajemen perbatasan, penge-lolaan data, pengawasan perdagangan).

b. Kerentanan Geografis

Kabupaten Keerom termasuk wilayah dengan kerentanan iklim dan bencana alam kategori sedang–tinggi, terutama akibat kom-binasi antara kondisi topografi, curah hujan ekstrem, dan degradasi lingkungan. Penguatan kebijakan lintas sektor, terutama pada tata guna lahan, ketahanan pangan, dan infrastruktur hijau, menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan ini.

Kerentanan Geografis Kabupaten Keerom terhadap bencana dan perubahan iklim, dipengaruhi oleh beberapa factor utama. Secara fisiografis, wilayah ini didominasi oleh dataran rendah di bagian utara dan timur, serta perbukitan dan pegunungan di bagian selatan dan barat. Sebagian besar wilayah memiliki topografi bergelombang hingga curam dengan ketinggian 50–2.000 mdpl. Iklim di wilayah ini termasuk tipe hujan A (basah) menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson, dengan curah hujan tahunan rata-rata di atas 3.000 mm per tahun. Kondisi ini mendukung produk-tivitas pertanian dan kehutanan, namun juga meningkatkan potensi bencana hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, dan genangan musiman.

Berdasarkan InaRISK BNPB (2024) dan Kajian Risiko Bencana Provinsi Papua (Bappenas, 2023), wilayah Kabupaten Keerom termasuk dalam kategori risiko sedang–tinggi terhadap beberapa jenis bencana, dengan distribusi spasial sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Kerentanan Geografis Kabupaten Keerom

Jenis Bencana	Distrik Paling Rentan	Keterangan Risiko	Potensi Dampak
Banjir dan Genangan Musiman	Arso, Skanto, Web, Senggi	Curah hujan tinggi, drainase belum optimal, banyak daerah dataran aluvial	Kerusakan infrastruktur jalan dan pemukiman, gagal panen musiman
Tanah Longsor	Waris, Towe, Yaffi, Senggi bagian selatan	Lereng curam, lahan terbuka, deforestasi lokal	Gangguan akses jalan lintas distrik dan isolasi kampung
Kekeringan Lokal (musiman)	Arso Timur, Towe Hitam	Perubahan pola hujan, degradasi lahan pertanian	Penurunan hasil pertanian subsisten
Kebakaran Hutan dan Lahan	Waris, Senggi, Web	Perubahan tutupan hutan, pembukaan lahan baru	Emisi karbon, kehilangan biodiversitas
Gempa Bumi (tektonik)	Seluruh wilayah (risiko rendah–sedang)	Berdekatan dengan zona patahan utara Papua	Potensi kerusakan bangunan ringan
Perubahan Iklim (anomali hujan, suhu naik)	Seluruh wilayah	Tren peningkatan suhu 0,3–0,5°C/10 tahun	Pergeseran musim tanam, tekanan ter-hadap ekosistem dan ketahanan pangan

Sumber: Peta Risiko Bencana Indonesia (InaRISK 202), Kajian Risiko Bencana Provinsi Papua Tahun 2023, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BPS Keerom 2024, Bappenas dan KLHK 2023.

Sementara itu, berdasarkan analisis KLHK dan BMKG (2023), Kabupaten Keerom memperlihatkan gejala perubahan iklim yang nyata:

- Kenaikan suhu rata-rata tahunan sekitar 0,04–0,05°C per tahun selama dekade terakhir.
- Pergeseran awal musim hujan sekitar 15–30 hari lebih lambat dari pola

historis, yang memengaruhi pola tanam padi dan hortikultura.
- Peningkatan kejadian cuaca ekstrem, seperti hujan lebat disertai angin kencang yang menyebabkan erosi lahan dan rusaknya infrastruktur pertanian.
- Deforestasi dan degradasi lahan kritis di wilayah perbatasan dan hulu DAS Tami sekitar 1.200 hektar lahan terdegradasi tercatat oleh KLHK (2022).

Kerentanan geografis Keerom diperkuat oleh kombinasi faktor biofisik dan sosial-ekonomi:
1. Kerapatan hutan menurun, akibat ekspansi permukiman dan pertanian di dataran rendah perbatasan.
2. Infrastruktur drainase dan jalan perbatasan belum mampu menahan aliran permukaan pada musim hujan ekstrem.
3. Kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana (BPBD, Dinas PU, Dinas Pertanian) masih terbatas sumber daya dan sistem peringatan dini.
4. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pertanian lahan kering menjadikan ekonomi lokal rentan terhadap anomali iklim dan bencana alam.

Selanjutnya, untuk menjawab kerentanan geografis ini, RPJMD Kabupaten Keerom 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat ketahanan iklim dan ketangguhan daerah, melalui strategi utama:
1. Integrasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah (selaras dengan RAD-GRK dan RPJPN 2025–2045).
2. Rehabilitasi lahan kritis dan pengendalian deforestasi melalui program penghijauan dan agroforestry pada DAS Tami dan Waris.
3. Pembangunan infrastruktur hijau (drainase ekologis, tanggul banjir, embung pertanian) untuk menahan dampak hidrometeorologis.
4. Penguatan sistem ketahanan pangan adaptif iklim, melalui diversifikasi pangan lokal, smart farming, dan cadangan pangan komunitas.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD dan perangkat distrik dalam sistem peringatan dini dan penanganan darurat bencana.

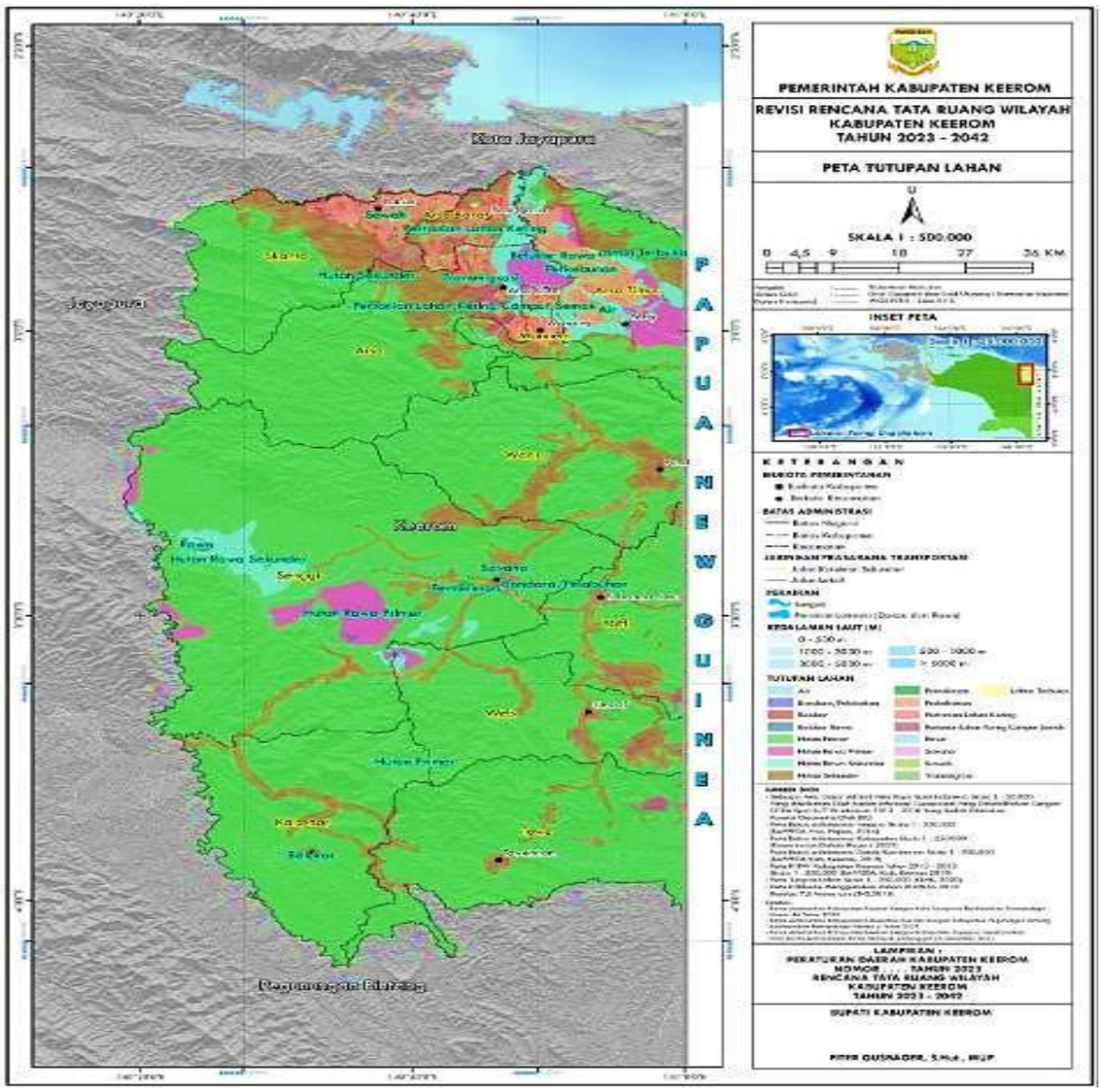
c. Fungsi dan Kontribusi Daerah

Kontribusi Kabupaten Keerom terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua hingga tahun 2024 masih tergolong relatif kecil. Struktur perekonomian Provinsi Papua didominasi oleh Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, dengan kontribusi masing-masing sebesar 46,56% dan 23,89% pada tahun 2024. Sementara itu, kontribusi Kabupaten Keerom hanya 4,23% dari total PDRB provinsi pada tahun yang sama. Dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi, posisi Kabupaten Keerom juga menunjukkan kinerja yang sedikit di bawah rata-rata provinsi. Pertumbuhan rata-rata PDRB Provinsi Papua tahun 2024 tercatat sebesar 3,52%, sedangkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Keerom hanya mencapai 3,20%. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa meskipun Keerom memiliki potensi wilayah strategis sebagai daerah perbatasan, kontribusi ekonominya belum mampu mengimbangi daerah lain seperti Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Kondisi ini menegaskan pentingnya strategi pemba-ngunan daerah yang lebih terarah, khususnya pada penguatan sektor-sektor unggulan lokal.

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang menjadi keunggulan kompa-ratif Kabupaten Keerom, sesuai hasil interpretasi citra satelit oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2020), tutupan lahan didominasi oleh kawasan hutan seluas 879.864 Ha (92,80%), sedangkan lahan non-hutan hanya mencakup 68.248 Ha (7,20%).

Gambar 2.2
Peta Tutupan Lahan



Sumber: RTRW Kabupaten Keerom 2023-2042.

Kondisi tutupan lahan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Keerom memiliki potensi besar pada sektor kehutanan, baik untuk pelestarian ekosistem maupun sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dikelola secara berkelanjutan, tetapi pemanfaatan nya belum dioptimalkan. Hal ini terlihat dari penggunaan kawasan hutan untuk lahan pertanian yang hanya mencapai 2,87% dari total luas wilayah. Keadaan ini menunjukan sebagian besar wilayah hutan belum dimanfaatkan untuk aktivitas produktif masyarakat, sehingga nilai tambah ekonomi dari sektor pertanian dan perkebunan relatif rendah.

Kondisi tersebut sekaligus menjadi tantangan dan peluang. Di satu sisi, rendahnya pemanfaatan lahan pertanian mencermin kan keterbatasan dalam membuka akses produksi pangan dan komoditas unggulan daerah. Namun, di sisi lain, hal ini juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan strategi pembangunan berbasis pemanfaatan lahan yang lebih optimal, terutama dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konservasi hutan, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Selanjutnya, representasi spasialnya disajikan pada Gambar Peta 2.2. dan sebaran luas wilayah menurut kategori penggunaan lahan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Penggunaan Lahan Kabupaten Keerom

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Primer	944,049.55	75.097
2	Hutan Sekunder	151,246.75	12.031
3	Hutan Rawa Primer	34,286.24	2.727
4	Hutan Rawa Sekunder	36,879.00	2.934
5	Perkebunan	30,870.11	2.456
6	Pertanian Lahan Kering	16,351.18	1.301
7	Pertanian Lahan Kering Campur	19,801.67	1.575
8	Transmigrasi	8,384.96	0.667
9	Badan Air	5,342.11	0.425
10	Belukar	5,492.94	0.437
11	Tanah Terbuka	577.84	0.046
12	Belukar Rawa	1,472.02	0.117
13	Bandara/Pelabuhan	35.37	0.003
14	Permukiman	1,388.68	0.110
15	Rawa	426.71	0.034
16	Savana	368.03	0.029
17	Sawah	141.39	0.011
	Kabupaten Keerom	**1,257,114.55**	**100.000**

Sumber: RTRW Kabupaten Keerom 2023-2042.

Data tersebut memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai pola pemanfaatan lahan, sekaligus menjadi dasar perencanaan pembangunan wilayah, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pertanian

Sektor pertanian mempunyai kontribusi penting terhadap perekonomian karena menjadi salah satu penyumbang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di luar sektor administrasi pemerintahan. Hal ini sejalan dengan struktur mata pencaharian penduduk, di mana sebagian besar masyarakatnya berkegiatan bercocok tanam, perkebunan, dan peternakan. Komoditas yang banyak diusahakan meliputi jagung, padi, kakao, kopi, dan tanaman hortikultura. Komoditas tersebut memiliki potensi menjadi produk unggulan daerah apabila dikelola dengan dukungan teknologi, infrastruktur, dan akses pasar yang memadai.

Sektor pertanian juga berperan penting dalam penyediaan kebutuhan pangan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan pangan juga semakin meningkat, baik pangan pokok maupun pangan tambahan. Sehingga, sektor pertanian menjadi penopang utama ketersediaan pangan lokal. Apabila ketersediaan pangan lokal diikuti dengan keterjangkauan nya, dan keberlanjutan pasokan pangan, ketahanan pangan akan tercapai. Selain itu, sektor pertanian juga berkontribusi pada aspek stabilitas sosial dan ekonomi. Ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau akan mendukung kesejahteraan masyarakat, mengurangi risiko inflasi pangan, serta mendorong terciptanya lapangan kerja baru di pedesaan. Dengan demikian, penguatan sektor pertanian bukan hanya soal peningkatan produksi, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah dan kualitas hidup masyarakat.

b. Perkebunan

Komoditas perkebunan masih didominasi oleh kelapa sawit dan kakao, dengan kontribusi terbesar terhadap luas areal dan produksi perkebunan rakyat. Data *Kabupaten Keerom dalam Angka [2024*], menunjukkan bahwa komoditas ini menjadi pilar utama, sementara kelapa, pinang, dan kopi hadir sebagai peleng-kap. Sawit umumnya terkonsentrasi di Distrik Arso, Arso Barat, Arso Timur, Skanto, dan Mannem yang memiliki akses jalan dan pasar lebih baik. Kakao lebih menyebar ke distrik seperti Waris, Senggi, Web, Towe, Yaffi, dan Kaisenar, berdampingan dengan perkebunan kecil kelapa, pinang, dan kopi. Kondisi ini menegaskan bahwa struktur perkebunan masih berbasis ganda, yaitu sawit-kakao sebagai inti dan komoditas lain sebagai diversifikasi.

Implikasi ekonominya jelas, yaitu pengembangan sawit dan kakao harus diarahkan pada peningkatan produktivitas, kemitraan hulu-hilir, serta akses pasar di klaster Arso–Skanto. Di sisi lain, diversifikasi melalui penguatan kelapa, pinang, dan kopi di distrik pendalaman penting untuk menambah pendapatan petani dan menjaga ketahanan ekonomi lokal. Data BPS [2024], dapat dijadikan baseline untuk mengevaluasi kebijakan per distrik, baik pada aspek bibit, rehabilitasi kebun, hingga pascapanen dan distribusi. Dengan pendekatan berbasis data, Pemerintah dapat merumuskan strategi pembangunan perkebunan yang lebih terukur, sehingga kontribusi sektor ini terhadap PDRB semakin meningkat.

c. Kehutanan

Sumber daya hutan merupakan potensi alam yang paling besar dimiliki Kabupaten Keerom, dan pada umumnya potensi ini belum banyak dimanfaatkan. Sebagian besar Kabupaten Keerom ditutupi oleh hutan, yaitu mencapai 93% dari luas kabupaten, baik hutan primer, hutan sekunder, hutan rawa primer, maupun hutan rawa sekunder. Sub-sektor kehutanan mampu menyumbang PDRB sebesar 8,53 % dan menempati urutan ketiga dalam sektor pertanian. Perencanaan tata ruang harus mengalokasikan wilayah lindung dan budidaya hutan secara proporsional untuk menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya hutan secara berkelanjutan. Terdapat 5 macam kawasan hutan yang meliputi Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Konversi (HPK), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan kawasan suaka alam. Luas keseluruhan kawasan hutan tersebut mencapai 71,51% dari areal berhutan. Berbagai komoditas yang dapat dikembangkan pada sub-sektor kehutanan antara lain meliputi yaitu kayu, rotan, dan kulit kayu yang dapat diolah menjadi *plywood, block-board, veneer, lumber-core*, kayu ger-gajian dan poliyester. Selain itu dapat pula dikembangkan produk non kayu seperti madu, plasma nutfah, dan jasa lingkungan hutan lainnya.

d. Peternakan

Peternakan memiliki posisi strategis dalam mendukung per ekonomian daerah, karena selain memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat, juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja di Kabupaten Keerom. Populasi ternak cukup beragam, dengan komoditas utama berupa sapi potong, kambing, babi dan unggas. Sapi potong memiliki populasi terbanyak, meskipun dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi akibat keterbatasan pakan dan sistem pemeliharaan yang masih tradisional. Kambing berkembang pesat di beberapa distrik sebagai sumber protein

hewani alternatif dengan siklus produksi yang relatif singkat. Sementara itu, babi banyak dipelihara oleh masyarakat di wilayah perkampungan. Pengelolaan ternak dengan sistem manajemen modern, dapat meningkatkan populasi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dalam mendukung peningkatan kontribusi PDRB sektor peternakan.

Potensi peternakan unggas juga sangat signifikan di Keerom. Jenis unggas yang dominan adalah ayam kampung yang jumlahnya mencapai puluhan ribu ekor dan tersebar di seluruh distrik. Ayam petelur dan ayam pedaging juga mulai dikembangkan, meskipun masih dalam skala terbatas karena kendala pakan, bibit, dan jaringan pemasaran. Sementara itu, ternak bebek menjadi salah satu komo-ditas tambahan yang berpotensi dikembangkan, baik untuk kon-sumsi daging maupun telur asin. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan protein hewani terus meningkat. Pengembangan subsektor unggas dapat memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan, sekaligus membuka peluang usaha baru.

Dengan dukungan pemerintah daerah dalam memfasilitasi infrastruktur, akses permodalan, dan pendampingan teknis, sub sektor peternakan di Keerom menjadi salah satu pilar ekonomi yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan.

e. Perikanan

Upaya peningkatan Sub-Sektor Perikanan, lebih fokus pada budidaya air tawar seperti ikan lele dan sejenisnya, dibandingkan perikanan tangkap karena faktor geografis. Konsumsi ikan per kapita masih rendah, yang mengindikasikan bahwa potensi pasar domestik dapat ditingkatkan melalui edukasi dan distribusi produk perikanan. Padahal, program budidaya ikan darat, sangat potensial dikembangkan, meskipun saat ini masih dalam skala relatif kecil dan terbatas dibandingkan kabupaten pesisir lainnya yang memiliki infrastruktur laut memadai. Menurut BPS Provinsi Papua [2023], volume produksi perikanan budidaya di Keerom adalah 1.867 ton dengan nilai produksi sekitar Rp 93.350 juta.

Data ini menunjukkan bahwa budidaya ikan dapat menjadi sumber pendapatan nyata bila didukung oleh investasi pengelolaan, penyediaan bibit, pakan, dan akses pasar. Pencacahan lengkap Sensus Pertanian [2023 Tahap-II], juga mencatat bahwa terdapat sejumlah usaha perikanan perorangan (UTP Perikanan) di Kabupaten Keerom, dapat dijadikan basis pengembangan lebih lanjut, walaupun belum terinci jenis ikan budidaya yang paling dominan per distrik, misalnya lele, nila, mujair, atau lainnya.

Untuk optimalisasi potensi, diperlukan perbaikan infra struktur seperti kolam, sistem pascapanen, transportasi, dan jaringan pemasaran serta dukungan kebijakan daerah: misalnya subsidi bibit, pendampingan teknis budidaya, sanitasi perairan, dan regulasi yang mendukung keberlanjutan perikanan. Jika usaha perikanan budidaya dan pemanfaatan sumber daya air tawar di beberapa distrik yang dekat sungai dan danau dapat dikembangkan dengan baik, maka sektor ini berpotensi menjadi penyumbang signifikan terhadap ekonomi di daerah ini.

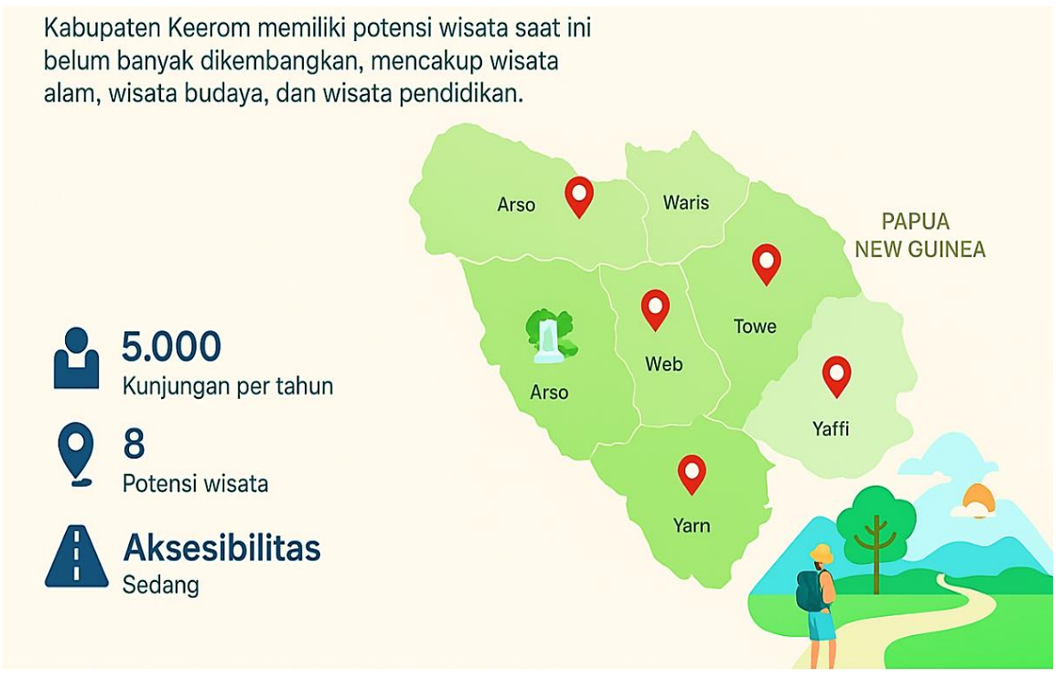
f. Pariwisata

Kabupaten Keerom mempunyai modal alam dan budaya yang kuat: hutan hujan tropis, air terjun dan sungai besar, bentang pegunungan dan dataran, serta warisan budaya masyarakat adat perbatasan. Potensi pariwisata utama adalah: ekowisata (air terjun, *trekking, birdwatching*), wisata budaya-adat, wisata agro-edukasi, dan wisata perbatasan-sejarah. Arah Pengembangan Pariwisata Kabupaten Keerom menurut klaster Zona Prioritas Pengembangan adalah:

- Zona I (Arso–Skanto): Pusat wisata agro dan budaya.
- Zona II (Waris–Senggi): Wisata alam dan sejarah perbatasan.
- Zona III (Yaffi–Towe–Web): Ekowisata dan penelitian alam tropis.

Kondisinya pengembangannya saat ini, masih berskala awal *(community-based,* terbatas fasilitas), akses bervariasi antar distrik, dan promosi masih minim. Sementara itu, strategi pengembangan yang ditempuh meliputi integrasi promosi wisata dalam portal "Keerom Explore" berbasis digital, Penguatan kelembagaan Pokdarwis dan UMKM wisata, Pembangunan akses dan fasilitas dasar melalui program Dana Otsus dan KPBU, dan Pengembangan wisata lintas batas bekerja sama dengan PNG. Data kunjungan terakhir (estimasi Dinas Pariwisata/penilaian cepat 2024) adalah sekitar 5.000 kunjungan per tahun, baik lokal maupun domestik, sedangkan kunjungan mancanegara hampir nihil kecuali kegiatan khusus lintas instansi.

Gambar 2.3.
Peta Lokasi dan Estimasi Kujungan Wisata di Kabupaten Keerom



Sumber: Data Potensi Wisata 2021 Kabupaten Keerom

Tabel 2.4
Lokasi, Jenis, Estimasi Kunjungan Wisata di Kabupaten Keerom

Distrik	Lokasi / Objek Wisata Utama	Jenis Wisata	Kondisi Terakhir (2024)	Estimasi Kunjungan / Tahun
Arso	Air Terjun Tami, Perkebunan Kopi Arso, Tugu Perbatasan RI–	Alam, Agro, Sejarah	Akses mudah dari pusat kota, fasilitas dasar (jalan, shelter) sudah tersedia,	±1.800 pengunjung

Distrik	Lokasi / Objek Wisata Utama	Jenis Wisata	Kondisi Terakhir (2024)	Estimasi Kunjungan / Tahun
	PNG		promosi meningkat	
Skanto	Bukit Sapurina, Agro Edu Wisata Kakao, Festival Budaya Skanto	Alam, Budaya, Edukasi	Mulai dikembangkan oleh Pokdarwis; kegiatan budaya tahunan rutin	±750 pengunjung
Senggi	Sungai Senggi, Hutan Lindung Senggi	Alam, Ekowisata	Potensi tinggi untuk konservasi dan wisata petualangan, infrastruktur terbatas	±500 pengunjung
Waris	Air Terjun Waris, Bukit Jayanti, Kampung Adat Waris	Alam, Budaya, Sejarah	Salah satu destinasi unggulan, mulai dikelola masyarakat adat dan gereja lokal	±1.200 pengunjung
Web	Hutan Pegunungan Web, Sungai Skofro	Ekowisata, Petualangan	Akses masih sulit, belum ada fasilitas wisata, cocok untuk riset alam	±250 pengunjung
Towe	Lembah Towe, Jalur Pendakian Gunung Towe Hitam	Alam, Ekowisata	Lokasi potensial untuk wisata alam ekstrem, belum terkelola	±150 pengunjung
Yaffi	Hutan Adat Yaffi, Kampung Tradisional Yabanda	Budaya, Ekowisata	Potensi wisata budaya dan penelitian keanekaragaman hayati, akses masih terbatas	±300 pengunjung
Kaisenar	Sungai Kaisenar, Kampung Nelayan Tradisional	Alam, Wisata Sungai	Potensi untuk wisata memancing dan edukasi lingkungan, minim fasilitas	±200 pengunjung

Sumber: BPS Keerom 2022-2025 dan Dinas Pariwisata Keerom

2.1.3. Daya Dukung dan Tampung Lingkungan Hidup

Status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diketahui dengan menghitung selisih antara ketersediaan dan kebutuhannya.

a. Daya Dukung dan Daya Tampung Air Bersih

Cadangan air secara alami pada tiap distrik di Kabupaten Keerom tergolong masih aman, dalam status surplus, dengan asumsi ketersediaan air akan konstan jika tidak ada perubahan penutupan lahan di hulu daerah resapan air dan tangkapan air. Namun jika terjadi perubahan tutupan lahan maka krisis air Kabupaten Keerom akan mengalami percepatan secara drastis. Ketersediaan air berdasarkan cadangan (prediksi ekplorasi GIS) sebesar 16,356,422,921 m^3/tahun. Kebutuhan air terus meningkat dari tahun 2024 sampai tahun 2056, dengan peningkatan dari 9.960,15 M^3/Tahun menjadi 14.406,14 M^3/Tahun (kebutuhan domestik) dan 192,326,103.82 M^3/Tahun (kebutuhan non domestik).

b. Daya Dukung Pengembangan Irigasi untuk Swasembada Pangan

Pelayanan infrastruktur irigasi di Kabupaten Keerom merupakan fondasi utama bagi pencapaian swasembada pangan daerah. Melalui pengelolaan air pertanian yang berkelanjutan, penguatan kelembagaan petani, dan sinergi lintas sektor, Keerom diharapkan menjadi sentra produksi pangan strategis di kawasan perbatasan timur Indonesia, sekaligus menjadi model pembangunan pertanian berbasis kemandirian dan keberlanjutan lingkungan.Kabupaten Keerom memiliki potensi besar di sektor pertanian sebagai salah satu lumbung pangan wilayah perbatasan Papua, dengan basis

utama pada produksi padi, jagung, dan hortikultura. Wilayah ini memiliki hamparan lahan pertanian yang relatif luas di distrik-distrik seperti Arso, Skanto, Mannem, dan Waris, yang didukung oleh kondisi agroklimat yang sesuai untuk pengembangan komoditas pangan.

Untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan daerah, pembangunan sistem irigasi menjadi faktor kunci dalam menjaga kesinambungan produksi pertanian sepanjang tahun, terutama pada lahan sawah dan lahan potensial yang sebelumnya bergantung pada tadah hujan. Jaringan irigasi di Kabupaten Keerom saat ini terdiri dari jaringan irigasi teknis, setengah teknis, dan sederhana, yang sebagian besar masih dalam tahap rehabilitasi dan peningkatan fungsi. Daerah irigasi utama berada di kawasan Arso dan Skanto, yang merupakan pusat produksi padi dan sayur-sayuran.

Beberapa jaringan irigasi kecil juga terdapat di distrik Waris, Towe, dan Yaffi, namun masih terbatas pada sistem gravitasi dan embung desa. Potensi pengembangan jaringan baru masih cukup besar, terutama di lahan-lahan datar di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Tami dan DAS Senggi, yang dapat dikembangkan menjadi lumbung pangan terpadu berbasis irigasi berkelanjutan. Meskipun sudah ada beberapa jaringan irigasi fungsional, tingkat pemanfaatan air belum optimal karena kondisi saluran tersier dan sekunder banyak yang mengalami sedimentasi atau kerusakan akibat erosi; keter-batasan tenaga operasional dan petugas pengairan (P3A); dan belum semua petani tergabung dalam kelembagaan irigasi secara aktif. Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Keerom menjadi bagian penting dari program swasembada Pangan Daerah, yang diarahkan untuk menjamin ketersediaan air pertanian sepanjang tahun, menekan risiko gagal panen, serta meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas lahan.

c. Daya Dukung Penyediaan Energi Pangan

Kebutuhan pangan penduduk Distrik Skanto adalah yang tertinggi di Kabupaten Keerom, sedangkan terendah adalah Distrik Senggi. Luas permukiman meningkat dengan cepat karena pertumbuhan penduduk. Ketersediaan pangan tidak hanya berasal dari lahan pertanian dan perkebunan, tetapi juga dapat dikembangkan pada lahan hutan produksi yang dapat dikonversi. Berdasarkan model prediksi dapat dihitung kebutuhan beras sebesar 7,643.55 ton/tahun, sedangkan produksinya dapat mencapai 128,940.37 ton/tahun.

d. Daya Dukung Karbon

Daya dukung karbon (carbon carrying capacity) adalah kapasitas suatu ekosistem (terutama hutan, lahan gambut, vegetasi alam) untuk menyimpan karbon (baik di biomassa atas tanah, bawah tanah, dan di tanah) dan untuk menyerap emisi karbon (misalnya CO_2) dari atmosfer, tanpa degradasi serius. Faktor utamanya: luas dan tipe vegetasi (hutan primer, sekunder, tanaman industri, dll.), kondisi ekosistem tanah, kedalaman karbon tanah/gambut, tingkat degradasi, dan alih guna lahan.

Tabel 2.5.
Estimasi Kemungkinan Daya Dukung Karbon Di Kabupaten Keerom

Komponen	Kondisi Umum Keerom	Implikasi untuk Daya Dukung Karbon
Luas hutan	± 88% wilayah masih hutan.	Potensi karbon tinggi karena area yang besar.
Kondisi hutan	Ada hutan rimba/lebat; sebagian mungkin sudah terdegradasi; ada alih guna sawit yang mulai mencerminkan tekanan.	Hutan yang masih bagus akan menyimpan karbon tinggi; alih guna dan degradasi mengurangi stok.

Komponen	Kondisi Umum Keerom	Implikasi untuk Daya Dukung Karbon
Tanah dan biomassa bawah tanah	Data spesifik belum ditemukan soal kedalaman gambut atau stok karbon tanah/mati (nekromasa).	Jika di Keerom ada lahan gambut atau tanah dengan kandungan organik tinggi, maka stok karbon tanah bisa besar.
Alih guna lahan dan tekanan antropogenik	Perkebunan sawit dan kegiatan budidaya yang berkembang.	Penurunan stok karbon dari aktivitas alih guna; potensi emisi dari deforestasi.

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder.

Kabupaten Keerom memiliki hutan yang menutupi sebagian besar wilayahnya. Kandungan karbon tertinggi berada pada tutupan lahan hutan, tertinggi di Distrik Senggi, dan terendah di Distrik Arso Barat. Menurut dokumen Potensi Kabupaten Keerom, hampir 942.157,31 ha atau sekitar 88,04% dari luas kabupaten adalah tutupan hutan. Ini menunjukkan bahwa potensi karbon melalui vegetasi dan tanah hutan di Keerom sangat besar, karena hutan adalah penyimpan karbon utama. Ada layer *GIS "Hutan Rimba AR250k_Keerom"* pada portal SIMTARU Papua, yang mengindikasikan keberadaan kawasan hutan rimba (hutannya relatif lebat dan alami) di Keerom. Ada indikasi bahwa ada alih guna lahan, misalnya "20.000 ha tanah adat Keerom beralih menjadi perkebunan sawit." Alih guna seperti ini akan mengurangi daya dukung karbonnya karena hutan digantikan oleh tanaman perkebunan yang umumnya menyimpan karbon jauh lebih sedikit dibanding hutan alam.

Bila Kabupaten Keerom memiliki hutan dengan karakteristik mirip (tropis lembap, tutupan pohon tinggi, sedikit degradasi), maka stok karbon total (pohon, tanah organik, serasah/nekromasa) dapat mencapai >100 ton/ha atau lebih, tergantung kondisi. Adapun faktor resiko penghambat adalah:

- Deforestasi dan alih guna lahan, seperti konversi hutan ke perkebunan sawit, bisa mengurangi stok dan kapasitas penyerapan karbon
- Degradasi hutan (bakar, penebangan liar) mengurangi biomassa dan merusak tanah.
- Kurangnya data: tanpa survei biomassa, data tanah organik, kedalaman gambut, sulit menghitung stok karbon tepat.
- Perubahan iklim dan cuaca ekstrem: bisa mempercepat kerusakan ekosistem.

e. Daya Dukung dan Daya Tampung Pencemaran Air

Kabupaten Keerom memiliki sumber mata air alami dan sistem sungai yang menjadi sumber air baku bagi pemukiman di banyak distrik, namun distribusi layanan air bersih belum menjangkau seluruh penduduk dan ada infrastruktur yang perlu perbaikan. Ssebagian besar kondisi layak namun ada parameter yang belum memenuhi standar dan ada potensi pencemaran sehingga memerlukan pemantauan berkala. Dokumen *Status Lingkungan Hidup Daerah* (SLHD) Keerom menyebut isu air bersih, pembukaan lahan, dan perladangan berpindah sebagai isu utama yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas air. Hal ini berarti ancaman terhadap daya dukung air berasal dari alih guna lahan, erosi, dan praktik pertanian tradisional.

Sebagai contoh di Kampung Yamta, sumur gali dan mata air, yang menggunakan indeks pencemaran, menunjukkan kualitas *tercemar ringan* pada parameter ter-tentu sehingga kapasitas asimilasi lokal sudah mulai teruji. Ini menegaskan bahwa daya tampung pencemaran tidak tak terbatas dan perlu dihitung sebelum pembangunan intensif (mis. perluasan perkebunan/ pemukiman). Parameter yang telah melebihi beban pencemaran maksimum adalah COD, Fenol, BOD, PO4-P, S-H2S, Cu, NH3, Fe, Chlorine

Bebas, TSS, NO3, Detergen sebagai MBAS, dan Minyak/Lemak. Sungai Tami telah tercemar oleh parameter COD, Fenol, BOD, PO4-P, S-H2S, Cu, NH3, Fe, Chlorine Bebas, TSS, NO3, Detergen sebagai MBAS, dan minyak/lemak. Indikator konkret yang harus dipantau di Keerom, minimal (prioritas): Debit (Q), DO, BOD, COD, TSS, pH, NO_3^-, PO_4^{3-}, *Coliform/E.coli*.

Ancaman utama terhadap daya dukung dan daya tampung di Keerom, Adalah (1) Alih guna lahan ke perkebunan (sawit): peningkatan limpasan nutrien, sedimentasi, dan pengurangan infiltrasi. (2) menurun-kan kualitas dan ketersediaan debit di musim kemarau. (3) Pertanian berpindah dan pembukaan lahan: erosi dan peningkatan TSS yang menurunkan kapasitas asimilasi. (4) Sanitasi domestik belum universal: sumber bakteri patogen masuk ke sumur & mata air (di Yamta/Arso).

f. Potensi Beban Pencemaran Berasal Dari Domestik

Potensi beban pencemaran yang berasal dari domestik tertinggi adalah parameter COD, diikuti oleh BOD dan terendah TSS. Dapat dijelaskan bahwa kondisi domestik di Kabupaten Keerom, ditentukan oleh: (1) Sumber air: masyarakat banyak memakai mata air dan sumur gali (Kampung Yamta, Arso, Skanto). Sebagian air sudah mengalami pencemaran ringan–sedang karena limbah rumah tangga dan sanitasi yang kurang. (2) Sanitasi: masih ada rumah tangga tanpa *septic-tank* atau menggunakan cubluk sederhana. Hal ini memungkinkan tinja & urin meresap ke tanah dan mencemari air tanah dangkal. (3) Kepadatan pemukiman: relatif rendah di beberapa distrik dan kampung, tetapi di pusat distrik (Arso, Waris, Skanto) konsentrasi penduduk lebih tinggi, beban domestik terakumulasi. (4) Infrastruktur air bersih: sebagian jaringan pipa dan sistem distribusi tidak berfungsi optimal, sehingga masyarakat mengandalkan sumber alami yang sekaligus rawan tercemar.

Potensi beban pencemaran domestik, diperkirakan mencapai ± 2 ton BOD/hari dan ± 3 ton COD/hari jika tidak diolah. Sumber utamanya adalah limbah rumah tangga (sanitasi buruk, grey water langsung), terutama di Arso & Skanto. Hal ini berdampak pada menurunkan kualitas air sumur dan sungai, risiko penyakit air, dan menekan daya tampung pencemaran. Oleh karena itu perlu ada perbaikan sanitasi, IPAL komunal, biofilter grey water, pemantauan berkala, serta integrasi dalam kebijakan lingkungan daerah. Adapun strategi pengelolaannya adalah: (1) perbakan Sanitasi yang layak dengan melakukan perluasan *septic tank* komunal danindividual di pemukiman. (2) IPAL komunal skala kecil di kampung padat (Arso, Skanto). (3) Pengelolaan grey water: biofilter rumah tangga atau sumur resapan khusus untuk air cucian/dapur. (4) Program edukasi masyarakat agar buang sampah dan limbah cair tidak langsung ke sungai. (5) Pemantauan rutin menggunakan indikator BOD, COD, coliform, N, P pada sumur dan mata air, minimal tiap semester. (6) Integrasi dengan RTRW/AMDAL: beban pencemar domestik dihitung dalam rencana pembangunan permukiman.

g. Beban Air limbah Domestik

Beban air limbah domestik adalah total polutan (organik, anorganik, mikrobiologis) yang dibuang dari aktivitas rumah tangga, baik berupa: Black water: limbah toilet (tinja, urin) dan Grey water: limbah dapur, kamar mandi, cucian. Parameter penting yang dapat digunakan adalah: BOD, COD, TSS, Total-N, Total-P, minyak/lemak, *coliform/E.coli*. Sementara itu, berdasar kan air limbah *grey water* dan *black water*, Kabupaten Keerom membutuh kan IPAL Komunal sebanyak 66-90 unit pada tahun 2025-2045. SLHD Keerom mengidentifikasi air bersih dan sanitasi sebagai isu lingkungan utama. Adapun kondisi titik rawan di Kabupaten Keerom, mengindikasikan bahwa:

- Sumber air bersih: banyak masyarakat memakai mata air dan sumur gali, tetapi sebagian sudah menunjukkan gejala pencemaran ringan (BOD, coliform).

- Sanitasi: sebagian rumah tangga belum memiliki septic tank; masih ditemukan cubluk sederhana, potensi rembesan fekal ke air tanah.
- Distribusi air bersih: jaringan pipa di distrik Arso & Skanto sebagian tidak berfungsi optimal, masyarakat memakai sumber air permukaan langsung yang rentan tercemar.
- Pemukiman akan padat di Arso, Waris, Skanto mengakibatkan beban limbah terakumulasi, serta di Distrik Arso dan di Distrik Skanto, konsentrasi penduduk tinggi, penggunaan sumur gali dan sungai sebagai sumber air.
- Di lokasi pasar dan fasilitas umum, sering tidak ada pengolahan limbah.
- Kampung pedalaman, *grey water* langsung ke sungai/mata air.
- Di Kawasan dekat perkebunan, limbah domestik bercampur dengan *runoff* pertanian.

Hal tersebut berdampak pada kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat, karena air tanah menjadi dangkal, dapat terkontaminasi *coliform/E.coli* yang meningkatkan risiko diare, tifus, hepatitis A. Kondisi sungai dengan kenaikan BOD dapat menurunkan DO (oksigen terlarut) yang mengganggu biota, nutrien (N,P) eutrofikasi (pertumbuhan *alga* berlebih). Dan, kesehatan masyarakat menjadi terganggu karena penyakit berbasis air yang cukup tinggi.

h. Beban Timbulan Sampah

Kondisi Umum timbulan sampat di Kabupaten Keerom disebutkan bahwa dengan jumlah penduduk 74.332 jiwa (BPS 2024), belum memiliki sistem persampahan yang terintegrasi penuh: pengangkutan dan TPA (tempat pembuangan akhir) masih terbatas di ibu kota kabupaten (Arso). Sebagian besar kampung: sampah dikelola dengan cara dibakar, ditimbun, atau dibuang ke kebun, sungai. Sampah organik mendominasi (sisa makanan, dedaunan), sedangkan anorganik (plastik, botol) semakin meningkat terutama di pasar dan sekolah.

Timbulan sampah Kabupaten Keerom, diproyeksikan terus meningkat dari Tahun 2025 –2045, sejalan dengan pertambahan penduduknya. Pada tahun 2024 timbulan sampah sebesar 16.965,46 ton kemudian menjadi 21.865,51 ton pada akhir perencanaan tahun 2046. Jumlah timbulan sampah diperkirakan membutuhkan TPS sekitar 27-34 unit TPS pada tahun 2025-2045. Adapun titik rawan timbulan sampah, di Distrik Arso dan Skanto, sebagai pusat pemerintahan dan pemukiman padat. Pasar tradisional (Arso, Waris, Skanto) yang memproduksi banyak sampah organik dan plastik sekali pakai. Di Sekolah dan perkantoran yang dominan sampah kertas dan plastik. Di Kampung di perbatasan PNG yang cenderung buang sampah langsung ke lingkungan karena minim sarana TPS.

2.1.4. Aksesibiltas Transportasi dan Daya Dukung Lingkungan

Kabupaten Keerom menunjukkan dinamika pembangunan yang kuat di sektor infrastruktur dasar namun menghadapi tantangan serius pada sektor lingkungan. Akses jalan meningkat di wilayah Arso dan Skanto, mendukung konektivitas ekonomi ke Jayapura dan PLBN Waris. Rasio elektrifikasi mencapai rata-rata 63%, dengan perluasan jaringan PLN ke distrik padat penduduk dan penguatan PLTS di wilayah terpencil seperti Towe Hitam dan Web. Di sisi lain, deforestasi terjadi di Arso Barat dan Skanto akibat ekspansi perkebunan, sementara distrik di utara (Towe Hitam, Waris, Web) masih menyimpan tutupan hutan lebih dari 70%. Upaya rehabilitasi

lahan kritis dan pengembangan energi hijau (PLTS dan mikrohidro) menjadi prioritas kebijakan daerah hingga 2029. Secara umum, arah pembangunan Keerom menuju pola Infrastruktur Hijau Perbatasan, menyeimbangkan akses dasar, konektivitas, dan konservasi eko-sistem hutan perbatasan.

Tabel 2.6.
Estimasi Kondsi Jalan dan Jembatan per DistrikKabupaten Keerom

No	Distrik	Estimasi status kondisi jalan dan jembatan	Prioritas / temuan / bukti sumber
1	Arso	Sedang-Baik di koridor pusat	Arso sebagai pusat administratif lebih banyak ruas aspal; program preservasi dan pening-katan jalan diarahkan ke koridor ini.
2	Arso Timur	Sedang	Kondisi bercampur: beberapa akses provinsi/ kabupaten dalam kondisi terawat, namun jalan desa masih tanah/kerikil.
3	Arso Barat	Sedang-rentan	Ruas penghubung antar kampung banyak membutuhkan preservasi; topografi datar, berawa di beberapa bagian.
4	Skanto	Sedang / Rusak di beberapa ruas	Program peningkatan jalan kabupaten pernah disebut dalam berita lokal; butuh pemeliha-raan berkala.
5	Mannem	Sedang-rentan	Daerah pedalaman; jalan desa mayoritas tanah/kerikil, rentan longsor & terputus saat hujan
6	Web	Sedang-rentan	Infrastruktur jalan di distrik luar pusat cende-rung minim; banyak jalan yang memerlukan perbaikan.
7	Towe	Sedang-rentan	Kondisi serupa distrik pedalaman, keterba-tasan akses permanen dan perlunya jembatan kecil di beberapa sungai.
8	Yaffi	Sedang-rentan	Jalan desa belum mantap secara menyeluruh; butuh preservasi/penimbunan dan drainase.
9	Senggi	Sedang-rentan pada musim hujan	Ruas trans/akses antar kampung rawan longsor, ada rencana/pekerjaan jalan nasional/ ruas strategis.
10	Waris	Sedang, ada ruas utama, namun rawan longsor	longsor di KM-76 Waris yang memutus akses sementara dan pekerjaan rehabilitasi jembatan.
11	Kaisenar	Rusak-Rentan	Kondisi jalan dan jembatan lebih terbatas; wilayah terpencil memerlukan intervensi infrastruktur.

Sumber: Bappeda Keerom (2024); Dinas PUPR Keerom; Dinas ESDM Papua; Global Forest Watch, Maret 2025

Tabel 2.7.
Kondsi Jalan dan Tutupan Hutan Tersisa Per Distrik di Kabupaten Keerom

Distrik	Panjang Jalan (km)	Tutupan Hutan Tersisa (%)
1. Arso	182	58
2. Arso Timur	135	61
3. Arso Barat	97	49
4. Skanto	120	43
5. Towe Hitam	70	78
6. Waris	88	72
7. Senggi	105	67
8. Web	84	74
9. Yaffi	76	69
10. Yosuar	68	71
11. Arso Selatan	115	56
12. Mannem	94	63
Total/Rerata	1.234 Km	64% Hutan Tersisa

Sumber: Bappeda Keerom (2024); Dinas PUPR Keerom; Dinas ESDM Papua; Global Forest Watch, Maret 2025

2.1.5. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan.

a. Konsumsi Listrik

Ketahanan energi mengacu pada kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan energi yang stabil, terjangkau, dan berkelanjut an. Daya terpasang listrik dari PT PLN (Persero) Ranting Keerom pada tahun 2024 sebesar 30.847.450 kW, sedangkan produksi listrik pada tahun yang sama sebesar 37.131.420 kW. Jumlah pelanggan menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 (16.659 pelanggan) menjadi 22.213 pelanggan pada tahun 2024.

Publikasi *Kabupaten Keerom Dalam Angka [2024*] menyebut bahwa akses rumah tangga terhadap listrik (baik dari PLN maupun non-PLN) belum dijabarkan secara spesifik per kWh, tapi indikator akses penerangan menunjukkan bahwa rumah tangga yang menikmati listrik sudah mayoritas. Berdasar data Susenas dan Statistik Kesejahteraan Rakyat, pada tahun 2022 angka rumah tangga di Keerom yang memiliki sumber penerangan dari listrik (baik PLN/non-PLN) telah mencapai 87,09%. Sisanya menggunakan sumber selain listrik seperti lampu minyak atau lilin.

BPS Web API+2Badan Pusat Statistik Kabupaten Keerom Pada 2024, terdapat perkembangan infrastruktur signifikan: PLN berhasil menghadirkan listrik 24 jam penuh untuk lima kampung di Keerom [Kampung Banda, Pund, Ampas, Skofro, dan Uskuwar], melalui pembangunan jaringan tegangan menengah sepanjang 28,75 km, jaringan tegangan rendah 17,51 km, dan 11 gardu distribusi dengan total daya 575 kVA.

Tabel 2.8.
Akses & Estimasi Konsumsi Listrik Kabupaten Keerom, 2021-2024

Tahun/ Periode	Indikator	Data Utama	Estimasi Konsumsi kWh (per tahun)	Sumber
2021	Rumah tangga PLN bermeter	85,50% dari total RT	-	BPS Papua
2021	Rumah tangga PLN tanpa meter	0,86% dari total RT	-	BPS Papua

Tahun/ Periode	Indikator	Data Utama	Estimasi Konsumsi kWh (per tahun)	Sumber
2021	Rumah tangga non-listrik/ alternatif	12,2% dari total RT	-	BPS Papua
2022	Penambahan listrik 6 kampung	474 pelanggan baru (daya 900 VA)	≈ 1,49 juta kWh/tahun	PLN UIW Papua
Mei 2024	Perluasan listrik 5 kampung (Ampas, skuwar, Skofro, Banda, Pund)	JTM 28,75 km; JTR 17,51 km; 11 gardu (575 kVA)	≈ 2,01 juta kWh/tahun	PLN UIW Papua

Sumber: Kabupaten Keerom Dalam Angka Tahun 2025, data primer PLN.

PLN juga mempersiapkan sambungan listrik untuk 358 calon pelanggan di kampung-kampung tersebut, dengan persentase rumhtangga yang terlayani antara 79.2% hingga tertinggi 96.7%. Ini menandai langkah nyata peningkatan kapasitas dan cakupan, walau belum ada data publik tentang konsumsi listrik dalam kWh secara rinci per pelanggan.

Tabel 2.9.
Persentase Akses Listrik Rumahtangga dan Kapasitas Pasokan Per Distrik di Kabupaten Keerom, Tahun 2024

No	Distrik	% RT Akses Listrik (2024)	Kapasitas Listrik (MW)
1	Arso	98.2	6.5
2	Arso Barat	96.7	4.8
3	Arso Timur	92.9	3.1
4	Arso Utara	91.5	2.0
5	Skanto	97.4	5.0
6	Waris	88.3	1.5
7	Web	84.6	1.2
8	Towe	81.0	1.0
9	Senggi	86.5	1.8
10	Yaffi	83.9	0.8
11	Kaisenar	90.1	2.2
12	Mannem	89.4	1.9
13	Yosuarso	87.2	1.4
14	Wembi	85.5	1.1
15	Osmolik	82.0	0.9
16	Tatangga	84.3	1.0
17	Timbul	80.9	0.8
18	Bembi	83.5	0.9
19	Senggo	81.8	1.0
20	Kikori	79.2	0.7

Sumber : BPS Keerom2024, RUPTL PLN Papua 2024-2033, PUPR Papua

b. Konsumsi Air Minum

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Keerom, bertambah secara signifikan

dari tahun 2021. Pada 2020, rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak sebesar 22,71% dan meningkat menjadi 79,27% pada tahun 2022.

Tabel 2.10
Perbandingan Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak Provinsi Papua dan Kabupaten Keerom Tahun 2020-2023

No	Rincian	2020	2021	2022	2023
1	Provinsi Papua	30.23	64.92	65.39	66.49
2	Kab.Keerom	22.71	75.67	79.27	29.50

Sumber: Hasil Susenas, BPS

Data Tahun 2024 mnunjukkan bahwa akses air bersih per rumah tangga terlayani antara 43.5% di Kikori hingga tertinggi 42.4% di Arso, dengan kapasitas pasokan sebanyak 163 per detik. Terbanyak di Distrik Arso (55 liter per detik) dan 12 lokasi lainnnya hanya maksimal sebanyak 2-5 liter per detik.

Tabel 2.11.
Persentase Akses Air Bersih Rumahtangga dan Kapasitas Pasokan Per Distrik di Kabupaten Keerom, Tahun 2024

No	Lokasi (Distrik/Kampung)	% RT Akses Air Bersih (2024)	Kapasitas Air Bersih (L/det)
1	Arso	82.4	55
2	Arso Barat	75.1	20
3	Arso Timur	69.8	10
4	Arso Utara	65.2	8
5	Skanto	77.6	15
6	Waris	58.2	5
7	Web	52.0	4
8	Towe	48.5	3
9	Senggi	56.7	6
10	Yaffi	51.0	2
11	Kaisenar	61.5	7
12	Mannem	59.9	6
13	Yosuarso	54.2	4
14	Wembi	50.3	3
15	Osmolik	47.8	3
16	Tatangga	49.6	3
17	Timbul	46.2	2
18	Bembi	49.0	2
19	Senggo	45.8	3
20	Kikori	43.5	2

Sumber: BPS Keerom 2023–2024, PDAM/SPAM Keerom dan PUPR Papua.

c. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat, yang ditunjukkan oleh ketersediaan pangan dalam jumlah cukup, mutu terjamin, aman dikonsumsi, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Pemenuhan pangan tersebut juga harus selaras dengan nilai agama, keyakinan, dan budaya lokal, sehingga mampu mendukung kehidupan masyarakat yang sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilaksanakan secara terpadu lintas sektor dengan pendekatan sistemik.

Upaya ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan pangan melalui produksi domestik dan perdagangan, menjaga stabilitas pasokan dan akses pangan di tingkat makro, meso, dan mikro, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan. Dukungan infrastruktur dan kebijakan ekonomi makro yang stabil menjadi prasyarat utama agar pasokan dan harga pangan tetap terjamin.

Untuk menilai tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, digunakan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun berdasarkan definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuknya. Data IKP Kabupaten Keerom menunjukkan tren positif selama periode 2020–2023. Nilai IKP meningkat secara konsisten dari 60,24 pada tahun 2020 menjadi 71,92 pada tahun 2023.

Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan signifikan dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas konsumsi pangan. Dengan demikian, Keerom berada pada jalur penguatan ketahanan pangan, meskipun masih diperlu kan konsistensi kebijakan, peningkatan kapasitas produksi, dan perbaikan distribusi agar pencapaian tersebut dapat berkelanjutan. Adapun prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) di Kabupaten Keerom sebesar 47,9% pada 2023, naik dari 38,99% tahun sebelumnya.

Tabel 2.12
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024

No	Rincian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks ketersediaan	37.72	48.84	-	75.85	-
2	Indeks Keterjangkauan	75.67	71.85	73.57	73.29	-
3	Indeks pemanfaatan	65.55	62.94	56.13	67.94	-
4	Indeks ketahanan pangan:					
	- Provinsi Papua	34.79	35.48	37.80	42.27	
	- Kabupaten Keerom	60.24	61.38	-	71.92	54.23

Sumber: Badan Pangan Nasional

IKP tahun 2024 Kabupaten Keerom berada pada pada posisi 54.23 (skala 0-100), termasuk kategori “rentan sedang”, digunakan sebagai nilai dasar. Dengan asumsi, perbaikan kebijakan *(smart farming, food estate, proteksi sosial*), akan ada peningkatan per tahun. Ditunjang dengan risiko iklim dan inflasi pangan sehingga dapat diturunkan, serta moderate *risk/severe risk* yang dapat memperlambat kenaikan atau stagnan atau sedikit dalam beberapa tahun yang lalu. Asumsi ambang prioritas, jika IKP turun mendekati atau di bawah 50 poin, itu menunjukkan kategori rentan yang memerlukan intervensi cepat (stok pangan, proteksi sosial, program gizi). Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, dapat dipro-yeksikan IKP Keerom 2025-2029, mencakup dimensi moderate risk (+0.50/tahun), severe risk (−2.00 shock 2025;−1.50/ tahun) dan resilience-policy (+2.00/tahun).

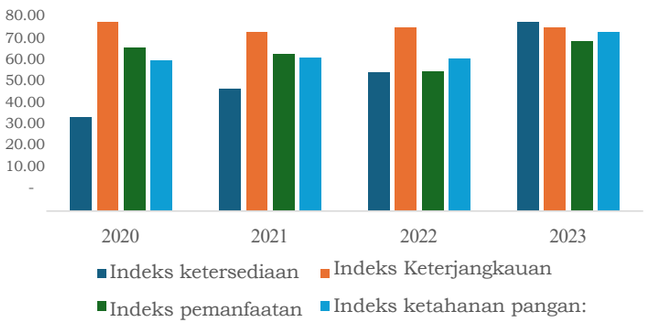
d.Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) mengukur proporsi penduduk yang asupan energinya tidak memenuhi kebutuhan minimum untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Di Kabupaten Keerom, PoU turun tajam dari 47,90% pada 2023 menjadi 37,83% pada 2024. Penurunan 10,07 poin persentase ini setara perbaikan relatif sekitar 21% dalam satu tahun. Secara teknis, ini sinyal membaiknya kecukupan energi pada sebagian rumah tangga, walau level 2024 tetap tinggi dan menuntut penanganan ber-kelanjutan. Angka 2023 bersumber dari tabel PoU

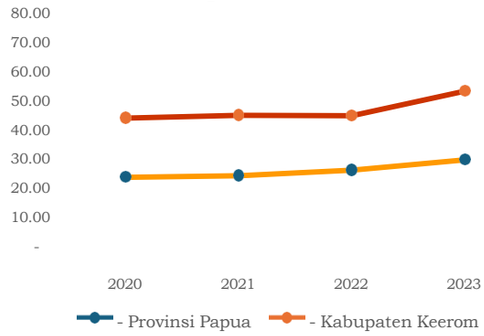
kabupaten/kota 2023, sedangkan angka 2024 berasal dari rilis PoU kabupaten/kota 2024 di portal statistik BPS.Sebagai indikator SDG's, PoU dipakai untuk menilai kerawanan pangan; definisinya merujuk pada metodologi resmi BPS/FAO tentang kecukupan energi penduduk.

Penurunan PoU Keerom 2024 perlu dikunci menjadi tren, melalui bauran kebijakan di empat pilar ketahanan pangan: ketersediaan (produksi dan pasokan), akses (daya beli dan harga), pemanfaatan (diversifikasi dan layanan gizi), serta stabilitas (fluktuasi musiman). Prioritas teknis yang lazim efektif mencakup pengendalian inflasi pangan, perbaikan distribusi ke wilayah sulit, penguatan jaring pengaman sosial, serta intervensi gizi spesifik dan sensitif. Semua interpretasi tersebut konsisten dengan penggunaan PoU oleh BPS dan Badan Pangan Nasional sebagai alat ukur kerawanan pangan.

Gambar 2.5
Perubahan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Keerom



Gambar 2.6
Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Keerom



Sumber: Data diolah, Tahun 2025

Dengan demikian, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) di Kabupaten Keerom menunjukkan perbaikan signifikan, turun dari 47,90% pada 2023 jadi 37,83% pada 2024, atau berku-rang sekitar 10 poin persentase dalam satu tahun. Penurunan ini menandakan semakin banyak rumah tangga yang mampu meme-nuhi kebutuhan energi hariannya, meskipun kondisi masih rentan karena hampir 2 dari 5 penduduk Keerom tetap berada dalam kategori rawan pangan. Dengan demikian, capaian ini perlu dijaga melalui strategi konsisten di empat pilar ketahanan pangan, ketersediaan, akses, peman-faatan, dan stabilitas agar perbaikan yang terjadi tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan dalam jangka panjang.

2.1.6. Lingkungan Hidup Berkualitas

Pegendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, meliputi indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Timbulan Sampah Terolah, Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah.

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai komposit yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH diperoleh dari gabungan beberapa indeks kualitas, seperti Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKLH digunakan sebagai indikator untuk memantau kondisi lingkungan, mendukung pengambilan keputusan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada publik. IKLH Kabupaten Keerom pada tahun 2022 tercatat sebesar 60,13 (SISKLHK), kemudian meningkat menjadi 77,70% pada tahun 2023, dan menurun menjadi 76,64% pada tahun 2024.

Tabel 2.13
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom

No	Rincian	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,13	77,70	76,64

Sumber: LPPD Kabupaten Keerom Tahun 2022-2024

Akan tetapi dalam pengelolaan hutan primer, hutan sekunder, hutan rawa primer, dan hutan rawa sekunder di Kabupaten Keerom masih memiliki kendala yang memerlukan tindak lanjut secara terpadu dan bersinambungan menjaga kualitas lingkungan hidup. Adapun proyeksi potensi pengurangan deforestasi dan rehabilitasi lahan kritis di Kabupaten Keerom ke depan, Tahun 2025-2029, disusun berdasarkan informasi dan asumsi konservatif, seperti berikut ini.

Tabel 2.14
Proyeksi Potensi Pengurangan Deforestasi dan Rehabilitasi Lahan Kritis Di Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029

Tahun	Target Rehabilitasi/Replanting/ Reforestasi (ha)	Estimasi Pengurangan Deforestasi / Degradasi (%) tahunan relatif ke baseline)
2025	~ 1.500 ha	−1,0 %
2026	~ 2.000 ha	−1,5 %
2027	~ 2.500 ha	−2,0 %
2028	~ 3.000 ha	−2,5 %
2029	~ 3.500 ha	−3,0 %

Sumber: KLHS Kabupaten Keerom, Diolah Tahun 2025

Dampak Lingkungan yang akan mempengaruhi faktor ekonomi, terutama dikaitkan dengan upaya peningkatan ketahanan pangan dalam 5 tahun ke depan, diantisipasi dengan proyeksi rekayasa lahan kritis kecil direhabilitasi, mengurangi degradasi, produksi pangan sedikit meningkat; pendapatan lokal sedikit naik. Hal ini dapat menimbulkan efek kumulatif terhadap stabilisasi tanah dan air, penurunan erosi dan manfaat iklim lokal.

Dengan demikian, pada Tahun 2027, diharapkan mulai terlihat perbaikan rantai pasokan pertanian, lebih banyak area produktif, kualitas air dan iklim mikro membaik. Dan pada Tahun 2028, dapat diperoleh manfaat lingkungan lebih jelas dengan kapasitas mitigasi iklim yang kian meningkat serta peluang wisata dan ekosistem meningkat. Pada tahun terakhir di 2029, secara total terjadi pengurangan deforestasi signifikan, di mana ketahanan pangan diperkuat, peningkatan pendapatan petani dan pengurangan emisi karbon lokal.

b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Sanitasi aman adalah kondisi di mana rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat dan digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Pada tahun 2023 sebesar 81,09% rumah tangga di Kabupaten Keerom sudah memiliki fasilitas jamban sendiri. Rumah tangga yang menggunakan fasilitas jamban secara bersama dan umum, masing-masing sebesar 5,42% dan 3,33%. Sisanya sebanyak 9,90% adalah

tidak ada fasilitas tempat buang air besar (Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Keerom 2024).

Penggunaan jamban sendiri atau bersama dengan tangki septik merupakan indikator fasilitas rumah tinggal yang berguna dalam mendukung tersedianya sanitasi layak. Akses ke fasilitas sanitasi yang memadai merupakan dasar untuk mengurangi resiko penyakit yang ditimbulkan oleh tinja seperti diare pada anak-anak. Berdasar kan hasil SUSENAS, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak di Kabupaten Keerom pada tahun 2023 sebesar 90,10%. Dengan kata lain, masih ada 9,90% rumah tangga tidak memiliki fasilitas jamban sendiri atau bersama dengan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Keerom secara umum masih bersifat tradisional dan belum sepenuhnya efektif dalam menangani volume sampah yang dihasilkan. Pengelolaan sampah organik di Kampung Yuwanain, Distrik Arso, menunjukkan bahwa sistem yang ada perlu ditingkatkan.

2.1.7. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Dideskripsikan tentang kemampuan masyarakat, infrastruk tur, dan ekosistem untuk bertahan dan bangkit kembali setelah terkena dampak peristiwa ekstrim atau perubahan lingkungan, dengan beberapa indikator seperti penurunan intensitas emisi GRK, Indeks Resiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah, dan indikator lainnya.

a. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan upaya penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai langkah seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan penggunaan energi terbaru kan. Kabupaten Keerom, seperti halnya wilayah lain di Indonesia, menghadapi tantangan perubahan iklim yang memerlukan upaya mitigasi GRK yang serius. Penurunan intensitas emisi GRK tidak hanya penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

b. Indeks Resiko Bencana

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 2024, bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Papua adalah bencana banjir dan gelombang pasang, dan abrasi. Pengukuran Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024 pada Provinsi Papua memiliki kelas risiko sedang dengan nilai 137,43. Ancaman bencana di wilayah ini adalah gempa bumi, banjir, tanah longor, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang ekstrim, abrasi.

Indeks Risiko Bencana adalah ukuran komposit yang menggambarkan potensi risiko suatu wilayah terhadap bencana, terdiri dari komponen utama:

1. Bahaya/ancaman *(Hazard):* jenis bencana yang bisa terjadi (banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dll.), frekuensi & intensitasnya.
2. Kerentanan *(Vulnerability)*: kondisi fisik dan sosial yang membuat suatu komunitas lebih atau kurang rentan terhadap bahaya: misalnya kemiskinan, kepadatan penduduk, kualitas bangunan, akses ke sarana evakuasi.
3. Kapasitas/kekebalan (*Capacity/Resilience):* kemampuan daerah dan masya rakat untuk mengurangi dampak, misalnya sistem peringatan dini, kesiap

siagaan, infrastruktur tahan bencana, kesiapan BPBD, mitigasi struktural dan nonstruktural.

4. Secara spesifik, tidak ditemukan data skor publik yang lengkap tentang Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Keerom yang menyebut IRB Keerom. Tetapi, (IRBI 2024, BNPB), menyebutkan bahwa Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Keerom termasuk resiko sedang dan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2015-2024, yakni sebesar 127.20, disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan. Beberapa pengalaman yang terjadi di Kabupaten Keerom, seperti:
   - Banjir: pernah ditetapkan status tanggap darurat untuk banjir. Kawasan yang terdampak cukup banyak, dan InaRISK melaporkan bahwa beberapa kecamatan di Keerom berada dalam potensi risiko banjir sedang hingga tinggi.
   - Tanah Longsor: Beberapa distrik mengalami ancaman longsor, dan kejadian longsor nyata terjadi (termasuk korban jiwa).
   - Gempa Bumi: Kabupaten Keerom dianggap rawan gempa karena ada struktur sesar naik. Gempa kuat pernah dirasakan (magnitudo 6,2) dan gempa magnitude 5-6 kedalaman menengah.

c. Indeks Ketahanan Daerah

IKD sering dipakai sebagai bagian dari penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), di mana IKD menggambarkan aspek kapasitas lokal. IKD merupakan bagian dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan menjadi acuan dalam pemantauan serta evaluasi pembangunan resiliensi daerah. IKD mengukur dan memetakan potensi risiko dan strategi penanggulangan yang efektif. Berikut beberapa data relevan sebagai acuan penting:

- Keerom termasuk daerah tertinggal menurut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, sehingga dinilai memiliki tantangan dalam aspek SDM, sarana dan prasarana.
- Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekitar 66,49 - 66,69%.
- Persentase Penduduk Masyarakat (PPM) sekitar 16% (yakni bagian penduduk yang diperkirakan kurang sejahtera).
- Angka ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) cukup tinggi [47,9%] tahun 2023, yang menunjukkan kerawanan gizi/pangan.

2.1.8. Demografi

Penjelasan mengenai karakteristik demografi berdasarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, keberadaan masyarakat adat, dan karakteristik lain, dilengkapi dengan proyeksi dan analisis penduduk selama 5 tahun ke depan.

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kabupaten Keerom pada tahun 2024 tercatat berjumlah 74.332 jiwa. Penduduk terbanyak berada di Distrik Arso dan Distrik Skanto, sedangka paling sedikit berada di Distrik Kaisenar. Pertumbuhan penduduk rata-rata Kabupaten Keerom adalah 4.77% sejak tahun 2020 sampai 2024.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Keerom
Tahun 2020-2024

No	Distrik	Penduduk (Jiwa)		% Laju Pertumbuhan (4 tahun-Eksponensial)
		2020	2024	
1	Arso	15,190	19,371	6.17
2	Arso Barat	11,823	13,796	3.93
3	Arso Timur	3,163	5,094	11.91

No	Distrik	Penduduk (Jiwa)		% Laju Pertumbuhan (4 tahun-Eksponensial)
		2020	2024	
4	Kaisenar	350	420	4.56
5	Mannem	4,397	4,617	1.22
6	Senggi	2,695	2,978	2.61
7	Skanto	17,000	18,708	2.38
8	Towe	896	1,073	4.56
9	Waris	3,425	4,425	6.37
10	Web	1,483	1,657	2.83
11	Yaffi	1,201	2,193	15.11
Kab.Keerom		61,623	74,332	4.77

Sumber: Kabupaten Keerom Dalam Angka, Tahun 2021-2025

Distik Skanto memiliki jumlah penduduk paling banyak dibandingkan distrik lainnya, tahun 2020 sebanyak 17,000 jiwa meningkat 2.38% pada tahun 2024 menjadi 18.708 jiwa. Selain itu, distrik Arso dan Arso Barat cukup banyak konsentrasi penduduk, namun jika ditinjau dari laju pertumbuhan maka Distrik cukup tinggi percepatan pertumbuhan Penduduk dari tahun 2020-2024 sebesar 6.17%. Namun secara keseluruhan laju pertumbuhan tertinggi pada distrik Yaffi mencapai angka 15.11%. Secara umum, distrik Arso sebagai tujuan penduduk karena dipengaruhi oleh Pusat Pemerintahan Kabupaten Keerom, selain itu juga aktifitas ekonomi masih berpusat pada distrik Arso. Sedangkan untuk disrik Arso Barat, Skanto dan Yaffi secara khusus hal ini disebabkan adanya Transmigrasi, dan juga ketiga distrik ini memiliki lokasi strategis dari segi akses Potensi Ekonomi Lokal.

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Keerom pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,84 jiwa/km^2. Distrik Arso Barat memiliki tingkat kepadatan tertinggi yaitu 85,70 jiwa/km^2, sedangkan yang terendah di Towe, Senggi dan Kaisenar. Beberapa daerah memiliki tingkat kepadatan di atas rata-rata kebupaten, yakni Distrik Arso Barat, Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Mannem, dan Distrik Skanto. Distrik yang memiliki tingkat kepadatan di atas rata-rata kabupaten berada di bagian utara.

Tabel 2.16
Kepadatan Penduduk Kabupaten Keerom Tahun 2024

No	Distrik	Luas (km2)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
1	Arso	1,065.07	19,371	18.19
2	Arso Barat	160.98	13,796	85.70
3	Arso Timur	600.27	5,094	8.49
4	Kaisenar	910.22	420	0.46
5	Mannem	191.32	4,617	24.13
6	Senggi	2,675.52	2,978	1.11
7	Skanto	692.59	18,708	27.01
8	Towe	999.02	1,073	1.07
9	Waris	1,052.30	4,425	4.21
10	Web	614.70	1,657	2.70
11	Yaffi	516.19	2,193	4.25
Kab. Keerom		**9,478.18**	**74,332**	**7.84**

Sumber: BPS Kabupaten Keerom, Data diolah 2025

c. Struktur Umur

Dilihat berdasarkan bentuk piramida penduduk yang ekspansif mencirikan struktur penduduk di Kabupaten Keerom adalah struktur penduduk usia muda. Penduduk usia muda (5-9 tahun dan 10-14 tahun) dominan. Selain itu, bentuk piramida yang gemuk, terutama di antara usia 20-49 tahun mengindikasikan bahwa penduduk usia yang sangat produktif lebih dominan dibandingkan yang non produktif. Adapun bentuk kerucut piramida mengecil memvisualisasikan usia harapan hidup di Kabupaten Keerom.

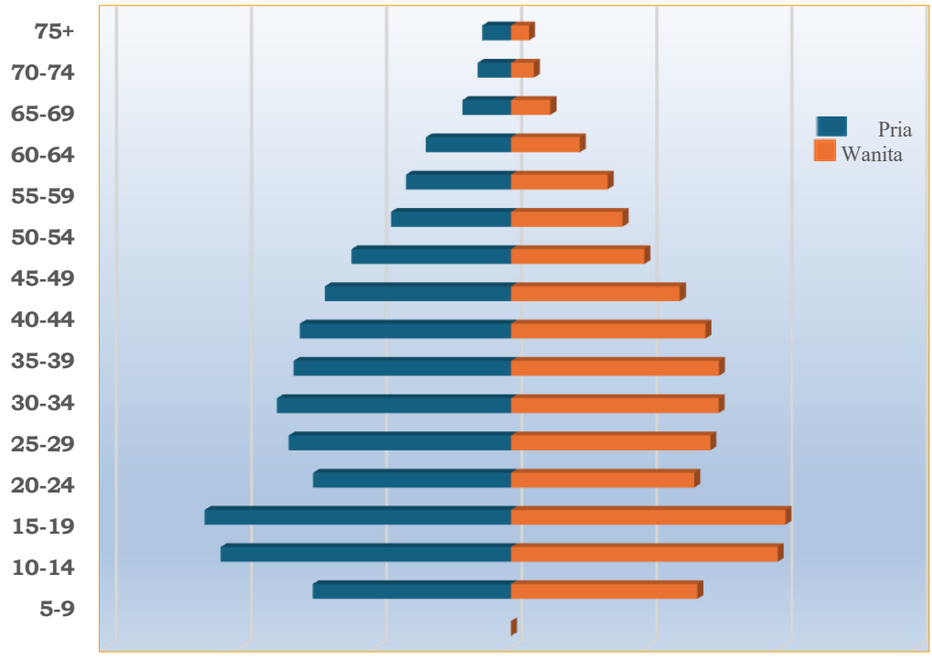
Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur Kabupaten Keerom Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	2,932	2,759	5,691
5-9	4,294	3,949	8,243
10-14	4,533	4,062	8,595
15-19	2,927	2,713	5,640
20-24	3,288	2,950	6,238
25-29	3,461	3,074	6,535
30-34	3,217	3,079	6,296
35-39	3,124	2,878	6,002
40-44	2,755	2,498	5,253
45-49	2,357	1,974	4,331
50-54	1,774	1,651	3,425
55-59	1,551	1,430	2,981
60-64	1,260	1,020	2,280
65-69	717	583	1,300
70-74	491	340	831
75+	424	267	691
Total	39,105	35,227	74,332

Sumber: Kabupaten Keerom Dalam Angka, Tahun 2025

Kondisi struktur kependudukan Kabupaten Keerom, menurut Kelompok usia belum produktif (0-14 tahun): Anak-anak yang belum dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan, hal utama menjadi perhatian bahwa kelompok umur 0-4 tahun sekitar 5,691 jiwa artinya mereka sangat membutuhkan topangan jaminan kesehatan karena tergolong masa kesemasan. Selain itu juga usia 5-14 tahun cukup tinggi, sehingga Kabupaten Keerom memerlukan pelayanan kesehatan dan pendidikan anak secara menyeluruh hingga pada kampung-kampung, terkhusus wilayah perbatasan RI-PNG. Kelompok usia produktif (15–64 tahun): Penduduk dianggap mampu bekerja dan menghasilkan uang, untuk menopang diri sendiri serta penduduk usia non-produktif. Artinya bahwa usia ini memberikan dampak positif bagi Kabupaten Keerom, dimana dari segi ketersediaan Tenaga Kerja guna mendukung prioritas pembangunan di Kabupaten Keerom, pada kelompok usia ini juga sebagai kaum milenial, sehingga kelompok ini menjadi prioritas subjek pembangunan di Kabupaten Keerom. Namun jika tidak dimaksimalkan secara inklusif, tentunya potensi ini akan memberikan eksternalitas, yang mana akan memberikan dampak ekstra bagi pemerintah daerah Kabupaten Keerom terkait jaminan sosial bagi masyarakat. Kelompok usia tidak produktif (65 tahun ke atas): Penduduk lansia yang sudah tidak lagi bekerja secara aktif, terlihat cukup sedikit, dibandingkan dengan kelompok usia produktif di Kabupaten Keerom.

Gambar 2.7.
Piramida Penduduk Kabupaten Keerom Tahun 2024



Sumber: Kabupaten Keerom Dalam Angka, Tahun 2025

Struktur umur penduduk Kabupaten Keerom, digunakan untuk menghitung rasio ketergantungan (dependency ratio), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif dengan penduduk usia produktif. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai kelompok usia muda dan tua. Kondisi Piramida Penduduk Kabupaten Keerom, terlihat menunjukan karakteristik ekspansif dimana penduduk usia Tua atau Lansia cenderung sedikit dibandingkan dengan usia muda atau produktif. Menunjukkan pertumbuhan penduduk Kabupaten Keerom cukup tinggi, hal ini dapat dipicu oleh migrasi penduduk atau angka kelahiran. Kondisi ini juga sering dikaitkan dengan bonus demografi, yaitu saat penduduk usia produktif lebih besar dari non-produktif.

d. Proyeksi Penduduk

Proyeksi Penduduk Kabupaten Keerom, untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan, seperti penyediaan infrastruktur, pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan lain sebagainya.Dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 4,77% per tahun (BPS Kabupaten Keerom), Laju pertumbuhan penduduk wilayah ini tergolong cukup tinggi. Diproyeksikan, pada tahun 2029 penduduk Kabupaten Keerom mencapai 67.280 jiwa.

Tabel 2.18.
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Keerom
Tahun 2025-2029

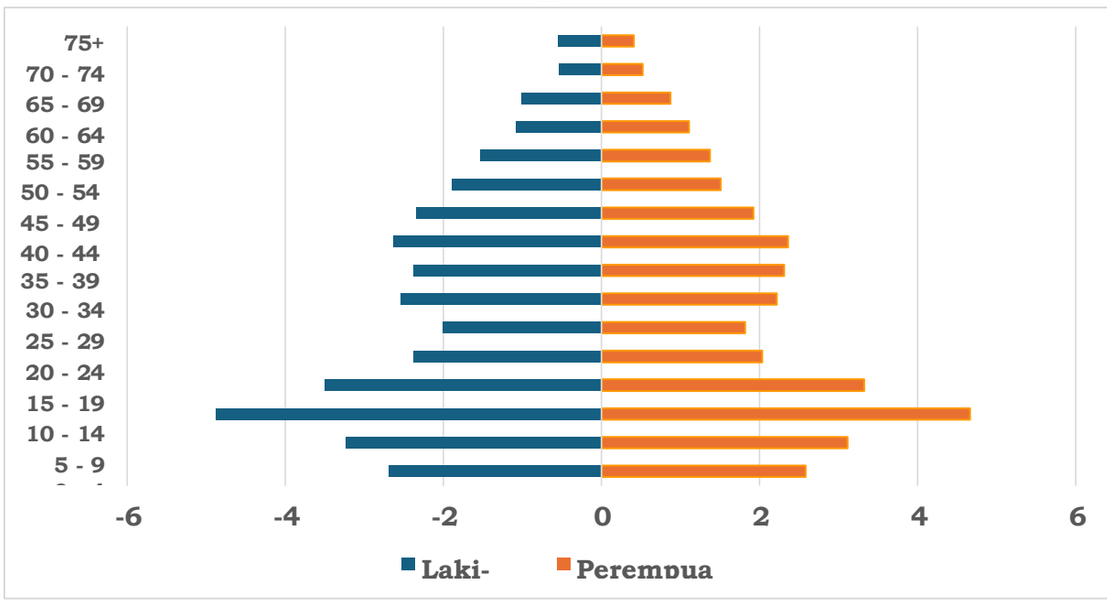
Kelompok Umur	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	2025	2026	2027	2028	2029
0 - 4	5.43	5.38	5.33	5.29	5.27
5 - 9	9.88	9.13	8.28	7.34	6.34
10 - 14	7.41	7.97	8.53	9.06	9.53
15 - 19	4.85	5.27	5.75	6.27	6.82
20 - 24	3.83	3.83	3.93	4.12	4.39
25 - 29	4.74	4.56	4.31	4.05	3.84
30 - 34	4.69	4.67	4.71	4.76	4.75

Kelompok Umur	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	2025	2026	2027	2028	2029
35 - 39	5.06	5.02	4.92	4.80	4.70
40 - 44	4.53	4.68	4.82	4.93	4.99
45 - 49	3.60	3.73	3.89	4.08	4.26
50 - 54	3.18	3.25	3.30	3.34	3.40
55 - 59	2.40	2.49	2.61	2.77	2.90
60 - 64	2.22	2.25	2.23	2.20	2.19
65 - 69	1.38	1.50	1.64	1.77	1.88
70 - 74	0.87	0.91	0.95	1.00	1.06
75+	0.78	0.81	0.86	0.90	0.96
Kab.Keerom	64.850	65.450	66.060	66.680	67.280

Sumber: Bapperida Kabupaten Keerom

Proyeksi tahun 2025 mencapai 64.840 jiwa meningkat menjadi 67.280 jiwa di tahun 2029, tentunya peningkatan penduduk ini memperhatikan harapan Kabupaten Keerom kedepan, dimana memiliki potensi SDA namun masih membutuhkan SDM. Sehingga hal ini sejalan dengan tujuan Keerom kedepan untuk mengoptimalkan lahan pertanian, perkebunan dan perikanan di Kabupaten Keerom. Proyeksi data penduduk berdasarkan kelompok usia sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan program dan kegiatan Pembangunan disetiap daerah. Perencanaan dilakukan dalam rangka mengakomodir kebutuhan dan keberadaan penduduk perempuan untuk turut serta memaksimalkan perannya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah

Gambar 2.8.
Piramida Penduduk Kabupaten Keerom Tahun 2029



Sumber: Bapperida Kabupaten Keerom

Proyeksi dengan kurun waktu ini dimaksudkan agar hasilnya dapat digunakan untuk berbagai keperluan terutama untuk perencanaan jangka menengah Kabupaten Keerom.Tidak jauh berbeda harapan proyeksi berdasarkan kondisi 2024 bahwa karakteristik Piramida Penduduk Tahun 2029 di Kabupaten Keerom, ekspansif dimana penduduk usia Tua atau Lansia cenderung sedikit dibandingkan dengan usia muda atau produktif. Menunjukkan pertumbuhan penduduk Kabupaten Keerom cukup tinggi, hal ini dapat dipicu oleh migrasi penduduk atau angka kelahiran. Kondisi ini juga sering dikaitkan dengan bonus demografi, yaitu saat penduduk usia produktif lebih besar dari non-produktif.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini memuat enam aspek yang berusaha menggambarkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Keerom secara umum, meliputi kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, agama, budaya, dan kondisi keluarga serta pengarustamaan gender. Distribusi kesejahteraan di Kabupaten Keerom, masih belum merata antar distrik dan kampung, dengan kesenjangan struktural yang kuat antara wilayah utara (Arso–Skanto) dan wilayah perbatasan selatan (Waris–Towe–Yaffi). Arah kebijakan pembangunan daerah perlu menitikberatkan pada pemerataan akses, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kapasitas SDM perdesaan, agar transformasi menuju kesejahteraan merata dapat dicapai pada 2029.

Kabupaten Keerom merupakan wilayah perbatasan negara dengan struktur sosial ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer (pertanian, perkebunan, dan kehutanan). Kesejahteraan cenderung menurun ke arah selatan dan timur, seiring dengan meningkatnya tingkat keterpencilan dan penurunan kualitas infrastruktur dasar. Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi aksesibilitas, infrastruktur dasar, dan keterhubungan antar-distrik. Menurut data BPS Keerom, bahwa:

- Persentase penduduk miskin tahun 2023 sebesar 30,12%, turun dari 32,6% pada 2020, namun masih di atas rata-rata Provinsi Papua (26,3%).
- Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan: ±Rp 1,19 juta (kategori rendah-menengah).
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2023: 61,34, menunjukkan capaian kategori “sedang”, dengan ketimpangan antar-distrik yang cukup signifikan.

Tabel 2.19.
Akses Infrastuktur dan Tingkat Kesejahteraan
Per Distrik Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029

Distrik	Ciri Ekonomi Utama	Akses dan Infra-struktur	Tingkat Kesejahteraan (Relatif)	Keterangan
Arso	Pertanian, perdagangan, perbatasan	Baik	Tinggi-Menengah Atas	Pusat administrasi dan ekonomi; peng-gerak utama PDRB.
Skanto	Perkebunan, hortikultura, jasa	Baik	Menengah Atas	Pertumbuhan pesat karena konektivitas Jayapura-Waris.
Waris	Pertanian sub-sisten, kehutanan	Sedang–kurang	Menengah Bawah	Jauh dari pusat kota, potensi SDA belum optimal.
Senggi	Pertanian lahan kering, kehutanan	Kurang	Menengah Bawah	Wilayah dataran tinggi; infrastruktur terbatas.
Arso Timur	Perkebunan kelapa sawit, pangan	Sedang	Menengah	Potensi besar, tapi ketimpangan antar kampung tinggi.
Web	Hutan lindung, pertanian sub-sisten	Kurang	Rendah	Daerah tertinggal dengan akses jalan terbatas.
Towe	Pertanian sub-sisten, hutan, batasan PNG	Sangat kurang	Rendah Sekali	Isolasi geografis tinggi, keterbatasan layanan publik.
Yaffi	Lahan perta-nian danhutan adat	Sangat kurang	Rendah Sekali	Terpencil; ketergan-tungan tinggi pada bantuan sosial.

Sumber: BPS Keerom 2023-2024, Susenas Provinsi Papua 2023, Badan Pangan Nasional 2023, Profil Ketahanan Pangan Kab Keerom, Peta P3KE Provinsi Papua.

Ketimpangan antar-kampung, ditunjukkan bahwa dari semua kampung di Kabu-paten Keerom, terdapat:

- Sekitar 25 kampung (27%) tergolong sejahtera atau mandiri, sebagian besar di Distrik Arso dan Skanto.
- Sekitar 40 kampung (44%) tergolong rentan, dengan ketergantungan tinggi terhadap program bantuan sosial.
- Sekitar 26 kampung (29%) tergolong sangat tertinggal, terutama di Distrik Web, Towe, Yaffi, dan Senggi.

Ciri utama kampung dengan kesejahteraan rendah adalah tingkat pendidikan kepala keluarga rendah (<SD), ketergantungan utama pada pertanian subsisten (tanpa pasar tetap), Akses ke jalan, listrik, dan air bersih terbatas, Angka stunting anak tinggi (>35%), dan Pengeluaran rumah tangga untuk pangan >65% total pengeluaran. Adapun faktor penentu ketimpangan, meliputi:

- Aksesibilitas dan infrastruktur: Distrik dekat pusat ekonomi (Arso, Skanto) memiliki kesejahteraan lebih tinggi karena konektivitas ke Jayapura dan fasilitas publik.
- Struktur Ekonomi: Wilayah selatan dan perbatasan (Towe, Yaffi) belum terkoneksi dengan rantai nilai ekonomi regional.
- Aset alam dan produktivitas lahan: Dataran rendah subur lebih sejahtera dibanding daerah perbukitan curam dan hutan.
- Pelayanan Dasar (pendidikan, kesehatan, air, listrik): Rasio fasilitas dan tenaga layanan masih timpang antar-distrik.
- Modal sosial dan kelembagaan adat: Kampung dengan tata kelola adat kuat (seperti di Senggi dan Waris) lebih tangguh terhadap kemiskinan ekstrim.

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan kondisi yang mencerminkan tingkat kemakmuran dan kualitas hidup masyarakat suatu daerah. Untuk mengukur kesejahteraan ekonomi, digunakan beberapa indikator penting, antara lain pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi, tingkat kemiskinan yang menggambarkan persentase penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan, dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita sebagai ukuran rata-rata pendapatan masyarakat. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka digunakan untuk mengetahui proporsi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan, sedangkan Indeks Gini mencerminkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Indikator lainnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengukur capaian pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 Kabupaten Keerom masih jauh di bawah Provinsi Papua yaitu sebesar 5,22% (BPS Provinsi Papua, 2024) dan Nasional sebesar 5,05 (BPS Indonesia, 2024).

2.2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang digunakan untuk melihat pergerakan ekonomi di suatu daerah. PDRB yang merupakan total dari nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan perekonomian yang ada di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh proses pembangunan daerah.

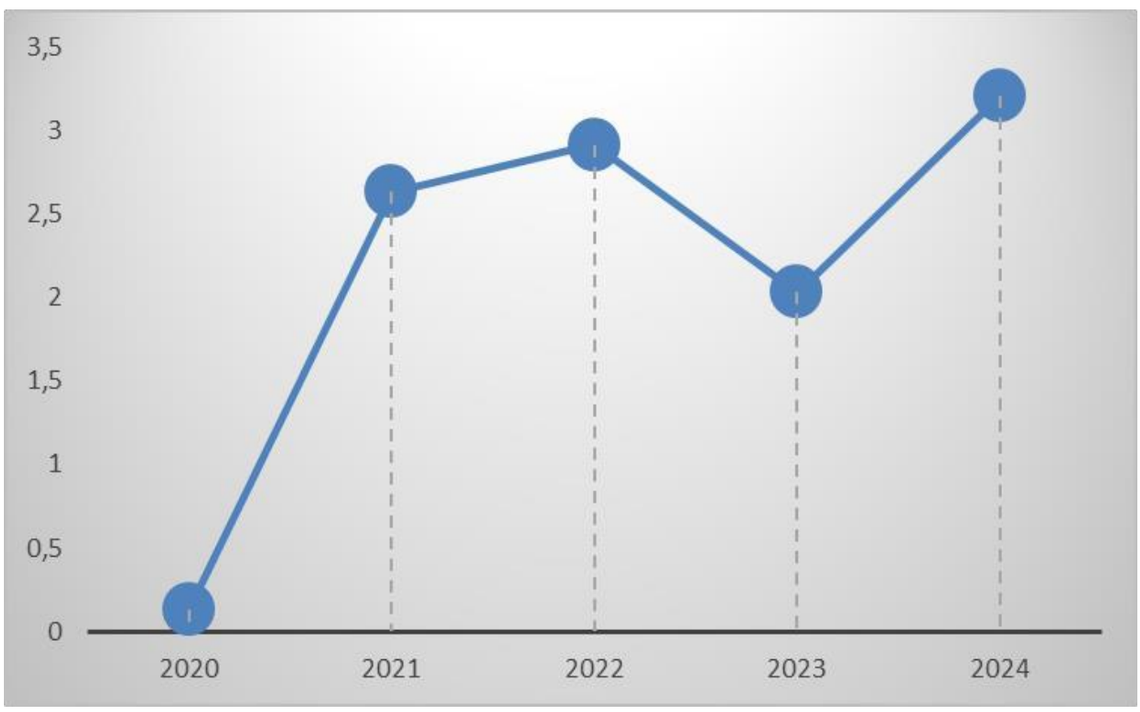
Tabel 2.20.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024 (Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.345.398,28	1.363.518,51	1.414.736,73	1.454.503,08	1.505.472,94
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	22.002,01	22.800,26	23.415,04	24.631,07	26.802,54
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	637.123,85	645.972,09	651.245,96	662.905,62	679.150,54
Pembentukan Modal Tetap Bruto	994.068,47	1.019.046,60	1.043.729,25	1.064.428,97	1.095.123,11
Perubahan Inventori	-3.028,66	924,77	-13.206,98	23.189,47	30.102,30
Net Ekspor	-1.002.018,37	-1.006.236,50	-2.105.659,29	-1.081.244,01	-1.119.384,72
PDRB	**1.993.545,59**	**2.046.025,73**	**2.105.659,29**	**2.148.414,21**	**2.217.266,76**

Catatan : * Angka Sementara **Angka Sangat Sementara'
Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Keerom Menurut Pengeluaran 2020-2024; BPS Kabupaten Keerom, 2024

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Keerom memiliki trend yang terus meningkat dari tahun ketahun, yakni sebesar 1,99 triliun rupiah (2020); 2,04 triliun rupiah (2021); 2,10 triliun rupiah (2022); dan 2,14 triliun rupiah (2023) dan 2,22 triliun rupiah (2024). Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Keerom mengalami perlambatan, yakni dari 2,91 % pada tahun 2022 menjadi 2,04 % pada tahun 2023.

Gambar 2.9
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024 (Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Keerom, 2024

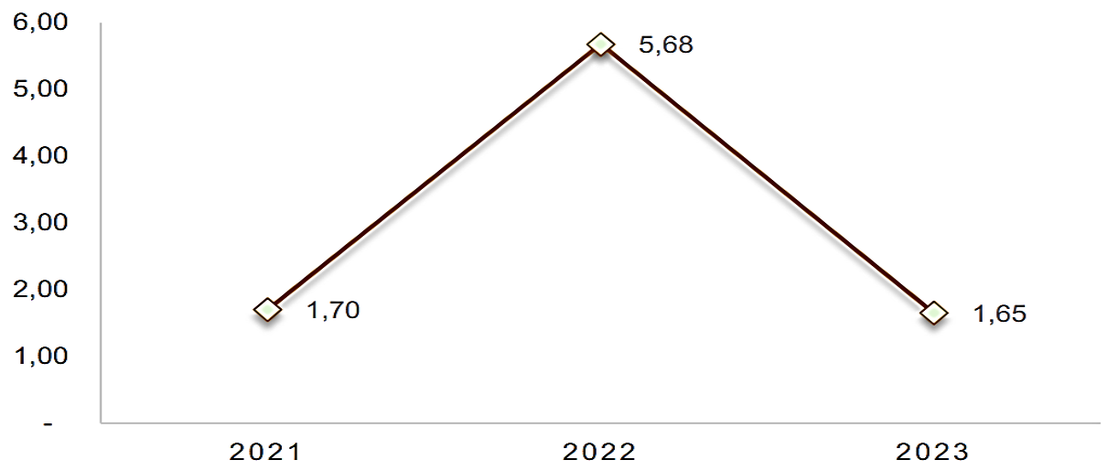
Tabel 2.21.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Keerom Tahun 2024

No	Lapangan Usaha	PDRB (Juta Rupiah)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.107.516,5
2	Pertambangan dan Penggalian	43.105,9
3	Industri Pengolahan	197.096,1
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.636,3
5	Konstruksi	1.025.754,8
6	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	307.781,2
7	Transportasi dan Pergudangan	36.632,3
8	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	39.740,3
9	Informasi dan Komunikasi	41.515,2
10	Jasa Keuangan dan Asuransi	52.319,9
11	Real Estat	61.046,3
12	Jasa Perusahaan	2.008,5
13	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Publik	490.684,4
14	Jasa Pendidikan	88.968,4
15	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76.592,1
16	Jasa Lainnya	45.176,7

Sumber: PDRB Kabupaten Keerom Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Keerom tidak bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan kelapangan usaha ekonomi lainnya, yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Keerom. Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2024 adalah pada lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan Perikanan dan kemudian diikuti aktivitas Konstruksi. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku.

Gambar 2.10
Laju Inflasi Deflator Kabupaten Keerom Tahun 2021-2023 (dalam %)



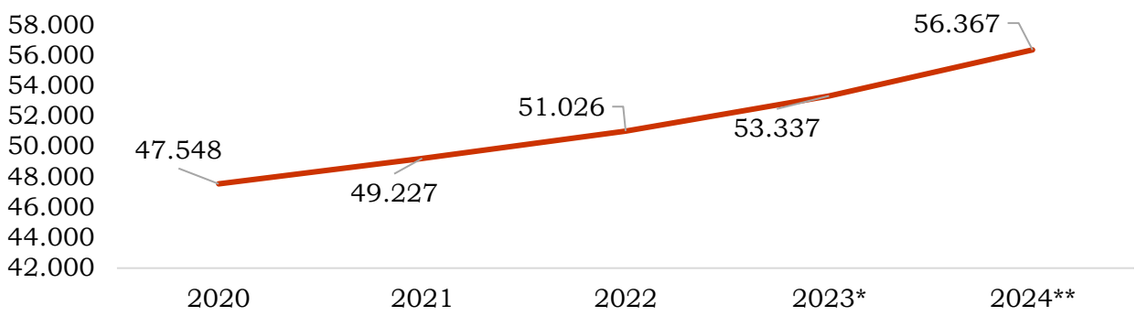
Sumber: BPS Kabupaten Keerom, 2024

Untuk tingkat inflasi di Kabupaten Keerom, indikator kenaikan harga-harga daerah yang lazim digunakan adalah angka deflator, di mana angka tersebut sebagai proksi untuk menggambarkan tingkat inflasi di suatu wilayah. Perkembangan kenaikan harga secara umum di Kabupaten Keerom terlihat mengalami fluktuatif sepanjang tahun 2021-2023. Tahun 2021 inflasi Kabupaten Keerom mencapai 1,70% kemudian meningkat menjadi 5,68% pada tahun 2022 dan menurun kembali di tahun 2023 menjadi 1,65%.

2.2.1.3. PDRB Perkapita

PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB per kapita yang terus meningkat menunjukkan kesejahteraan rakyat di wilayahnya. PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Gambar 2.11
PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2020-2024 (ribu rupiah)



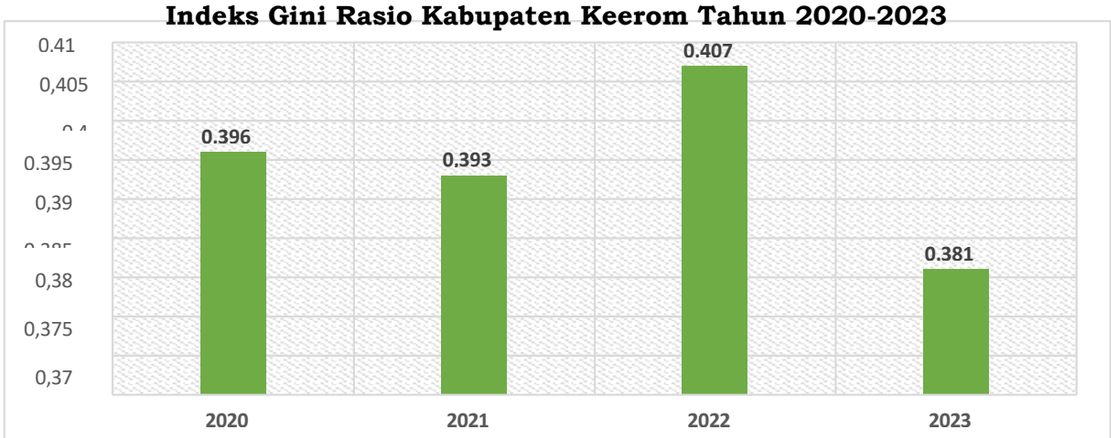
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2025 (Data diolah)

Risiko ekonomi dan ketahanan pangan, ditentukan oleh perubahan kondisi iklim dan bencana (potensi banjir/longsor menekan sektor pertanian dan infrastruktur. Hal ini berdampak pada inflasi yang menggerus daya beli rumah tangga dan margin usaha kecil dan eisiko fiskal: tekanan anggaran dan keterlambatan realisasi proyek publik, serta eantai pasok gangguan akses jalan dan pasar lokal. Oleh karena itu, prioritas mitigasi dan kebijakan resilien diarahkan kepada aspek-aspek, seperti: Early warning system banjir/longsor (BMKG, BNPB lokal), rehabilitasi irigasi, proteksi sosial saat gagal panen (PKH, bantuan pangan), dukungan input pertanian tahan cuaca dan akses pembiayaan mikro, dan dana kontinjensi daerah dan asuransi pertanian komunitas.

2.2.1.4. Indeks Gini

Ukuran ketimpangan pendapatan yang digunakan dalam analisis ini adalah ketimpangan antarpersonal, yakni menggunakan rasio gini. Untuk ketimpangan pendapatan yang direpresentasikan dengan angka ratio gini menunjukkan bahwa secara keseluruhan ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Keerom masuk dalam kategori ketimpangan tinggi.

Gambar 2.12
Indeks Gini Rasio Kabupaten Keerom Tahun 2020-2023



Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Keerom 2024, BPS Papua

2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan rasio antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran mencakup angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha; tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT Kabupaten Keerom tahun 2023 sebesar 1,50 persen, menurun dibandingkan tahun 2022.

Secara umum, TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan. Hal ini kemungkinan dikarenakan laki-laki lebih aktif secara ekonomi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2023, TPAK laki-laki sebesar 87,70 persen sedangkan TPAK perempuan sebesar 64,72 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan partisipasi penduduk laki-laki dan perempuan usia kerja untuk aktif dalam kegiatan ekonomi

Tabel 2.22.
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76.84	76.91	74.75	76,79	78.92
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2.56	1.41	2.49	1.50	2.91
Jumlah Angkatan Kerja :					
Angkatan Perempuan	11,593	12,848	12,178	12,262	12,986
Angkatan Laki-laki	20,502	21,323	21,591	19,059	19,733

Sumber: BPS Papua, dan BPS Kerom, 2025 (data diolah)

Perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Keerom dari tahun 2020-2024 tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan. Partisipasi Angkatan kerja Keerom pada tahun 2020 adalah sebesar 76,84% kemudian meningkat menjadi 78,92% di tahun 2024. Selain itu, jumlah Angkatan kerja menurut jenis kelamin juga ke duanya mengalami penambahan dari tahun ke tahun. Sampai pada tahun 2024 jumlah Angkatan kerja perempuan adalah sebanyak 12.986 orang dan laki-laki sebanyak 19.733 orang.

Dengan semakin bertambahnya jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Keerom menandakan semakin besarnya kebutuhan akan lapangan kerja. Berbeda pada kondisi Angkatan kerja, jumlah tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Keerom mengalami penurunan, dengan kata lain penurunan tersebut mengindikasikan semakin baik dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Keerom.

2.2.1.6. Tingkat Kemiskinan

Secara keseluruhan kondisi kemiskinan di Kabupaten Keerom terus mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Sepanjang tahun 2020-2024 persentase penduduk miskin di Kabupaten Keerom terus mengalami perbaikan, hal tersebut ditandai dengan semakin menurunnya persentase penduduk miskin. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin adalah sebesar 15,28% yang mengalami kenaikan menjadi 15,84% di tahun 2024. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, tingkat keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan juga perlu diukur dari seberapa besar perubahan yang terjadi pada tingkat kedalaman (P1) dan keparahan (P2) dari kemiskinan. Di mana semakin tinggi nilai indeks P1 ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, yang menggambarkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Berikutnya, semakin tinggi angka indeks P2 maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin akan semakin timpang dan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.23.
Indikator Kemiskinan Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	9.415	9.300	9.270	9.320	9.524
Persentase Penduduk Miskin (%)	15,28	16,00	15,77	15,68	15,84
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,70	0,95	0,61	1,25	0,82
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,79	3,16	2,46	3,79	3,11

Sumber: BPS Papua, dan BPS Keerom, 2025 (data diolah)

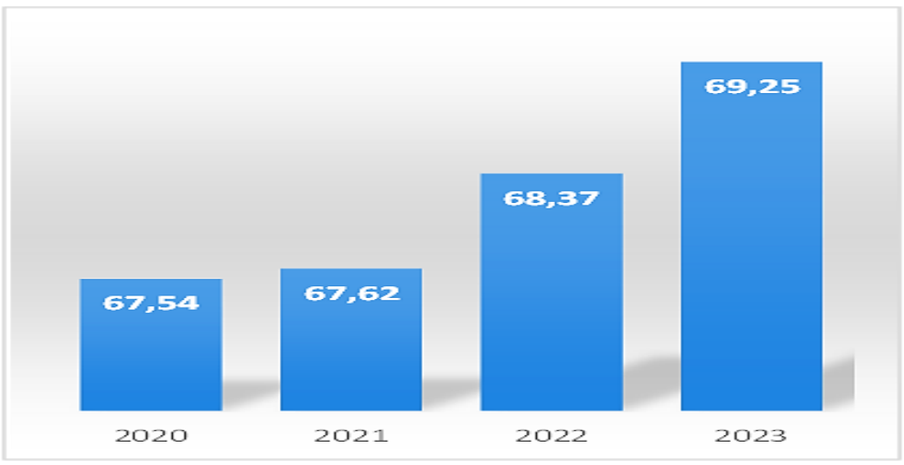
Pada tahun 2020, P1 menjadi 2,79%. Hal ini bisa jadi terkait dengan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, terutama terkait dengan dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan pemerintah memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah miskin. Meskipun demikian, kondisi ekonomi yang terganggu oleh pandemi tetap bisa mempengaruhi ketahanan ekonomi rumah tangga miskin. Pada tahun 2021 P1 di Keerom mengalami peningkatan cukup tajam menjadi 3,16%. Pada 2022, P1 turun lagi menjadi 2,46%. Penurunan ini mungkin menunjukkan adanya sedikit pemulihan ekonomi, adanya intervensi pemerintah yang lebih baik, atau peningkatan akses terhadap bantuan sosial.

Secara umum, Keerom mengalami sedikit perbaikan dalam hal kedalaman kemiskinan pada tahun ini. P1 kembali meningkat tajam pada 2023 menjadi 3,79%. Lonjakan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakstabilan harga barang kebutuhan pokok, inflasi, atau penurunan efektivitas program bantuan sosial. Secara keseluruhan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Keerom mengalami fluktuasi yang cukup besar, dengan penurunan di tahun 2020 dan 2022, tetapi lonjakan signifikan pada 2021 dan 2023. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan yang meningkat di kalangan rumah tangga miskin di Keerom, dengan sebagian rumah tangga mungkin mengalami kemiskinan yang lebih parah dibandingkan yang lain.

2.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan ukuran untuk melihat kualitas capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar di Kabupaten Keerom terus mengalami peningkatkan, tetapi masih masuk dalam kategori IPM sedang yang capaiannya berada di atas IPM Papua. Secara keseluruhan pembentuk IPM di Kabupaten Keerom juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Gambar 2.14
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Keerom, 2024 (data diolah)

2.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Keerom merupakan bagian penting dari upaya pembangunan manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan dengan PNG. Secara geografis, Keerom memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan karena kondisi wilayah yang luas, sebagian besar berupa pegunungan dan hutan, serta keterpencilan antar distrik yang menyebabkan keterbatasan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Secara kelembagaan, pelayanan kesehatan di Kabupaten Keerom diselenggarakan melalui Dinas Kesehatan dengan dukungan jaringan fasilitas pelayanan dasar dan rujukan. Terdapat beberapa Puskesmas yang tersebar di tiap distrik, dilengkapi dengan Pustu, Poskesdes, dan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar di tingkat kampung. Selain itu, terdapat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Keerom yang berfungsi sebagai rumah sakit rujukan kabupaten, meskipun masih menghadapi keterbatasan tenaga medis spesialis dan sarana penunjang.

Dari sisi ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, Kabupaten Keerom masih mengalami kekurangan dokter umum, tenaga bidan, perawat, dan tenaga gizi, terutama di wilayah terpencil. Upaya pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dilakukan melalui pola penempatan tenaga kontrak daerah, kerja sama dengan pemerintah provinsi, dan program nasional seperti Nusantara Sehat.

Capaian indikator derajat kesehatan masyarakat menunjukkan tren perbaikan, terutama dalam hal peningkatan cakupan imunisasi, penurunan angka kesakitan penyakit menular seperti malaria, serta peningkatan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan. Namun demikian, angka stunting, gizi buruk, dan penyakit berbasis lingkungan masih menjadi tantangan utama yang perlu mendapat perhatian lintas sektor, terutama di distrik-distrik perbatasan dan daerah dengan keterbatasan air bersih.

Dalam konteks kebijakan pembangunan daerah, pelayanan kesehatan di Keerom diarahkan untuk:

1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui penguatan sarana prasarana dan tenaga kesehatan.
2. Memperluas jangkauan pelayanan promotif dan preventif, termasuk pengendalian penyakit menular dan peningkatan gizi masyarakat.
3. Mendorong partisipasi masyarakat dan pemerintah kampung dalam menjaga kesehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta pemberdayaan kader kesehatan.
4. Mengintegrasikan pendekatan sosial-budaya lokal dalam pelayanan kesehatan masyarakat, mengingat keberagaman etnis dan adat istiadat di Keerom.

Secara keseluruhan, pelayanan kesehatan di Kabupaten Keerom sedang menuju arah yang lebih baik melalui peningkatan infrastruktur, penguatan sistem rujukan, dan kolaborasi lintas sektor. Namun, keberhasilan transformasi kesehatan di Keerom akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik, pemerataan tenaga medis, serta sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra pembangunan.

2.2.2.1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (Life Expectancy) merupakan perkiraan rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat hidup oleh seseorang sejak lahir atau dari usia tertentu, berdasarkan kondisi mortalitas (angka kematian) pada suatu wilayah dan periode waktu tertentu. Perkembangan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Keerom ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Keerom Tahun 2020-2023

Tahun	UHH (Tahun)	Keterangan
2020	69,12	-
2021	69,21	Meninglat 0,09
2022	69,47	Meninglat 0,26
2023	69,73	Meninglat 0,26

Sumber : BPS Kab Keerom (Publikasi IPM 2019-2023); dan Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom (Laporan Kinerja 2023)

Dari tabel di atas, peningkatan UHH dari tahun 2020 ke tahun 2023 terjadi peningkatan 0,61 tahun atau sekitar 6 bulan. Bila dibandingkan dengan UHH Nasional tahun 2023 sebesar 71,6 tahun dan UHH Papua tahun 2023 sebesar 69,73 tahun UHH Kabupaten Keerom masih lebih rendah. Untuk meningkatkan UHH, hal-hal yang masih perlu ditingkatkan di kabupaten Keerom adalah peningkatan fasilitas dan pelayanan Kesehatan, meningkatkan kualitas gizi bayi, dan menurunkan angka kematian bayi

2.2.2.2. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Angka atau prosentase persalinan di fasilitas Kesehatan menunjukkan proporsi kelahiran bayi yang dilahirkan dengan menggunakan fasilitas yang ada di kabupaten Keerom dalam hal ini Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Bersalin atau Bidan terlath. Hal ini menjadi penting karena angka ini juga merupakan indicator bagi Kesehatan ibu dan anak dan juga menjadi tolok ukur Pembangunan dari sisi ketersediaan fasilitas bersalin yang memadai. Adapun persentase persalinan pada unit fasilitas Kesehatan di Kab Keerom ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tahun 2022-2025

NO	PUSKESMAS	Persalinan Nakes di Faskes Tahun 2022					Persalinan Nakes di Faskes Tahun 2023					Persalinan Nakes di Faskes Tahun 2024					Persalinan Nakes di Faskes Tahun 2025				
		Sasaran	Papua	Non	Total	%	Sasaran	Papua	Non	Total	%	Sasaran	Papua	Non	Total	%	Sasaran	Papua	Non	Total	%
1	Arso Kota	276	54	120	174	63	350	72	142	214	61	356	61	93	154	43	292	18	63	81	28
2	Arso Barat	220	25	153	178	81	260	28	137	165	63	264	31	141	172	65	218	10	71	81	37
3	Arso Tiga	343	39	190	229	67	370	40	202	242	65	366	22	163	185	51	291	12	60	72	25
4	Ywan	111	36	14	50	45	92	38	29	67	73	91	28	20	48	53	73	14	13	27	37
5	Ptewi	26	13	9	22	85	80	23	18	41	51	87	28	28	56	64	75	14	9	23	31
6	Waris	82	38	0	38	46	83	23	0	23	28	86	32	3	35	41	70	21	1	22	31
7	Senggi	51	33	50	83	163	57	39	47	86	151	55	26	40	66	120	43	8	19	27	63
8	Ubrub	43	11	0	11	26	32	17	0	17	53	33	9	0	9	27	25	3	0	3	12
9	Towe	39	6	0	6	15	17	10	0	10	59	12	7	0	7	58	10	4	0	4	40
10	Milki	25	2	0	2	8	11	6	0	6	55	5	9	0	9	180	3	2	0	2	67
11	Yaffi	37	3	0	3	8	31	0	0	0	0	38	6	0	6	16	28	1	0	1	3
12	Keisenar	11	0	0	0	0	10	0	0	0	0	7	1	0	1	14	4	0	0	0	0
TOTAL DINAS		1,277	260	796	796	62	1,394	296	575	871	62	1,401	260	488	748	53	1,132	107	236	343	30

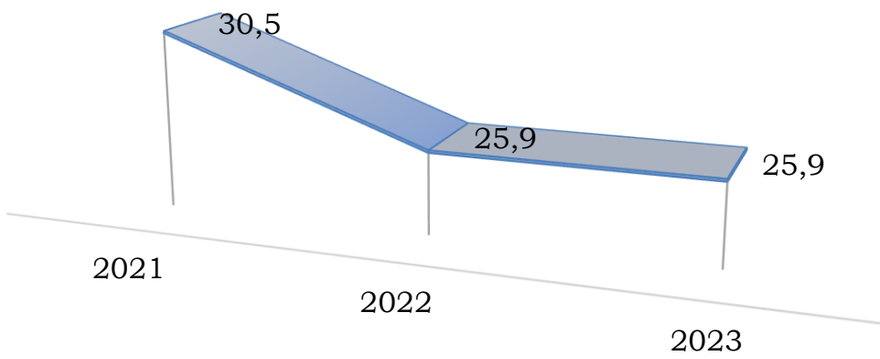
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom

Ditunjukkan pemanfaatan fasilitas Kesehatan untuk persalinan bayi sudah cukup baik karena menunjukkan prosentase di atas 50%. Beberapa kendala masih menjadi permasalahan, diantaranya kondisi topografi dan jarak tempuh ke Puskesmas atau rumah sakit terdekat yang melayani persalinan bayi. Kebijakan yang perlu ditempuh pemerintah adalah meningkatkan jumlah bidan dan menjalankan atau Puskesmas keliling yang dapat melayani ibu hamil.

2.2.2.3. Prevelansi Stunting

Prevalensi Stunting adalah persentase anak balita (usia 0–59 bulan) dalam suatu populasi yang mengalami stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh kronis akibat kekurangan gizi, infeksi berulang, atau faktor lingkungan dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi Stunting dicirikan dengan tinggi badan anak di bawah standar; Perkembangan otak dan fisik terhambat ; Dampak jangka panjang: penurunan kecerdasan, produktivitas, dan risiko penyakit kronis. Data Prevalensi Stunting ditampilkan pada gambar berikut:

Gambar 2.15
Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Keerom



Sumber : Kemenkes RI : SSGI, 2024

Data pada tersebut menunjukkan kondisi Prevalensi Stunting yang menurun 4,8 persen dari tahun 2021 sebesar 30,5 persen ke tahun 2022 dan pada tingkat prosentase yang sama sampai dengan tahun 2023, yaitu 25,9 persen. Angka tersebut masih tergolong tinggi walau pun masih dibawah angka Prevalensi Stunting di Provinsi Papua sebesar 28,4 persen dan 21,6 persen angka Prevalensi Stunting nasional. Prevalensi Stunting dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1). Gizi Ibu & Anak: Kurang protein, zat besi, zinc. (2) Infeksi: Diare, cacingan, malaria. (3) Sanitasi: Air tidak bersih, jamban tidak layak. (4) Pola Asuh: MPASI tidak tepat, kurang stimulasi. (5) Sosial-Ekonomi: Kemiskinan, akses terbatas ke layanan kesehatan.

2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Secara umum, pelayanan pendidikan di Kabupaten Keerom telah menunjukkan arah transformasi menuju layanan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan sosial. Melalui penguatan SDM pendidik, pemerataan sarana, dan peningkatan kualitas pembelajaran pemerintah daerah berkomitmen mewujudkan visi “Pendidikan Berkualitas untuk Semua” yang tidak hanya mencerdaskan tetapi juga membangun karakter dan daya saing generasi Keerom di masa depan. Pelayanan pendidikan di Kabupaten Keerom merupakan salah satu pilar utama pembangunanSDM di wilayah perbatasan PNG. Dengan karakteristik geografis yang kompleks, Keerom menghadapi tantangan besar dalam menyediakan akses pendi-dikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, hingga kawasan jauh dipedalaman dan perbatasan negara.

Sistem pelayanan pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang membawahi satuan pendidikan formal mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK, serta pendi-

dikan nonformal dan kesetaraan. Layanan ini tersebar di tujuh distrik utama, namun masih menunjukkan ketimpangan sebaran sarana prasarana dan tenaga pendidik antara wilayah perkotaan (seperti Distrik Arso dan Skanto) dengan wilayah pedalaman (seperti Waris, Towe, dan Web).

Dari sisi kuantitas, jumlah sekolah dasar dan menengah sudah cukup memadai, tetapi kualitas layanan belajar mengajar masih perlu ditingkatkan. Beberapa sekolah di wilayah terpencil mengalami keterbatasan ruang kelas layak, peralatan belajar, dan akses terhadap jaringan internet. Selain itu, APM dan angka melanjutkan sekolah menurun pada jenjang menengah, yang disebab kan oleh faktor jarak, kondisi ekonomi keluarga, serta pernikahan usia dini.

Salah satu isu utama dalam pelayanan pendidikan di Keerom adalah pemerataan dan kompetensi tenaga pendidik. Sebagian guru masih berstatus non-PNS dan bertugas di daerah yang sulit dijangkau. Distribusi guru belum proporsional, terdapat kelebihan guru di wilayah pusat kabupaten dan kekurangan guru di distrik terpencil. Pemerintah daerah berupaya mengatasinya melalui kebijakan rotasi dan insentif daerah terpencil, pelatihan peningkatan kompetensi, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk penempatan tenaga guru kontrak.

Dalam hal mutu pembelajaran, Kabupaten Keerom telah mulai menerapkan pendekatan Kurikulum Merdeka secara bertahap, disertai penguatan literasi dan numerasi dasar, serta pembinaan karakter siswa. Upaya peningkatan mutu dilakukan me-lalui program Sekolah Penggerak, peningkatan digitalisasi sekolah, serta penguatan kapasitas sekolah dan pengawas pendidikan. Sementara iti dari aspek pemerataan layanan pendidikan menjadi prioritas utama mengingat kondisi geografis Keerom yang sulit dijangkau. Pemerintah daerah menargetkan agar seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan dasar 9 tahun melalui:

- Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas di wilayah perbatasan dan pedalaman.
- Penyediaan asrama untuk siswa dari kampung terpencil.
- Pemberian beasiswa daerah, BOS daerah, dan transportasi sekolah.
- Pemanfaatan sarana digital dan sekolah berbasis daring untuk menjangkau daerah dengan akses fisik terbatas.

Secara bertahap, berbagai indikator pembangunan pendidikan menunjukkan peningkatan positif. Tingkat melek huruf masyarakat Keerom terus meningkat, rata-rata lama sekolah telah melampaui 8 tahun, dan angka putus sekolah menunjukkan tren menurun. Tetapi, tantangan yang masih dihadapi adalah:

- Keterbatasan tenaga guru berkualifikasi S1 di daerah terpencil;
- Kesenjangan sarana TIK antar sekolah;
- Rendahnya partisipasi pendidikan PAUD di kampung-kampung;
- Ketergantungan bantuan pemerintah pusat dan provinsi untuk pembangunan sarana.

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata, arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Keerom difokuskan pada:

- Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan melalui penguatan kurikulum, kompetensi guru, dan inovasi pembelajaran berbasis teknologi.

- Pemerataan akses layanan pendidikan dasar dan menengah di seluruh distrik, dengan prioritas pada daerah pedalaman, ter-pencil, dan perbatasan negara.
- Penguatan tata kelola pendidikan berbasis data dan partisipasi masyarakat, termasuk optimalisasi peran komite sekolah dan pemerintah kampung.
- Peningkatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga keagamaan, dunia usaha, dan organisasi masyarakat dalam mendukung pendidikan karakter dan keterampilan.
- Integrasi kearifan lokal dan budaya Keerom ke dalam sistem pendidikan untuk memperkuat identitas dan rasa kebangsaan generasi muda di wilayah perbatasan.

2.2.3.1. Angka Rerata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator pendidikan yang menunjukkan jumlah tahun pendidikan formal (dari SD hingga perguruan tinggi) yang berhasil diselesaikan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di suatu wilayah. Data Rata-rata lama Sekolah dalam 4 (empat) tahun terakhir di Kabupaten Keerom disajikan berikut ini.

Tabel 2.26
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Keerom
Tahun 2020-2023

Tahun	RLS (Tahun)	Keterangan
2020	8,01	
2021	8,02	Meninglat 0,1
2022	8,31	Meninglat 0,29
2023	8,57	Meninglat 0,26

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom, 2025

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Keerom mengalami pening-katan 0,56 point dibandingkan dengan tahun 2020. Dengan capaian RLS 8,57 tahun artinya penduduk yang telah berusia 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh Pendidikan kelas 3 SMP. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah perkiraan rata-rata lamanya (dalam tahun) seorang anak usia 7 tahun akan menem-puh pendidikan formal selama hidupnya, berdasarkan pola partisipasi sekolah saat ini.

Tabel 2.27
Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Keerom
Tahun 2019-2023

Tahun	HLS (Tahun)	Keterangan
2020	12,42	
2021	12,43	Meninglat 0,01
2022	12,45	Meninglat 0,02
2023	12,46	Meninglat 0,01

Sumber: BPS Kabupaten Keerom, 2023; dan Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom, 2023

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Keerom mengalami peningkatan 0,04 point dibandingkan dengan tahun 2020. Dengan capaian HLS tahun 2023 sebesar 12,46 diharapkan penduduk usia 7 tahun ke atas dapat menyelesaikan Pendidikan di Tingkat SMA dan melanjutkannya ke Perguruan tinggi.

Perbedaan dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS): Mengukur realisasi capaian pendidikan penduduk usia 15+ sedangkan HLS: Memproyeksikan potensi pendidikan anak usia 7 tahun ke depan (prediksi).

Faktor Mempengaruhi Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah:

- Akses Pendidikan: Ketersediaan sekolah (SD-SMP-SMA-PT) dan Infrastruktur pendidikan memadai.
- Ekonomi: Daya beli keluarga untuk biaya sekolah dan Program beasiswa (KIP Kuliah, dll.).
- Kebijakan: Wajib belajar 12 tahun dan pemerataan guru bermutu.

2.2.3.2. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah prosentase penduduk usia tertentu (di atas usia 15 tahun) yang dapat membaca dan menulis dengan pemahaman dasar. Angka Melek Huruf merupakan indikator yang penting untuk mengukur tingkat Pendidikan dan kualitas hidup manusia pada suatu wilayah tertentu. Angka Melek Huruf di Kabupaten Keerom ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 2.28
Angka Melek Huruf di Kabupaten Keerom, 2022-2024

2022	2023	2024
95,21	95,21	94,82

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Keerom. 2024

Tabel di atas, menggambarkan kondisi Angka Melek Huruf di Kabupaten Keerom sudah cukup baik dan sudah mendekati angka Melek Huruf nasional sebesar 96%. Beberapa faktor sangat mempengaruhi Angka Melek Huruf di Kabupaten Keerom, diantaranya : Akses Pendidikan; Sosial Ekonomi; Budaya; dan Kebijakan Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Keerom perlu terus menjaga ketersediaan dan kualitas tenaga pengajar atau pendidik dengan kelengkapan sarana Pendidikan yang standar.

2.2.3.3. Persentase Kabupaten Keerom yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional

Standar Kompetensi Minimum (SKM) merupakan batas kemampuan minimal yang harus dikuasai dalam Literasi dan Numerasi, sedangkan prosentase capaian SKM menunjukkan berapa banyak siswa (dalam persen) yang berhasil mencapai melampaui level kompetensi minimum tersebut. Literasi diartikan sebagai kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks (tertulis, digital, atau visual) untuk mengembangkan pengetahuan serta berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Sedang Numerasi merupakan kemampuan menerap kan konsep bilangan atau angka, matematika, serta kemampuan menganalisa data dan pola kehidupan sehari-hari dalam pengambilan keputusan.

Tabel 2.29
Persentase Kabupaten Keerom Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Tahun 2023-2024

Kategori	Literasi (%)		Numerasi (%)	
	2023	2024	2023	2024
Baik	10	21	4	21
Sedang	24	21	19	21
Cukup	28	43	39	43

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom, 2025

Ditunjukan capaian kategori cukup masih mendominasi baik literasi maupun numerasi, namun capaian kategori Baik menunjukkan peningkatan yang signifikan baik literasi maupun numerasi. Capaian literasi kategori baik meningkat 110% dari tahun 2023 ke tahun 2024, sedangkan Capaian numerasi kategori baik meningkan 425 % dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Capaian-capain dalam literasi dan numerasi sangat ditentukan oleh beberapa hal diantaranya: kualitas pembelajaran, fasi-litas pembelajaran dan dukungan lingkungan keluarga. Oleh karena itu, untuk mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional yang baik di kabupaten Keerom hal-hal dimaksud perlu mendapat perhatian yang baik.

2.2.3.4. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional di Kabupaten Keerom

Capaian Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) pada Asesmen Tingkat Nasional menunjukkan capaian tingkatan Sekolah sesuai kategori yang ditetapkan, mulai dari tiingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional pada tahun 2023-2024 di tunjukkan berikut ini.

Tabel 2.32
Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Tahun 2023-2024

Kategori	Literasi (%)						Numerasi (%)					
	2023			2024			2023			2024		
	Kurang	Sedang	Baik	Kurang	Sedang	Baik	Kurang	Sedang	Baik	Kurang	Sedang	Baik
SD	40	40	20	53,1	16,3	30,6	67,5	22,5	10	61,2	20,4	18,4
SMP/SEDERAJAT	36,4	45,4	18,2	35	45	20	72,7	27,3	0	25	30	45
SMA/SEDERAJAT	72,7	27,3	0	68,8	18,7	12,5	62,6	36,4	0	50	31,3	18,7

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom, 2025. Diolah.

Digambarkan bahwa Satuan Tingkat Pendidikan SD, SMP, dan SMA yang mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) pada Asesmen tingkat nasional khusunya kategori “baik” menun-jukkan adanya peninggkatan prosentase, baik dalam Literasi maupun numerasi. Meningkatnya capaian standarisasi kompe-tensi minimum pada satuan pendidikan pada Asesmen Tingkat nasional dipengaruhi oleh beberapa hal seperti: Akreditasi sekolah, kualitas tenaga pengajar, sarana belajar dan infrastruktur, serta factor geografis letak sekolah. Kebijakan pemerintah yang menun-jang diharap kan dapat terus mendorong meningkatnya kualitas pendidikan di kabupaten Keerom.

2.2.3.5. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator komposit yang mengukur tingkat kemajuan literasi suatu masyarakat, mencakup akses, kemampuan, dan lingkungan pendukung literasi (baca-tulis, numerasi, digital, sains, finansial, dan budaya). IPLM di atur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penum-buhan Budi Pekerti melalui Gerakan Literasi Sekolah (GLS), yang kemudian diperluas ke masyarakat. IPLM biasanya dihitung dengan 4 pilar utama (mengacu UNESCO:

1. Akses terhadap Sumber Literasi
   - Ketersediaan perpustakaan/perpustakaan digital.
   - Rasio buku per kapita.
   - Jaringan internet untuk literasi digital.
2. Kemampuan Dasar Literasi
   - Tingkat melek huruf (BPS).
   - Hasil tes kompetensi (AKM/PISA untuk numerasi & membaca).
   - Angka partisipasi pendidikan (APK/APS).
3. Lingkungan Literasi
   - Frekuensi kegiatan baca di komunitas.
   - Dukungan pemerintah (anggaran, program).
   - Keterlibatan keluarga dalam literasi anak.
4. Dampak Literasi
   - Penggunaan informasi untuk kesehatan/ekonomi.
   - Kontribusi literasi terhadap produktivitas kerja.

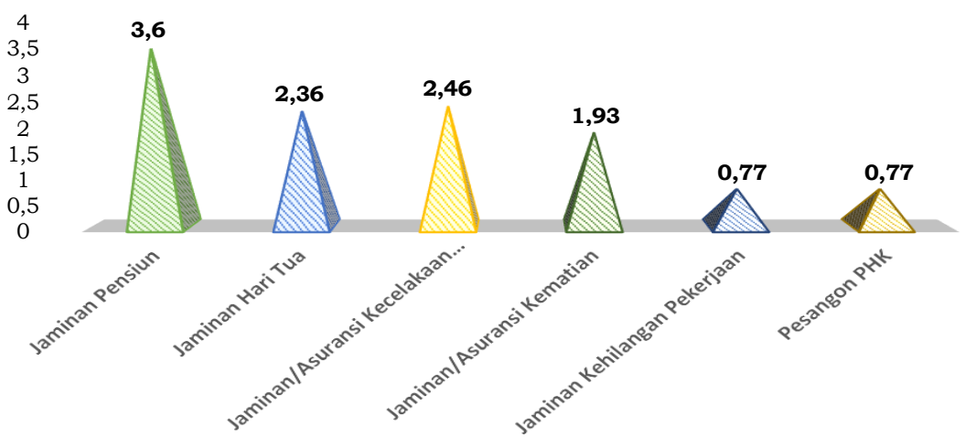
2.2.4. Perlindungan Sosial Yang Adaptif

Kabupaten Keerom merupakan daerah perbatasan Republik Indonesia–Papua Nugini yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang khas. Sebagian besar penduduknya bermukim di wilayah pedalaman dan kampung-kampung adat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Tingkat kemiskinan Kabupaten Keerom pada tahun 2024 tercatat sekitar 26,4% (BPS Keerom, 2024), jauh di atas rata-rata Provinsi Papua sebesar 23,2%. Kondisi ini menandakan pentingnya sistem perlindungan sosial yang komprehensif, inklusif, dan adaptif terhadap risiko multidimensi.

2.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Secara keseluruhan, angka-angka ini menunjukkan bahwa kesadaran dan akses terhadap program jaminan sosial di Kabupaten Keerom masih sangat terbatas. Program jaminan sosial yang penting untuk mengurangi beban ekonomi pada individu dan keluarga saat menghadapi situasi darurat atau perubahan status pekerjaan seperti pensiun, kecelakaan kerja, atau PHK, belum dirasakan oleh sebagian besar penduduk. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Keerom bekerja di sektor informal, yang tidak selalu terlindungi oleh jaminan sosial yang ditawarkan oleh pemerintah. Pekerja informal ini seringkali tidak memiliki akses ke program jaminan sosial seperti JHT, pensiun, atau asuransi kecelakaan kerja.

Gambar. 2.15
Persentase Penduduk yang Menerima Jaminan Sosial Menurut Jenis Jaminan Sosial di Kabupaten Keerom Tahun 2023 (persen)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2023

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kabupaten Keerom merupakan wilayah yang kaya akan keragaman etnis, budaya, dan kepercayaan, perpaduan antara masyarakat asli Papua (suku-suku seperti Walsa, Waris, dan Yafi) serta pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Keragaman ini menjadikan Keerom sebagai ruang sosial multi-kultural, di mana nilai-nilai keagamaan dan budaya hidup berdampingan secara harmonis.

Dengan semangat Tanah Damai, menghidupkan nilai beragama maslahat dan berkebudayaan maju sebagai pondasi pembangunan manusia yang ber-iman, toleran, dan berkarakter. Visi ini bukan sekadar menjaga keberagaman, melainkan menjadikannya sumber kekuatan moral, sosial, dan ekonomi kreatif bagi kemajuan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Oleh karena itu, beragama maslahat dan berkebudayaan maju, mencerminkan visi moral dan kultural pembangunan daerah Keerom adalah:

- Beragama maslahat berarti praktik kehidupan beragama, memberi manfaat sosial, memperkuat solidaritas, toleransi, dan kedamaian lintas iman;
- Berkebudayaan maju berarti penguatan identitas dan ekspresi budaya lokal yang adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap berakar pada nilai-nilai luhur masyarakat adat dan nusantara.

Tabel 2.33.
Ancangan Perkembangan Aspek dan Indikator Capaian Keberagamaan dan Berkebudayaan MajuKabupaten Keerom Tahun 2025–2030

Aspek	Indikator	Kondisi 2024	Target 2030
Kehidupan Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	74 (sedang)	80 (tinggi)
Aktivitas Budaya	Jumlah Event/Festival Budaya Tahunan	3 kegiatan	8 kegiatan
Kelembagaan Budaya	Desa/Kampung Memiliki Sanggar Budaya Aktif	20%	50%
Pewarisan Nilai Lokal	Sekolah Dengan Muatan Lokal Budaya Keerom	25%	60%

Sumber: BPS Keerom 2024, Laporan IKUB Papua, Profil FKUB Kab.Keerom 2023

Dalam dua dekade terakhir, Keerom menunjukkan kemajuan dalam penguatan kelembagaan keagamaan dan pelestarian budaya. Beberapa ciri khas dan dinamika yang menonjol antara lain:

- Kehidupan beragama yang toleran: terdapat rumah ibadah berbagai agama berdampingan di setiap distrik (gereja, masjid, dan mushala).
- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) aktif mendorong dialog dan kegiatan lintas agama, terutama di wilayah perbatasan yang heterogen.
- Pelestarian budaya lokal terus digerakkan melalui festival seni daerah, tari tradisional (tari perang, tari penyambutan), serta revitalisasi bahasa lokal dan ritual adat.
- Generasi muda mulai dilibatkan dalam program kreativitas budaya (musik etnik, film pendek, tenun khas Keerom), yang mempertemukan tradisi dan inovasi.

Namun, tantangan masih ada, seperti melemahnya pewarisan nilai budaya pada generasi muda, berkurangnya ruang ekspresi seni tradisional, dan keter-batasan infrastruktur kebudayaan (balai budaya, museum lokal, sanggar seni).

2.2.5.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks ini menggambarkan kondisi hubungan antarumat beragama yang harmonis, toleran, dan saling menghormati. Di Kabupaten Keerom yang memil-iki keberagaman suku dan agama, menjaga kerukunan umat bergama menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan menciptakan lingkungan hidup yang damai.

Tabel. 2.32
Jumlah Penduduk dan Jumlah Tempat Peribadatan
Kabupaten Keerom, 2024

Jumlah Penduduk	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
	31.887	17.355	16.347	306	-	-
Jumlah Tempat Ibadah	**Masjid**	**Mushola**	**Gereja Protestan**	**Gereja Katolik**	**Pura**	**Vihara**
	31	153	162	73	3	-

Sumber: Kabupaten Keerom Dalam Angka, 2025 (data diolah), BPS Papua

Tempat ibadah atau rumah ibadah merupakan sarana sosial yang harus disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Keerom agar semua masyarakat dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdasar-kan data BPS Kabupaten Keerom Dalam Angka 2025, agama Islam, Protestan, Katolik dan Hindu merupakan agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Keerom. Jumlah rumah ibadah bagi semua penganut agama di Kabupaten Keerom diuraikan pada sebagai berikut.

2.2.5.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks ini mengukur kemajuan pembangunan kebudayaan, termasuk pelestarian warisan budaya, pemajuan seni, bahasa daerah, serta peran masyarakat dalam aktifitas kebudayaan. Sebagai daerah dengan keberagaman suku bangsa dan budaya yang tinggi, kabupaten Keerom memiliki potensi yang besar, namun kondisi tersebut sekaligus menghadapkan Kabupaten Keerom dengan berbagai tantangan dalam pelestarian budaya asli Papua.

Masyarakat Hukum Adat merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Identifikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu ikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial; mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun-temurun; memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat; dan/atau mempunyai Lembaga Adat yang diakui oleh Masyarakat Hukum Adat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Artinya, bahwa Negara mengakui dan menghormati masyarakat adat asal sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap masyarakat memiliki konsepsi dan persepsi yang berbeda-beda terhadap ekosistem wilayah adat baik itu tanah daratan, air-perairan dan sumber daya alam diatas, ada yang beranggapan bahwa wilayah adat adalah tempat untuk mencari nafkah dan melaksanakan berbagai aktivitas sosial, ekonomi, budaya, religi dan sebagainya. Ada juga masyarakat lainnya yang menganggap bahwa wilayah adat adalah bagian wilayah adat diganggu maka kehidupan mereka pun terganggu.

Dengan demikian, maka persoalan wilayah adat dalam kehidupan mereka telah tertata dalam seperangkat pranata kebudayaan baik mencakup aspek peran, hak dan kewajiban yang diawasi langsung oleh organisasi sosial atau lembaga adat yang diakui oleh masyarakat. Masyarakat adat secara umum memiliki nilai budaya lokal yang mengatur hubungan mereka dengan lingkungan alam sekitar, termasuk hak atas wilayah adat baik itu kepemilikan dan pengelolaan tentang tanah, gunung, sungai, hutan kayu, dusun sagu dan tempat lainnya yang berhubungan dengan sejarah kehidupan mereka.

Masyarakat adat Keerom mengetahui, mengenai, dan mengakui kepemilikan ekosistem adat yang sepanjang hidupnya menjadi tempat kehidupannya.wilayah adat yang Terdapat di Keerom antara lain: wilayah adat Arso (Abrab, Wikyah); wilayah adat Waris; Wilayah adat Senggi; wilayah adat Web; wilayah adat Skanto; wilayah adat Manem; wilayah adat Arso timur; wilayah adat Towed dan Kaisenar. Perkembangan kebudayaan di Kabupaten Keerom, seringkali muncul pada berbagai dokumen laporan penelitian (studi etnografi, laporan festival budaya) dan disebut dalam konteks program/pelestarian budaya daerah (mis. Festival Budaya Keerom, laporan antropologi).

Tetapi, belum berarti ada nilai IPK [Indeks Pembangunan Kebudayaan] yang dipublikasi secara tersendiri. IPK adalah alat ukur untuk menilai capaian pembangunan kebudayaan, dengan tujuan: (1) Memantau sejauh mana kebudayaan sebagai bagian dari pembangunan sudah diintegrasikan ke dalam kebijakan publik. (2) Menilai kondisi budaya: pelestarian warisan budaya, ekspresi budaya, literasi budaya, dan aspek sosial budaya lainnya. (3) Memberikan gambaran untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan agar aspek budaya tidak terabaikan.

Tabel. 2.33
Dimensi dan skor IPK Kabupaten Keerom, 2024

Dimensi	Skor Awal (perkiraan)	Catatan
Warisan Budaya	55	Banyak tradisi hidup, tapi sedikit yang terdokumentasi resmi.
Ekspresi Budaya	65	Festival aktif, tapi kurang merata ke distrik.
Pendidikan & Literasi	45	Akses perpustakaan rendah, bahasa lokal mulai tergerus.
Ekonomi Budaya	40	UMKM budaya ada, tapi kontribusinya kecil.
Ketahanan Sosial	70	Lembaga adat masih kuat.
Gender & Inklusi	50	Perempuan aktif di level komunitas, kurang di level pengelolaan.
Tata Kelola Budaya	48	OPD ada, tapi anggaran minim.

Sumber: Hasil olahan Data primer, 2025

Terdapat sumber-sumber IPK yang dikelola oleh pemerintah pusat (portal IPK Kementerian dan dataset IPK 2024), dan dokumen pemerintah yang memuat nilai-nilai IPK, tetapi publikasi resmi yang eksplisit menampilkan nilai IPK tingkat Kabupaten Keerom tidak ditemukan. Adapun komponen dimensi umum IPK, terdiri dari:

1. Ekonomi Budaya (1 indikator), pengukuran aspek ekonomi terkait budaya.
2. Pendidikan (6 indikator), bagaimana pendidikan mengakomodasi budaya.
3. Ketahanan Sosial Budaya (8 indikator), kekuatan sosial budaya di masyarakat.
4. Warisan Budaya (6 indikator), pelestarian, pemeliharaan warisan budaya tak benda atau benda.
5. Ekspresi Budaya (4 indikator), kebebasan dan keberagaman dalam ekspresi budaya.
6. Budaya Literasi (3 indikator), akses dan kegiatan literasi budaya seperti

perpustakaan, arsip, baca tulis budaya.
7. Gender (3 indikator), kesetaraan gender dalam akses dan partisipasi budaya.

Kabupaten Keerom, memiliki keanekaragaman budaya tinggi: suku, bahasa adat, tari, musik, tradisi lisan, upacara adat, dan warisan budaya lainnya, belum tersedia data IPK resmi, karena:

- Infrastruktur pendidikan dan budaya belum merata [akses ke sekolah, perpustakaan, infrastruktur budaya, fasilitas kesenian dan pelestarian warisan mungkin masih terbatas di wilayah-wilayah terpencil].
- Kelembagaan pengelolaan budaya (dinas kebudayaan, lembaga adat) dan regulasi, masih perlu diperkuat agar pelestarian dan pengembangan budaya berjalan baik dan berkelanjutan.
- Isu gender dan partisipasi masyarakat adat dalam pelestarian budaya juga bisa menjadi variabel penting.

Untuk menghitung IPK, beberapa langkah dan data berikut diperlukan:

- Penetapan dimensi yang akan digunakan sesuai standar nasional (8 dimensi), dan menyesuaikan konteks kebutuhan di Kabupaten Keerom.
- Penentuan indikator untuk setiap dimensi [misalnya berapa banyak warisan budaya terdaftar, akses masyarakat ke fasilitas budaya, jumlah kegiatan ekspresi budaya per tahun, tingkat literasi budaya, peran perempuan dalam kegiatan budaya, dll].
- Pengumpulan data dari sumber yang valid dari dinas kebudayaan, pendidikan, perpustakaan, organisasi adat, survei masyarakat.
- Penetapan skala/skor sesuai standar internasional/nasional atau membuat benchmark spesifik.
- Analisis dan publikasi dengan memperhatikan area yang lemah dan perlu mendapat perhatian kebijakan.

Berdasarkan standar IPK, dimensi dan indicator yang sering digunakan adalah:

- Warisan budaya, jumlah situs/objek berstatus terdaftar; kegiatan pelestarian; dokumentasi warisan.
- Ekspresi budaya, frekuensi pagelaran seni, jumlah sanggar, seniman terdaftar, partisipasi pemuda.
- Pendidikan dan Literasi Budaya, kurikulum lokal yang memasukkan materi budaya, eksistensi perpustakaan/arsip budaya, literasi baca budaya.
- Ekonomi budaya, kontribusi ekonomi kreatif, UMKM berbasis budaya, jumlah pelaku ekonomi kreatif.
- Ketahanan sosial-budaya, bahasa daerah yang masih dipakai, transmisi antargenerasi, peran lembaga adat.
- Gender dan Inklusi, akses dan partisipasi perempuan, kelompok marjinal, masyarakat adat dalam kegiatan budaya.
- Tata Kelola budaya, eksistensi OPD, kebijakan daerah, anggaran program kebudayaan.

Untuk menyusun IPK Kabupaten Keerom ke depan, sumber data potensial yang perlu ditelaah, meliputi:

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Keerom [data festival, sanggar, program pelestarian, anggaran].
- BPS Kabupaten Keerom [publikasi “Keerom Dalam Angka: statistik demografi, pendidikan, ekonomi lokal].
- Dokumen nasional/dataset IPK (Kementerian terkait), metodologi IPK dan indikator standar yang bisa diadaptasi untuk level kabupaten.
- Penelitian akademik danlaporan antropologi yang mendokumentasikan bahasa, praktik adat, struktur sosial yang berguna untuk indikator ketahanan budaya.

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyakat Inklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif meru-pakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Keluarga yang berkualitas berperan sebagai lingkungan per-tama dalam membentuk individu yang tangguh, berpendidikan, dan memiliki kesejahteraan yang baik.

Tabel. 2.34
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif di Kabupaten Keerom Tahun 2024

Aspek	Kondisi 2024	Tantangan
Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) ±60,3 (kategori menengah); cakupan keluarga berencana 68%	Rendahnya kualitas pengasuhan anak dan ekonomi keluarga, terutama di distrik pedalaman
Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Keerom 88,1; perempuan dalam jabatan struktural ±22%	Keterbatasan partisipasi ekonomi perempuan, stereotip sosial budaya
Masyarakat Inklusif	Telah ada Forum Anak Daerah dan Unit Layanan Disabilitas di 2 distrik	Masih minimnya akses penyandang disabilitas dan lansia terhadap layanan dasar dan pekerjaan

Sumber: BPS Keerom 2024, BKKBN Papua 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keerom (DP3A).

Sementara itu, kesetaraan gender memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan partisipasi sosial. Pada sisi lain masyarakat inklusif mencerminkan lingkungan sosial yang terbuka dan menerima keberagaman sekaligus memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam proses pembangunan. Hal ini sesuai dengan SDGs dan kondisi sosial Kabupaten Keerom.

Melalui visi Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif, Kabupaten Keerom menegaskan komitmennya untuk membangun manusia yang berdaya, keluarga yang tangguh, perempuan yang setara, serta masyarakat yang terbuka bagi semua. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, kasih, dan kesetaraan dalam keberagaman menjadi landasan moral untuk mewujudkan Keerom sebagai tanah perbatasan yang humanis, adil, dan berkeadilan sosial.

Tabel. 2.35
Indikator Capaian Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif di Kabupaten Keerom Tahun 2024

Indikator	Kondisi 2024	Target 2030
Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	60,3	70,0
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,1	92,0
Partisipasi perempuan dalam jabatan struktural	22%	30%
Desa/Kampung ramah anak dan inklusif	15%	50%
Kasus KDRT per 1000 rumah tangga	5,6	3,0
Fasilitas publik ramah disabilitas	20%	60%

Sumber: BKKBN Keerom, BPS Papua, DP3A Keerom, DP3A–Kemendes, DP3A–Polres, Dinas PUPR Keerom

Keluarga berkualitas mencerminkan ketahanan sosial dasar masyarakat Keerom, yang ditandai dengan kesejahteraan ekonomi, kesehatan keluarga, pendidikan anak, dan keharmonisan sosial. Kualitas keluarga di Keerom meningkat secara bertahap berkat

intervensi BKKBN, PKK, dan Dinas Sosial. Tantangan masih ada pada kesenjangan akses ekonomi, air bersih, dan pendidikan keluarga di daerah terpencil.

Kesetaraan gender menjadi fokus lintas sektor di Kabupaten Keerom, terutama dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi perempuan. Perempuan Keerom semakin berdaya dalam kegiatan sosial ekonomi, terutama di bidang pertanian, koperasi, dan kerajinan. Namun, masih terdapat kendala budaya dan akses pendidikan yang menghambat peningkatan peran perempuan di sektor formal dan pemerintahan.

Masyarakat inklusif di Keerom mencakup penghargaan terhadap keberagaman etnis, gender, dan kondisi sosial. Kabupaten ini memiliki populasi heterogen (penduduk asli Papua dan pendatang), sehingga kebijakan inklusi sosial menjadi penting. Keerom menunjukkan arah positif menuju masyarakat inklusif, terutama dengan pendekatan adat dan gereja dalam mengatasi perbedaan sosial. Tantangan ke depan adalah memperkuat layanan dasar bagi penyandang disabilitas dan perempuan kepala keluarga.

2.2.6.1. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana anak-anak mendapat perlindungan yang memadai dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Indeks ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program perlindungan anak dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung tumbuh kembang optimal, serta menjamin hak-hak anak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Tabel. 2.36
Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Keerom

Wilayah	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Klaster V Perlindungan Khusus	IPA	IPHA	IPKA
Kab.Keerom	48,91	67,28	65,37	31,56	54,02	53,91	53,85	48,25
Papua	30,34	66,45	59,47	19,1	39,07	43,43	44,57	34,72
Indonesia	49,04	78,64	77,15	33,96	73,61	63,3	60,33	75,21

Sumber : Indeks Perlindungan Anak 2022, Kemen PPPA

Perlindungan anak menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Dengan adanya sistem perlindungan yang kuat, anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan berdaya, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat. Berikut merupakan capaian Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Keerom.

2.2.6.2. Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) digunakan untuk mengukur sejauh mana kesenjangan gender terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perbedaan akses dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Indeks ini mencakup berbagai dimensi utama, seperti partisipasi dalam dunia kerja, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta tingkat kesejahteraan ekonomi. Semakin rendah angka ketimpangan gender, semakin setara kesempatan yang dimiliki oleh

perempuan dan laki-laki dalam berkontribusi terhadap pembangunan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam suatu masyarakat berdasarkan beberapa dimensi kunci seperti kesehatan, pendidikan dan partisipasi ekonomi. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang digunaan untuk mengukur kesejahteraan akses dan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

Tabel. 2.37
Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Keerom 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,584	0,530	0,571	0,534	0,498
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,23	86,32	87,46	87,92	88,13
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,31	59,83	54,04	63,87	68,98

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2025 (data diolah)

Dari tabel itu dapat kita lihat bahwa kinerja pembangunan gender di kabupaten keerom menunjukan kemajuan yang relatif stabil. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat dari 86,23 pada tahun 2020 menjadi 88,13 pada tahun 2024, mencerminkan perbaikan akses dan kualitas hidup perempuan dalam akses kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga menunjukan tren positif, meningkat dari 59,31 di tahun 2020 menjadi 68,98 di tahun 2024, menandakan peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Sedangkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) masih menunjukan fluktuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kemajuan dalam pemberdayaan perempuan, masih terdapat tantangan dalam mengurangi ketimpangan antara perempuan dan laki-laki.

2.2.6.3. Pengembangan wilayah per distrik

Pengembangan wilayah per distrik di Kabupaten Keerom, diarahkan secara terpadu dan berjenjang, dengan memperkuat konektivitas antarwilayah, peme-rataan layanan dasar, serta optimalisasi potensi lokal sebagai dasar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Ditunjukkan bahwa Distrik Arso, Arso Timur, dan Skanto berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Distrik Mannem, Waris, dan Yaffi menjadi kawasan produksi pertanian dan ketahanan pangan berbasis perbatasan. Distrik Towe dan Web difokuskan sebagai kawasan konservasi, kehutanan, dan pengem-bangan wisata alam.

Kabupaten Keerom terdiri dari beberapa distrik dengan karakteristik yang berbeda-beda, baik dari aspek geografis, sosial-ekonomi, maupun potensi sumber daya alam. Oleh karena itu, arah pengembangan wilayah diarahkan secara spesifik per distrik, dengan mempertimbangkan fungsi strategis, keterkaitan antarwilayah, serta kapasitas dukung lingkungan dan infrastruktur. Secara umum, pengembangan wilayah di Keerom diarahkan pada pemerataan pembangunan antar distrik, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta penciptaan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan dengan PNG.

2.3. Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam perencanaan pembangunan daerah, karena menentukan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kabupaten Keerom, sebagai salah satu daerah perbatasan strategis di Provinsi Papua, memiliki beragam potensi, namun juga menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan daya saingnya.

Daya saing Kabupaten Keerom dipengaruhi oleh kombinasi lokasi strategis perbatasan, potensi sumber daya alam, dan keterbatasan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan. Untuk meningkatkan daya saing perlu intervensi terfokus: perbaikan konektivitas dan logistik, penguatan SDM dan kewirausahaan lokal, tata kelola investasi yang jelas, dan strategi nilai tambah berbasis sumber daya lokal serta konservasi. Pada konteks ini, sejumlah faktor yang mempengaruhi daya saing adalah:

1. Lokasi Geografis dan Aksesibilitas. Posisi perbatasan memberikan peluang pasar lintas-negara, arus barang, diplomasi sub-nasional, sekaligus menim-bulkan tantangan keamanan dan regulasi. Berdampak pada potensi perda-gangan lintas batas dapat meningkatkan pendapatan lokal dan lapangan kerja tetapi membutuhkan mekanisme legal, infrastruktur PLBN, dan pengawasan. Keterbatasan akses (jalan, jembatan) meng-hambat biaya logistik dan waktu tempuh, menurunkan produktivitas petani dan UMKM.
2. Infrastruktur Fisik (transportasi, energi, air). Infrastruktur menurun-kan biaya transaksi, mendukung produktivitas, dan menarik investor. Berdampak pada jalan rusak dan jaringan listrik terbatas menaikkan biaya produksi, memperkecil daya saing produk lokal di pasar regional. Kurangnya fasilitas *cold chain* menekan kemampuan ekspor produk hortikultura.
3. SDM dan Pendidikan. Kualitas tenaga kerja menentukan kemam-puan adopsi teknologi, produktivitas, dan kapasitas entrepreneur-ship. Berdampak pada kekurangan guru berkualifikasi, tenaga kesehatan, dan keteram-pilan teknis menurunkan produktivitas ekonomi sektor formal. Rendahnya kapasitas pemasaran digital menghambat penetrasi pasar wisata dan produk lokal.
4. Struktur Ekonomi dan Nilai Tambah (Komposisi Sektor). Ekonomi yang bergantung pada komoditas primer rentan terhadap harga dan volume; nilai tambah meningkat pendapatan. Berdampak pada dominasi subsistence agriculture dan ekonomi informal membuat pendapatan rendah dan volatil. Minimnya agro-processing memaksa penjualan bahan baku murah.
5. Akses Pasar dan Konektivitas Digital. Pasar yang lebih luas dan perdagangan digital memperbesar peluang skala dan margin. Berdampak pada jaringan telekomunikasi yang lemah membatasi pemasaran digital, e-commerce, dan layanan publik digital (perizinan, promosi wisata).
6. Kelembagaan, Tata Kelola dan Regulasi Lokal. Kepastian aturan, pelayanan terpadu OPD, dan kualitas perizinan menentukan iklim investasi. Berdampak pada tata kelola lemah, tumpang tindih kewenangan, proses perizinan lambat, alokasi dana tidak efisien, menurunkan minat investor dan efisiensi penggu-naan anggaran.
7. Modal Sosial dan Budaya Lokal. Adat, kepemimpinan lokal, dan jaringan komunitas pengaruhi kepatuhan, konservasi, dan keberlanjutan program. Berdampak pada kondisi jika adat dilibatkan, proyek lebih berkelanjutan; jika diabaikan, risiko konflik lahan. Budaya juga menjadi aset pariwisata.
8. Lingkungan dan Keberlanjutan (Risiko Iklim). Degradasi lingkungan

menurun-kan produktivitas jangka panjang; perubahan iklim mempengaruhi hasil pertanian dan infrastruktur. Berdampak pada erosi, sedimentasi saluran irigasi, dan perubahan pola hujan mengurangi IP (Indeks Pertanaman) dan meningkatkan biaya pemeliharaan infrastruktur.

9. Keamanan dan Stabilitas (Termasuk Penegakan Perbatasan). Keamanan mempengaruhi wisata, investasi, dan arus barang manusia. Berdampak pada isu lintas batas (penyelundupan, pergerakan tak tercatat) meningkat-kan biaya pengawasan dan risiko reputasi.
10. Akses Pembiayaan dan Layanan Keuangan. Pembiayaan memung-kinkan skala usaha, modernisasi, dan investasi infrastruktur lokal. Berdampak pada akses kredit formal, UMKM tidak bertransformasi; ketergantungan pada rentenir atau modal sendiri.

Analisis perbandingan daya saing Kabupaten Keerom dengan beberapa kabupaten/kota lainnya, dikemukakan seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Biak Numfor, Merauke. Analisis tersebut merupakan gabungkan indikator kunci (IPM/HDI, ukuran ekonomi/ PDRB, struktur ekonomi dan lapangan kerja, infrastruktur dan konektivitas, pariwisata dan potensi sumber daya, kapabilitas pemerintah daerah, sebagai berikut.

Tabel. 2.38
Komparasi Indikator Utama Antar Kabupaten/Kota

Indikator utama	Kabupaten Keerom	Kabupaten/Kota				
		Kota Jayapura	Kab Jayapura	Kab Sarmi	Kab Biak Numfor	Kab Merauke
IPM/HDI (status recent)	Sedang-Keerom termasuk kategori sedang; IPM meningkat tetapi masih di bawah kota besar.	Tinggi-Kota Jayapura tertinggi provinsi (≈81.98 pada 2024). wartaplus.com	Tinggi–Sedang-lebih baik dari se-bagian kabupaten di pedalaman (lebih dekat ke akses dan layanan provinsi	Sedang–Rendah-sering terpengaruh keterpencilan dan layanan dasar lebih terbatas.	Tinggi–Sedang-pulau besar dengan konekti-vitas laut; variatif.	Sedang-basis agraris besar, pelabuhan, tapi layanan/SDM menantang. Jubi
Ukuran Ekonomi (PDRB total/trend)	Kecil–meningkat-PDRB Keerom meningkat 2020–2024; ekonomi dominan pertanian.	Paling besar di provinsi (kota pusat ekonomi & jasa)	Lebih besar dari Keerom (area kabupaten dengan aktivitas komersial)	Lebih kecil dari Keerom (ekonomi wilayah pesisir/ pertanian skala kecil)	Lebih besar (penopang ekono-mi regional lewat pelabuhan dan perdagangan)	Besar di sektor per-tanian/ekspor lokal (Merauke lumbung pangan)
Struktur eko-nomi (dominant sektor)	Pertanian subsisten/ komoditas lokal (≈>60% tenaga kerja dpertanian.	Jasa, pemerintahan, perdagangan	Pertanian + jasa penopang kota provinsi	Perikanan & pertanian lokal	Perikanan, perdagangan, jasa pelabuhan	Pertanian intensif (pertanian lahan luas)
Infrastruktur dan konektivitas	Terbatas jaringan jalan primer relatif ada; jalan produksi & akses antar kampung bermasalah; telekomunikasi terbatas di pedalaman.	Sangat baik (bandara, pelabuhan, jaringan telekom)	Lebih baik dari Keerom (keterkaitan ke Jayapura)	Terbatas	Cukup baik di pusat kota/ pelabuhan	Baik pada koridor produksi ekspor
Pariwisata dan potensi sumber daya alam	Tinggi potensi (ekowisata budaya, perbatasan) tapi kunjungan rendah (~5.000/tahun estimasi)	Tinggi (akses dan fasilitas lengkap)	Menengah	Menengah (potensi alam)	Menengah-Tinggi (wisata bahari dan sejarah)	Menengah (wisata alam dan agro)
Tata kelola dan kapasitas OPD	Sedang–perlu penguatan (keterbatasan SDM, birokrasi, data).	Lebih kuat (kapasitas administrasi kota)	Lebih kuat dari kabupaten pedalaman	Terbatas	Variatif	Cukup

Sumber: publikasi BPS Kabupaten Keerom (PDRB 2020–2024) dan BPS Provinsi Papua (IPM/HDI serta indikator sektoral).

Data perbandingan tersebut, mengandung makna bahwa:

1. Kekuatan Keerom
   - Posisi perbatasan, potensi perdagangan lintas-negara, nilai strategis keamanan dan diplomasi sub-nasional.
   - Sumber daya alam (hutan, air terjun, lahan pertanian irigasi), peluang pariwisata dan ketahanan pangan.

2. Kelemahan yang menurunkan daya saing relatif
   - Skala ekonomi kecil (PDRB total jauh di bawah pusat provinsi), dominasi pertanian subsisten, nilai tambah rendah.
   - Konektivitas dan infrastruktur produksi terbatas (jalan tani, cold-chain, telekomunikasi), meningkatkan biaya logistik dan meng-hambat akses pasar.
   - SDM & layanan publik (kualitas pendidikan, kesehatan, kapasitas OPD) masih gap dibanding kota besar, mempengaruhi IPM/ kapasitas inovasi.

3. Diferensiasi kompetitif (ruang peluang)
   - Keerom bisa memposisikan diri sebagai koridor pariwisata perbat-asan dan lumbung pangan berkelanjutan—nilai unik yang tidak dimiliki semua kabupaten. Namun diperlukan transformasi (akses, tata kelola, dan pembiayaan) agar potensi jadi produktif dan kompetitif.

Adapun strategi peningkatan daya saing Kabupaten Keerom yang dikem-bangkan adalah:

Strategi Utama:
- Diversifikasi Ekonomi Daerah. Kembangkan sektor unggulan berbasis SDA lokal (pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata) dengan nilai tambah
- Peningkatan Nilai Tambah Produk. Hilirisasi pertanian dan pengo-lahan pascapanen
- Pariwisata Produktif. Transformasi potensi wisata alam dan budaya menjadi ekonomi daerah

Strategi Peningkatan Daya Saing SDM dan inklusivitas Sosial
- Peningkatan mutu pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis potensi lokal
- Penguatan layanan dasar dan gizi masyarakat
- Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan masyarakat adat

Strategi Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
- Meningkatkan konektivitas antar-distrik dan antarnegara
- Mendukung efisiensi ekonomi dan pelayanan publik
- Meningkatkan kualitas permukiman dan air bersih

Strategi Penguatan Tata Kelola dan Inovasi Daerah
- Reformasi birokrasi, *government,* dan pelayanan publik
- Kerjasama lintas wilayah, swasta, dan lembaga internasional
- Penguatan basis data pembangunan dan inovasi layanan

Strategi Ekologi dan Ketahanan Wilayah
- Pemanfaatan sumber daya berkelanjutan
- Mengurangi risiko ekologis wilayah

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

IPM Kabupaten Keerom menunjukkan tren peningkatan yang kuat selama lima tahun terakhir, seperti terlihat capaian IPM naik dari 66,40 pada 2020 menjadi 69,87 pada 2024, atau meningkat hampir 3,5 poin dalam lima tahun, yang merupakan kinerja sangat positif. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam tiga komponen utama IPM, yaitu peningkatan harapan hidup, rata-rata dan harapan lama sekolah bertambah, serta meningkatnya daya beli dan konsumsi. Peningkatan IPM ini menunjukkan bahwa daya saing SDM Keerom secara umum mengalami kemajuan, meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi Papua.

Tabel 2.39
Perkembangan IPM dan Laku Pertumbuhan PDRB Perkapita
Kabupaten Keerom Tahun 2019-2024

Tahun	IPM	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita	Angka Ketergantungan
2019	66,69	-	-
2020	66,40	0,13	67,21
2021	66,49	2,63	67,46
2022	67,24	2,91	67,45
2023	69,25	2,03	67,26
2024	69,87	3,20	66,73

Sumber : RPJPD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2045, KLHS RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, BPS Kabupaten Keerom 2025

Pertumbuhan PDRB per kapita menggambarkan peningkatan rata-rata output ekonomi per individu, yang secara tidak langsung mencerminkan produktivitas dan daya saing SDM di daerah tersebut. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa pada 2020, pertumbuhan nyaris stagnan (0,13%), kemungkinan besar akibat dampak pandemi COVID-19 yang melemahkan aktivitas ekonomi nasional maupun lokal. Sejak 2021, terjadi tren pemulihan dan penguatan, dengan pertumbuhan stabil di atas 2%, dan mencapai puncaknya pada 2024 dengan 3,20%.

Pertumbuhan per kapita yang positif mengindikasikan bahwa SDM Keerom mulai berkontribusi lebih besar terhadap aktivitas ekonomi, baik melalui produktivitas maupun kewirausahaan. Namun, agar pertumbuhan ini benar-benar mencerminkan peningkatan daya saing SDM, dibutuhkan intervensi pada aspek pendidikan dan pelatihan vokasi, kesehatan masyarakat, literasi digital dan inovasi, penguatan kapasitas kerja masyarakat usia produktif.

Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) di Keerom menunjukkan tren penurunan bertahap, yang merupakan sinyal positif bagi ketahanan ekonomi keluarga dan kapasitas kerja penduduk. Penurunan angka ketergantungan dari 67,46 (2021) ke 66,73 (2024) berarti jumlah penduduk usia produktif meningkat proporsional terhadap non-produktif. Ini memberikan peluang demografis (bonus demografi) jika diiringi peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja.

Secara keseluruhan capaian indikator-indikator daya saing SDM menunjukkan bahwa Kabupaten Keerom berada pada jalur peningkatan daya saing SDM, ditandai oleh IPM yang meningkat signifikan, penurunan angka ketergantungan, menandakan peningkatan potensi tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan PDRB per kapita meningkat, meski masih rendah dan perlu didorong dengan diversifikasi ekonomi. Namun demikian, tantangan utama masih terletak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja dan belum meratanya kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, khususnya di wilayah pedalaman.

2.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Keerom selama enam tahun terakhir relatif rendah dan stagnan, yaitu berkisar antara 5,53%–5,67%. Nilai ini mengindikasikan bahwa aktivitas pengolahan hasil pertanian, perkebunan, maupun industri rumah tangga belum berkembang secara signifikan. Padahal, sektor ini seharusnya menjadi lokomotif peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi daerah, terutama jika didorong dengan adopsi teknologi tepat guna dan proses hilirisasi. Stagnasi ini juga menandakan bahwa penerapan iptek dalam proses produksi, manufaktur, dan pengolahan masih sangat terbatas. Ketiadaan kawasan industri, minimnya insentif investasi industri, serta rendahnya kapasitas pelaku usaha lokal dalam mengadopsi inovasi turut memperlemah performa sektor ini. Dengan demikian, peluang pengem-bangan ekonomi berbasis iptek dan industrialisasi lokal masih belum tergarap optimal.

Tabel 2.40
Perkembangan Rasio PDRB, UMKM, IID dan TPK
Kabupaten Keerom, 2019-2024

Tahun	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (%)	Jumlah UMKM (unit)	Indeks Inovasi Daerah	TPAK (%)
2019	5,55	0,95		-	76,39
2020	5,53	0,98	5.000	03,00	76,84
2021	5,53	1,03	5.500	48.04	76,91
2022	5,67	1,09	6.000	36,91	74,75
2023	5,67	1,09	6,500	11,80	76,79
2024	5,54	1,10	7,000	13,88	78,92

Sumber: RPJPD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2045, KLHS RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, BPS Kabupaten Keerom 2025

Rasio PDRB sektor akomodasi dan makan minum menunjukkan tren pertumbuhan positif dari 0,95% pada 2019 menjadi 1,10% pada 2024. Walaupun masih kecil dalam struktur PDRB keseluruhan, pertumbuhan ini menunjukkan adanya dinamika produktivitas ekonomi lokal, terutama dari sektor informal dan UMKM berbasis jasa. Kenaikan ini berpotensi dikaitkan dengan munculnya usaha kuliner, penginapan lokal, serta pelayanan pendukung kegiatan pemerintahan dan masyarakat. Sektor ini biasanya padat karya dan relatif cepat tumbuh dengan dukungan promosi, pelatihan wirausaha, dan akses pembiayaan mikro. Potensi inovasi dalam penyajian produk dan layanan berbasis budaya lokal menjadi kekuatan Kabupaten Keerom jika dikembangkan dengan baik.

Selama lima tahun terakhir, jumlah UMKM di Kabupaten Keerom mengalami peningkatan konsisten rata-rata 500 unit per tahun. Dari 5.000 unit pada 2020, meningkat menjadi 7.000 unit pada 2024—bertumbuh sebesar 40% dalam lima tahun. Ini merupakan indikator positif bahwa sektor informal dan ekonomi lokal semakin dinamis. Pertumbuhan ini mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi produktif, terutama pada sektor perdagangan, kuliner, jasa, dan kerajinan.

Meningkatnya jumlah UMKM menunjukkan bahwa struktur ekonomi Keerom semakin inklusif dan berbasis kerakyatan. UMKM berperan penting dalam menyerap tenaga kerja lokal, khususnya dari kelompok usia produktif dan perempuan; meningkatkan pendapatan rumah tangga, terutama di wilayah kampung dan pinggiran; memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan produk ekonomi lokal. Namun demikian, jumlah UMKM yang bertambah belum tentu langsung meningkatkan produktivitas ekonomi daerah apabila tidak disertai dengan skala usaha yang meningkat, kualitas produk yang bersaing, dan akses terhadap pasar, teknologi, dan pembiayaan.

Indeks Inovasi Daerah Keerom menunjukkan fluktuasi tajam dan tren menurun yang mengindikasikan kelemahan dalam tata kelola inovasi. Setelah mencatat capaian yang tinggi pada 2021 (48,04), indeks ini turun drastis menjadi 11,80 pada 2023, dan hanya naik tipis menjadi 13,88 pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas inovasi kelembagaan dan ekosistem inovasi lokal masih lemah dan tidak terlembaga secara sistemik. Rendahnya skor inovasi menunjukkan keterbatasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penguatan regulasi yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas lokal. Selain itu, kurangnya kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan perguruan tinggi semakin memperlemah inovasi berbasis kebutuhan lokal.

Selama enam tahun terakhir, TPAK Kabupaten Keerom menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi dan relatif stabil. Dengan capaian TPAK>74% setiap tahun, ini berarti lebih dari tiga perempat penduduk usia kerja di Keerom aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Angka TPAK Keerom tergolong tinggi dibanding rata-rata provinsi dan nasional, mencerminkan potensi tenaga kerja yang besar. Tingginya TPAK mengindikasikan ketersediaan sumber daya manusia produktif dalam jumlah besar.

Oleh karena itu, produktivitas ekonomi Keerom cenderung rendah meskipun TPAK tinggi, karena struktur ekonomi belum diarahkan pada sektor yang mendukung transformasi struktural dan inovasi. Namun, tingginya partisipasi tidak serta-merta menunjukkan produktivitas tinggi, karena

- Sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor pertanian tradisional yang padat karya namun rendah produktivitas dan nilai tambahnya.
- Lapangan kerja modern atau berbasis inovasi dan iptek masih terbatas, khususnya industri pengolahan, jasa profesional, dan teknologi informasi.
- Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan (sebagian besar tenaga kerja berpendidikan SMP ke bawah) membatasi kemampuan adaptasi terhadap inovasi.

2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau

Secara umum Keerom sudah memasukkan prinsip ekonomi hijau ke dalam perencanaan wilayah (RPJMD/RKPD) dan melaksanakan beberapa program nyata, terutama pada sektor pertanian/komoditas (kakao), penguatan tata kelola lingkungan (KLHS), serta pembangunan infrastruktur perbatasan yang berdampak ekonomi. Namun tantangan besar tetap ada: tingkat kemiskinan dan kebutuhan peningkatan nilai tambah produk lokal, antara lain adalah:

1. Program Green Economy Growth (GEG). Pemerintah/mitra pernah menyalurkan bantuan bibit kakao dan dukungan untuk menjadikan kakao sebagai komoditas unggulan di kampung–kampung Keerom (program tercatat/diwartakan Maret 2022). Ini contoh pelaksanaan ekonomi hijau berbasis komoditas lokal dan pengembangan UMKM agraris.
2. Pengintegrasian ekonomi hijau dalam perencanaan daerah. Pemerintah kabupaten melaksanakan Kickoff & sosialisasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai bagian dari penyusunan RPJPD 2025–2045 (June 24, 2024). Dokumen RKPD, RPJMD Provinsi dan Kabupaten juga menempatkan pembangunan berkelanjutan/green economy sebagai arah kebijakan. Ini menandakan adanya upaya tata kelola kebijakan yang mendukung ekonomi hijau jangka panjang.
3. Dukungan infrastruktur & integrasi perbatasan (dampak ekonomi hijau tidak langsung). Pembangunan fasilitas perbatasan (PLBN) dan infrastruktur lain dipandang memperkuat sektor perekonomian Kabupaten Keerom dan membuka peluang pemasaran/akses komoditas lokal yang berkelanjutan. Infrastruktur ini memengaruhi potensi ekonomi hijau dengan membuka pasar dan layanan pendukung.

4. Data ekonomi dan sosial (konteks kebutuhan program). Jumlah penduduk Keerom (proyeksi 2022): sekitar 62.160 jiwa. (sumber BPS Kabupaten Keerom). Tingkat kemiskinan (angka yang dilaporkan di beberapa kajian 2023/2024): studi/jurnal menyebutkan angka kemiskinan Keerom cukup tinggi, tercatat 29,6% pada 2023 dalam beberapa publikasi analisis (menunjukkan keren-tanan sosial-ekonomi yang besar dan kebutuhan program yang lebih intensif untuk manfaat pro-poor dari ekonomi hijau). (Catatan: angka kemiskinan resmi lengkap tersedia di publikasi BPS Kabupaten/Provinsi). PDRB & statistik ekonomi lokal: BPS Kabupaten Keerom menerbitkan publikasi PDRB 2019–2023 dan indikator kesejahteraan rakyat 2023, sumber data primer untuk melihat kontribusi sektor pertanian, industri, dan jasa terhadap ekonomi lokal (berguna untuk mengukur dampak ekonomi hijau terhadap PDRB).

Terkait dengan itu, dilakukan adopsi kebijakan dan kajian lingkungan [KLHS] sebagai kerangka kebijakan dasar. Melalui intervensi lapangan [misalnya: program kakao (bantuan bibit, UMKM) yang mendorong secara nyata pemberdayaan berbasis masyarakat. Upaya sinergi lintas-level pemerintahan, dilakukan dengan keterlibatan Kementerian terkait dan Pemda Provinsi Papua, (mis. program GEG, dukungan PLBN, modal institusional untuk skala lebih luas).

Tantangannya adalah: (1) Tingkat kemiskinan yang masih tinggi (29,6%) menunjukkan bahwa manfaat ekonomi hijau belum tersebar merata atau belum menghasilkan penurunan kemiskinan yang signifikan. (2) Keterbatasan nilai tambah: banyak program masih fokus penyediaan input (bibit), perlu langkah lanjut (pelatihan pengolahan, akses pasar, sertifikasi, pengolahan pasca-panennya). (3) Data pengukuran dampak yang masih terbatas: publikasi BPS dan dokumen RPJMD menyediakan baseline, tapi evaluasi kuantitatif tentang berapa banyak rumah tangga yang meningkat pendapatannya lewat program ekonomi hijau belum dipublikasikan secara rinci.

Tabel 2.41
Perkembangan Bauran Energi Terbarukan
di Kabupaten Keerom, 2019-2024

Tahun	Bauran Energi Terbarukan
2019	9,19
2020	11,27
2021	12,16
2022	12,23
2023	-
2024	-

Sumber: RPJPD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2045, KLHS RPJMD Kab. Keerom Tahun 2025-2029, BPS Kabupaten Keerom 2025

Kenaikan bauran ET menunjukkan bahwa Kabupaten Keerom mulai Paralel dengan hai itu maka dibutuhkan adanya bauran Energi Terbarukan (ET) menggambarkan porsi energi terbarukan (PLTS, PLTMH, bioenergi, dsb.) dalam total konsumsi energi di wilayah. Data menunjukkan: peningkatan konsisten dari 9,19% pada 2019 ke 12,23% pada tahun 2022. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2019–2020 (+2,08 poin), menandakan akselerasi awal yang baik. Namun, laju peningkatan melambat tajam pada 2021–2022 (+0,07 poin), menunjukkan bahwa pengembangan ET mulai menghadapi tantangan teknis atau struktural.bertransisi ke arah energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, namun transformasi ini masih dalam tahap awal. Beberapa tantangan yang mungkin menyebabkan melambatnya pertumbuhan ET antara lain terbatasnya infrastruktur pendukung dan investasi hijau, khususnya di wilayah pedalaman; minimnya insentif dan regulasi daerah untuk pengembangan energi terbarukan skala kecil; dan keterbatasan SDM dan teknologi lokal untuk mengelola dan memelihara instalasi ET seperti PLTS atau PLTMH.

2.3.4. Transformasi Digital

Pembangunan BTS 4G di Desa Sawyatami telah mendapatkan BTS 4G baru yang diresmikan oleh BAKTI Kominfo, sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk memperluas jaringan internet ke daerah perbatasan. Ini meningkatkan akses koneksi internet berkualitas bagi masyarakat di wilayah terpencil. Hal ini menunjukkan adanya prioritas layanan digital di daerah Kabupaten Keerom. Sementara itu, Videotron & Akses Internet & Tanda Tangan Elektronik (TTE) diterapkan secara optimal. Pada 2024, telah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Videotron, akses internet, dan peluncuran sistem Tanda Tangan Elektronik di Kabupaten Keerom. Misalnya, Videotron akan dipasang di Keerom sebagai sarana informasi publik dan hiburan, dengan harapan memperkuat penyebaran informasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Terkait dengan Akses Internet untuk Layanan Publik, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kominfo menyerahkan secara simbolis perangkat akses internet kepada beberapa lembaga di Keerom, termasuk kantor Klasis Keerom, kantor sekretariat dekanat Katolik Keerom, Puskesmas Arso VIII, dan SMP YPK Mahanaim Yetti. Tujuannya adalah agar lembaga-lembaga tersebut bisa memanfaatkan internet untuk layanan, pendidikan, administrasi, dan komunikasi. Demikian halnya dengan aspek digitalisasi Data Fiskal Pemerintah Daerah, terdapat publikasi karya ilmiah yang membahas tentang *Digitalisasi Manajemen Data Fiskal Daerah melalui Sistem Informasi berbasis web* di Kabupaten Keerom. Namun, sampai laporan tersebut, pengelolaan data wajib pajak masih banyak yang dilakukan secara manual (menggunakan Microsoft Excel) dan belum tersosialisasi secara luas mengenai kewajiban/tunggakan pajak kepada masyarakat.

Indeks SPBE adalah ukuran tingkat kematangan dan kapabilitas digital pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan layanan berbasis elektronik. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Keerom sempat berada di skor 1,69 pada 2019–2020, kemudian indeks mengalami penurunan drastis ke 1,09 pada 2021, dan meskipun sempat membaik ke 1,43 di 2023, kembali melemah menjadi 1,14 di 2024. Tren ini mencerminkan inkonsistensi dalam kebijakan dan implementasi transformasi digital, serta kemungkinan kendala dalam pengelolaan infrastruktur TIK, regulasi, dan sumber daya manusia aparatur. Dengan kisaran skor <1,5 (skala 0–5), ini menunjukkan bahwa kematangan digital Keerom masih berada pada tahap awal (initiating–developing) dan belum mampu memberikan layanan digital yang terintegrasi, terbuka, dan responsif.

Tabel 2.42
Indeks SPBE Kabupaten Keerom, 2019-2024

Tahun	Indeks SPBE	Jumlah e-goverment (aplikasi)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband (%)
2019	1,69	N/A	N/A
2020	1,69	N/A	N/A
2021	1,09	N/A	25
2022	1,39	4	27
2023	1,43	5	37
2024	1,14	6	30,5

Sumber : RPJPD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2045, KLHS RPJMD Kab Keerom Tahun 2025-2029, BPS Kabupaten Keerom 2025

Jumlah aplikasi e-Government Keerom mengalami pertumbuhan secara kuantitatif dalam tiga tahun terakhir. Meski terdapat kenaikan jumlah aplikasi, peningkatannya relatif lambat (bertambah satu aplikasi per tahun) dan belum mencerminkan transformasi digital yang strategis dan lintas sektor. Belum ada indikasi apakah aplikasi tersebut saling terintegrasi, memiliki interoperabilitas data, atau difokuskan pada pelayanan publik prioritas (kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan). Hal ini dapat

menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi belum berdasarkan peta jalan SPBE yang sistematis, melainkan bersifat sektoral dan belum terkoordinasi antar-OPD.

Proporsi penduduk terlayani mobile broadband mencerminkan tingkat keterjangkauan akses internet seluler berkecepatan tinggi (3G/4G/5G) yang merupakan infrastruktur kunci dalam transformasi digital masyarakat dan pemerintahan. Pada 2021, baru 25% penduduk Keerom yang terlayani. Proporsi ini meningkat menjadi 37% pada 2023, namun justru mengalami penurunan menjadi 30,5% pada 2024. Secara rata-rata dalam empat tahun terakhir, hanya sekitar sepertiga penduduk Keerom yang memiliki akses mobile broadband yang memadai.

Capaian ini mengindikasikan bahwa transformasi digital Keerom masih dalam tahap awal, dan belum menjangkau sebagian besar penduduk, terutama mereka yang tinggal di wilayah pedalaman atau terpencil. Penurunan pada 2024 juga mencerminkan masalah keberlanjutan infrastruktur atau gangguan pelayanan, seperti kerusakan BTS, lemahnya sinyal, atau kurangnya dukungan operasional dari operator. Transformasi digital di Kabupaten Keerom dari sisi infrastruktur dasar seperti mobile broadband masih sangat terbatas, dengan capaian proporsi akses yang belum mencapai 40% bahkan pada tahun 2024. Penurunan akses pada 2024 menjadi alarm penting bahwa pembangunan infrastruktur digital perlu diperkuat dan dijaga keberlanjutannya. Kabupaten Keerom belum menunju-kkan capaian yang kuat dalam transformasi digital. Meskipun jumlah aplikasi e-Government meningkat, kualitas dan efektivitas implementasi SPBE masih rendah dan tidak stabil. Dibutuhkan perencanaan strategis dan investasi digital yang terintegrasi untuk mendorong loncatan digital pemerintahan dan layanan publik di daerah ini.

2.3.5. Integrasi Ekonomi

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan indikator utama investasi produktif dalam perekonomian, mencerminkan akumulasi aset tetap seperti bangunan, infrastruktur, mesin, dan sarana produksi lainnya. Selama periode 2019–2023, PMTB Keerom mengalami pertumbuhan moderat sebesar 16,7% atau rata-rata 4% per tahun.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa investasi fisik di daerah masih terus berjalan meskipun terbatas, mencerminkan adanya proyek-proyek pembangunan seperti jalan, fasilitas umum, dan sarana ekonomi. Namun, angka nominal PMTB masih tergolong rendah, menandakan bahwa skala investasi swasta dan PMA/PMDN di Keerom masih terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi ekonomi Keerom dalam jejaring ekonomi domestik dan regional belum kuat.

Tabel 2.43
Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2019-2023

Tahun	Pembentukan Modal Tetap Bruto (ribu rupiah)	Net Ekspor Barang dan Jasa (ribu rupiah)
2019	1.370	-1.568
2020	1.377	-1.538
2021	1.419	-1.535
2022	1.523	-1.678
2023	1.599	-1.788

Sumber: RPJPD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2045, KLHS RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, BPS Kabupaten Keerom 2025

Net Ekspor Barang dan Jasa (ekspor dikurangi impor) Kabupaten Keerom selama lima tahun berturut-turut berada pada angka negatif. Capaian ini mengindikasikan bahwa Keerom mengalami defisit perdagangan daerah, artinya nilai barang dan jasa yang dibeli dari luar daerah lebih tinggi dibanding yang dijual keluar. Defisit ini berkembang makin besar dari -1.535

menjadi -1.788 ribu rupiah dalam lima tahun. Fakta ini mengindikasikan beberapa hal: ketergantungan tinggi terhadap pasokan luar daerah, baik untuk konsumsi maupun bahan baku; minimnya basis produksi ekspor, baik di sektor pertanian, industri, maupun jasa; dan rendahnya peran pelaku usaha lokal dalam rantai pasok regional atau nasional. Implikasi capaian diatas terhadap integrasi ekonomi domestik dan global menunjukkan bahwa Kabupaten Keerom masih mengalami hambatan besar, yang ditandai oleh:

- Investasi fisik masih didominasi sektor publik (APBD/APBN), bukan swasta produktif.
- Konektivitas logistik dan infrastruktur distribusi masih terbatas.
- Produk lokal belum memiliki daya saing dan kapasitas menembus pasar luar daerah [ekspor].
- Ketergantungan tinggi pada pasokan luar memperlemah kemandirian ekonomi.

2.3.6. Perkotaan dan Perkampungan Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pada 2022 dan 2023, total panjang jalan tercatat cukup besar, yaitu sekitar 5.813 km, namun justru menurun menjadi 5.493 km pada 2024. Penurunan ini bisa disebabkan oleh reklasifikasi jalan, penghapusan aset, atau berkurangnya ruas fungsional akibat kerusakan. Meskipun cakupan jalan terlihat luas, kualitas dan konektivitas jalan antar distrik dan kampung tetap menjadi tantangan utama, terutama di daerah perbatasan dan pedalaman.

Penurunan panjang jalan menunjukkan perlunya pemeliharaan dan peren-canaan infrastruktur jalan secara berkelanjutan, agar konektivitas sebagai prasyarat pertumbuhan pusat-pusat wilayah tetap terjaga. Hingga 2023, akses hunian layak di Keerom masih berkisar di bawah 30%, menunjukkan keter-batasan kualitas perumahan dan akses dasar (air bersih, sanitasi, listrik). Namun pada 2024 terjadi lonjakan signifikan ke 62,16%, yang dapat mencerminkan intervensi program perumahan rakyat, rehabilitasi rumah tidak layak huni, atau perbaikan basis data pengukuran. Terjadi perbaikan drastis dalam kualitas permukiman masyarakat, yang merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan wilayah, terutama di perdesaan dan pinggiran perkotaan.

Tabel 2.44
Kondisi Perkotaan dan Perkampungan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Keerom, 2019-2024

Tahun	Total Panjang Jalan (km)	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani	Indeks Desa Membangun (IDM)
2019	-	25,19	-	0,5653
2020	-	28,56	32,47	0,5036
2021	-	28,92	26,52	0,5413
2022	5.813,873	27,28	26,30	0,5559
2023	5.813,873	29,01	26,13	0,5541
2024	5.493,640	62,16	26,0	0,5572

Sumber : RPJPD Tahun 2025-2045, KLHS RPJMD Kabupaten Keerom T 2025-2029, BPS Keerom 2025

Penanganan sampah mengalami penurunan tajam dari 32,47% (2020) ke 26% (2024), dan stagnan selama empat tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa sistem pengelolaan sampah di kawasan perkotaan, seperti Arso dan sekitarnya, masih lemah dan belum bertransformasi secara signifikan. Ketersediaan armada, TPS, TPA, serta partisipasi masyarakat masih menjadi kendala utama. Isu lingkungan kota seperti sampah menjadi hambatan daya saing wilayah, terutama dalam menarik investasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat urban. IDM Keerom masih berada

pada kisaran 0,55, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar desa masih berstatus tertinggal hingga berkembang, dan hanya sedikit yang masuk kategori maju atau mandiri. Fluktuasi indeks dari Tahun 2019-2024 cenderung stagnan, menunjukkan belum masifnya transformasi sosial-ekonomi di desa. Keterbatasan akses layanan dasar, rendahnya ekonomi lokal, serta kapasitas kelembagaan desa menjadi penyebab utama.

Untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan, perlu strategi pembangunan desa yang lebih komprehensif dan berbasis potensi lokal. Capaian daya saing wilayah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Keerom menunjukkan kemajuan yang belum merata, karena perumahan layak meningkat signifikan, menjadi sinyal positif perbaikan kualitas hidup masya rakat, namun panjang jalan dan pengelolaan sampah stagnan atau menurun, menghambat konektivitas dan kualitas lingkungan. IDM belum menunjukkan lompatan transformasi desa, sehingga potensi pusat pertum-buhan baru masih terbatas.

2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Inflasi Kabupaten Keerom relatif rendah dan stabil pada 2019–2021 (sekitar 1,7%–2,4%), mencerminkan situasi harga yang terkendali, serta pasokan kebutuhan pokok yang cukup. Lonjakan terjadi pada 2022 sebesar 5,68%, kemungkinan besar disebabkan oleh tekanan eksternal seperti kenaikan harga energi nasional, gangguan rantai pasok pasca-COVID-19, serta penye-suaian harga BBM dan transportasi.

Pemulihan terjadi pada 2023, dengan inflasi turun kembali ke 1,65%, yang mengindikasikan kinerja pengendalian harga yang membaik, didukung oleh koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), distribusi bahan pokok, dan stabilisasi pasokan pangan. Secara umum, tingkat inflasi Keerom cenderung stabil dan terkendali, mendukung kondisi makroekonomi yang aman bagi investasi dan konsumsi rumah tangga. Stabilitas ekonomi makro Kabupaten Keerom dari sisi fiskal lokal masih belum kuat. Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB yang berfluktuasi dan rata-rata rendah meng-indikasikan kemandirian fiskal yang masih terbatas, tingkat produktivitas pajak yang belum optimal, dan keterbatasan ruang fiskal untuk mengelola risiko ekonomi secara mandiri.

Tabel 2.45
Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Keerom Tahun 2019-2024

Tahun	Konstribusi PAD terhadap APBD (%)	Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB	Tingkat Inflasi
2019	2,20	3,01	1,73
2020	3,20	2,08	2,42
2021	-	1,73	1,70
2022	-	1,90	5,68
2023	2,78	1,53	1,65
2024	-	2,74	1,78

Sumber: RPJPD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2045, KLHS RPJMD Kab. Keerom Tahun 2025-2029, BPS Kabupaten Keerom 2025

Meskipun terdapat perbaikan di 2024, tren lima tahunan menunjukkan perlunya reformasi fiskal struktural secara menyeluruh. Tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Keerom terhadap transfer pusat masih sangat tinggi. Rendahnya rasio PAD mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang lemah, yang berpotensi membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam merespon dinamika ekonomi atau memberikan stimulus fiskal secara mandiri.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola Berintegritas dan Adaptif

Tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis dalam rangka transformasi tata kelola di Kabupaten Keerom. Upaya transformasi tata kelola dalam rangka mendorong penyelenggara pemerintahan Kabupaten Keerom untuk bekerja lebih efektif, efisien, akuntabel dan mampu memberi-kan pelayanan publik lebih optimal. Tata kelola pemerintahan Kabupaten Keerom ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan dinamis, pemerintahan senantiasa adaptif dan kolaboratif mampu menyesuaikan dalam menghadapi gejolak maupun perubahan yang seringkali terjadi lebih cepat melalui regulasi adaptif dan tidak tumpang tindih, SDM penyelenggara pemerintahan Kabupaten Keerom kompeten dan profesional.

Tabel 2.46
Capaian Indikator Kinerja Regulasi dan Tata Kelola Berintegritas dan Adaptif Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Indeks Reformasi Birokrasi	1.000	1.075	1.082	1.127	1.130
2	Indeks Pelayanan Publik	24.71	28.18	31.65	35.12	42.06
3	Indeks Integritas Nasional	58.92	61.47	65.02	69.57	71.53
4	Indeks Akses Keuangan Daerah	1.00	1.30	1.60	1.90	2.50
5	Indeks SPBE	1.04	1.09	1.10	1.12	1.14

Sumber: Data diolah, 2025 dari dokumen KPK, Kemenpan/RB, dan BPS Papua

Terdapat 5 ukuran kinerja, beberapa indikator kinerja cukup baru, sehingga beberapa kinerja dilakukan peramalan. Sehingga cukup membantu memberikan pandangan bagi proses Perencanaan Pembangunan Daerah, kinerja ramalan Indeks Reformasi Birokrasi, menilai sejauh mana instansi pemerintah Kabupaten Keerom, telah berhasil melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, Indeks Pelayanan Publik, mengukur kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah pada level Pemerintah Daerah, Distrik dan Kampung di Kabupaten Keerom, Indeks Integritas Nasional, mendeteksi dini potensi penyimpangan dan praktik korupsi di sektor publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom, Indeks Akses Keuangan Daerah, memetakan kondisi inklusi keuangan dan Indeks SPBE merupakan ukuran tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Keerom.

2.4.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penajaman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Keerom sesuai ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018, memperoleh hasil capaian aktual Tahun 2024–2025. Menjadi alat ukur minimum kinerja pemda Keerom dalam menyediakan layanan publik secara merata dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat atas infrastruktur pelayanan dasar, khususnya bidang jalan, air minum, drainase lingkungan, dan perumahan layak huni. Sebagai wilayah perbatasan negara dan daerah dengan kondisi geografis yang kompleks, Keerom menghadapi tantangan ketersediaan infrastruktur dasar, ketimpangan antar-distrik, serta keterbatasan sumber daya teknis dan fiskal.

Tabel 2.47
Kondisi Dasar Capaian SPM Kabupaten Keerom Tahun 2024 Untuk infrastuktur Jalan, Air Minum, Drainase, dan Perumahan

Bidang	Indikator Pokok	Capaian Keerom 2024	Permasalahan Utama
Jalan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi	±67,3% dari 837 km total	Keterbatasan dana pemeliharaan, defisit alat berat, akses distrik

Bidang	Indikator Pokok	Capaian Keerom 2024	Permasalahan Utama
Air Minum	mantap (%) Persentase rumah tangga terlayani jaringan air minum layak	±70,1% (BPS, PDAM Keerom)	terpencil Distribusi terbatas di distrik pedalaman, kapasitas IPA rendah
Drainase Lingkungan	Persentase kawasan permukiman dengan sistem drainase berfungsi	±52%	Belum ada sistem kawasan terpadu, sedimentasi tinggi
Perumahan	Persentase rumah tangga menempati rumah layak huni	±74%	Backlog rumah layak huni tinggi, bahan bangunan mahal di daerah perbatasan

Sumber: BPS dan PDAM Kabupaten Keerom. Disesuaikan

Pendekatannya melalui Integrasi Data SPM–SDGs: seluruh indikator SPM menjadi input utama dalam pengukuran SDGs tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dan tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan). Juga pemanfaatan Dana Transfer dan KPBU, prioritas penggunaan DAK Tematik "Infrastruktur Dasar" serta potensi kerja sama KPBU untuk air minum dan jalan strategis. Transformasi Digital dan Geospasial, pemutakhiran sistem GIS infrastruktur untuk memetakan gap layanan per distrik, serta Pemberdayaan Masyarakat Adat & Lokal: pengelolaan air dan drainase berbasis komunitas di wilayah adat (contoh: Distrik Waris, Towe, Web).

Tabel 2.48
Target Capaian SPM Kabupaten Keerom Tahun 2024 Untuk infrastuktur Jalan, Air Minum, Drainase dan Perumahan

Bidang	Indikator Kinerja SPM	Target 2025	Target 2027	Target 2029	Strategi Utama
Jalan Kabupaten	Persentase jalan mantap	72%	78%	85%	Peningkatan ruas strategis antar-distrik, rehabilitasi jalan poros Arso–Waris–Towe, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dan Otsus
Air Minum	Persentase rumah tangga berakses air minum layak	75%	82%	90%	Rehabilitasi SPAM Skanto–Arso, pembangunan jaringan distribusi desa, optimalisasi IPA Waris & Web
Drainase Lingkungan	Persentase kawasan permukiman dengan drainase berfungsi	55%	65%	75%	Penataan sistem drainase kawasan Arso–Skanto, revitalisasi saluran utama di pusat distrik
Perumahan	Persentase rumah tangga	77%	82%	90%	Program Rumah Layak Huni Otsus, bantuan PSU

Bidang	Indikator Kinerja SPM	Target 2025	Target 2027	Target 2029	Strategi Utama
	dengan rumah layak huni				permukiman baru, dan kemitraan CSR perumahan perbatasan

Sumber: BPS dan PDAM Kabupaten Keerom. DIsesuaikan

Penajaman SPM tersebut melalui pendekatan standarisasi teknis layanan minimum, pemetaan spasial cakupan layanan (jalan mantap, jaringan air, dan drainase) per distrik, dan Kolaborasi lintas-sektor: Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Perumahan, PDAM, PLN, dan dukungan Dana Otsus serta KPBU sektor perbatasan. Dengan penajaman SPM ini, Kabupaten Keerom menegaskan komitmen untuk mewujudkan pemerataan pelayanan dasar bidang PUPR hingga ke wilayah terluar dan perbatasan. Target 2029 diarahkan agar seluruh distrik mencapai minimal 85% layanan dasar jalan mantap, 90% akses air minum, dan 90% rumah layak huni, sejalan dengan prinsip pembangunan merata, layanan dasar tuntas.

2.4.3. Hukum, Keamanan dan Demokrasi

Memperkuat sistem hukum Kabupaten Keerom, termasuk penegakan hukum adil dan transparan. Hal ini mencakup pemberantasan korupsi, peningkatan pelayanan publik berbasis hukum, perlindungan hak-hak masya-rakat Keerom. Menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kabu-paten Keerom. Hal ini meliputi penanganan tindak kriminalitas, pencegahan konflik sosial, peningkatan keamanan di berbagai kondisi kehidupan masya-rakat Keerom. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Keerom, termasuk masyarakat, orga-nisasi masyarakat sipil, dunia usaha, lembaga pemerintahan lainnya, secara transparan dan akuntabel, sehingga seluruh masyarakat Keerom dapat mengakses informasi terkait pelaksanaan pembangunan.

Terdapat 8 ukuran kinerja, beberapa indikator kinerja cukup baru, sehingga beberapa kinerja dilakukan peramalan, untuk mendapatkan titik data awal Kinerja Hukum, Keamanan dan Demokrasi Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024. Sehingga cukup membantu memberikan pandangan bagi proses Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tabel 2.49
Capaian Indikator Kinerja Hukum, Keamanan dan Demokrasi Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Persentase Capaian Aksi HAM	50.00	52.55	55.10	57.65	60.20
2	Indeks Demokrasi Indonesia	59.42	61.97	64.52	67.07	67.64
3	Persentase Penduduk rasa aman jalan sendiri di area domisilinya	60.78	63.33	65.88	68.43	71.00
4	Persentase Perda atau Perkada yang ditegakkan	39.22	41.77	44.32	46.87	47.44
5	Indeks reformasi hukum	61.78	64.33	66.88	69.43	70.00
6	Indeks ketentraman-ketertiban	58.66	61.21	63.76	66.31	68.88
7	Indeks kerukunan umat beragama	68.24	70.79	73.34	75.89	76.46
8	Persentase tanah ulayat yang di tetapkan	50.58	53.13	55.68	58.23	58.80

Sumber: Data diolah, Tahun 2025 dari Kemenpan/RB, Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua. BPS Papua, dan Pemerintah Kabupaten Keerom

Kinerja ramalan tahun 2024 untuk Persentase Capaian Aksi HAM mencapai angka 60.20%, Indeks Demokrasi Indonesia tercatat 67.64,

sedangkan Persentase Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya dapat terhitung 71% Persentase Perda atau Perkada yang ditegakkan 47.44%, Indeks Reformasi Hukum 70, sedangkan Indeks Ketentraman dan Ketertiban sebesar 68.88, Indeks Kerukunan Umat Beragama 76.46 dan Persentase Tanah Ulayat yang di Tetapkan 58.80%.

2.4.4. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Kawasan

Diplomasi yang kuat berarti Kabupaten Keerom mampu menjalin hubungan baik dan kerjasama strategis dengan berbagai stakeholder pembangunan baik itu Pemerintah Daerah, Provinsi, TNI/POLRI ataupun sektor swasta. Terutama dalam isu-isu seperti keamanan, ekonomi, dan lingkungan hidup

Tabel 2.50
Capaian Indikator Kinerja Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Kawasan Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Indeks Daya Saing Daerah	2.21	2.87	2.92	3.38	3.43
2	Indeks Inovasi Daerah	36.33	38.88	41.43	43.98	44.55
3	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.078	1.333	1.588	1.843	1.900
4	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	49.58	52.13	54.68	57.23	58.80
5	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	35.00	37.55	40.10	42.65	43.22
6	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi Daerah	100	100	100	100	100
7	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP)	0.014	0.069	0.124	0.130	0.134
8	Kontribusi Terhadap PDRB Provinsi Papua	3.12	3.17	3.27	3.82	4.34
9	Cakupan Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan Wilayah Perbatasan	79.23	81.78	84.33	86.88	87.45

Sumber: Data diolah, Tahun 2025 dari BRIN, BSKDN, BPS Papua, BNPP dan Pemerintah Kabupaten Keerom

Salah satu subtansi bagi Kabupaten Keerom ialah Pengelolaan kawasan perbatasan RI/PNG secara terpadu untuk menjaga kedaulatan, kesejahteraan masyarakat OAP, mendorong pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan. Ini melibatkan berbagai aspek pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi serta penataan sosial dan budaya.

Terdapat 9 ukuran kinerja, beberapa indikator kinerja cukup baru, sehingga beberapa kinerja dilakukan peramalan, untuk mendapatkan titik data awal Kinerja Kabupaten Keerom. Untuk itu, secara rata-rata tahun 2020-2024 kinerja Indeks Daya Saing Daerah ialah 2.96, sedangkan untuk Indeks Inovasi Daerah dengan rata-rata kinerja yakni 41.03, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dikabupaten keerom mencapai rata-rata 1.55, sedangkan Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan mencapai angka 54.48, dan Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan hanya mencapai 39.70, Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi Daerah telah 100% namun cakupannya perlu ditingkatkan, sedangkan salah satu prioritas di Kabupaten Keerom untuk Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) hanya mencapai rata-rata 0.134, sedangkan Kontribusi Terhadap PDRB Provinsi Papua 3.54 dan untuk kinerja Cakupan Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan Wilayah Perbatasan mencapai 83.93.

2.4.5. Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

2.4.5.1. Urusan Pemerintah Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Kinerja Urusan Pemerintah Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kabu paten Keerom Tahun 2020-2024, merupakan amulasi dari kurang lebih 6 urusan antara lain: Sosial, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlin-dungan Masyarakat, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesehatan dan Pendidikan di Kabupaten Keerom.

Tabel 2.51
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintah
Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024*
1	**Pendidikan**					
1.1	Harapan Lama Sekolah	12.22	12.32	12.43	12.45	12.46
1.2	Rata-Rata Lama Sekolah	8.11	8.22	8.31	8.45	8.57
1.3	Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	32.10	35.51	38.92	39.33	40.22
1.4	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi dan Numerasi	36.40	36.44	36.48	36.52	37.06
1.5	Angka Partisipasi Murni SD/Sederajat	86.16	86.57	86.98	84.51	85.60
1.6	Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat	71.83	72.24	72.65	64.98	73.93
1.7	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/Sederajat	69.54	69.95	70.36	59.52	57.96
1.8	Angka Melek Huruf	93.84	93.86	95.21	95.23	94,82
2	**Kesehatan**					
2.1	Umur harapan hidup	66.69	66.78	67.04	67.24	67.24
2.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	28.73	25.51	25.29	34.62	34.40
2.3	Angka kematian ibu	4	1	3	4	4
2.4	Indeks keluarga sehat	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78
2.5	Rasio dokter per satuan Penduduk per 1.000 penduduk	0.45	0.67	0.89	1.11	1.34
2.6	Rasio tenaga perawat per satuan penduduk per 1.000 penduduk	2.19	2.41	2.63	2.85	3.08
2.7	Rasio tenaga bidan per satuan penduduk per 1000 penduduk	1.23	1.45	1.67	1.89	2.12
2.8	Jumlah kasus baru hiv/aids	24	55	64	43	54
2.9	Jumlah penderita TB paru terdaftar	47	59	111	131	145
2.10	Jumlah kasus malaria per 1.000 penduduk	433.11	388.23	411.03	503.73	518.60
3	**Pekerjaan umum dan penataan ruang**					
3.1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (persen)	40.02	40.02	48.33	50.51	60.00
3.2	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 (persen)	19.70	19.70	19.70	20.30	21.50
3.3	Persentase penduduk berakses air minum	16.99	14.60	14.60	14.60	17.60
3.4	Persentase areal kawasan kumuh	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026
3.5	Persentase tempat pemakaman umum di kampung	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3.6	Ketaatan terhadap RTRW	70.50	70.50	70.50	70.50	70.50
4	**Perumahan rakyat dan kawasan permukiman**					

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024*
4.1	Rasio rumah layak huni	14.30	14.30	14.70	12.20	13.00
4.2	Rasio permukiman layak huni	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
4.3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	15.38	20.98	22.01	20.01	22.01
5	**Ketenteraman dan ketertiban umum dan linmas**					
5.1	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	0.00	0.27	26.37	30.00	30.00
5.2	Jumlah petugas perlindungan masyarakat	192	300	448	450	450
5.3	Jumlah Ppetugas yang laksanakan pengamanan obyek vital	4	4	6	12	12
6	**Sosial**					
6.1	Persentase keluarga komunitas adat terpencil (KAT) yang dapat pemberdayaan sosial, peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT	8.13	6.10	12.19	18.29	24.39
6.2	Persentase pekerja sosia/tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial yang melaksanakan pena-nganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	100	100	100	100	100
6.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	12.99	15.54	25.48	38.22	76.43
6.4	Indeks Kesejahteaan Sosial	18.84	21.41	23.98	26.55	26.55

Sumber: Data diolah, 2025 dari Pemerintah Kabupaten Keerom dan BPS Papua

Pelayanan pendidikan di Kabupaten Keerom, memerlukan percepatan dan pemerataan. Walaupun secara makro pelayanan pendidikan di Kabupaten Keerom telah berjalan dengan baik. Namun terdapat beberapa daerah khususnya kawasan distrik yang memerlukan pelayanan pendidikan yang optimal dan memperhatikan kontekstual wilayah. Daya dukung dalam pembangunan manusia di Kabupaten Keerom 5 tahun mendatang, memerlukan pelayanan kesehatan yang prima. Dalam hal ini upaya, derajat, promosi, pemberdayaan hidup sehat masyarakat menjadi penting meletakkan pondasi pembangunan manusia di Kabupaten Keerom.

Salah satu input penting pelayanan publik ialah tersedianya aksesibilitas antar kabupaten, distrik, dan kampung. Diyakini dengan adanya sarana jalan yang memadai, mampu mendorong bertumbuhnya pemerataan pembangunan di Kabupaten Keerom. Terdapat beberapa tantangan penting dimana pada saat ini, penunjang kawasan tata ruang pemukiman belum maksimal dikelola. Pemakaman umum hanya tersedia masing-masing kampung. Selain itu juga terkait tata ruang, ialah belum adanya RDRT sehingga implementasi program yang bersinergi dengan pembangunan berkelanjutan belum maksimal. Potret lainnya ialah keberadaan trotoar jalan, irigasi, dan akses air minum yang diperlukan upaya peningkatan di Kabupaten Keerom, dalam menunjang pembangunan dimasa yang akan datang. Akses ketersediaan perumahan dan pemukiman masyarakat menjadi penting, tentunya berkaitan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Keerom. Dengan adanya akses perumahan dan kawasan pemukiman yang terkelola dengan baik, diharapkan menjadi penunjang dalam kerangka upaya pembangunan manusia keerom yang mampu berdaya saing dimasa yang akan datang.

Keberhasilan dalam mencipatakan kondisi yang aman dan nyaman

untuk keseluruhan masyarakat di Kabupaten Keerom merupakan tanggung-jawab pemerintah daerah. Ketentraman dan ketertiban umum mencirikan kondisi dimana kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang ada dan juga pemberdayaan masyarakat terhadap partisipasi dalam rangka menciptaka kondisi aman dan nyaman di Kabupaten Keerom.

Berbagai kebijakan Pemerintah telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Keerom diantaranya adalah penerima manfaat penyelenggaran kesejahteraan sosial melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masuk kedalam kategori : (i) anak meliputi balita, anak terlantar, anak putus sekolah, anak jelanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan, dan anak dalam situasi darurat (yang memerlukan perlindungan khusus), (ii) penyandang cacat (anak maupun dewasa), (iii) tuna sosial, (iv) lanjut usia (lansia) terlantar, dan (v) korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainya (Napza) serta penderita HIV/AIDS, mantan narapidana.

2.4.5.2. Urusan Pemerintah Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Kinerja Urusan Pemerintah Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan DasarKabupaten Keerom Tahun 2020-2024, merupakan amulasi dari kurang lebih 18 urusan antara lain: Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Keerom.

Tabel 2.52
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Tenaga Kerja					
1.1	Jumlah pencari kerja OAP	-	-	98	52	75
1.2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	4.443	5.162	4.661	4.985	4.813
1.3	Jumlah pencari kerja disektor informal	3.340	3.300	3.340	3.300	3.320
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.1	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang dapat ayanan Komprehensif	0.01	0.01	0.01	4.16	5.06
2.2	Indeks Pembangunan Gender	70.13	86.32	87.46	87.92	82.96
3	Pangan					
3.1	Konsumsi pangan hewani (kg/kap/th)	-	-	61.98	61.98	86.20
3.2	Persentase daerah rentan rawan pangan	-	-	21.98	38.47	30.23
4	Pertanahan					
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	17.10	19.70	19.80	-	-
4.2	Penyelesaian kasus tanah negara	10	7	1	3	-
5	Lingkungan Hidup					
5.1	Indeks kualitas lingkungan hidup	-	-	77.70	87.70	90.70
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	77.70	87.70	90.70
6.1	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	-	-	24.00	24.00	25.00
6.2	Persentase Penduduk OAP yang terdata dalam SIAK Plus	-	-	48.00	48.00	50.00

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024*
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
7.1	Jumlah kelembagaan Kampung yang telah ditata sesuai standar	-	-	-	76	80
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
8.1	Jumlah pasangan Usia Subur yang mengikuti program KB	6.153	6.488	7.035	6.454	6.533
9	Perhubungan					
9.1	Rasio konektivitas simpul transportasi	63.00	64.00	65.00	65.00	70.00
9.2	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan	73.00	84.00	84.00	80.00	85.00
10	Komunikasi dan Informatika					
10.1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	70.00	70.00	77.30	79.80	79.80
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
11.1	Jumlah kelembagaan koperasi aktif	51	51	78	78	78
12	Penanaman Modal					
12.1	Jumlah surat izin tempat usaha (SITU)	612	441	386	353	448
12.2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	237	170	116	115	159
13	Kepemudaan dan Olahraga					
13.1	Sarana dan prasarana olahraga	9	15	15	15	15
13.2	Jumlah organisasi karang taruna	50	21	21	21	21
14	Statistik					
14.1	Persentase ketersediaan data dan informasi statistik daerah	100	100	100	100	100
15	Persandian					
15.1	Persentase pemanfaatan persandian	100	100	100	100	100
16	Kebudayaan					
16.1	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan	19.00	19.50	22.50	25.03	30.00
17	Perpustakaan					
17.1	Cakupan pelayanan perpustaka-an per 10.000 penduduk	0.492	0.584	0.676	0.860	0.950
18	Kearsipan					
18.1	Arsip sebagai bahan akuntabili-tas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Data diolah, 2025 dari Pemerintah Kabupaten Keerom dan BPS Papua

Kinerja urusan pemerintah tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024, hendaknya mendapatkan perhatian dimasa depan terkait indikator kinerja persentase luas lahan bersertifikat, jumlah pencari kerja OAP, persentase daerah rentan rawan pangan, indeks kualitas lingkungan hidup, persentase penduduk OAP yang terdata dalam SIAK Plus, jumlah kelembagaan kampung yang telah ditata sesuai standar, jumlah psangan usia subur yang mengikuti program KB, rasio konektivitas simpul transportasi, persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah, jumlah kelembagaan koperasi aktif, jumlah organisasi karang taruna dan persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan.

2.4.5.3. Urusan Pemerintah Pilihan

Kinerja urusan pilihan di Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024, merupakan amulasi dari beberapa urusan antara lain: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya, mineral, perda-gangan, perindustrian dan transmigrasi. Meskipun berada dalam urusan pilihan, namun berbagai bidang di dalam urusan ini tetap menjadi hal strategis perlu diulas dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah. Urusan ini terkait dengan dinamika optimalisasi potensi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan berbagai urusan pilihan, merupakan bidang strategis menentukan masa depan pembangunan Kabupaten Keerom.

Tabel 2.53
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Pilihan Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Kelautan dan Perikanan					
1.1	Jumlah Produksi Perikanan Darat	158	149	193	205	176
2	Pariwisata					
2.1	Jumlah Objek Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2	2	2	2	2
2.2	Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Terhadap PDRB	0.98	1.02	1.09	1.09	1.29
3	Pertanian					
3.1	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	30.00	37.00	35.00	40.00	40.00
3.2	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	50.00	54.00	56.00	60.00	60.00
3.3	Jumlah Produksi Gabah	495	1.373	45	70	100
3.4	Jumlah Produksi Beras	347	961	32	49	100
4	Energi dan Sumber Daya Mineral					
4.1	Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4.2	Persentase Penggunaan Listrik	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
5	Perdagangan					
5.1	Jumlah Sarana Perdagangan	1.168	1.168	1.153	1.292	1.292
5.2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	62.00	68.00	100	100	100
6	Perindustrian					
6.1	Kontribusi Perindusterian Terhadap PDRB	5.53	5.55	5.53	5.67	5.57
7	Transmigrasi					
7.1	Jumlah satuan pemukiman transmig-rasi, difasilitasi pembangunannya	2	2	2	2	2

Sumber: Data diolah, 2025 dari Pemerintah Kabupaten Keerom dan BPS Papua

Peranan pariwisata di Kabupaten Keerom masih belum unggulan terhadap perekonomian daerah dan juga mengungkit pendapatan masyarakat di Kabupaten Keerom. Namun sejarah, budaya, dan juga keunggulan kompetitif SDA daerah Kabupaten Keerom sangat berpotensi dikembangkan. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis di Kabupaten Keerom, hal ini disebabkan adanya kampung-kampung transmigrasi terkonsentrasi pada beberapa pusat produksi. Perdagangan di Kabupaten Keerom dapat berjalan optimal tentunya memerlukan uttilitas sarana dan prasarana.

Ketersediaan energi dapat menunjang pembangunan di Kabupaten Keerom. Hal paling penting ialah akses pembangunan dan masyarakat terhadap ketersediaan jaringan lisrik. Kondisi Kabupaten Keerom masih mengandalkan PLTD Kabupaten Keerom. Infrastruktur energi alternatif yang ada di beberapa wilayah di Kabupaten Keerom saat ini adalah Solar Cell yang dibangun oleh pemerintah kabupaten. Salah satu urusan pilihan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Keerom untuk

segera dipacu perkembangannya di tahun-tahun mendatang adalah urusan industri. Hal ini disebabkan karena kehadiran aktivitas industri di daerah ini akan mampu memberikan nilai tambah cukup besar bagi komoditi-komoditi pertanian yang dihasilkan di Kabupaten Keerom.

2.4.5.4. Urusan Pemerintah Pendukung

Kinerja Urusan Pemerintah Pendukung Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024 melalui 2 urusan yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus semakin meningkat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Sekretariat DPRD sebagai unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang DPRD. Sekretariat DPRD menunjang tata kelola pencapaian kinerja DPRD di Kabupaten Keerom.

Tabel 2.54
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Pendukung
Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Sekretariat Daerah					
1.1	Nilai Perolehan LKj Pemerintah Daerah	34.08	47.32	47.32	47.55	47.55
1.2	Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan	189	158	107	223	169
2	Sekretariat DPRD					
2.1	Persentase Raperda yang diterbitkan dan Perda yang ditetapkan	100	100	100	100	100
2.2	Jumlah Peraturan Daerah	10	10	11	4	8

Sumber: Data diolah, Tahun 2025 dari Pemkab. Keerom dan RPJMD Tahun 2021-2025

Kinerja capaian indikator urusan pendukung Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024 dicerminkan dari 4 indikator. Secara keseluruhan memiliki prestasi cukup baik dalam menunjang tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Tahun 2023/2024, nilai perolehan LKJ pemerintah daerah sebesar 47.55 dan jumlah produk hukum yang dihasilkan 169. Kinerja Raperda yang diterbitkan dan Perda yang ditetapkan dan 8 Peraturan Daerah. Tentunya dimasa depan Kabupaten Keerom 2025-2029 diharapkan konsisten untuk menjaga Kinerja Urusan Pemerintah pendukung diKabupaten Keerom.

2.4.5.5. Urusan Pemerintah Penunjang

Kinerja Urusan Pemerintah Penunjang Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024 merupakan akumulasi kinerja urusan perencanaa, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan pengelolaan per-batasan daerah Kabupaten Keerom. Perencanan serta keuangan dalam kernagka pembangunan berkualitas tentunya memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Keerom. Selain itu adanya kinerja kepegawaian merupakan input dalam proses pembangunan. Penelitian dan pengembangan merupakan input perencanaan pembangunan daerah.

Kinerja Capaian Indikator Kinerja Urusan penunjang Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024 dicerminkan dari 5 urusan pemerintahan, beberapa kinerja yang perlu di cermati untuk ditingkatkan atau dipertahankan ialah Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Keselarasan RPJMD terhadap Renstra PD, Opini BPK Atas Laporan Keuangan, Penerapatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (SIPD dan E-BMD), ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, pengembangan inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan dan kerjasama kawasan perbatasan yang terfasilitasi (tapal batas, perijinan keluar masuk, dll). Tentunya dimasa depan,

diharapkan konsisten menjaga Kinerja Urusan penunjang pemerintah daerah Kabupaten Keerom.

Tabel 2.55
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Penunjang Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Perencanaan					
1.1	Persentase Keselarasan RPJMD terhadap Renstra PD	100	100	100	100	100
1.2	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	100	100
1.3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100	100	100
1.4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100	100	100
1.5	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.7	Keterdediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Keuangan					
2.1	Persentase Alokasi Belanja Pegawai Dari TKDD di luar Tunjangan Profesi Guru (Di Bawah 30% dari Pagu APBD)				27.51	27.51
2.2	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 %	-	-	-	42.10	42.10
2.3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	-	-	-	0.88	0.88
2.4	Persentase Penurunan SILPA	-	-	-	4.60	4.60
2.5	Persentase Pelaporan Syarat Salur Pendapatan Transfer Pusat dan Daerah	-	-	-	100	100
2.6	Persentase laporan keuangan tepat waktu	-	-		66.67	66.67
2.7	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.8	Persentase Realisasi Nilai Aset Tetap dari pagu belanja modal Per Tahun	-	-	-	87.61	87.61
2.9	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Per tahun	-	-	-	7.67	7.67
2.10	Persentase Penerapatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (SIPD dan E-BMD)	-	-	-	25.00	25.00
3	Kepegawaian, Pendidikan Pelatihan					
3.1	Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00
3.2	Presentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural	60	70.00	85.00	90.00	90.00
4	Penelitian dan Pengembangan					
4.1	Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan	40.00	45.00	45.00	50.00	59.00
5	Pengelolaan Perbatasan Daerah					
5.1	Persentase Intensitas/partisipasi kerjasama daerah perbatasan	100	100	100	100	100
5.2	Persentase kerjasama kawasan perbatasan yang terfasilitasi (tapal batas, perijinan keluar masuk, dll)	100	100	100	100	100

Sumber: Data diolah, 2025 dari Pemkab. Keerom dan RPJMD Tahun 2021-2025

2.4.5.6. Urusan Pemerintah Pengawasan

Urusan pemerintahan pengawasan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Keerom, berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan. Pengawasan mencakup pengawasan pelak-sanaan urusan pemerintahan, peraturan daerah, pengawasan terhadap kinerja. Dalam Hal ini dilaksanakan inspektorat untuk tujuan keselarasan pelaksanaan pemerintahan dengan peraturan perundang-undangan, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan tujuan otonomi daerah yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Keerom dan pelayanan publik yang memadai.

Tabel 2.56
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Pengawasan Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Level Kapabilitas Aparat Peng-awasan Intern Pemerintah (APIP)	2	2	2	2	3
2	Level Maturitas Sist Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2	2	2	2	2
3	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran	-	-	-	73.89	73.89
4	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)	-	-	-	38	38
5	Manajemen Resiko Indeks (MRI)	-	-	-	1.81	1.81
6	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	-	-	-	2.06	2.06

Sumber: Data diolah, 2025 dari Pemkab. Keerom dan RPJMD Tahun 2021-2025

Kinerja Capaian Indikator Kinerja Urusan pengawasan Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024 dicerminkan dari 6 indikator, secara keseluruhan memiliki prestasi cukup baik pelaksanaan kegiatan untuk menunjang Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, mengenai kinerja Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran, Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD), Manajemen Resiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Tentunya dimasa depan Kabupaten Keerom 2025-2029 diharapkan konsisten untuk menjaga Kinerja Urusan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Keerom.

2.4.5.7. Urusan Pemerintah Kewilayahan

Urusan kewilayahan berkaitan dengan pengelolaan administrasi wilayah, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kegiatan ber-tujuan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dalam Hal ini kinerja urusan pemerintahan kewilayahan di tunjukkan berdasar-kan pelaksanaan Pemerintahan Distrik di Kabupaten Keerom yaitu: Arso Barat, Arso, Skanto, Waris Senggi, Web, Yaffi, Towe, Kaisenar, Arso Timur dan Mannem.

Tabel 2.57
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Kewilayahan Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	100	100	100	100	100
2	Persentase tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat distrik dan kelurahan	100	100	100	100	100
3	Persentase tingkat pembinaan dan pengawasan pemerintahan	100	100	100	100	100

Sumber: Data diolah, T 2025 dari Pemkab. Keerom dan RPJMD Tahun 2021-2025

Kinerja Capaian Indikator urusan kewilayahan Tahun 2020-2024 dicer-

minkan dari 3 indikator, secara keseluruhan memiliki prestasi baik rata-rata 100% pelaksanaan kegiatan untuk menunjang tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat distrik dan kelurahan dan tingkat pembinaan dan pengawasan pemerintahan. Ke depan, Kabupaten Keerom 2025-2029 diharapkan konsisten untuk menjaga kinerja urusan pemerintah kewilayahan terutama distrik yang berbatasan langsung dengan PNG di Kabupaten Keerom.

2.4.5.8. Urusan Pemerintah Umum

Urusan Pemerintahan Umum selama ini menjadi bagian dari urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dari urusan wajib terkait pelayanan dasar. Namun berdasar UU No 23 Tahun 2014, urusan ini memiliki kewenangan tersendiri, sehingga menjadi urusan tersendiri.

Tabel 2.58
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Umum Kabupaten Keerom Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Presentase pendidikan politik kader partai politik	100	100	100	100	100
2	Presentase penguatan ideologi Pancasila	100	100	100	100	100
3	Persentase pertemuan FKUB difasilitasi	100	100	100	100	100
4	Persentase ormas yang aktif	100	100	100	100	100
5	Presentasi konflik sosial di selesaikan	100	100	100	100	100
6	Persentase Capaian Aksi HAM	100	100	100	100	100
7	Presentase terlaksananya rapat koordinasi dengan unsur forkopimda	100	100	100	100	100

Sumber: Data diolah, 2025 dari Pemkab. Keerom dan RPJMD Tahun 2021-2025

Kinerja Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Umum Tahun 2020-2024 dicerminkan dari 7 indikator, secara keseluruhan memiliki prestasi baik rata-rata 100% pelaksanaan kegiatan untuk menunjang dan menjaga Aksi HAM, unsur forkopimda, Konflik Sosial Yang Di selesaikan, Organisasi Kemasyarakatan, FKUB yang difasilitasi, Penguatan Ideologi Pancasila dan Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik di Kabupaten Keerom.

2.5. Gambaran Keuangan Daerah

2.5.1. Realisasi APBD

Perkembangan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Keerom tahun 2019-2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2019, pendapatan daerah mencapai lebih dari 1,25 triliun rupiah, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 menjadi sekitar 1,04 triliun rupiah. Penurunan ini berlanjut hingga 2021 dengan pendapatan hanya mencapai 864,46 miliar rupiah, sebelum kembali meningkat sedikit pada 2022 dan 2023, masing-masing menjadi 917,66 miliar dan 930,91 miliar rupiah.

Belanja daerah mengikuti tren yang serupa, dengan total belanja tertinggi di tahun 2019 sebesar 1,25 triliun rupiah. Belanja juga menurun pada tahun 2020 dan 2021, mencapai 995 miliar dan 814,46 miliar rupiah, sebelum meningkat kembali pada tahun 2022 dan 2023. Meskipun belanja meningkat, surplus anggaran yang tercatat mengalami penurunan signifikan, dari lebih dari 5 miliar rupiah di tahun 2019 menjadi defisit pada tahun 2021 dan seterusnya, walaupun defisit ini semakin mengecil.

Pembiayaan daerah mencerminkan nilai defisit yang sama, menunjukkan ketergantungan pada sumber pembiayaan lain untuk menutupi kekurangan anggaran. Secara keseluruhan, perkembangan kinerja APBD Kabu-paten Keerom selama periode ini mencerminkan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan penurunan pendapatan yang

berdampak pada belanja dan surplus anggaran.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Keerom yang meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, Dalam periode 2019-2023, Pendapatan Daerah Kabupaten Keerom mengalami fluktuasi yang mencerminkan dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal. Pada tahun 2019, target pendapatan daerah ditetapkan dengan optimisme berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Namun, realisasi penda-patan menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi, seperti dampak dari kon-disi ekonomi global dan masalah administrasi yang menghambat pengumpulan pajak.

Memasuki tahun 2020, pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah. Banyak sektor ekonomi terimbas, sehingga realisasi pendapatan jauh di bawah target. Pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran dan berfokus pada pemulihan ekonomi, meskipun hasilnya tetap tidak memuaskan. Pada tahun 2021, terdapat upaya untuk meningkatkan realisasi pendapatan melalui inovasi dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan kapasitas pemu-ngutan pajak. Meskipun ada perbaikan, realisasi pendapatan masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2022 menunjukkan tren positif dengan adanya peningkatan pendapatan akibat kebijakan yang lebih terarah dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Target pendapatan pun berhasil tercapai, menciptakan harapan untuk tahun-tahun berikutnya. Memasuki tahun 2023, pemerintah daerah kembali menetapkan target yang ambisius, berlandaskan pada pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Terkait implementasi otonomi khusus di Kabupaten Keerom adalah wujud nyata desentralisasi asimetris yang memberikan ruang bagi pemerintah dan masyarakat adat Kabupaten Keerom untuk mengelola potensi dan kepentingannya secara mandiri.

Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen tata kelola yang baik, kapasitas kelembagaan, partisipasi aktif masyarakat adat, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua. Pelaksanaan Otsus, dilakukan melalui program dan kebijakan daerah yang bersumber dari Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), dan transfer pusat lainnya. Di bidang Bidang Tata Kelola Pemerintahan, merujuk pada Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi).

Kebijakan afirmatif, di mana terdapat peningkatan peran ASN Orang Asli Papua, mengakomodir kelembagaan adat dalam proses musyawarah dan perencanaan pembangunan kampung. Sementara itu di Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan, dilaksanakan program afirmatif ekonomi kerakyatan bagi OAP, seperti pertanian, peternakan, dan UMKM berbasis lokal. Dana Otsus diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat kampung melalui BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung), sedangkan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan, disipkan beasiswa otsus untuk siswa-mahasiswa OAP Keerom, pembangunan puskesmas, rumah layak huni, dan air bersih sebagai bagian dari pelayanan dasar, serta program tenaga kesehatan dan guru kontrak Otsus untuk distrik-distrik terpencil. Selanjutnya, di Bidang Sosial Budaya dan Adat, terjadi penguatan lembaga adat, nilai-nilai kearifan lokal, dan rekognisi wilayah adat, dan fasilitasi kegiatan budaya dan keagamaan sebagai bagian dari pembangunan karakter masyarakat Keerom.

Adapun realisasi pendapatan menunjukkan kemajuan, tetapi masih terdapat tantangan yang harus diatasi, seperti ketergantungan pada sektor tertentu dan kebutuhan untuk diversifikasi sumber pendapatan. Perkembangan pendapatan daerah selama kurun waktu 2019-2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.59
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2019-2023 (juta rupiah)

Akun	2019		2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pendapatan Daerah	**1.257.014**	**1.057.914**	**1.047.203**	**827.121**	**864.464**	**883.756**	**917.656**	**1.004.995**	**930.914**	**984.425**
Pendapatan Asli Daerah	**18.726**	**26.383**	**33.722**	**19.900**	**24.242**	**22.227**	**25.465**	**12.393**	**10.115**	**12.116**
Pajak Daerah	5.450	8.589	6.450	6.075	3.225	5.281	3.225	6.102	3.225	4.965
Retribusi Daerah	2.345	1.372	2.345	7.543	1.173	8.867	1.173	1.032	1.173	1.101
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	2.000	1.472	2.000	1.960	2.000	2.278	2.000	2.259	2.300	2.258
Lain-lain PAD yang Sah	8.931	14.950	22.927	4.321	17.844	5.800	19.067	3.000	3.417	3.792
Pendapatan Transfer	**1.029.829**	**1.031.531**	**900.682**	**800.824**	**840.222**	**847.691**	**864.049**	**931.657**	**905.149**	**934.577**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.011.867	1.014.808	890.018	788.821	829.557	812.172	853.385	916.945	894.484	917.167
Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.961	16.724	10.665	12.003	10.665	35.519	10.665	14.712	10.665	17.410
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**208.459**	**-**	**112.799**	**6.398**	**-**	**13.838**	**28.142**	**60.945**	**15.650**	**37.733**
Pendapatan Hibah	109.000	-	112.799	6.398	-	-	-	39.641	-	23.106
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	99.459	-	-	-	-	13.838	28.142	21.303	15.650	14.626

Sumber : DJPK RI, 2024 (data diolah)

Tabel 2.60
Sumber Pembiayaan Program

Program	Sumber Dana Utama	Potensi Tambahan	Keterangan
1. Pengamanan Lintas Batas dan Infrastruktur Pertahanan Sipil	APBN (Kemenhan, BNPP, Kemendagri)	Dana Otsus dan Hibah Australia (*Defence Cooperation Program*)	Pembangunan Pos Pamtas, CCTV perbatasan, dan menara pengawasan terpadu.
2. Pengembangan Ekonomi Perbatasan & Perdagangan Lintas Negara	Dana Otsus dan DAK Fisik (Perdagangan, Perindustrian)	KPBU sektor logistik dan pasar lintas batas; dukungan *World Bank- Border Economic Zone*	Pengembangan pasar lintas batas Waris dan Yaffi, *Border Trade Center*.
3. Energi Terbarukan (PLTS & Mikrohidro Perbatasan)	Dana Otsus; DAK EBT; APBN (ESDM)	Hibah *ASEAN Catalytic Green Finance Facility (ACGF)*; *Green Climate Fund (GCF)*	PLTS komunal di kampung perbatasan dan PLTMH untuk UMKM lokal.
4. Pendidikan dan Layanan Kesehatan Perbatasan	APBD Keerom; Dana Otsus; DAK Nonfisik	UNICEF & WHO – *Cross Border Health Support*	Pembangunan SD perbatasan dan klinik lintas batas bersama PNG.
5. Pengelolaan Lingkungan dan Hutan Adat/ Rehabilitasi Lahan Kritis	Dana Otsus; APBN (KLHK); DAK Lingkungan	Program *World Bank REDD+*, *BioCarbon Fund Initiative*	Restorasi hutan Waris–Towe sebagai zona penyangga karbon.
6. Infrastruktur Jalan dan Jembatan Lintas Distrik	APBN (PUPR); Dana Otsus; KPBU	*Indonesia Infrastructure Finance (IIF)*	Pembangunan koridor Arso–Waris–Yaffi dan jembatan penghubung.
7. Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama Internasional	APBD; Dukungan BNPP dan Kemenlu	Program *ASEAN Connectivity 2025* dan *ADB Border Connectivity Fund*	Pembentukan sekretariat bersama pengelolaan lintas batas Keerom–Sandaun.

Sumber: Data diolah, Tahun 2025

2.5.2. Neraca Daerah

Neraca daerah adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu pemerintah daerah pada waktu tertentu. Ini seperti gambaran umum keuangan daerah, menunjukkan apa yang dimiliki (aset), apa yang menjadi kewajiban, dan kekayaan bersih daerah pada saat tertentu. Komponen Utama Neraca Daerah, adalah : (1) Aset, yaitu sumber daya yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, antara lain :aset lancar (Kas, piutang pajak, persediaan); Investasi Jangka Panjang (Investasi pada perusahaan lain, surat berharga); Aset Tetap (Tanah, bangunan, peralatan, jalan); dan Aset Lainnya (Aset tak berwujud seperti hak cipta, software); (2) Kewajiban, yaitu hutang atau kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah di masa depan. Antara lain: Hutang Jangka Pendek (Hutang kepada pemasok, hutang gaji); Hutang Jangka Panjang (Obligasi daerah, pinjaman dari pemerintah pusat); (3) Ekuitas, yaitu selisih antara aset dan kewajiban, mewakili kekayaan bersih milik pemerintah daerah. Ini menunjukkan bagian dari aset yang benar-benar dimiliki oleh daerah, bukan berasal dari utang.

Berdasarkan publikasi dari DJPK RI, selama 5 (Lima) tahun terakhir, Neraca Daerah Kabupaten Keerom dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam pertumbuhan aset dan kewajiban. Total aset daerah mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,12%, dengan total aset pada tahun 2023 mencapai sekitar 1,89 triliun rupiah. Penurunan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk penurunan aset lancar yang mencerminkan masalah likuiditas. Khususnya, nilai aset lancar mengalami pertumbuhan negatif yang sangat mencolok, mencapai -158,27%.

Di sisi lain, aset tetap menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,18%. Namun, komponen penting seperti tanah, peralatan, dan bangunan menunjukkan pertumbuhan positif yang menunjukkan potensi peningkatan infrastruktur. Meski demikian, akumulasi penyusutan yang besar pada aset tetap juga mengindikasikan perlunya investasi lebih lanjut untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai aset tersebut. Kewajiban daerah, yang mencakup utang jangka pendek dan panjang, menunjukkan variasi yang cukup besar. Terdapat peningkatan kewajiban jangka pendek yang menimbulkan kekhawatiran terhadap likuiditas. Selain itu, ekuitas mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,96%, yang menunjukkan bahwa posisi keuangan daerah tidak stabil dan memerlukan perhatian segera.

Dalam menghadapi permasalahan posisi keuangan daerah ini, kebijakan yang tepat harus mencakup langkah-langkah strategis. Pertama, penting untuk meningkatkan pengelolaan aset, terutama aset lancar, dengan cara mempercepat penagihan piutang pendapatan dan mengoptimalkan kas dan setara kas. Kedua, perlu dilakukan evaluasi dan perencanaan investasi yang lebih cermat untuk aset tetap, guna meminimalkan penyusutan dan memastikan bahwa investasi baru memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya, pemerintah daerah harus fokus pada pengendalian kewajiban, terutama dalam pengelolaan utang jangka pendek. Melakukan renegosiasi utang atau mencari sumber pendanaan alternatif dapat membantu mengurangi beban kewajiban. Selain itu, memperkuat dasar pendapatan daerah melalui diversifikasi sumber pendapatan juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan ekuitas dan stabilitas finansial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2019-2023

Akun	2019	2020	2021	2023	Rata-rata Pertumbuhan
TOTAL ASET	**2.259.510.803.580**	**2.289.900.710.223**	**1.839.826.305.398**	**1.894.131.652.298**	**(5,12)**
ASET LANCAR	**45.081.888.508**	**(43.095.103.335)**	**59.048.074.119**	**34.134.847.875**	**(158,27)**
Kas dan Setara Kas	6.707.082.941	9.148.570.009	18.234.653.666	8.977.168.233	28,32
Investasi Jangka Pendek			-		
Piutang Pendapatan	2.865.611.032	(90.783.515.727)	9.513.108.530	15.525.058.810	(1.105,11)
Piutang Lainnya			-		
Penyisihan Piutang			(6.493.267.108)	(7.785.827.092)	19,91
Beban dibayar Dimuka	152.499.997	98.333.333	75.150.641	37.500.000	-36,40
Persediaan	35.356.694.537	38.441.509.049	37.718.428.390	17.380.947.924	-15,69
Aset untuk Dikonsolidasikan			-		
Aset Lancar Lainnya					
INVESTASI JANGKA PANJANG	**30.000.000.000**	**30.000.000.000**	**30.000.000.000**	**31.370.000.000**	**1,52**
Investasi Nonpermanen			-	31.370.000.000	
Investasi Permanen	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000		-
ASET TETAP	**1.862.046.929.374**	**1.984.210.332.654**	**1.435.695.231.717**	**1.746.290.943.406**	**0,18**
Tanah	184.823.418.010	185.426.115.010	186.335.115.010	194.072.015.010	1,66
Peralatan dan Mesin	327.394.619.388	341.265.937.390	372.238.920.862	412.889.453.029	8,08
Gedung dan Bangunan	712.117.892.377	736.937.820.765	826.915.893.400	885.581.339.912	7,60
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.346.242.610.155	1.387.944.754.952	1.450.315.787.793	1.664.372.150.956	7,45
Aset Tetap Lainnya	15.035.491.662	17.233.405.931	15.396.362.777	17.613.307.062	6,12
Konstruksi dalam Pengerjaan	190.766.285.503	229.862.929.000	170.511.743.034	186.338.141.337	1,32
Akumulasi Penyusutan	(914.333.387.721)	(914.460.630.394)	(1.586.018.591.159)	(1.614.575.463.900)	25,08
DANA CADANGAN	**3.641.027.223**	**44.522.429**	**44.525.490**	**44.525.490**	**(32,92)**
Dana Cadangan	3.641.027.223	44.522.429	44.525.490	44.525.490	(32,92)
ASET LAINNYA	**318.740.958.475**	**318.740.958.475**	**315.038.474.072**	**82.291.335.527**	**(25,01)**
Tagihan Jangka Panjang			-		

Akun	2019	2020	2021	2023	Rata-rata Pertumbuhan
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.198.045.000	1.198.045.000	1.198.045.000	1.198.045.000	-
Aset Tak Berwujud	5.535.327.332	5.535.327.332	7.294.739.332	2.577.594.472	(10,96)
Aset Lain-Lain	312.007.586.143	312.007.586.143	312.091.847.872	78.515.696.055	(24,94)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud			(5.546.158.132)		
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**2.259.510.803.580**	**1.993.634.751.829**	**1.839.826.305.398**	**1.894.131.652.297**	**(5,51)**
KEWAJIBAN	**226.588.503.200**	**86.054.844.284**	**173.665.036.271**	**112.324.193.872**	**1,49**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**226.588.503.200**	**(28.945.155.716)**	**173.665.036.271**	**112.324.193.872**	**-282,69**
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	300.015.806	392.465.000	173.884.188	825.143.698	116,55
Utang Bunga	902.777.778	902.777.778	-		-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	125.000.000.000		56.439.097.850		(54,85)
Pendapatan Diterima di Muka			-		
Utang Belanja	23.336.337.954	(63.898.484.215)	38.127.609.815	111.499.050.174	(113,68)
Utang Jangka Pendek Lainnya	77.049.371.662	33.658.085.721	78.924.444.418		39,09
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**-**	**115.000.000.000**	**-**	**-**	
Utang Dalam Negeri		115.000.000.000	-		
Utang Jangka Panjang Lainnya			-		
EKUITAS	**2.032.922.300.380**	**1.907.579.907.545**	**1.666.161.269.127**	**1.781.807.458.425**	**(3,96)**
EKUITAS	**2.032.922.300.380**	**1.907.579.907.545**	**1.666.161.269.127**	**1.781.807.458.425**	**(3,96)**
Ekuitas	2.032.922.300.380	1.907.579.907.545	1.666.161.269.127	1.781.807.458.425	(3,96)
Balance/ Unbalance	**(0)**	**296.265.958.394**	**-**	**1**	

Sumber : DJPK RI, 2024 (data diolah)

2.5.3. Proyeksi APBD

Dalam menentukan proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah, selain berdasarkan hasil analisis atas gambaran keuangan pada periode sebelumnya perlu mempertimbangkan beberapa asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Keerom. Selama kurun waktu 2019-2023, proporsi pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer dengan rata-rata 98,62%, diikuti pendapatan asli daerah sebesar 1,26%. Hal ini menunjukkan kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten Keerom masih rendah. Walaupun terdapat peningkatan PAD yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan 2,07%, Namun pendapatan daerah Kabupaten Keerom 2025-2029 sebagian besar diperkirakan masih bersumber pada pendapatan transfer daerah. Tetapi pendapatan asli daerah diharapkan akan terus mengalami peningkatan yang signifikan pada masa yang akan datang.

Sementara dari sisi belanja daerah, diproyeksikan bahwa belanja pemerintah Kabupaten Keerom masih didominasi belanja operasi. Namun demikian belanja daerah akan difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam pengelolaan pembiayaan dan perumusan proyeksi pembiayaan daerah selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan tidak adanya penerimaan pembiayaan daerah, namun diproyeksikan akan adanya penyertaan modal daerah yang dialokasikan dari efisiennsi belanja daerah.

Secara keseluruhan, proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Keerom untuk tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan asumsi yang relevan, memastikan bahwa rencana tersebut realistis dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu dalam menentukan proyeksi pendapatan dan belanja daerah dilakukan koreksi terhadap data pertumbuhan didasarkan pada analisis data historis dan kondisi ekonomi terkini. Koreksi ini dilakukan untuk menyesuaikan proyeksi dengan realitas ekonomi yang ada, serta menyesuaikan pekembangan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga proyeksi yang dihasilkan lebih akurat dan dapat diandalkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam kerangka Otonomi Khusus Papua dan transformasi ekonomi daerah, proyeksi APBD Kabupaten Keerom diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi dana transfer dan peningkatan PAD.
2. Menopang program prioritas sektoral yang berbasis pada potensi unggulan lokal (pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan lintas batas).
3. Mendukung agenda transformasi ekonomi dari berbasis konsumsi ke produktif, serta penguatan peran Orang Asli Papua (OAP).

Terkait dengan implementasi Otonomi Khusus Papua di Kabupaten Keerom melalui proyeksi APBD sektoral, transformasi ekonomi diarahkan untuk: menguatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan lokal, mengurangi ketimpangan antar distrik dan kampung, meningkatkan peran Orang Asli Papua dalam struktur ekonomi daerah, dan membangun tata kelola fiskal yang berdaya saing, transparan, dan berkelanjutan. Adapun proyeksi angagran pendapatan dan belanja Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel berikut:

.Tabel 2.62
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029

Akun	2025	2026	2027	2028	2029	Rata-Rata Pertumbuhan
Pendapatan Daerah	**1.019.795.541.058**	**1.028.098.346.689**	**1.042.973.092.659**	**1.058.069.245.901**	**1.073.390.203.227**	**1,29**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**12.612.539.056**	**12.871.247.123**	**13.137.046.165**	**13.410.139.335**	**13.690.735.695**	**2,07**
Pajak Daerah	5.242.444.115	5.386.884.600	5.535.304.728	5.687.814.147	5.844.525.524	2,76
Retribusi Daerah	1.179.429.307	1.220.591.390	1.263.190.030	1.307.275.362	1.352.899.272	3,49
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.378.075.153	2.440.631.810	2.504.834.057	2.570.725.181	2.638.349.610	2,63
Lain-lain PAD yang Sah	3.812.590.481	3.823.139.322	3.833.717.350	3.844.324.645	3.854.961.289	0,28
Pendapatan Transfer	**1.000.829.125.420**	**1.015.227.099.566**	**1.029.836.046.495**	**1.044.659.106.566**	**1.059.699.467.531**	**1,44**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**991.746.393.007**	**1.006.053.539.829**	**1.020.570.751.159**	**1.035.301.158.278**	**1.050.247.939.760**	**1,44**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	61.023.618.277	62.140.350.491	63.277.518.905	64.435.497.501	65.614.667.105	1,83
Dana Alokasi Umum	575.246.692.145	583.817.867.858	592.516.754.089	601.345.253.725	610.305.298.005	1,49
Dana Alokasi Khusus	140.714.466.342	142.417.111.384	144.140.358.432	145.884.456.769	147.649.658.696	1,21
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann, Infrastruktur	132.582.360.244	134.677.161.535	136.805.060.688	138.966.580.647	141.162.252.621	1,58
Dana Desa	82.179.256.000	83.001.048.560	83.831.059.046	84.669.369.636	85.516.063.332	1,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**9.082.732.414**	**9.173.559.738**	**9.265.295.335**	**9.357.948.289**	**9.451.527.771**	**1,00**
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0
Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan PeraturanPerundang-Undangan	0	0	0	0	0	0
Belanja Daerah	**1.018.795.541.058**	**1.027.098.346.689**	**1.041.973.092.659**	**1.057.069.245.901**	**1.072.390.203.227**	**1,29**
Belanja Operasi	**629.277.891.314**	**635.090.331.113**	**641.038.656.898**	**647.124.496.809**	**653.349.529.122**	**0,94**
Belanja Pegawai	292.137.131.095	297.746.164.012	303.462.890.361	309.289.377.856	315.227.733.911	1,92
Belanja Barang dan Jasa	277.486.856.961	278.791.045.189	280.101.363.101	281.417.839.508	282.740.503.354	0,47
Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
Belanja Hibah	34.994.046.081	34.189.183.022	33.402.831.812	32.634.566.680	31.883.971.647	-2,30
Belanja Bantuan Sosial	24.659.857.176	24.363.938.890	24.071.571.624	23.782.712.764	23.497.320.211	-1,20
Belanja Modal	**325.528.049.829**	**327.748.103.225**	**336.337.062.594**	**344.947.375.768**	**353.584.936.527**	**2,09**
Belanja Modal Tanah	7.127.586.093	7.277.265.401	7.430.087.975	7.586.119.822	7.745.428.339	2,10
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.290.731.145	39.719.734.739	39.714.680.774	39.645.112.201	39.512.733.304	-1,08

Akun	2025	2026	2027	2028	2029	Rata-Rata Pertumbuhan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	126.344.121.988	128.858.558.145	133.053.822.824	137.335.658.017	141.709.594.208	2,91
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	145.008.313.540	147.760.686.587	152.193.346.514	156.707.825.204	161.309.236.622	2,70
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.967.789.590	2.322.666.297	2.116.031.339	1.823.447.331	1.438.389.517	-21,33
Belanja Modal Aset Lainnya	1.789.507.473	1.809.192.055	1.829.093.168	1.849.213.193	1.869.554.538	1,10
Belanja Tidak Terduga	**6.725.271.977**	**6.123.672.700**	**5.575.888.598**	**5.077.105.714**	**4.622.940.717**	**-8,95**
Belanja Tidak Terduga	6.725.271.977	6.123.672.700	5.575.888.598	5.077.105.714	4.622.940.717	-8,95
Belanja Transfer	**57.264.327.938**	**58.136.239.651**	**59.021.484.569**	**59.920.267.610**	**60.832.796.860**	**1,52**
Belanja Bagi Hasil						
Belanja Bantuan Keuangan	57.264.327.938	58.136.239.651	59.021.484.569	59.920.267.610	60.832.796.860	1,52
Surplus/Defisit	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**0,00**
Pembiayaan Daerah	**(1.000.000.000)**	**(1.000.000.000)**	**(1.000.000.000)**	**(1.000.000.000)**	**(1.000.000.000)**	**0,00**
Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	0	0	0	0	
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	
Pengeluaran Pembiayaan	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**0,00**
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0	0	
Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Sumber: Sumber Data Diolah, Tahun 2025

Arah Proyeksi APBD dan Transformasi Fiskal:

1. Pendapatan Daerah Tahun 2025–2029, diproyeksikan tumbuh rata-rata 6–8% per tahun, dengan peningkatan kontribusi PAD dan efisiensi belanja rutin.
2. Belanja Modal dan Pemberdayaan Ekonomi diarahkan meningkat dari 28% menjadi 40% total belanja pada akhir periode RPJMD.
3. Dana Otsus dan DTI diarahkan menjadi *catalyst fund* bagi investasi publik dan swasta.

Sinergi Pendanaan dan Transformasi Kelembagaan

1. Integrasi Dana Otsus – DAK – Dana Desa: digunakan secara komplementer untuk memperkuat rantai nilai ekonomi lokal.
2. Kolaborasi antar-OPD dan distrik melalui *cluster pembangunan ekonomi* (*Cluster Arso Agroindustri* dan *Cluster Skanto-Perbatasan*).
3. Digitalisasi perencanaan dan penganggaran (e-Planning dan e-Budgeting) untuk transparansi dana sektoral.

Secara umum struktur sumber pendanaan program sektoral dalam proyeksi APBD Kabupaten Keerom terdiri dari:

Tabel 2.63
Sumber Pendanaan Program Sektoral Dalam Proyeksi APBD Kabupaten Keerom Tahun 2025–2029

Sumber Dana	Keterangan & Fokus Penggunaan	Rata-rata (%)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Fokus pada pembiayaan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas OPD, dan pembinaan UMKM.	4–6%
2. Dana Transfer Umum (DAU & DBH)	Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil untuk mendanai belanja rutin dan sebagian infrastruktur dasar.	35–40%
3. Dana Transfer Khusus (DAK Fisik & Non-Fisik)	DAK sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, perumahan, dan lingkungan hidup.	15–20%
4. Dana Otonomi Khusus (Otsus Papua)	Dana afirmatif untuk OAP, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur kampung.	20–25%
5. Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)	Untuk pembangunan infrastruktur strategis antar-distrik, jalan perbatasan, dan konektivitas wilayah produksi.	5–10%
6. Dana Desa (DD & ADD)	Untuk pemberdayaan ekonomi kampung, penguatan BUMKam, dan pelayanan dasar berbasis komunitas.	0–12%
7. Sumber Alternatif (KPBU, Hibah, CSR)	Skema pembiayaan kerja sama publik-swasta (misal PLTS, agropolitan, agroindustri).	1–3%

Sumber: Alokasi DAK, DAU, Otsus Tahun 2024, Alokasi TKD untuk Papua. Diolah.
***Catatan:* proporsi dapat berubah mengikuti kebijakan fiskal nasional, realisasi pendapatan, dan arah prioritas pembangunan di level Provinsi Papua dan pusat.**

Sementara itu, rincian dana sektoral program prioritas transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan di Kabupaten Keerom, seperti berikut ini:

Tabel 2.64
Dana Sektoral Program Prioritas Transformasi Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan di Kabupaten Keerom

Sektor Prioritas	Program/Agenda Utama	Sumber Dana Dominan	Catatan Implementasi
Pertanian dan Perkebunan Rakyat	Pengembangan padi, jagung, kakao, kelapa, dan kopi dataran tinggi; revitalisasi irigasi dan jalan produksi.	DAK Fisik Pertanian, DTI, Dana Otsus, DAU	Fokus pada distrik Arso, Skanto, Towe Hitam; integrasi dengan *Food Estate* Papua.
Perikanan dan Peternakan	Budidaya ikan air tawar, pengembangan ternak babi dan sapi lokal, pelatihan OAP.	DAK Pertanian, Otsus, ADD	Kolaborasi Dinas Perikanan dan kampung; penguatan BUMKam produksi pakan.
Pariwisata dan Budaya Perbatasan	Pengembangan wisata alam dan budaya di Arso dan Waris; promosi festival lintas batas.	Dana Otsus, CSR, Hibah, KPBU	Branding “Keerom Border Tourism”; sinergi dengan provinsi dan BNPP.
UMKM dan Ekonomi Kreatif	Inkubasi wirausaha muda OAP, digitalisasi UMKM, akses permodalan koperasi.	PAD, DAK Non-Fisik, Otsus	Kemitraan Bank Papua, LPDB-KUMKM, dan pelatihan kewirausahaan kampung.
Infrastruktur Ekonomi dan Energi	Peningkatan konektivitas antar-distrik, jembatan, jalan produksi, dan PLTS	DTI, Otsus, DAU, KPBU	Dukung integrasi pasar hasil tani dengan kota perbatasan Jayapura.
Pendidikan dan Kesehatan Produktif	Beasiswa vokasional OAP, pelatihan tenaga terampil, dan layanan kesehatan produktif.	Dana Otsus, DAK Non-Fisik	Fokus pada SDM unggul sektor agroindustri dan perbatasan.
Reformasi Tata Kelola Ekonomi Daerah	Penyusunan Perda afirmatif ekonomi, sistem e-fiskal, dan akuntabilitas Otsus.	PAD, DAU, Otsus	Transformasi menuju pengelolaan berbasis hasil (*outcome-based budgeting*).

Sumber: Alokasi DAK, DAU, Otsus Tahun 2024, Alokasi TKD untuk Papua. Diolah.

Berkenaan dengan mekanisme kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga internasional untuk daerah perbatasan di Kabupaten Keerom, merupakan instrumen strategis untuk mempercepat transformasi, ekonomi. Tetapi, pelaksanaannya memerlukan kesiapan kelembagaan, peraturan daerah, dan kejelasan proyek prioritas. Maka, dengan pendekatan bertahap, dimulai dari penguatan kapasitas daerah, penyusunan investment profile, hingga menjalin komunikasi dengan mitra potensial, Kabupaten Keerom dapat membuka jalan bagi kemitraan produktif dan berkelanjutan di kawasan perbatasan.

Mekanisme kerja sama dengan badan usaha, dapat menggunakan skema untuk pembangunan infrastruktur strategis, seperti: Jalan dan jembatan perbatasan, Sistem air bersih dan energi (PLTS), dan Pasar lintas batas dan kawasan ekonomi kecil. Di mana Pemda Kabupaten Keerom dapat berperan menyediakan lahan dan izin, menjamin dukungan kebijakan dan infrastruktur pendukung, serta mengawasi mutu pelayanan dan keberlanjutan program dan kegiatan. Adapun tahapannya adalah:

1. Identifikasi Program Prioritas (oleh Bapperinda, Dinas Teknis, dan BPKAD).
2. Studi Kelayakan dan Penyiapan Dokumen (Pra-FS, Outline Business Case).
3. Penetapan Proyek KPBU oleh Bupati Kabupaten Keerom.
4. Tender dan Penetapan Mitra Swasta.
5. Pelaksanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja.

Tabel 2.65
Jenis, Bentuk, dan Mekanisme Kemitraan Potensial di Kabupaten Keerom

Jenis	Bentuk Program / Mekanisme	Mitra Potensial
Teknis dan Pembangunan Kapasitas	Pelatihan SDM, studi kelayakan, perencanaan wilayah perbatasan	UNDP, JICA, KOICA, GIZ
Pendanaan Hibah	Bantuan non-komersial untuk infrastruktur sosial dan pemberdayaan ekonomi	USAID, ADB, World Bank
Kerja Sama Lintas Negara	Program perdagangan rakyat, kesehatan lintas batas, dan konservasi ekoregion	IOM, WHO, UN ESCAP
Kemitraan Tematik	Green economy, energi terbarukan, digitalisasi pemerintahan	UNDP-GEF, GIZ-Energizing Development

Sumber: LPPD Kabupaten Keerom 2024. Diolah.

Sementara itu, skema *Corporate Social Responsibility)* dan *Public-Private Partnership*, dapat dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah daerah dan perusahaan yang beroperasi di Papua (BUMN/BUMD, Bank Papua, PLN, atau Telkom). Fokusnya pada penguatan ekonomi masyarakat, pelatihan vokasional, penyediaan energi dan air bersih, sedangkan mekanisme kerja sama dengan lembaga internasional, diarahkan untuk dukungan teknis, sosial, dan ekonomi lintas batas.

2.5.4. Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah

Merujuk pada dokumen laporan dan reviu BPK tentang Kemandirian fFskal, Peta Kapasitas Fiskal Daerah dan Formula KFD (PMK 2024/65 dan dokumen peta fiskal), serta Perda APBD 2025 dan hasil studi tentang penertiban sumber PAD di Keerom), maka kinerja keuangan daerah Kabupaten Keerom dapat diungkapkan terutama menyangkut kemandirian fiskal daerah.

Kabupaten Keerom untuk membiayai pengeluaran, pelayanan publiknya dari sumber-sumber keuangan sendiri (PAD) tanpa bergantung besar pada transfer dari Pemerintah Pusat atau Provinsi Papua atau berupa pinjaman. Evaluasi dilakukan untuk menilai seberapa besar peran PA) terhadap kebutuhan pembiayaan daerah dengan menggunakan indikator utama:

1. Indeks Kemandirian Fiskal (digunakan BPK).
2. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (PAD/Total Pendapatan).
3. Rasio PAD terhadap Belanja Daerah (PAD/Belanja).
4. Pertumbuhan PAD per tahun (tren kemampuan menggali sumber sendiri).
5. Komposisi PAD (pajak daerah, retribusi, hasil kekayaan daerah, lain-lain).

6. Tingkat kebocoran dan kepatuhan pemungutan PAD (realisasi vs potensi), efektivitas administrasi pajak dan retribusi

Dengan ketentuan menggunakan Klasifikasi BPK bahwa Nilai IKF berkisar 0–1; semakin mendekati 1 semakin mandiri, di mana:
0.00 ≤ IKF < 0.25 = Belum Mandiri
0.25 ≤ IKF < 0.50 = Menuju Kemandirian
0.50 ≤ IKF < 0.75 = Mandiri
0.75 ≤ IKF ≤ 1.00 = Sangat Mandiri.

Interpretasi hasil (kinerja kemandirian keuangan Daerah Kabupaten Keerom)
- IKF rendah (mis. <0.25): daerah sangat bergantung pada transfer pusat atau provinsi, ruang fiskal mandiri kecil, kerentanan bila transfer berkurang.
- IKF menengah (0.25–0.5): ada perbaikan tetapi perlu upaya mening-katkan basis PAD (pajak/retribusi dan potensi lain).
- Trend naik lebih penting daripada angka tunggal yang menunjukkan perbaikan administrasi dan basis penerimaan.

Dari hasil interpretasi itu, direkomendasi kebijakan dan tindakan operasional:
- Penertiban dan optimalisasi pemungutan PAD: audit potensi pajak dan retribusi, hentikan kebocoran.
- Perluasan basis PAD: kajian untuk memungut pajak sektor informal tertentu, retribusi jasa, pengelolaan aset daerah, kewirausahaan BUMDES.
- Reformasi administrasi pajak daerah: digitalisasi, SIPP, peningkatan kepatuhan, pemetaan objek pajak.
- Pengendalian komposisi belanja: restrukturisasi belanja agar belanja modal produktif tetap prioritas; kurangi belanja tidak produktif.
- Peningkatan kapasitas perencanaan dan potensi fiskal: integrasikan hasil kajian peta kapasitas fiskal (PMK) ke strategi APBD.
- Sinergi lintas-institusi: Bapperinda, BPKPAD, Inspektorat, serta koordinasi dengan provinsi untuk program pendampingan fiskal.
- Monitoring dan evaluasi berkala: target kenaikan IKF tahunan dan indikator turunan (realisasi PAD, turunnya rasio belanja pegawai terhadap belanja total, dsb).

Kinerja keuangan Keerom saat ini menunjukkan ketergantungan tinggi pada dana transfer dan realiasi TKD yang relatif lambat di awal tahun anggaran. Kapasitas penyerapan dan administratif menjadi faktor pembatas utama. PAD sebagai sumber pendapatan lokal belum terlihat signifikan (dari data alokasi) dalam pengaruh terhadap keseluruhan APBD.

Tabel 2.66
Tren Kinerja Keuangan (Indikatif) di Kabupaten Keerom

Indikator	Data Tersedia	Tren / Pergerakan	Implikasi
Penyaluran TKD hingga Mei 2025	Capaian realisasi penyaluran TKD ke-Kabupaten Keerom *sampai 15 Mei 2025* sudah 18,12% dari pagu tahunan.	Dalam lebih dari 4 bulan pertama (sekitar 40% dari tahun anggaran) penyaluran baru mencapai 18%. Ada keterlambatan atau karena sebagian besar alokasi belum masuk ke tahap penyaluran.	Potensi risiko terlam-batnya pelaksanaan program yang andal-kan dana transfer. Keterlambatan ini dapat menghambat realisasi belanja modal dan

Indikator	Data Tersedia	Tren / Pergerakan	Implikasi
			prioritas pembangunan.
Alokasi TKD (2025)	Total TKD yang dialoka-sikan ke Keerom sekitar Rp 1.187.013.513.000 (sekitar Rp 1,187 triliun) dalam Buku Alokasi TKD 2025.	Angka yang cukup besar; komposisi DBH, DAU, dan DAK menggambaran bahwa sebagian besar dana berasal dari transfer umum dan khusus, bukan PAD.	Keerom sebagai kawasan perbatasan dengan PAD rendah, sangat tergantung pada transfer pusat/ provinsi.
Komposisi Alokasi	Dari dokumen alokasi: DBH relatif kecil diban-ding DAU dan DAK. Contoh: DAU Rp 565,652,186 ribu (Rp 565,65 miliar); DAK Rp 387,086,436 ribu.	Komposisi yang me-nunjukkan: belanja rutin (pegawai dan operasional) via DAU dankomitmen program fisik melalui DAK jadi komponen utama.	Bila realisasi belanja fisik dan DAK rendah, maka pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat tertunda.

Sumber: Laporan Monev TKD Kab Keerom oleh Kanwil DJPb Provinsi Papua dan Buku Alokasi TKD 2025. Diolah

Dari analisis tren di atas, berikut kelemahan dan risiko yang tampak:

1. Ketergantungan tinggi pada dana transfer. Karena PAD diperkirakan kecil dibanding total TKD, Keerom memiliki kemandirian keuangan yang rendah. Ini membuat keuangan daerah sangat sensitif terhadap penundaan atau perubahan di tingkat pusat/provinsi.
2. Keterlambatan penyaluran dana transfer. Realisasi TKD yang baru sekitar 18% hingga pertengahan Mei mengindikasikan bahwa sebagian besar dana akan menjadi “backloaded” masuk di paruh kedua tahun anggaran. Ini bisa menyebabkan tekanan pada pelaksanaan program dan belanja modal.
3. Rendahnya kapasitas penyerapan belanja fisik.Biasanya, keterlambatan penyaluran mengiringi kapasitas OPD dalam melakukan pengadaan barang/jasa (PBJ), administrasi tender, dan perizinan. Jika kemampuan daerah rendah atau prosedur lambat, realisasi DAK fisik dan proyek infrastruktur bisa stagnan.
4. Keterbatasan PAD. Kalau tidak ada data PAD yang signifikan, maka ada risiko bahwa Pemda tidak bisa meningkatkan belanja prioritas tanpa bergantung pada transfer. PAD yang rendah juga membatasi fleksibilitas anggaran.
5. Risiko administratif dan pelaporan. Penyaluran TKD tergantung kepatuhan daerah terhadap persyaratan administratif dan pelaporan. Jika terdapat keterlambatan laporan atau tidak terpenuhinya syarat teknis (misalnya laporan posisi kas, progres fisik), maka pencairan bisa tertunda.

2.5.5. Proyeksi Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dihitung dari selisih penerimaan daerah dikurangi belanja wajib dan mengikat serta pengeluaran pembiayaan. Dari tabel dibawah menunjukkan bahwa kemampuan kapasitas riil Kabupaten Keerom cukup rendah yaitu dikisaran Rp.504.613.488.021 pada tahun 2025, sampai dengan Rp.543.750.654.747 pada tahun 2029. Namun demikian diproyeksikan bahwa dari tahun ke tahun kapasitas riil akan mengalami peningkatan.

Kapasitas riil terendah pada tahun 2025 karena pada tahun 2025 merupakan puncak/akhir penerimaan PPPK sehingga belanja pegawai tinggi, sedangkan kapasitas riil tertinggi adalah pada tahun 2029. Selain itu, tidak tercatat adanya sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, mengindikasikan pengelolaan anggaran yang disiplin. Total penerimaan tetap sejalan dengan penda-patan, yang menunjukkan kestabilan dalam sumber daya keuangan.

Pada sisi pengeluaran, belanja wajib dan mengikat mengalami pening-katan dari Rp.514.182.053.037 pada tahun 2025 menjadi Rp.528.639.548.480 pada tahun 2029. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan operasional, pemeliharaan dan pening-katan kesejahteraan pegawai, sementara pengeluaran pembiayaan tetap konstan di angka Rp 1.000.000.000 setiap tahun. Kapasitas riil kemam-puan keuangan juga menunjukkan pertumbuhan yang baik, meningkat dari Rp.504.613.488.021 pada 2025 menjadi Rp.543.750.654.747 pada tahun 2029.

Peningkatan ini mencerminkan adanya ruang fiskal yang cukup untuk mendanai lebih banyak program unggulan di masa depan, asal perencanaan dan pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik. Dalam mengalokasikan anggaran, Kabupaten Keerom membagi menjadi dua prioritas utama.

Prioritas I dialokasikan sebesar 30% dari total kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, yang digunakan untuk pelaksanaan program unggulan dan prioritas terkait dengan visi-misi Kepala Daerah. Alokasi Prioritas I diproyeksikan meningkat dari Rp.151.384.046.406 pada tahun 2025 menjadi Rp.163.125.196.424 pada tahun 2029.

Prioritas II dialokasikan sebesar 70% dari total kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, digunakan untuk pelaksanaan program-program pelayanan dasar, program urusan pemerintahan lainnya, serta penunjang tugas dan fungsi OPD. Alokasi untuk Prioritas II diproyeksi-kan meningkat dari Rp.353.229.441.614 pada tahun 2025 menjadi Rp.380.625.458.323 pada tahun 2029.

Secara keseluruhan, Kabupaten Keerom memberikan porsi yang lebih besar pada Prioritas II, yang terkait dengan program-program pelayanan dasar, urusan pemerintahan lainnya, dan penunjang tugas serta fungsi OPD. Sementara itu, program-program unggulan dan prioritas terkait visi-misi Kepala Daerah mendapatkan alokasi yang lebih kecil, namun tetap menjadi fokus utama dalam penggunaan anggaran daerah.

Dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang terbatas diharapkan agar fokus belanja diarahkan pada 2 (dua) prioritas yaitu:

1. Prioritas I dialokasikan sebesar 30% untuk pelaksanaan program-program unggulan dan prioritas terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah;
2. Prioritas II dialokasikan sebesar 70% untuk pelaksanaan program-program pelayanan dasar, dan program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

Mengingat kapasitas riil kemampuan keuangan yang sangat terbatas, maka pemerintah daerah perlu menggali sumber-sumber pendanaan lain di luar APBD Kabupaten Keerom antara lain:

1. Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
2. Pemanfaatan sumber pembiayaan lain yang berasal dari Lembaga Donor, partisipasi masyarakat dan swasta. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan daerah Kabupaten Keerom tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.67
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Keerom

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
1. Pendapatan	1.019.795.541.058	1.028.098.346.689	1.042.973.092.659	1.058.069.245.901	1.073.390.203.227
2. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3. Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	-	-	-	-	-
Total Penerimaan	**1.019.795.541.058**	**1.028.098.346.689**	**1.042.973.092.659**	**1.058.069.245.901**	**1.073.390.203.227**
Dikurangi :					
5. Belanja Wajib Dan Mengikat	514.182.053.037	517.657.695.536	521.228.632.424	524.890.544.218	528.639.548.480
6. Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	**504.613.488.021**	**509.440.651.153**	**520.744.460.235**	**532.178.701.683**	**543.750.654.747**

Sumber: (data diolah)

Tabel 2.68
Alokasi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan DaerahKabupaten Keerom Tahun 2025-2029

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	**504.613.488.021**	**509.440.651.153**	**520.744.460.235**	**532.178.701.683**	**543.750.654.747**
Prioritas I	151.384.046.406	152.832.195.346	156.223.338.071	159.653.610.505	163.125.196.424
Prioritas II	353.229.441.614	356.608.455.807	364.521.122.165	372.525.091.178	380.625.458.323

Sumber : (data diolah)

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis

Berdasarkan kondisi daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, pembangunan akan menghadapi banyak tantangan atau isu-isu strategis yang membutuhkan perhatian, pemikiran, dan solusi pemecahan. Permasalahan dan isu-isu strategis yang belum dapat diselesaikan, disebabkan belum teridentifikasinya masalah-masalah tersebut secara tepat.

Pemetaan permasalahan dan isu strategis merupakan langkah awal yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan melakukan pemetaan ini, pemerintah daerah dapat menyusun rencana pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pemetaan ini membantu pemerintah daerah untuk fokus pada masalah-masalah yang paling mendesak dan berdampak signifikan terhadap pembangunan. Pemetaan ini juga mampu menghasilkan data yang akurat dan relevan tentang kondisi daerah, sehingga menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan.

2.6.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.6.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Penyelenggaraan layanan pendidikan di Kabupaten Keerom masih menghadapi berbagai masalah, baik itu akses yang terbatas, kualitas guru yang kurang, sarana prasarana yang belum memadai, dan kurikulum yang kurang relevan saling mempengaruhi dan memperparah situasi. Kondisi ini berdampak pada kualitas lulusan, produktivitas masyarakat, dan pada akhirnya, pada pembangunan daerah. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan.
2. Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang kese-hatan merupakan bagian krusial dalam memastikan produktivitas sumber daya manusia dalam berkontribusi terhadap upaya pembangunan.
3. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Keerom berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berkaitan dengan dua hal yaitu belum optimalnya akses dan kualitas infrastruktur dasar. Akses dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan merupakan hal yang vital sebagai penghubung antar pusat-pusat social, ekonomi dan pemukiman. kondisi jalan dan jembatan yang rusak atau tidak mantap akan berdampak pada terhambatnya mobilitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan ekonomi maupun sosial.
4. Akses Pemukiman layak huni masih menjadi persoalan utama dalam urusan ini. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu belum optimalnya akses masyarakat dalam memiliki rumah layak huni serta minimnya ketersediaan utilitas pemukiman.
5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat bagian dari urusan wajib yang terkait pelayanan dasar, sehingga menjadi syarat utama sekaligus tujuan dari pemba-ngunan daerah. Pembangunan Kabupaten Keerom masih terdapat permasalahan di bidang ini, misalnya ditunjukkan dengan adanya gangguan pada kondusifitas daerah dan kohesivitas sosial masyarakat.
6. Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, terwujudnya akses dan distribusi kesejahteraan yang merata, serta terwujudnya kohesivitas sosial. bidang sosial serta akar-akar masalahanya.

Tabel 2.69
Pemetaan Permasalahan Urusan Pendidikan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Kualitas pendidikan belum sesuai standar yang ditetapkan.	– Akses pendidikan di daerah terpencil sangat terbatas. – Mutu pendidikan belum merata di semua jenjang. – Implementasi pendidikan karakter belum merata di semua jenjang.	– Tingginya angka putus sekolah pada usia sekolah. – Belum semua anak sekolah di sekolah terakreditasi B. – Capaian SPM Pengelolaan Pendidikan belum maksimal. – Pendidikan layanan khusus untuk OAP belum optimal. – Akses pendidikan keluarga miskin masih rendah.Biaya pendidikan tingkat menengah atas dan tinggi mahal.Masih ada guru yang belum bersertifikasi. – Mutu proses belajar mengajar rendah.Tingkat pendidikan perempuan lebih rendah dari laki-laki. – Manajemen penyelenggaraan pendidikan belum optimal. – Penyusunan kurikulum muatan lokal belum maksimal. – Minat baca siswa masih rendah. – Pendidikan formal dianggap kurang penting atau relevan. – Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran masih rendah. – Koordinasi antar pemangku kepentingan pendidikan kurang. – Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan rendah. – Kesempatan pengembangan profesional guru terbatas. – Akses infrastruktur TIK di sekolah terbatas. – Kasus perundungan dan kekerasan di sekolah masih tinggi. – Alat belajar peserta didik masih minim. – Sarana prasarana sekolah belum memadai. – Kompetensi guru dalam bidang tertentu rendah. – Pengembangan kurikulum muatan lokal belum optimal.

Tabel 2.70
Pemetaan Permasalahan Urusan Kesehatan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Derajat kesehatan masyarakat belum merata	Kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang belum Merata;	– Angka kematian ibu, bayi, dan balita masih tinggi. – Pencegahan dan pengendalian penyakit belum maksimal. – Kasus gizi buruk masih terjadi. – Penyakit menular dan tidak menular masih menjadi masalah. – Kunjungan ibu hamil pada K1 dan K4 belum optimal. – Kunjungan ibu hamil pada N1 dan N4 belum optimal. – Kesehatan penduduk miskin (terutama OAP) belum terjamin. – Mutu dan kompetensi SDM kesehatan perlu ditingkatkan. – Akreditasi unit layanan kesehatan masih rendah. – Mutu layanan fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan. – Sediaan farmasi dan alat kesehatan belum merata. – Tenaga kesehatan spesialis masih kurang. – Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan belum optimal. – Upaya kesehatan belum sinergis. – Koordinasi lintas sektor kesehatan daerah kurang. – Kompetensi dan kualifikasi SDM OAP Kesehatan belum maksimal. – Pengelolaan kawasan tanpa rokok masih minim. – Pelayanan kesehatan bergerak belum optimal. – Pelayanan kesehatan di daerah terpencil untuk OAP kurang. – Pelayanan kesehatan untuk penyakit menular dan tidak menular kurang. – Ketersediaan dan pemanfaatan alat dan jaringan informasi kesehatan masih rendah.

Tabel 2.71
Pemetaan Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Infrastruktur dan layanan dasar di daerah belum memadai	– Infrastruktur dasar belum memadai – Tata ruang dan lingkungan belum optimal – Akses air bersih, sanitasi, dan layanan air minum belum merata	– Kondisi jembatan dan Jalan kota belum memadai. – Pengelolaan sampah regional belum maksimal. – Layanan pengolahan limbah belum merata. – Pasokan air bersih masih kurang. – Sumber air baku terbatas. – Sistem irigasi belum berfungsi optimal. – Sistem informasi konstruksi belum menyeluruh. – Sistem pembuangan limbah belum memadai. – Akses air bersih dan sanitasi masih terbatas. – Layanan air minum belum merata – Saluran drainase perlu perbaikan dan penambahan. – Fasilitas pengendali banjir belum memadai. – Kepatuhan terhadap izin mendirikan bangunan rendah. – Pengawasan penataan ruang masih lemah. – Pelatihan tenaga konstruksi belum optimal. – Koordinasi perencanaan tata ruang belum baik. – Kapasitas dan kualifikasi SDM – OAP belum maksimal.

Tabel 2.72
Pemetaan Permasalahan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Kualitas utilitas perumahan belum memadai dan Keterbatasan akses terhadap air bersih, listrik, dan sanitasi yang layak.	– Akses terhadap pemukiman layak huni masih belum merata – Kualitas lingkungan perumahan saat ini masih jauh dari ideal	– Bantuan perumahan OAP belum optimal – Tingkat hunian tidak layak masih tinggi – Infrastruktur permukiman strategis belum memadai – Penataan bangunan dan lingkungan kurang optimal – Penyelenggaraan bangunan gedung belum maksimal – Ketersediaan PSU perumahan belum mencukupi – Sanitasi lingkungan perumahan perlu perbaikan – Penanganan kawasan kumuh masih belum optimal – Akses terhadap perumahan layak masih terbatas – Kualitas hidup di permukiman perlu ditingkatkan – Perencanaan tata ruang permukiman perlu dievaluasi – Investasi infrastruktur permukiman masih kurang – Peraturan terkait bangunan gedung belum efektif – Pengelolaan sampah dan limbah belum optimal – Partisipasi masyarakat dalam pembangunan permukiman rendah

Tabel 2.73
Pemetaan Permasalahan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat belum tercapai secara optimal.	Risiko terjadinya bencana masih sangat tinggi dan mengancam	– Penanganan gangguan ketertiban umum belum maksimal. – Konflik kepemilikan lahan masih sering terjadi. – Kejahatan di daerah perkotaan masih menjadi masalah. – Penyelesaian tindak pidana belum optimal. – Penegakan peraturan daerah belum maksimal. – Kasus kebakaran masih tinggi terjadi. – Dana taktis bencana belum tersedia cukup. – Mitigasi bencana belum dipahami masyarakat. – Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana rendah. – Informasi kerawanan bencana masih minim. – Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana belum optimal. – Koordinasi penanganan bencana antar instansi lemah. – Infrastruktur penanggulangan bencana belum memadai. – Sosialisasi risiko bencana belum merata. – Kapasitas relawan dalampenanganan bencana terbatas.

Tabel 2.74
Pemetaan Permasalahan Urusan Sosial

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Perlindungan sosial dan penanganan PMKS belum optimal	– Pemberdayaan, rehabilitasi, dan jaminan sosial korban belum maksimal – Penanganan korban bencana saat dan pasca bencana belum optimal	– Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil belum maksimal. – Data Orang dengan Usia Produktif (OAP) dalam penanganan masalah sosial masih minim. – Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah belum optimal melalui Pemberdayaan Ekonomi. – Basis data bidang sosial yang terintegrasi sangat terbatas. – Tenaga terlatih dalam penanganan masalah sosial masih kurang. – Koordinasi antar kelembagaan kesejahteraan sosial lemah. – Kesenjangan sosial tinggi, berpotensi menimbulkan konflik. – Perlu peningkatan pelayanan sosial dasar dan keterpaduan penanganan PMKS. – Pengendalian penyakit sosial, termasuk NAPZA, masih rendah. – Infrastruktur dan lingkungan belum ramah lansia dan difabel. – Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial belum optimal. – Perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang sosial. – Akses terhadap layanan sosial masih terbatas bagi kelompok rentan. – Perlu adanya sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif. – Peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial masih kurang. – Perlu adanya evaluasi berkala terhadap program kesejahteraan sosial. – Anggaran untuk program kesejahteraan sosial masih belum memadai. – Perlu adanya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penanganan masalah sosial. – Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan sosial. – Perlu adanya regulasi yang lebih kuat dalam bidang kesejahteraan sosial.

2.6.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Permasalahan sektor tenaga kerja adalah masih tingginya tingkat pengangguran terbuka dan produktivitas tenaga kerja masih rendah.
2. Permasalahan masih pada derajat hidup masyarakat, pember-dayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.
3. Ketahanan pangan masyarakat Keerom tidak memiliki kedaulatan dalam mempro-duksi dan menghasilkan kebutuhan pangan maka akan sulit untuk menciptakan ketahanan pangan.
4. Pertanahan merupakan urusan penting terkait konteks lokal masyarakat Papua yang dalam kehidupannya terkait dengan erat dengan aspek agraria.
5. Permasalahan yang dihadapi di bidang lingkungan hidup adalah banyaknya kerusakan lingkungan hidup perlu diwaspadai dan ditindak-lanjuti karena akan meningkat dari waktu ke waktu.
6. Urusan kependudukan dan pencatatan sipil memegang peran penting dalam mempertegas hak kewarganegaraan dan efektivitas pembangunan. Berdasarkan kondisi tersebut.
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa berperan penting sebagai solusi atas permasalahan kesejahteraan yang masih dialami masyarakat. Urusan ini sangat strategis dengan dukungan kebijakan undang-undang desa dan program pemberdayaan masyarakat kampung yang telah berjalan cukup lama di Kabupaten Keerom.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dihadapi oleh Kabupaten Keerom saat ini adalah belum optimalnya perencanaan terkait jumlah dan jarak kelahiran anggota keluarga, hal ini terjadi karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam keluarga berencana.
9. Perhubungan berkaitan dengan ketidakoptimalan konektivitas transportasi.
10. Komunikasi dan informatika adalah akses komunikasi dan telekomunikasi yang belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Keerom serta belum optimal nya kualitas kelembagaan dalam rangka peningkatan keterbukaan informasi publik.
11. Sektor koperasi dan UKM adalah rendahnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekono-mian daerah.
12. Penanaman modal adalah belum optimalnya kinerja investasi dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah di Kabupaten Keerom.
13. Potensi pemuda dan keolahragaan yang cukup besar. Jika potensi tersebut dikelola dengan baik maka pemuda dan olahraga dapat menjdi salah satu pengungkit daya saing Kabupaten Keerom.
14. Urusan statistik bagian dari urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Statistik sebagai urusan memegang peran penting dalam pembangunan daerah, terutama terkait penyediaan basis data di Kabupaten Keerom.
15. Persandian merupakan bagian dari urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan persandian terkait keamanan informasi daerah di Kabupaten Keerom.
16. Sebagai daerah dengan keberagaman suku bangsa dan budaya yang tinggi, Kabupaten Keerom memiliki potensi yang besar namun, kondisi tersebut sekaligus menghadapkan Kabupaten Keerom dengan berbagai tantangan dalam pelestarian budaya asli Papua (Keerom).
17. Perpustakaan merupakan kebutuhan sekaligus prasyarat krusial dalam meningkatkan literasi masyarakat.
18. Kearsipan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, terutama untuk mencapai tertib administrasi dan basis data bagi Pembangunan. Permasalahan yang masih terjadi terkait urusan kearsipan ialah belum optimalnya penerapan arsip secara baku di setiap perangkat daerah dan kapasitas sumber daya kearsipan.

Tabel 2.75
Pemetaan Permasalahan Urusan Tenaga Kerja

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya daya saing ketenaga-kerjaan	Masih tingginya angka pengangguran terbuka	– Pelatihan berbasis kompetensi belum terlaksana optimal. – Tingkat sertifikasi kompetensi tenaga kerja rendah. – Penempatan tenaga kerja belum memadai dan efektif. – Lapangan kerja sektor potensial daerah masih terbatas. – Perlindungan tenaga kerja belum didukung perencanaan. – Pengelolaan informasi pasar kerja belum optimal. – Angkatan kerja berpendidikan rendah masih tinggi. – Daya serap tenaga kerja Orang Dengan Usia Produktif rendah. – Pencegahan perselisihan hubungan industrial belum optimal. – Pemberdayaan wirausaha bagi OAP belum optimal. – Akses jaminan sosial ketenagakerjaan masih rendah. – Kurangnya link and matchantara pendidikan dan dunia kerja. – Keterampilan tenaga kerja belum sesuai kebutuhan industri. – Mobilitas tenaga kerja antar daerah masih rendah. – Kualitas pelatihan kerja belum terstandarisasi. – Regulasi ketenagakerjaan belum sepenuhnya efektif. – Kesadaran akan pentingnya – sertifikasi kompetensi rendah antara pendidikan dan dunia kerja. – Keterampilan tenaga kerja belum sesuai kebutuhan industri. – Mobilitas tenaga kerja antar daerah masih rendah. – Kualitas pelatihan kerja belum terstandarisasi. – Regulasi ketenagakerjaan belum sepenuhnya efektif. – Kesadaran akan pentingnya sertifikasi kompetensi rendah.

Tabel 2.76
Pemetaan Permasalahan Urusan Pemberdayaan perempuan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengarus-utamaan gender dan pengarusutamaan hak anak	Pemberdayaan perempuan masih terbatas. Perlindungan hak perempuan dan anak belum memadai.	– Kesetaraan gender di berbagai bidang masih belum tercapai. – Penetapan kampung layak anak belum merata di seluruh wilayah. – Fasilitas publik yang ramah anak masih terbatas. – Masalah anak jalanan, korban narkoba, terlantar, dan putus sekolah masih ada. – Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi. – Pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi belum maksimal.Penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan perlu ditingkatkan. – Kasus KDRT masih menjadi masalah yang perlu diatasi. – Jaringan antar lembaga perlindungan perempuan belum terintegrasi dengan baik. – Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak belum optimal. – Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus masih kurang memadai. – Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah. – Stereotipe gender masih kuat dalam masyarakat. – Akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi masih terbatas. – Kualitas pendidikan anak, terutama anak perempuan, belum merata. – Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual belum optimal. – Kesadaran masyarakat tentang pentingnya keseta-raan gender masih rendah. – Anggaran untuk program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih minim. – Koordinasi antar lembaga terkait dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum efektif.

Tabel 2.75
Pemetaan Permasalahan Urusan Ketahanan Pangan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Ketersediaan pangan tidak merata dan Ketergantungan pangan dari luar daerah tinggi, serta Infrastruktur pangan belum memadai.	Tingginya ketergantungan pada pangan impor Infrastruktur pendukung kemandirian pangan belum optimal	– Ketersediaan Pangan tidak merata di seluruh wilayah. – Produk pangan lokal kurang beragam. – Ketergantungan pangan dari luar daerah masih tinggi. – Pengawasan mutu dan keamanan pangan belum optimal. – Infrastruktur pendukung kemandirian pangan belum memadai. – Penyediaan dan penyaluran pangan pokok belum maksimal. – Harga minimum pangan lokal belum terlaksana dengan baik. – Peta kerentanan dan ketahanan pangan kurang dimanfaatkan. – Pembinaan keamanan pangan UMKM belum optimal. – Distribusi pangan tidak efisien dan merata. – Produksi pangan lokal belum mencukupi kebutuhan. – Kualitas pangan impor belum terjamin. – Konsumen kurang sadar akan pentingnya pangan lokal. – Kebijakan pangan belum sepenuhnya efektif. – Koordinasi antar instansi terkait belum optimal.

Tabel 2.76
Pemetaan Permasalahan Urusan Pertanahan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Sertifikasi, pengadaan, sengketa, dan pengakuan hak adat, belum terselesaikan secara optimal.	Rendahnya sertifikasi dan penetapan tanah Tingginya sengketa dan lemahnya penyelesaian	– Tingkat sertifikasi tanah masih rendah. – Rekomendasi penetapan tanah terlantar belum tersusun. – Koordinasi pengadaan tanah belum optimal. – Sengketa tanah garapan masih tinggi. – Penyelesaian ganti kerugian tanah sangat rendah. – Sengketa hak ulayat dan tanah adat masih banyak. – Peta zona nilai tanah belum tersedia secara lengkap. – Peta zona nilai ekonomi kawasan belum tersedia. – Pemetaan tanah adat belum dilakukan secara menyeluruh. – Penetapan tanah ulayat belum maksimal. – Penyelesaian sengketa tanah ulayat belum optimal. – Pelepasan hak masyarakat hukum adat belum optimal. – Fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan belum maksimal. – Data pertanahan belum terintegrasi secara baik. – Regulasi pertanahan masih perlu penyempurnaan.

Tabel 2.77
Pemetaan Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Kelembagaan, sumber daya manusia, kesadaran masyarakat, dan kurangnya instrumen serta penegakan hukum yang belum efektif	Lemahnya tata kelola lingkungan Kurangnya partisipasi dan sinergi untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan yang lebih efektif	– Dokumen perencanaan lingkungan belum lengkap. – SDM OAP bidang lingkungan masih terbatas. – Kesadaran masyarakat akan pem-bangunan berkelanjutan rendah. – Permintaan air bersih meningkat, ketersediaan menurun. – Instrumen ekonomi lingkungan belum tersedia. – Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan daerah belum optimal. – Penegakan hukum lingkungan belum efektif. – Petugas pengawas lingkungan masih kurang. – Aturan pemanfaatan SDA berkelanjutan belum ada. – Keterlibatan multipihak dalam pengelolaan lingkungan perlu ditingkatkan. – Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah belum optimal. – Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan belum maksimal. – Pengelolaan keanekaragaman hayati belum maksimal. – Pengendalian B3 dan limbah B3 belum maksimal. – Pembinaan dan pengawasan usaha berizin lingkungan belum maksimal. – Koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan lingkungan lemah. – Alokasi anggaran untuk lingkungan masih terbatas. – Teknologi pengelolaan lingkungan belum optimal. – Partisipasi masyarakat dalam program lingkungan rendah. – Evaluasi dan monitoring program lingkungan belum efektif. – Data dan informasi lingkungan belum terintegrasi. – Kapasitas lembaga dalam pengelolaan lingkungan terbatas. – Akses masyarakat terhadap informasi lingkungan terbatas. – Kerjasama internasional dalam pengelolaan lingkungan belum optimal. – Edukasi lingkungan sejak dini belum masif.

Tabel 2.78
Pemetaan Permasalahan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Pelayanan publik administrasi kependudukan belum optimal	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Belum Optimal Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Belum Optimal	– Kesadaran masyarakat terhadap regulasi kependudukan masih rendah. – Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pendaftaran penduduk belum optimal. – Data OAP yang terkelola belum memadai untuk program. – Tertib administrasi kependudukan di tingkat desa/kelurahan belum tercapai. – Kepemilikan dokumen kependudukan utama masih di bawah target. – Pengumpulan, pemanfaatan, dan penyajian data kependudukan belum maksimal. – Pemanfaatan profil data kependudukan masih rendah. – Koordinasi antar instansi terkait kependudukan belum efektif. – Akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan masih terbatas. – Kualitas data kependudukan yang ada belum terjamin akurasinya. – Sumber daya manusia yang menangani kependudukan belum memadai. – Anggaran yang dialokasikan untuk kependudukan belum mencukupi. – Teknologi informasi yang digunakan untuk kependudukan belum optimal. – Sosialisasi mengenai pentingnya administrasi kependudukan masih kurang. – Evaluasi terhadap pelaksanaan program kependudukan belum dilakukan secara berkala.

Tabel 2.79
Pemetaan Permasalahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kerjasama dan kapasitas, serta kurangnya pemanfaatan potensi lokal dan teknologi, hingga keterbatasan informasi dan partisipasi masyarakat	kerjasama pemerintah, pemberdayaan lembaga masyarakat, pengembangan ekonomi, dan pemanfaatan potensi local belum optimal Rendahnya kapasitas sumber daya manusia, keterbukaan informasi, serta koordinasi antar lembaga terkait pembangunan kampung.	– Kinerja pemerintah kampung masih lemah untuk peningkatan ekonomi lokal. – Pemberdayaan lembaga masyara-kat belum optimal. – Pemberdayaan masyarakat hukum adat belum maksimal. – Pengembangan ekonomi kampung masih rendah. – Pengembangan ekonomi, investasi desa, daerah tertinggal, minim. – Pemberdayaan BUMKAM belum optimal. – Belum ada pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. – Teknologi informasi belum dimanfaatkan maksimal dalam pemberdayaan masyarakat. – Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi kampung, rendah. – Informasi terkait pengelolaan dana desa kurang transparan. – Kapasitas SDM pemerintah kampung belum memadai. – Koordinasi antar lembaga terkait pembangunan kampung belum optimal. – Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung masih rendah. – Kurangnya inovasi dalam pengem bangan ekonomi kampung. – Akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi terbatas – Kelembagaan ekonomi kampung belum kuat. – Peran swasta dalam pembangun an kampung belum signifikan. – Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan berkelanjutan. – Belum adanya perencanaan pembangunan kampung yang partisipatif. – Pembiayaan pembangunan kampung masih menjadi kendala utama.

Tabel 2.80
Pemetaan Permasalahan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pokok masalah	Masalah	Akar masalah
Rendahnya kesadaran dan akses masyarakat terhadap program keluarga berencana, serta lemahnya koordinasi dan implementasi program	– Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan pentingnya KB masih rendah – Pelaksanaan program KB, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat belum optimal	– Kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi masih minim. – Upaya advokasi dan edukasi kesehatan reproduksi belum maksimal. – Target pengguna kontrasepsi dan peserta KB aktif belum tercapai. – Pentingnya keluarga berencana belum disadari masyarakat luas. – Program BKB, BKL, BKR, dan PKLK perlu ditingkatkan. – Ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu diperkuat. – Pemanfaatan alat kontrasepsi dan layanan KB belum optimal. – Peran serta masyarakat dalam program keluarga sejahtera masih terbatas. – Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan keluarga perlu ditingkatkan. – Kualitas lingkungan keluarga perlu terus diperbaiki. – Penyerapan alat kontrasepsi perlu ditingkatkan. – Pelaksanaan pelayanan KB perlu dioptimalkan. – Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan perlu digalakkan. – Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan perlu diperkuat. – Kesejahteraan keluarga menjadi sasaran utama pembangunan.

Tabel 2.81
Pemetaan Permasalahan Urusan Perhubungan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Sistem transportasi public, perencanaan, kesadaran masyarakat, serta fasilitas dan SDM yang belum memadai.	– Infrastruktur dan Regulasi Transportasi Belum Memadai – Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Transportasi Belum Optimal	– Rasio trayek angkutan umum tidak sesuai kebutuhan. – Pemahaman masyarakat akan peraturan lalu lintas rendah. – Penyelenggaraan LLAJ belum optimal. – Jaringan trayek perkotaan belum optimal. – Penetapan tarif angkutan ekonomi belum optimal. – Penataan angkutan dalam kota belum optimal. – Jumlah kendaraan tidak seimbang dengan kapasitas jalan. – Fasilitas lalu lintas masih minim. – Pemberdayaan SDM Papua di bidang LLAJ belum optimal. – Penerbitan izin angkutan laut, penyeberangan, dan sungai belum optimal. – Pengelolaan pelabuhan – pengumpan local belum maksimal. – Pengelolaan penerbangan belum maksimal. – Pengembangan UPTD bandar udara belum terlaksana. – Jalan dan infrastruktur pendukung belum memadai. – Terminal dan halte belum memadai. – Fasilitas parkir terbatas. – Koordinasi antar instansi terkait belum optimal. – Anggaran untuk sektor transportasi masih terbatas. – Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan transportasi rendah. – Teknologi transportasi belum dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2.82
Pemetaan Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Kurang optimalnya manajemen informasi, ketidaklengkapan sistem informasi, keterbatasan SDM IT, infrastruktur yang belum memadai	– Pengelolaan informasi publik dan e-Gover-nance masih belum optimal – SDM, sarana prasarana, dan penyebaran informasi belum optimal untuk mendukung e-Governance	– Pengelolaan informasi publik masih belum optimal. – Sistem informasi e- Governance belum lengkap dan terintegrasi. – Kualitas sumber daya manusia pengelola IT masih terbatas. – Sarana prasarana telekomunikasi masih belum memadai. – Penyelenggaraan domain pemerintah belum optimal. – Penyebaran informasi ke masyarakat belum maksimal. – Pengelolaan rencana induk e-Gov belum optimal. – Keamanan sistem informasi e-Gov masih perlu ditingkatkan. – Akuntabilitas pengelolaan sistem informasi belum terjamin. – Integrasi data antar sistem – Informasi masih menjadi tantangan.

Tabel 2.83
Pemetaan Permasalahan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya kontribusi UMKM dalam perekonomian wilayah	– Rendahnya pengetahuan, akses teknologi, sumber daya manusia, dan dukungan peme-rintah serta swasta dalam pengem-bangan kapasitas UMKM dan koperasi – Regulasi dan infrastruktur pendukung UMKM dan koperasi belum memadai	– Peningkatan kapasitas SDM OAP bidang UKM belum maksimal. – Pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi belum efektif. – Masyarakat kurang paham perkoperasian dan usaha simpan pinjam legal. – Penerapan teknologi pemasaran produk masih minim.Koperasi dan UMKM kurang kompetitif. – Sumber daya manusia koperasi terbatas. – Kerjasama pemerintah dan swasta belum optimal. – Pengembangan usaha mikro ke skala lebih besar belum optimal. – Regulasi pengembangan koperasi dan UMKM belum ada. – Basis data usaha mikro OAP belum komprehensif. – Dukungan bagi UMKM OAP sebagai penyedia barang/jasa pemerintah kurang. – Akses permodalan untuk UMKM masih terbatas. – Ketersediaan infrastruktur pendukung UMKM belum memadai. – Kualitas produk UMKM perlu ditingkatkan. – Promosi dan branding UMKM masih lemah. – Keterlibatan UMKM dalam – Rantai pasok masih rendah – Koordinasi antar lembaga terkait UMKM belum optimal. – Pengembangan produk UMKM berbasis inovasi masih kurang. – Keterampilan kewirausahaan pelaku UMKM perlu ditingkatkan. – Akses pasar bagi UMKM OAP masih terbatas.

Tabel 2.84
Pemetaan Permasalahan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya daya saing investasi dan aktivitas permodalan	Daya serap investasi masih tergolong rendah Belum Optimal nya layanan perijinan 1- pintu	– Fasilitas dan insentif investasi belum memadai. – Peta potensi investasi belum dimanfaatkan secara maksimal. – Promosi investasi masih kurang efektif. – SDM promosi investasi belum kompeten. – Akses informasi investasi terbatas. – Sumber daya manusia di bidang investasi masih minim. – Sarana dan prasarana pendukung investasi belum optimal. – Kepemilikan hak ulayat belum jelas secara hukum. – Belum ada BUMD untuk pengem-bangan ekonomi dan investasi. – Pelayanan perizinan terpadu satu pintu belum optimal. – Pengendalian pelaksanaan investasi masih lemah. – Data dan informasi perizinan belum terintegrasi. – Koordinasi antar lembaga terkait investasi belum efektif. – Iklim investasi belum sepenuhnya kondusif. – Peraturan daerah terkait investasi masih perlu penyempurnaan

Tabel 2.85
Pemetaan Permasalahan Urusan Kepemudaan dan olahraga

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya partisipasi pemuda dalam pemba-ngunan serta daya saing keolahragaan	– Pengembangan kapasitas pemuda belum maksimal – Keterlibatan berbagai pihak dalam pembinaan pemuda kurang optimal	– Pengembangan kapasitas pemuda belum maksimal. – Pengawasan organisasi pemuda kurang optimal. – Prestasi pemuda dalam pembangunan belum optimal. – Sarana prasarana kepemudaan dan olahraga terbatas. – Peran serta pemda, swasta, masyarakat dalam pembinaan pemuda kurang. – Sarana prasarana peningkatan prestasi olahraga terbatas. – Pembinaan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan belum optimal. – Pembinaan organisasi kepramukaan belum optimal.
		– Keterbatasan akses pemuda terhadap pelatihan dan pengembangan diri. – Kurangnya dukungan finansial untuk kegiatan kepemudaan. – Koordinasi antar lembaga dalam pembinaan pemuda belum efektif. – Rendahnya minat pemuda dalam berorganisasi. – Kurangnya inovasi dalam program pembinaan pemuda. – Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan pemuda. – Kurangnya evaluasi terhadap program pembinaan pemuda.

Tabel 2.86
Pemetaan Permasalahan Urusan Statistik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya pengelolaan dan pemanfaatan data statistik daerah dalam menunjang pembangunan daerah	– Penerapan SOP, kapasitas SDM, dan integrasi data statistik masih lemah. – Infrastruktur data sektoral belum memadai, kapasitas aparatur terbatas, dan analisis kinerja pembangunan kurang berkualitas.	– Penerapan SOP pengelolaan data statistik daerah belum maksimal. – Pengembangan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi belum optimal. – Kebutuhan data statistik dasar dengan statistik sektoral kurang terintegrasi. – Data belum terintegrasi dalam kebutuhan perencanaan pembangunan. – Infrastruktur pangkalan data sektoral belum memadai. – Kapasitas dan keterampilan aparatur perencanaan dalam menyediakan data-data statistik sektoral masih minim. – Ketersediaan dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas belum optimal. – Penerapan tata kelola pembangunan berbasis bukti belum optimal. – Koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan data statistik masih lemah. – Aksesibilitas data statistik bagi masyarakat dan pemangku kepentingan belum optimal.

Tabel 2.87
Pemetaan Permasalahan Urusan Persandian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Sistem keamanan informasi pemerintah daerah masih lemah	– Belum optimalnya koordinasi hubungan sandi antar perangkat daerah – Belum optimalnya manajemen keamanan	– Penyelenggaraan persandian di pemerintah daerah masih belum mencapai tingkat optimalisasi yang diharapkan. – Pola komunikasi sandi antar perangkat daerah belum ditetapkan secara resmi dan komprehensif. – Pelaksanaan standar operasional prosedur persandian masih jauh dari kata sempurna dan efektif.Kapasitas sumber daya manusia dan teknis dalam bidang persandian masih perlu ditingkatkan. – Keamanan informasi berbasis elektronik di lingkungan pemerintah daerah belum terjamin secara optimal. – Implementasi sistem persandian yang terintegrasi dan efisien masih menjadi tantangan besar. – Kurangnya kesadaran akan pentingnya keamanan informasi menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan persandian.

Tabel 2.88
Pemetaan Permasalahan Urusan Kebudayaan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya Penerapan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat	Pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan kebudayaan masih belum optimal	– Pengelolaan kebudayaan perlu ditingkatkan. – Pelestarian kesenian tradisional belum maksimal. – Pembinaan kesenian masyarakat kurang optimal. – Event budaya masih terbatas. – Sinergi lintas sektor dalam kebudayaan lemah. – Komitmen masyarakat terhadap budaya rendah. – Pengelolaan komunitas budaya perlu diperbaiki. – Ruang publik untuk budaya masih terbatas. – Infrastruktur pendukung budaya belum memadai. – Penetapan dan pengelolaan cagar budaya belum optimal. – Pengelolaan budaya benda dan non-benda kurang maksimal. – Museum daerah belum sesuai standar nasional. – Pendidikan lingkungan dan budaya belum optimal. – Akses masyarakat terhadap budaya masih terbatas. – Dokumentasi dan arsip budaya belum terkelola baik. – Revitalisasi kawasan budaya belum optimal – Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lemah. – Perlindungan hak cipta karya budaya belum optimal. – Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal. – Keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya rendah.

Tabel 2.89
Pemetaan Permasalahan Urusan Perpustakaan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya minat membaca pada masyarakat	Keterbatasan akses dan kualitas layanan perpustakaan publik menjadi penghambat utama peningkatan literasi masyarakat.	– Tingkat literasi fungsional masya-rakat masih rendah. – Minat baca masyarakat, terutama generasi muda, masih rendah. – Akses masyarakat terhadap bahan bacaan bemutu, terbatas. – Keterampilan literasi digital masyarakat belum merata. – Koleksi buku perpustakaan kurang relevan dengan kebu-tuhan masyarakat. – Fasilitas perpustakaan belum memadai untuk menunjang kegiatan literasi. – Promosi layanan perpustakaan belum efektif. – Pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan masih minim. – Jumlah perpustakaan umum belum mencukupi kebutuhan masyarakat. – Tenaga kepustakaan yang profesional masih terbatas. – Anggaran untuk pengembangan perpustakaan masih kurang. – Koleksi naskah kuno belum terkelola dengan baik. – Pelestarian koleksi buku langka belum optimal. – Digitalisasi koleksi belum dilakukan secara menyeluruh. – Koordinasi antar lembaga terkait pengembangan literasi belum optimal.

Tabel 2.90
Pemetaan Permasalahan Urusan Kearsipan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Tata kelola kearsipan dan dilaksanakan secara profesional	Belum tertatanya arsip daerah	– Pengelolaan arsip dinamis dan statis daerah belum optimal. – Perlindungan, penyelamatan, dan pemusnahan arsip belum optimal. – Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional belum optimal. – Pemerintah daerah kurang perhatian pada dokumentasi kekayaan arsip. – Tenaga kearsipan bersertifikasi profesional masih terbatas. – Pengembangan tenaga kearsipan belum memadai dan berkelanjutan. – Minat masyarakat terhadap profesi kearsipan masih rendah. – Fasilitas dan infrastruktur kearsipan belum memadai. – Standar pengelolaan arsip belum sepenuhnya diterapkan. – Koordinasi antar lembaga terkait kearsipan belum efektif.

2.6.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Permasalahan yang dihadapi di sektor perikanan adalah rendah nya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah.
2. Dengan beragamnya potensi wisata di Kabupaten Keerom, seharus nya dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi Keerom, namun dari data terlihat bahwa Jumlah tamu/wisatawan WNA/WNI Keerom masih rendah.
3. Pertanian merupakan salah satu sector yang sangat penting. Salah satu komponen dalam membentuk PDRB adalah sector pertanian.
4. Masalah pokok yang dapat diidentifikasi berdasarkan sektor adalah Masih belum optimalnya upaya Konservasi lahan dan pelestarian sumber daya kehutanan.
5. Kebutuhan akan energi dan sumber daya mineral semakin lama semakin meningkat seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia.
6. Sektor Perdagangan di Kabupaten Keerom belum menunjukkan pengingkatan yang baik. Rendahnya kontribusi sector perdagangan terhadap perekonomian daerah menjadi salah satu masalah di Kabupaten Keerom.
7. Sektor Perindustrian merupakan salah satu komponen PDRB. Rendahnya kontribusi sekotor perdagangan.

2.6.1.4. Urusan Pendukung Pemerintahan

1. Sekretariat daerah dan sekretariat DPRP dan MRP serta beberapa perangkat daerah lainnya. Urusan kesekretariatan terkait pelaksaan fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga DPRD dan kepala daerah.

2.6.1.5. Urusan Penunjang Pemerintahan

1. Urusan perencanaan daerah terkait dengan kinerja perencanaan pembangunan daerah belum spenuhnya optimal, terkait perencanaan daerah dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan, perencanaan wilayah dan tata ruang.
2. Urusan keuangan terkait kinerja pendapatan daerah, alokasi belanja, efektivitas penggunaannya bagi kebutuhan pembangunan, serta pelaporan keuangan.
3. Pembangunan daerah terkait urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan merupakan upaya pelaksanaan siklus manajemen kepegawaian.
4. Manajemen kepegawaian secara garis besar terkait peningkatan profesionalitas aparatur, peningkatan kualitas administrasi kepegawaian, serta penempatan aparatur sipil negara berbasis pada sistem merit.
5. Urusan perencanaan terkait perencanaan pembangunan serta perencanaan penelitian dan pengembangan.

2.6.1.6. Urusan Kewilayahan

1. Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh distrik. Distrik dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kampung/kelurahan.

2.6.1.7. Urusan Pemerintahan Umum

1. Urusan Pemerintahan Umum dalam hal ini Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan peran pengembangan dan pembinaan wawasan kebangsaan dan Pendidikan Politik individu dan organisasi Kemasyarakatan.

Tabel 2.91
Pemetaan Permasalahan Urusan Pemerintahan Pilihan

Bidang Urusan	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah	Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	– Konsumsi ikan nasional masih rendah. – Pengelolaan penangkapan di perairan darat belum optimal. – Tempat pembibitan ikan belum dikelola secara optimal. – Pengembangan sumber daya manusia perikanan belum maksimal. – Tata niaga hasil tangkap nelayan kecil belum optimal – Tata niaga produk olahan perikanan belum optimal. – Penerapan teknologi perikanan masih rendah. – Tenaga teknis perikanan masih kurang dan kurang kompeten. – Pendukung produksi perikanan belum optimal. – Produksi ikan cenderung menurun. – Sarana dan prasarana perikanan belum memadai. – Peralatan tangkap nelayan belum sesuai standar. – Akses pemasaran produk perikanan masih terbatas. – Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil belum optimal. – Pengelolaan pembudidayaan ikan belum optimal. – Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan belum optimal. – Kualitas benih ikan belum terjamin.
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Rendahnya produktifitas regional sektor-sektor berbasis pariwisata	Belum berkembangnya industri pariwisata Belum optimalnya Pengembangan ekonomi Kreatif	– Pengelolaan daya tarik wisata lemah. – Infrastruktur pariwisata belum memadai. – Promosi pariwisata terbatas. – Pengembangan destinasi terhambat. – Kawasan strategis pariwisata belum optimal. – SDM pariwisata masih terbatas. – Kolaborasi pengelolaan pariwisata kurang. – Rencana induk pariwisata belum dimanfaatkan. – Pemasaran pariwisata belum maksimal. – Ekonomi kreatif belum berkembang optimal. – Pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif terbatas. – Fasilitasi dan pembinaan OAP belum optimal.

Bidang Urusan	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah masih rendah	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/ perkebunan Rendahnya tingkat kesejahteraan petani/ peternak	– Kekurangan penyuluh pertanian menghambat transfer teknologi. – Penerapan teknologi pertanian modern masih belum maksimal. – Ekstensifikasi lahan belum optimal untuk perluasan lahan pertanian. – Intensifikasi lahan belum optimal untuk peningkatan produktivitas. – Akses pasar produk lokal terbatas, menghambat pemasaran. – Ketersediaan benih dan pakan – berkualitas masih kurang. – Pemanfaatan lahan pertanian belum maksimal. – Sarana prasarana pertanian belum memadai. – Produksi pertanian belum stabil dan berkelanjutan. – Pengembangan bibit unggul masih terbatas. – Ketersediaan pakan ternak masih menjadi kendala. – Skala usaha peternakan masih kecil dan tidak efisien. – Kelembagaan petani belum kuat dan mandiri. – Peningkatan kualitas produk perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai jual. – Sertifikasi produk hasil ternak masih rendah.
Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	Kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah masih rendah	Pengelolaan hutan adat dan hak masyarakat hukum adat belum optimal Pemanfaatan hasil hutan non-kayu, investasi kehutanan, dan pengembangan industri hasil hutan belum maksimal.	– Ketidakjelasan Wilayah Hutan Produksi untuk Ekonomi Masyarakat Adat. – Pengakuan Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat yang Belum Optimal. – Belum adanya konsep yang terintegrasi untuk mengembang-kan industri hasil hutan secara – Investasi yang diarahkan pada pemanfaatan hasil hutan selain kayu masih sangat terbatas. – Penyelenggaraan pengelolaan hutan adat belum berjalan secara efektif dan efisien. – Masyarakat adat belum diberikan ruang yang cukup untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan – Penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor kehutanan masih lemah dan seringkali tidak efektif. – Konflik terkait kepemilikan dan penggunaan lahan hutan masih sering terjadi – Kurangnya Akses Masyarakat Adat terhadap Teknologi untuk meningkatkan produktivitas – Kurangnya Dukungan Kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan. – Minimnya Penelitian dan Pengembangan yang terkait dengan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. – Kurangnya Data dan Informasi yang Akurat terkait kondisi hutan, potensi hasil hutan – Rendahnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Kelestarian Hutan. – Peran Pemerintah Daerah yang Belum Optimal dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan

Bidang Urusan	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	Rendahnya produktifitas sektor energi dan sumberdaya mineral	Belum meratanya kapasitas terpasang energi listrik pada seluruh wilayah	– Inventarisasi keragaman geologi belum lengkap. – Akses listrik bagi seluruh rumah tangga masih terbatas. – Negara sangat bergantung pada impor energi fosil. – Potensi bahan tambang galian C belum dimanfaatkan secara maksimal. – Pengembangan energi terbarukan belum berjalan optimal. – Peningkatan kapasitas SDM bidang ESDM masih perlu diperkuat. – Data keragaman geologi masih belum komprehensif. – Distribusi listrik belum merata, terutama di daerah terpencil. – Biaya impor bahan bakar fosil terus meningkat. – Kontribusi sektor pertambangan galian C terhadap perekonomian masih rendah. – Pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti surya dan angin masih minim. – Kualitas SDM di bidang ESDM belum memenuhi standar yang diharapkan.
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Rendahnya daya saing sektor perdagangan	Rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah	– Perizinan perusahaan belum optimal. – Perdagangan daerah kurang efisien. – Ekspor rendah, impor tinggi. – Peran pemerintah dalam pengemb. perdagangan belum optimal. – Sarana perdagangan belum memadai. – Stabilisasi harga belum optimal. – Standarisasi dan perlindungan konsumen kurang. – Penggunaan produk dalam negeri belum optimal. – Kualitas SDM pelaku usaha OAP masih rendah. – Akses pasar produk lokal terbatas. – Birokrasi perizinan masih rumit. – Infrastruktur pendukung kurang memadai. – Kurangnya inovasi produk lokal. – Persaingan bisnis tidak sehat. – Ketergantungan pada produk impor tinggi.

Bidang Urusan	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Rendahnya daya saing sektor perindustrian	Rendahnya kontribusi sektor industri terhadap perekono-mian daerah	– Peta industri strategis daerah belum lengkap. – Sarana distribusi barang industri terbatas dan kurang berkualitas. – Kapasitas dan kualitas produksi masih rendah. – Keterlibatan pemerintah dan swasta dalam pengembangan industri kurang optimal. – Pemahaman masyarakat tentang metrologi legal masih rendah. – Akses permodalan untuk pengembangan industri masih terbatas. – Belum optimalnya penyelenggaraan pendampingan akses permodalan/ perkreditan industri kecil OAP ; – Belum optimalnya penyelenggara-an bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil OAP; – Belum optimalnya penyelenggaraan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI; – Belum optimalnya penyelenggara an Ijin IUI, IPUI, IUKI dan IPKI.

Tabel 2.92
Pemetaan Permasalahan Urusan Pendukung Pemerintahan

Bidang Urusan	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Pendukung Pemerintahan Sekretariat Daerah	Belum optimalnya reformasi birokasi dalam pemerintahan	Belum optimalnya layanan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	– Belum optimal penyelenggara an Kebijakan Kesra; – Belum optimalnya identifikasi masalah pembangunan daerah – Belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam layanan administrasi pemerintahan – Masih rendahnya nilai evaluasi SAKIP; – Perlu peningkatan kualitas pelayanan publik. – Belum terpenuhinya SPM di beberapa sektor pelayanan – Rentang kendali wilayah wilayah pembangunan – Belum maksimal penerapan SOP dan standar pelayanan publik; – Belum adanya regulasi terkait pelimpahan kewenangan kepada Kepala Distrik; – Minimnya sarana prasarana pemerintahan di wilayah pinggiran, jauh dari perkotaan; – Belum maksimalnya penerapan Kebijakan SDA.
Pendukung Pemerintahan Sekretariat DPRD	Pelaksaan fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal	Pelaksaan fungsi penopang DPRD berjalan belum optimal	– Belum optimalnya koordinasi dalam perumusan dan pengendalian kebijakan – Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan SOP dan SPM pelayanan publik; – Belum optimalnya peran penyerapan aspirasi masyarakat; – Belum optimalnya kapasitas legal drafting; – Belum optimalnya fasilitasi proses legislasi daerah perdasus/perdasi; – Belum tuntasnya pengawalan revisi undang-undang otonomi khusus Papua; – Perlunya pengembangan Kapasitas DPRD; – Belum optimalnya pemanfaatan informasi hasil Reses dalam pengambilan keputusan.

Tabel 2.93
Pemetaan Permasalahan Urusan Penunjang, Pengawasan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

Bidang Urusan	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Penunjang Pemerintahan Perencanaan	Belum optimalnya konsistensi perencanaan daerah berbasis kewilayahan	Belum tercipta-nya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif antar wilayah serta sektor perekonomian daerah, dengan Ketersediaan data dan informasi Sektoral kebutuhan perencanaan masih rendah.	– Kurangnya analisis mendalam kondisi daerah tahunan. – Belum optimalnya kajian komprehensif terhadap permasalahan daerah. – Isu strategis pembangunan daerah belum teridentifikasi secara tepat. – Instrumen MONEV belum terstandarisasi. – Data pembangunan daerah belum terkelola secara sistematis. – Kualitas data pembangunan masih rendah dan tidak akurat. – Basis data terpusat untuk seluruh sektor belum tersedia. – Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data masih minim. – Pengendalian data pembangunan belum efektif. – Sistem perencanaan pemba ngunan berbasis elektronik belum optimal. – Koordinasi antar sektor dan wilayah dalam perencanaan lemah. – Perencanaan pembangunan belum berbasis data yang ada. – Sinergi dan harmonisasi perencanaan pembangunan belum maksimal. – Terbatasnya penyediaan data dan informasi perencanaan. – Mutu tenaga perencana di perangkat daerah masih kurang. – SDM untuk analisis data pembangunan masih minim. – Rendahnya kapasitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi. – Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan belum optimal. – Pemanfaatan sistem informasi pemerintahan daerah belum maksimal. – Evaluasi terhadap pelaksanaan – Anggaran untuk kegiatan perencanaan dan evaluasi masih terbatas. – Partisipasi masyarakat dalam perenca-naan pembangunan belum optimal.

Bidang Urusan	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Penunjang Pemerintahan Keuangan	Belum optimalnya penyelengga-raan pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi, perencanaandan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah belum optimal dan Potensi pendapatan daerah belum termaksimalkan	– Koordinasi anggaran daerah belum maksimal. – Perbendaharaan dan akuntansi daerah perlu ditingkatkan. – Kualitas pelaporan keuangan perlu diperbaiki. – Pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah kurang optimal. – SDM pengelola keuangan daerah masih terbatas. – Aset daerah belum dimanfaatkan secara optimal. – Potensi aset daerah belum maksimal. – Implementasi regulasi pendapatan daerah belum optimal. – Pengelolaan data dan sistem informasi keuangan lemah. – Pengelolaan barang milik daerah belum optimal. – Pengelolaan pendapatan daerah masih kurang optimal. – Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah belum maksimal. – Pengawasan internal keuangan daerah perlu diperkuat. – Transparansi pengelolaan keuangan daerah masih terbatas. – Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah belum optimal. – Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan rendah. – Kelembagaan pengelola keuangan daerah perlu diperbaiki. – Akses informasi keuangan daerah masih terbatas. – Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran lemah.

Bidang Urusan	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Penunjang Pemerintahan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	Belum optimalnya penyeleng-gara an manajemen kepega-waian	Pengelolaan kepegawaian ASN belum efektif dan Sistem informasi kepegawaian masih belum optimal	– Pengadaan, pemberhentian, dan informasi ASN belum optimal. – Keterisian jabatan, formasi, dan pengembangan karir ASN kurang optimal. – Kompetensi ASN tidak sesuai dengan bidang pekerjaan. – Mutasi, promosi, dan kompetensi ASN perlu ditingkatkan. – Penegakan disiplin aparatur masih belum optimal. – Pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN belum memadai. – Sistem penilaian kinerja ASN kurang akurat. – Sistem informasi kepegawaian belum optimal. – Penerapan e-kepegawaian lambat, menghambat kenaikan pangkat. – Pengembangan kompetensi teknis belum optimal. – Sertifikasi, kelembagaan, dan pengembangan kompetensi manajerial – Pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri belum optimal. – Kurangnya sinkronisasi antara kebutuhan ASN dengan ketersediaan formasi. – Masih rendahnya motivasi dan kinerja ASN.
Penunjang Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan inovasi daerah dalam pembangunan sektoral	Masih rendahnya kualitas penelitian dan pengembangan dalam bidang social, kependudukanekonomi dan pembangunan dan Pemafaatan hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah belum optimal	– Fasilitasi litbang belum memadai. – Pelaksanaan litbang perlu ditingkatkan. – Evaluasi litbang kurang optimal. – Penelitian sosial belum maksimal. – Penelitian kependudukan masih terbatas. – Penelitian ekonomi masih terbatas. – Penelitian pembangunan belum komprehensif. – Penerapan Inovasi teknologi perlu dipercepat. – Pengembangan inovasi belum optimal. – Kapasitas aparatur dalam litbang terbatas. – Perencanaan pembangunan belum berbasis litbang. – Hasil litbang belum dimanfaatkan secara maksimal. – Hilirisasi hasil litbang masih rendah. – Daya saing daerah belum didukung litbang.

Bidang Urusan	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Urusan Pengawasan Pemerintahan Inspektorat Daerah	Belum optimalnya Pengawasan Pengelolaan APBD dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah	– Belum optimalnya kapabilitas APIP; – Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan belum optimal. – Pengawasan internal OPD dan Zona Integritas perlu ditingkatkan. – Jumlah dan kapasitas auditor tidak seimbang dengan beban kerja. – Upaya pembinaan dan pengawasan masih belum maksimal. – Pendampingan, asistensi dan verifikasi perlu dioptimalkan. – Pengawasan dengan tujuan tertentu belum dilaksanakan secara optimal. – Pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus belum maksimal. – Tindak lanjut hasil pemeriksaan perlu lebih ditingkatkan. – Sumber daya manusia pengawasan masih perlu dikembangkan. – Sistem pengawasan internal perlu diperkuat secara menyeluruh. – Koordinasi antar instansi pengawas belum berjalan efektif. – Penggunaan teknologi dalam pengawasan masih terbatas. – Evaluasi kinerja pengawasan perlu dilakukan secara berkala.
Urusan Kewilayahan	Belum optimalnya pengembangan pelayanan tingkat Distrik secara secara prima dan profesional	Pelayanan publik di tingkat distrik dan kampung belum optimal serta Belum optimalnya kapasitas aparatur distrik dalam penyelenggaraan pemerin-tahan dan pelayanan publik	– Percepatan SPM di Distrik belum maksimal. – Pembinaan dan pengawasan Distrik terhadap Kampung kurang optimal. – Kualitas kelembagaan Distrik masih rendah. – Perencanaan di tingkat Distrik hingga Kampung belum berkualitas. – Kampung terluar masih tertinggal. – Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Kepala Distrik. – Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan – Pemberdayaan Lembaga Kemasyara-katan Tingkat Distrik rendah. – Pemberdayaan masyarakat di kampung/kelurahan belum optimal. – Koordinasi antar lembaga terkait belum berjalan efektif. – Aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik masih terbatas. – Sumber daya manusia yang terbatas di distrik, kelurahan dan Kampung. – Anggaran yang dialokasikan belum mencukupi. – Evaluasi dan monitoring program belum optimal.
Urusan Pemerintahan	Penyelengga raan	Pengamalan Nilai- nilai kebangsaan, Bineka	– Kualitas pendidikan politik masyarakat masih rendah. – Kesadaran bela negara masyarakat belum memadai.

Bidang Urusan	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Umum	pendidikan politik, wawasan kebangsaandan nilai-nilai kebangsaan lainnya masih belum optimal	Tunggal Ika, dan sejarah kebangsaan belum optimal dan Rendahnya Kesadaran dan Pendidikan Politik	– Koordinasi forum pembauran kebangsaan perlu ditingkatkan. – Wawasan kebangsaan masyarakat masih kurang. – Pendidikan ideologi dan karakter bangsa belum optimal. – Pendidikan politik di masyarakat belum maksimal. – Penyelenggaraan pendidikan politik dan etika budaya politik belum optimal. – Peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan belum optimal. – Penyelenggaraan pemilihan umum belum optimal. – Pemantauan situasi politik belum optimal. – Ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya belum optimal. – Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan belum optimal. – Pengawasan organisasi kemasyarakatan belum optimal. – Upaya pembauran kebangsaan belum maksimal.

2.6.2. Isu-Isu Strategis

Isu strategis pembangunan di Kabupaten Keerom disusun setelah mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan pokok yang dihadapi melalui analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Dalam rangka proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Keerom dalam 5 tahun ke depan, dipandang perlu mendapatkan gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai kondisi aktual. Maka, berdasarkan identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal. Hal ini dimaksudkan sebagai instrumen strategis untuk memetakan aspek-aspek kekuatan dan potensi unggulan daerah yang dapat dikembangkan, kelemahan yang perlu dibenahi, serta peluang dan ancaman dari aapek eksternal yang perlu diantisipasi.

Dengan analisis SWOT tersebut, strategi pembangunan Kabupaten Keerom yang tepat, layak, dan fisibel dapat diungkapkan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan tantangan yang dihadapi. Melalui analisis ini, setiap permasalahan pembangunan dapat diuraikan secara sistematis sehingga arah kebijakan dan program pembangunan dapat dirancang secara terpadu, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Analisis SWOT juga berperan sebagai jembatan antara identifikasi permasalahan dan perumusan strategi, sehingga arah pembangunan Kabupaten Keerom mampu menjawab isu-isu strategis daerah seperti kesenjangan wilayah, keterbatasan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal berbasis pertanian dan perbatasan, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Hasil analisis SWOT dijadikan sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan yang realistis, efektif, dan berkelanjutan, serta mendorong transformasi Kabupaten Keerom menuju daerah yang maju dan berdaya saing. Berikut ini ditunjukkan hasil analsisi SWOT dimaksud.

Tabel 2.94
Analisis SWOT Perencanaan Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029

Kekuatan: ❖ Potensi SDA sangat besar, terutama hutan tropis, lahan pertanian datar, dan potensi perikanan darat. ❖ Letak strategis sebagai wilayah perbatasan langsung dengan PNG membuka peluang perdagangan lintas batas. ❖ Ketersediaan lahan pertanian luas (food estate di Distrik Mannem dan Arso). ❖ Struktur sosial berbasis adat yang masih kuat, potensi untuk kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya. ❖ Citra daerah perbatasan prioritas nasional mendapatkan dukungan dana Otsus, Dana Perbatasan, dan Dana Desa yang signifikan. **Kelemahan:** ❖ Keterisolasian wilayah dan konektivitas antar distrik masih rendah, terutama di distrik Towe, Kaisenar, dan Yaffi. ❖ Akses listrik, air bersih, dan layanan publik masih terbatas di banyak kampung terpencil. ❖ Kualitas SDM rendah (IPM 2023: 63,64; masih kategori menengah bawah). ❖ Ketergantungan tinggi pada transfer pusat (DAU, DAK, Otsus); PAD < 5% dari total APBD. ❖ Produktivitas ekonomi rendah, dominan sektor pertanian subsisten dan informal. ❖ Kapasitas kelembagaan OPD dan data perencanaan masih lemah (termasuk sistem monitoring pembangunan).
Peluang: ❖ Kebijakan nasional penguatan wilayah perbatasan (BNPP, Kemenko Polhukam) membuka peluang infrastruktur, perdagangan, dan pendidikan lintas batas. ❖ Kebijakan nasonal pengembangan lumbung pangan ❖ Pengembangan kawasan strategis ekonomi perbatasan (KPPN Skouw–Wutung) yang bisa dimanfaatkan Keerom. ❖ Program pemerintah pusat: food estate, perhutanan sosial, SDGs Desa, dan

Dana Otsus Plus.
- ❖ Kebangkitan ekonomi hijau dan ekowisata: potensi hutan adat, agroforestry, dan wisata alam di Distrik Senggi, Web, dan Towe.
- ❖ Kerja sama lintas batas dengan PNG untuk perdagangan hasil bumi, bahan bangunan, dan kebutuhan pokok.
- ❖ Kebijakan nasional pengembangan kawasan hijau (dan biru), pengembangan SDGs, dan lingkungan hidup yang didukung oleh dunia internasional

Tantangan:
- ❖ Kerusakan lingkungan dan deforestasi akibat ekspansi sawit, tambang ilegal, dan food estate tanpa pengawasan.
- ❖ Ancaman keamanan di wilayah perbatasan (pergerakan kelompok bersenjata dan penyelundupan barang).
- ❖ Ketimpangan pembangunan antar distrik, terutama antara Arso–Skanto (padat) dengan Kaisenar–Towe (terpencil).
- ❖ Perubahan iklim yang meningkatkan risiko kekeringan dan banjir musiman di daerah rendah.
- ❖ Migrasi keluar tenaga muda akibat rendahnya peluang kerja lokal.
- ❖ Ketergantungan ekonomi tunggal pada sektor primer (pertanian mentah) tanpa pengolahan lanjutan.

Sektor Pendidikan dan SDM	
Kekuatan	❖ Dukungan Otonomi Khusus untuk peningkatan pendidikan dasar dan beasiswa putra daerah. ❖ Terdapat sekolah negeri di hampir semua distrik utama (Arso, Skanto, Waris). ❖ Komunitas adat mendukung nilai-nilai pendidikan lokal (gotong royong, kearifan adat).
Kelemahan	❖ Rasio guru–murid dan fasilitas sekolah di distrik terpencil (Towe, Kaisenar, Yaffi) masih sangat rendah. ❖ Angka partisipasi sekolah (APS) menengah masih di bawah rata-rata provinsi. ❖ Kurangnya tenaga pendidik berkualifikasi dan rotasi guru yang tinggi.
Peluang	❖ Kebijakan pendidikan nasional yang menganut paradigma peningkatan mutu, pemerataan, dan perluasan akses pendidikan yang menjangkau kawasan perbatasan. ❖ Kemitraan dengan perguruan tinggi dalam rangka pembinaan pendidikan hingga ke jenjang pendidikan tinggi. ❖ Digitalisasi pendidikan melalui satelit dan internet desa.
Ancaman	❖ Anak muda banyak migrasi ke kota besar (Jayapura, Merauke). ❖ Ketergantungan pada bantuan pusat; keberlanjutan rendah jika Otsus berkurang.
Sektor Ekonomi dan Ketahanan Pangan	
Kekuatan	❖ Lahan pertanian luas di Arso, Skanto, dan Mannem. ❖ Komoditas unggulan: padi, jagung, dan kakao. ❖ Potensi ekonomi lintas batas dengan PNG.
Kelemahan	❖ Rantai pasok dan logistik lemah; biaya transportasi tinggi. ❖ Tidak ada industri pengolahan hasil pertanian lokal. ❖ PAD rendah, ekonomi masih berbasis subsisten.
Peluang	❖ Program Food Estate Papua dan Perhutanan Sosial. ❖ Pengembangan UMKM berbasis hasil pertanian. ❖ Potensi ekspor hasil bumi ke PNG.
Ancaman	❖ Ketergantungan ekonomi tunggal (pertanian mentah). ❖ Risiko degradasi lingkungan akibat ekspansi sawit dan proyek besar.
Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	
Kekuatan	❖ Dukungan proyek nasional infrastruktur perbatasan. ❖ Lokasi strategis di koridor Jayapura–Skouw–Wutung.
Kelemahan	❖ Kondisi jalan antar-distrik banyak rusak berat (terutama Senggi–Towe–Web). ❖ Cakupan listrik PLN dan jaringan air minum rendah. ❖ Jembatan dan irigasi banyak butuh rehabilitasi.
Peluang	❖ Program Inpres Jalan Daerah dan DAK Infrastruktur dari pusat. ❖ Teknologi energi terbarukan (solar cell, PLTMH).

Ancaman	❖ Biaya pembangunan tinggi karena medan sulit. ❖ Dampak lingkungan dari pembangunan tanpa AMDAL.
Sektor Lingkungan dan Daya Dukung	
Kekuatan	❖ Tutupan hutan masih dominan (>70%). ❖ Keanekaragaman hayati tinggi dan potensi wisata alam besar.
Kelemahan	❖ Belum ada data lengkap daya dukung/tampung lingkungan per distrik. ❖ Penegakan hukum lingkungan masih lemah.
Peluang	❖ Program nasional Ekonomi Hijau Papua dan Restorasi Ekosistem. ❖ Perhutanan sosial dan konservasi berbasis masyarakat adat.
Ancaman	❖ Deforestasi, tambang ilegal, dan pembukaan lahan *food estate* tanpa pengawasan. ❖ Perubahan iklim memperburuk banjir dan kekeringan.
Kesimpulan Strategis ❖ Posisi Keerom sebagai daerah perbatasan dan lumbung pangan Papua adalah kekuatan dan peluang besar, namun rawan menjadi beban lingkungan dan sosial bila ekspansi dilakukan tanpa kendali. ❖ Pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat) menjadi titik lemah paling mendasar. Perlu percepatan peningkatan IPM dan penataan SDM aparatur. ❖ Kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar distrik harus menjadi fokus utama RKPD/RPJMD Tahun 2025–2029. ❖ Transformasi ekonomi lokal perlu diarahkan ke ekonomi hijau, agroindustri kecil, dan jasa lintas batas (bukan hanya sektor primer). ❖ Penguatan tata kelola lingkungan dan data spasial (SIG) penting untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, terutama di zona food estate dan perbatasan.	

Sumber: Hasil Olahan Data yang berasal dari dokumen RPJMD Keerom 2019–2024; Bappeda Keerom; BPS (2024), BPS Keerom; RPJMD 2019–2024; Data Bappenas 2023, Kemenko PMK; RPJMN 2020–2024; BNPP; RPJPD Papua, dan SLHD Keerom; BNPB; RPJMD; Kajian KLHS 2024

2.6.2.1. Isu Strategis Global

2.6.2.1.1. Sustainable Development Goals

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan global sebelumnya yaitu MDGs atau Milennium Development Goals, Peserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada bulan September 2015 meluncurkan SDGs atau Sustainable Development Goals. Peluncuran SDGs merupakan agenda global yang melanjutkan upaya dan capaian agenda global sebelumnya yaitu MDGs yang sudah banyak merubah wajah dunia 15 tahun kearah yang lebih baik.

Sustainable Development Goals atau SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam penentuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World: The 2O3O Agenda for Sustainable Development.

Gambar 2.16
Sustainable Development Goals Indonesia



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Indonesia sebagai berikut:

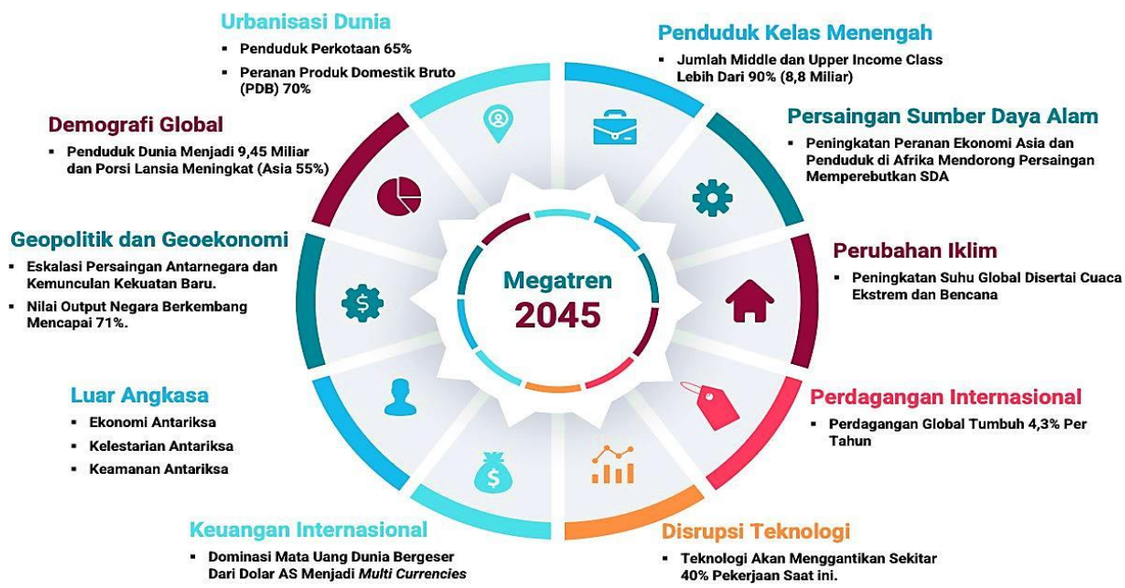
Tujuan 1	Tanpa kemiskinan;
Tujuan 2	Tanpa kelaparan;
Tujuan 3	Kehidupan sehat dan sejahtera;
Tujuan 4	Pendidikan berkualitas;
Tujuan 5	Kesetaraan gender;
Tujuan 6	Air bersih dan sanitasi layak;
Tujuan 7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
Tujuan 8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
Tujuan 9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
Tujuan 10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara;
Tujuan 11	Kota dan pemukiman yang berkelanjutan;
Tujuan 12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
Tujuan 13	Penanganan perubahan iklim;
Tujuan 14	Ekosistem lautan;
Tujuan 15	Ekosistem daratan;
Tujuan 16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh;
Tujuan 17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2020.

2.6.2.1.2. Megatrend Dunia 2045

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.17
Sustainable Development Goals Indonesia



Sumber: RPJPN 2025-2045 (Bappenas)

Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan- perubahan tersebut meliputi (i) perkembangan demografi global, (ii) geopolitik dan geoekonomi, (iii) disrupsi teknologi, (iv) peningkatan urbanisasi dunia, (v) peningkatan peran perdagangan internasional, (vi) perubahan keuangan internasional, (vii) peningkatan penduduk kelas menengah (*middle class*), (viii) peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, (ix) perubahan iklim, dan (x) pemanfaatan luar angkasa (*space economy*). Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Terdapat 10 (sepuluh) megatren global yang akan dihadapi menuju 2045, yaitu:

1) Pertumbuhan Kelas Menengah (*middle class*)

- Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia.Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.
- Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru *(new life style)*. Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual-metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

2) Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

- Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetensi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, diantaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

3) Perkembangan Teknologi (*digital disrupsion*)

- Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatkan oleh masyarakat seperti *Internet of Things (*IoT*), blockchain, Hyper Connection, Artificial Intelligence (*AI*), Distributed Ledger Technology (*DLT*), Production Lifecycle Management, Robotic Process Automation (*RPA*), Edge Computing, Auto Robotic System, 3D,* dan *Future Technologies.*

- Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal, yang diiringi denga meminimalkan risiko yang meyertai terjadinya disrupsi teknologi.
- Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Selama pandemi, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlang-sungan proses bisnis. Digitalisasi usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas serta pasar usaha. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang. Faktor penghambat pemanfaatan toknologi dan digital perlu diatasi karena penggunaan toknologi dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas.
- Teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri seperti: *nanotechnology*; *blockchain*; robotika cerdas, IoT, AI, dan teknologi imersif; digitalisasi yang mendukung konektivitas; material maju; rekayasa genetik dan bioteknologi; teknologi lanjutan dari *additive manufacturing* (3D *printing, rapid prototyping, powder bed system*, dan lainnya); inovasi mesin multifungsi yang mengintegrasikan proses produksi komponen dan produk akhir untuk rantai pasok terlokalisasi; serta teknologi hijau, termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan.
- Perkembangan teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis *artificial intelligence* (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan AI, penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis.
- Perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence)* bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Industri media termasuk yang paling terdampak dan hanya meninggalkan sedikit pelaku usaha yang mampu bertahan ditengah gempuran disrupsi. Bahkan, pekerjaan yang membutuhkan aspek kreatif (seni dan hiburan) dalam jangka panjang juga berisiko tergantikan atau setidaknya tersaingi oleh kemajuan teknologi dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan.
- Perkembangan teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. Pekerjaan jarak jauh *(remote working)* menciptakan peluang di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mendorong perkembangan sektor lain yang mendukung pola *work from anywhere* (WFA). Akan tetapi, di sisi lain hal tersebut akan memukul sektor yang selama ini bertumpu pada pola kerja konvensional, seperti properti perkantoran dan *real estate*. Pola kerja jarak jauh

mengasumsikan terbangunnya kepercayaan antara pekerja dan pemberi kerja sehingga kualitas hasil pekerjaan terjaga.

- Perkembangan teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah. Teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui pening-katan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi di antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.
- Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih ter-rencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara. Teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta mampu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

4) Perubahan Iklim

- Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan keanekaragaman hayati (tiga krisis global – *the Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirankan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan seperti, lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple Planetary Crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business as usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan, dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sekuler.
- Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target *net zero emission* pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

- Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim men-dorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi IV yang dinamakan Innovative Designs termasuk skala lebih kecil atau Small Modular Reactor (SMR). Teknologi elektrolisis Green Hydrogen (GH2) dan fuel cell menunjukan perkembangan yang positif, terutama untuk transportasi berat, seperti kendaraan truk, kereta api, kapal tanker, dam transportasi udara sebagai pengganti avtur, serta pemanfaatan GH2 sebagai feedstock industri petrokimia dan *green ammonia* untuk pupuk.

5) Pemanfaatan Luar Angkasa *(space economy)*

- Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia *(common heritage of humankind)*, yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa *(space ecenomy),* kelestarian antariksa *(space sustainabilility),* dan keamanan antariksa *(space security).*
- Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Ekonomi antariksa diperkirakan mencapai US$469,0 miliar pada tahun 2021 dan diprediksi akan terus meningkat mencapai US$ 1,0 triliun hingga tahun 2040. Nilai pasar ekonomi antariksa bahkan tumbuh sebesar 6,0 persen saat krisis COVID-19. Oleh karena itu, negara- negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

6) Tata Kelola Keuangan Global

- Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.
- Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan

sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

- Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), *Cloud Computing*, *Artificial Intelligence* (AI), dan *Machine Learning* telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Ke depannya puluhan juta pekerja an pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi akan terganti-kan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (*skill*) yang baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial *(financial technology)* seperti bank digital, dan keuangan terde-sentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri ke-uangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

7) Konstelasi Perdagangan Global

- Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asiap-Afrika. Perekonomian negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukan tren yang berlanjut terutama di Tiongkok, India, dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di kawasan Afrika, Nigeria, dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.
- Kolaborasi produksi bersama internasional *(global production networks*/GPN) dan rantai pasok global (*global value chain*/GVC) semakin menguat dan terdiversifikasi. Skema GPN dan GVC menjadi salah satu pilihan utama bagi industri dalam melakukan produksi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari GPN dan GVC tidak hanya mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih murah, tetapi juga meningkatkan penerimaan investasi asing dan perdagangan internasional bagi suatu negara. Sementara itu, kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat GVC dunia seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor.
- Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global.

- Kerja sama kawasan menciptakan *hub* perdagangan strategis. Kerja sama kawasan seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dam *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan berpusat di Asia terutama kawasan Indo-Pasifik.

8) Geo-politik dan Geo-ekonomi

- Dinamika geopolitik ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia.Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.
- Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan.Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antar negara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan.
- Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas.Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antar negara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan.
- Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedapankan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan.Indo-Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antar negara.
- Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan.Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas (*borderless*) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional.

- Nilai *output* dunia negara berkembang semakin dominan.Pada tahun 2015, negera berkembang menyumbang 55 persen dari niali *output* dunia, meningkat 34 persen pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai *output* negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 persen dari total nilai *output* dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54 persen dari total nilai *output* global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai output yang menurun dari 32 persen pada tahun 2015 menjadi 20 persen pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meski demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi dari pada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015.
- Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang.Sebagian besar negara berkembang selama 60 tahun terakhir mengandalkan ekspor komoditas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan 54 persen ekspor negara di kawasan Amerika Latin berbasis pada produk komoditas, 81 persen di Afrika, dan 75 persen di negara kawasan Timur Tengah. Perubahan struktur perekonomian, utamanya di negara pengimpor komoditas menurun kan permintaan atas komoditas. Kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang.
- Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara ber-kembang.Kebijakan makroekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan menjadi salah satu pilar utama di masa mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertum-buhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas.
- Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang berpeluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi.Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntung kan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. secara umum, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Perbaikan investasi dan perkembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi akan menjadi sumber pertum-buhan di negara-negara kawasan Afrika Timur Tengah, dan Amerika Latin. Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya.
- Perekonomian global pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun 2015.Pada tahun 2015 perekonomian global adalah sebesar USD 74,0 triliun, dengan kontribusi Amerika Serikat sebesar USD 17,9 triliun, Tiongkok sejumlah USD 11,0 triliun, dan India senilai USD 2,1 triliun (IMF, *World Economic Outlook*, Oktober 2016). Pada tahun 2050

nilai perekonomian dunia diperkirakan meningkat sebanyak 3 kali lipat dengan kontribusi dari 5 negara terbesar (Tiongkok, India, AS, Jepang, dan Indonesia) mencapai kurang lebih 55 persen dari nilai *output* dunia.

9) Peningkatan Urbanisasi Dunia

- Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, dimana 95 persen pertam-bahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Berdasarkan data UN, pada tahun 2020 terdapat 23 *megacities*, yaitu kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa di dunia (di mana lebih separuhnya berada di negara *emerging economies*). Jumlah ini meningkat pesat sejak tahun 1970, di mana pada saat itu dunia hanya memiliki dua *megacities.*
- Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh.Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25-30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan akti-vitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma penge-lolaan perkotaan ke arah kompak (*compact*) melalui efisiensi layanan.
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam meng-atasi masalah yang timbul sehari-hari.Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis mahadata kedepan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan per-kotaan untuk menjadi yang terdepan. Di sisi lain, dampak pandemi COVID-19, di samping menimbulkan kerugian jiwa dan meterial, juga menjadi pemicu perkembangan teknologi yang memudahkan proses kolaborasi lintas ruang dan waktu. Tantangan terhadap pengarusutamaan pendekatan hijau juga menjadi peluang bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya humanis, melainkan juga ramah lingkungan. Kota yang mampu beradaptasi terhadap trans-formasi pasca pandemi dan pengarusutamaan pendekatan hijau mampu menarik SDM kompetitif untuk menetap dan berkarya.

10) Perkembangan Demografi Global

- Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembagan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tinggi-nya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya keter-

sediaan SDA dan lahan. Sementara itu kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendo-rong rentang kehidupan *(life-span)* yang semakin panjang.

- Jumlah Penduduk terus bertambah, namun laju pertum-buhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Di sisi lain, terjadi penurunan angka kelahiran yang signifikan di beberapa negara, terutama negara maju. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua *(aging population)* dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.
- Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga.Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memuncu-lkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak *(childfree)*, menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran. Sementara itu perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusiam adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal.
- Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global.Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan eko-nomi stabil menjadi daya tarik investor di kawasan tersebut. Pada saat bersamaan, beberapa negara berkembang di kawasan Asia, menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekono-mian dunia di masa mendatang.

2.6.2.2. Isu Nasional

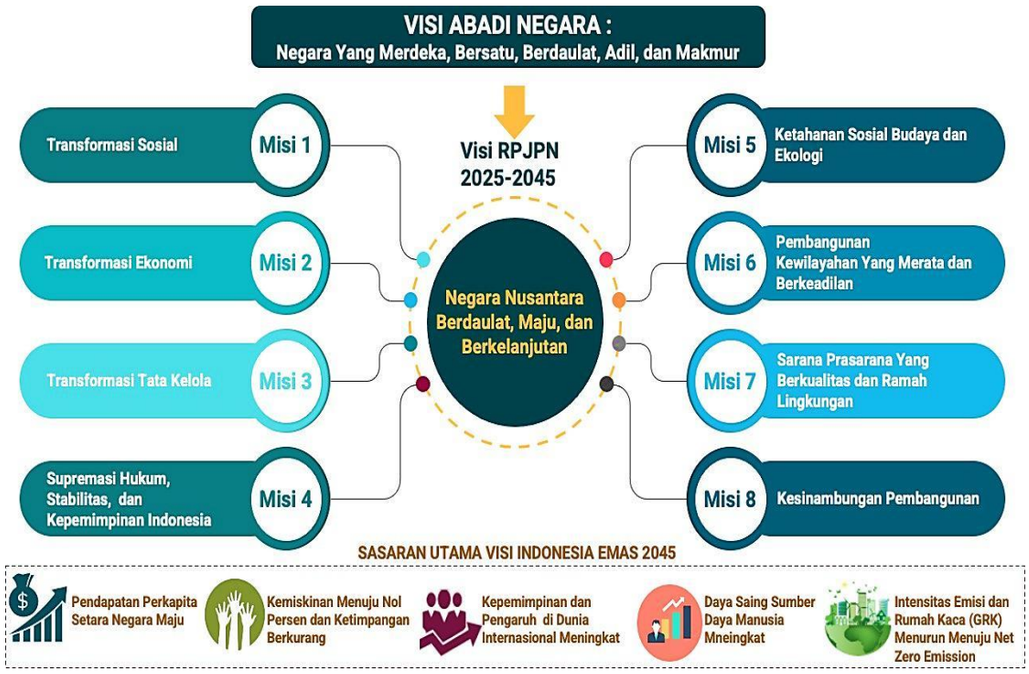
2.6.2.2.1. Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

Dalam kerangka pikir pembangunan nasional, membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Visi dan Misi abadi Negara yaitu Negara Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur menjadi acuan utama dalam setiap pembangunan yang kemudian diterjemahkan ke dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

Untuk mencapai Visi Indonesia ditetapkan 8 Misi pembangunan, 5 Sasaran utama, dan 17 Tujuan pembangunan yang kesemuanya diukur dengan akan tercapainya 45 indikator utama pembangunan, sedangkan Penjabaran dan penjelasan Visi Sebagai Berikut.

1. **Berdaulat:**
   Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk meng-atur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.
2. **Maju:**
   Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil.
3. **Berkelanjutan:**
   Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitan lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Gambar 2.18
Visi dan Misi RPJPN 2025-2045



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Adapun 8 Misi pembangunan Indonesia 2025-2045, sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi Iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia ditingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.

5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Pembangunan Kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing Wilayah.
7. Dukungan Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi kesinambungan Pembangunan Untuk Mengawal Pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan

Selanjutnya, dalam mencapai visi dan misi Nasional terdapat 5 (lima) Sasaran pokok RPJPN 2025-2045 yaitu:

1. Pendapatan Perkapita Setara Negara Maju
   Pendapatan perkapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US$ 23.000 - 30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima terbesar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (decent job) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.
2. Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Ketimpangan Berkurang
   Sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,290- 0,320. Sementara itu, ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB kawasan timur Indonesia menjadi 28,5 persen.
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat
   Sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyele saian isu-isu global yang diukur dengan Global Power Indeks (GPI) di peringkat 15 besar dunia.
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat
   Meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index)

menjadi 0,73 persen pada tahun 2045.

5. Intensitas Emisi dan Rumah Kaca (GRK) Menurun Menuju Net Zero Emission
   Dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang ditunjukan oleh menurunya Intensitas Emisi (GRK) menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca ditahun 2010, dan menuju Net Zero Emission pada tahun 2060.

Adapun Isu dan tantangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagai berikut ini:

1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat.
2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN).
3. Selanjutnya, kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai.
4. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah.
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata.
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut.
7. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi.
8. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal.
9. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip- prinsip berkelanjutan.
10. Peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.
11. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau.
12. Infrastruktur dan literasi digital masih terbatas.
13. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas.
14. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi.
15. Akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
16. Kualitas pendidikan yang masih rendah.
17. Adapaun tantangan dalam jaminan sosial meliputi : Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
18. Masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran janminan sosial masih rendah.
19. Regulasi yang berlebih (hyper regulation) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah.
20. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif.
21. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.
22. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D.
23. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap investasi politik.
24. Belum meratanya kualitas pelayanan publik.
25. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang- bidang strategis

belum memenuhi harapan masyarakat.
26. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagi tantangan mendasar.
27. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik.
28. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal.
29. Selain itu, prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamankan dalam pelaksanaan pembangunan.
30. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan.
31. Dalam aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan.
32. Keamanan Nasioanl menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan.
33. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun, tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro- pertumbuhan.
34. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.
35. Selanjutnya, ketahanan ekologi menghadapi tantangan berupa tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.
36. Ketimpangan antar Jawa dan Luar Jawa masih cukup tinggi.
37. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya.'
38. Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.
39. Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang.
40. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.

Selain itu, isu dan tantangan pembangunan berdasar kewilayahan khususnya Papua dibagi beberapa bidang diantaranya:

Tabel 2.95
Isu Kewilayahan RPJPN Wilayah Papua

No	Bidang	Isu Kewilayahan
1	Ekonomi	Wilayah Papua berkaitan dengan pengembangan ekonomi yang belum inklusif di antaranya pengembangan potensi unggulan wilayah dan UMKM.
2	Sosial	Wilayah Papua erat kaitannya dengan kondisi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah ditunjuk kan oleh tingginya persentase penduduk miskin dan

No	Bidang	Isu Kewilayahan
		ketertinggalan daerah.
3	Sarana dan Prasarana	• Aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah Papua yang masih rendah juga menjadi tantangan pembangunan di Wilayah Papua. • Potensi energi hidro, energi surya, dan energi angin di Wilayah Papua belum dikembangkan dengan optimal dalam menopang transisi energi. • Pembangunan infrastruktur • telekomunikasi dan digital di Wilayah Papua masih rendah dan belum merata. • Pembangunan bidang infrastruktur dasar di Wilayah Papua juga belum optimal sehingga memengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi.
4	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	• Isu bidang desentralisasi dan otonomi daerah di Wilayah Papua sangat erat kaitannya dengan penye lenggaraan otonomi khusus dan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah otonomibaru. • Selain itu, Wilayah Papua menghadapi permasalahan belum optimalnya tata kelola pemerintahan, penye lenggaraan pelayanan dasar, serta keterbukaan informasi publik. • Rendahnya kemandirian fiskal menjadi isu krusial yang menghambat pertumbuhan.
5	Stabilitas Pertaha-nan dan Keamanan	• Isu bidang stabilitas pertahanan dan keamanan Wilayah Papua berkaitan dengan kondisi keamanan dan ketertiban umum yang menyebabkan cakupan pelayanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan belum optimal.
6	Sosial Budaya dan Ekologi	• Dari sisi ketahanan sosial budaya, Wilayah Papua menghadapi isu rendahnya perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang berdampak pada belum optimalnya penataan tanah adat/ulayat. • Terkait dengan ketahanan ekologi, Wilayah Papua dihadapkan pada kondisi risiko bencana tinggi, rendahnya kemandirian pangan, serta belum optimalnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim.

Sumber: RPJPN 2025-2045

2.6.2.2.2. Isu Strategis Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041

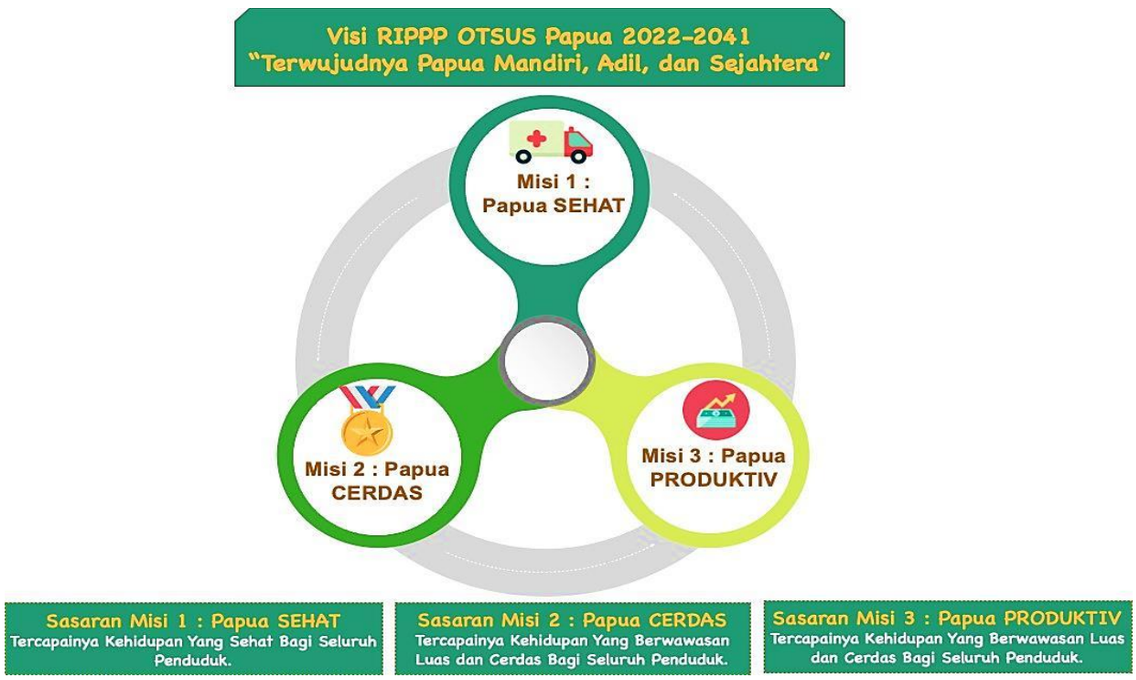
Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan oto-nomi khusus skema baru di Provinsi Papua yang dipayungi dengan 3 (tiga) regulasi utama, diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Peraturan Peme-rintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan

Otonomi Khusus Provinsi Papua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041.

Regulasi baru penyelenggaraan otonomi khusus Papua mengubah aturan main yang sudah ada dan membutuhkan kapasitas baru bagi pemangku kepentingan di setiap level pemerintahan (Provinsi dan Kabupaten/Kota), mulai dari merencanakan, melaksanakan, menata-usahakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 yang diturun-kan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, diperlukan sebuah Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041.

Gambar 2.20
Visi, Misi dan Sasaran RIPPP OTSUS Papua Tahun 2022-2041



Sumber: Perprs Nomor 24 Tahun 2023, Tentang RIPPP Tahun 2022-2041

Dokumen RIPPP menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan kesejahteraan di Wilayah Papua. Selain itu, RIPPP juga menjadi dasar pengelolaan Otonomi Khusus guna optimalisasi pembangunan dan mensejajarkan Wilayah Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan penetapan RIPPP yang tepat sasaran dan disinergikan dengan tujuan dan cita-cita pembangunan di dalam UUD 1945, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*), RPJP 2025-2045, Visi Indonesia 2045 dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

RIPPP akan menjadi gambaran ukuran dan indikator capaian pembangunan dari lintasan perjalanan (t*rajectory*) maupun tahapan program (*milestone*) pembangunan nasional dalam rangka Otonomi Khusus tahun 2022 hingga 2041 yang selanjutnya akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan pemba-ngunan di Papua pasca berakhirnya periode Otonomi khusus di Wilayah Papua tahun 2041, sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk;
2. Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk;
3. Meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk.

Selain itu, demi Terwujudnya Papua yang Mandiri, Adil, & Sejahtera, maka ditetapkan 3-Sasaran Pokok Pembangunan RIPPP diantaranya

1. tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk;
2. tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk; dan
3. tercapainya kemampuan bekerja, berusaha dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk.

Dalam rangka mencapai kehidupan yang sehat, berwawasan luas, cerdas, berkemampuan dalam bekerja, berusaha, dan berinovasi bagi seluruh penduduk, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, maka dibutuhkan kondisi prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran pembangunan yaitu: a) infrastruktur dasar dan konektivitas; b) lingkungan hidup; c) tata kelola pembangunan; d) tanah adat/ulayat, kebudayaan, dan harmoni sosial. Dalam RIPPP 2022-2041 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan diantaranya Pengarusutamaan Gender, sosial budaya, transformasi digital, dan resiliensi bencana dan perubahan iklim.

Wilayah adat MAMTA (Mamberamo, Jayapura, Sarmi, Keerom, Waropen, Biak Numfor, Supiori, dan Yapen) memiliki posisi strategis sebagai beranda depan NKRI di Pasifik. Arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah ini menekankan penguatan ekonomi maritim, agroindustri, perdagangan lintas batas, peningkatan konektivitas infrastruktur, serta pembangunan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas SDM dan pelayanan dasar menjadi fokus melalui pendidikan vokasi berbasis potensi lokal, layanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat adat. Sejalan dengan itu, pembangunan berkelanjutan diperkuat dengan menjaga kelestarian hutan Mamberamo, ekosistem pesisir, dan ketahanan pangan lokal. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui Dana Otsus dan penerapan SPIP menjadi landasan utama pelaksanaan pembangunan.

RPJMD Kabupaten Keerom 2025–2029 memperkuat arah kebijakan MAMTA dengan prioritas pada lima pilar: penguatan ekonomi lintas batas, pembangunan konektivitas antar-distrik, peningkatan IPM, ketahanan pangan lokal, serta tata kelola berbasis Otsus. Hal ini menegaskan peran Keerom sebagai kabupaten strategis perbatasan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi wilayah MAMTA.

RIPPP 2022–2041 memberikan kerangka besar pembangunan Papua dengan lima dimensi utama: transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan konektivitas wilayah, penguatan SDM orang asli Papua, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola akuntabel. Dengan demikian, arah kebijakan MAMTA dan RPJMD Keerom saling terintegrasi dengan RIPPP dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 dan memperkuat Papua sebagai beranda terdepan NKRI di Pasifik.

Selanjutnya, perumusan isu dan tantangan dalam RIPPP terbagi atas beberapa bidang yaitu sebagai berikut:

a) Isu dan Tantangan Bidang Kesehatan

- Belum meratanya akses ke pelayanan kesehatan akibat kondisi geografis yang beragam;
- Masih terdapat kecamatan yang belum memiliki puskesmas;
- Rendahnya persentase rumah sakit (RS) dan puskesmas terakreditasi;
- Masih terdapat puskesmas yang belum memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar;
- Terdapat rumah sakit kabupaten/kota kelas C tidak memiliki dokter spesialis dasar dan dokter spesialis lainnya;
- Terdapat puskesmas yang belum memiliki dokter;
- Pengetahuan masyarakat yang masih minim tentang masalah kese-hatan, menyebabkan tingginya penyakit menular endemis seperti tuberkulosis (TB), HIV/AIDS, malaria, dan kusta, serta tingginya faktor risiko penyakit tidak menular seperti konsumsi rokok, alkohol, NAIZA, dan obesitas;
- Kesadaran ibu hamil yang masih minim untuk rutin memeriksa-kan kehamilannya, menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi sfunting;
- Minimnya pembudayaan olahraga ditunjukkan dengan persen-tase penduduk yang rutin berolahraga dalam seminggu terakhir yang masih di bawah rata-rata nasional; Belum optimalnya keberlang-sungan kegiatan pelayanan kesehatan, salah satunya telemedicine akibat cakupan infrastruktur energi dan telekomuni-kasi yang belum merata;
- Masih tingginya masalah kesehatan di Papua akibat belum optimalnya penyediaan akses layanan infrastruktur dasar, meliputi hunian layak dan terjangkau, air minum layak dan aman, sanitasi layak dan aman, serta promosi kebersihan;
- Masih rendahnya cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Papua yang dapat menghambat masyarakat mendapatkan layanan kesehatan;
- Belum optimalnya tata kelola manajemen mutu dan risiko pada puskesmas;
- Belum optimalnya regulasi antarsektor yang terintegrasi, serta kewenangan dalam perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan dalam rangka otonomi khusus yang bersinergi.

b) Isu dan Tantangan Bidang Pendidikan

- Masih rendahnya rata-rata lama sekolah;
- Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP/ sederajat, SMA/sederajat, dan perguruan tinggr (PT);
- Belum optimalnya tingkat aksesibilitas layanan pendidikan akibat faktor geografis serta belum meratanya distibusi tenaga pendidik, namun di sisi lain telah terdapat upaya mengatasi kekurangan guru melalui Kolese Pendidikan Guru (KPG) untuk menghasilkan guru profesional yang dapat beradaptasi dengan budaya lokal,

meskipun kualifikasi dan kompetensinya masih perlu ditingkat-kan untuk memenuhi standar;
- Masyarakat Papua memiliki karakteristik yang terbuka terhadap keberagaman agama, suku, dan adat istiadat yang ditunjukkan oleh capaian indeks kerukunan umat beragama;
- Masih rendahnya AMH penduduk usia 15-59 tahun;
- Kurangnya aksesibilitas siswa dan tenaga pendidik menuju fasilitas pendidikan akibat kondisi geografis yang beragam sehingga menjadi kendala dalam pembangunan jalan antarkota dan antarkampung, tetapi di sisi lain upaya pembangunan Jalur Trans-Papua diharapkan dapat meningkatkan dan membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk menjangkau pelayanan pendidikan;
- Masih rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun;
- Keterbatasan tenaga pendidik dan siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar akibat cakupan infrastruktur energi dan telekomu-nikasi yang belum merata;
- Masih terdapat blankspot yang menjadi salah satu kendala akses telekomunikasi;
- Belum optimalnya integrasi konektivitas, sehingga siswa dan tenaga pendidik mengalami keterbatasan dalam mengakses fasilitas Pendidikan;
- Masih terdapat ketimpangan gender di Papua dalam upaya pembangunan kualitas hidup masyarakat yang ditunjukkan dengan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG).

c) Isu dan Tantangan Bidang Ekonomi
- Belum optimalnya nilai realisasi investas;
- Rendahnya penciptaan nilai tambah yang disebabkan belum optimal nya pengembangan sektor/komoditas unggulan dari hulu ke hilir;
- Tingginya proporsi tenaga kerja informal yang sebagian besar terdiri dari pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar, serta masih rendahnya proporsi angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas;
- Tingginya angka kemiskinan dan masih tingginya ketimpangan pendapatan;
- Belum optimalnya pemberdayaan UMKM;
- Belum optimalnya penguatan pelaku UMKM yang ditunjukkan oleh penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM;
- Adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga kredit UMKM tumbuh signifikan sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi;
- Rendahnya rata-rata konsumsi kalori per kapita penduduk;
- Indeks kemahalan konstruksi yang masih relatif tinggi, akibat kondisi geogralis yang beragam, kendala pembebasan lahan, dan faktor keamanan;
- Belum terintegrasinya infrastruktur konektivitas bebragai moda transportasi, menyebabkan akses menuju pusat-pusat ekonomi terbatas sehingga pertumbuhan ekonomi wilayah belum optimal;
- Belum meratanya cakupan infrastruktur energi dan telekomu-nikasi yang menjadi kebutuhan dasar dalam melakukan kegiatan ekonomi;
- Rendahnya persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN;
- Rendahnya konsumsi listrik per kapita bersumber dari listrik PLN;
- Masih terdapat ketimpangan gender;

- Belum optimalnya penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam yang dapat menjadi sumber pendanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan pemulihan kawasan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis; pengelolaan keanekaragaman hayati; dan kepastian hukum pertanahan di kawasan hutan dan reforma agrarian.

d) Isu dan Tantangan Bidang Lingkuagan Hidup

- Indeks risiko bencana termasuk kelas risiko tinggi yang diakibatkan (a) masih lemahnya pengawasan dan mitigasi terhadap kawasan rawan bencana; (b) masih lemahnya kesadaran dan wawasan masyarakat dalam mengelola sampah dan tanggap bencana; dan (c) lemahnya pengawasan terhadap penggunaan lahan pada zona rentan bencana;
- Indeks kualitas air sudah berada di atas nasional. Selain itu indeks kualitas udara juga berada di atas angka nasional. Hal ini perlu dipertahankan untuk mengantisipasi penurunan kualitas air dan udara akibat pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan;
- Terdapat dampak perubahan iklim pada sektor kesehatan;
- Terdapat 18 kabupaten/kota prioritas ketahanan iklim subsektor malaria dan 2 kabupaten/kota prioritas ketahanan iklim subsektor demam berdarah yang berpotensi meningkatkan jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan adanya perubahan iklim apabila tidak dilakukan intervensi (business as usual);
- Isu pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai backbone ekonomi hijau belum terimplementasikan dengan baik di Papua. Konversi hutan mengganggu keseimbangan lingkungan dan meningkatkan emisi gas rumah kaca;
- Belum optimalnya pemanfaatan bioekonomi hutan di Papua untuk menyejahterakan masyarakat setempat;
- Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan berbasis masyarakat untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan melalui skema perhutanan sosial.

e) Isu dan Tantangan Bidang Tata Kelola

- Masih tingginya gangguan keamanan dan ketertiban umum menyebabkan cakupan pelayanan dan tenaga kesehatan dan pendidikan belum optimal yang ditunjukkan dengan persentase nrmah tangga menurut kekhawatiran berjalan sendirian di siang hari khususnya di daerah perkotaan;
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus yang ditunjukkan dengan rendahnya pemanfaatan dana otonomi khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan;
- Masih rendahnya penerapan tata kelola pemerintahan digital yang selaras dengan kerangka regulasi sistem pemerintahan berbasis (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) akibat belum meratanya infrastruktur TIK yang ditunjukkan dengan masih banyaknya daerah blankspot;
- Masih rendahnya cakupan akta kelahiran anak usia 0-17.

f) Isu dan Tantangan Bidang Soslal Budaya

- Belum optimalnya upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- Nilai budaya literasi masih berada di bawah rata-rata nasional;
- Indeks kerukunan umat beragama berada di atas angka nasional yang perlu diperkuat sebagai modal sosial dalam pembangunan yang berkelanjutan.

2.6.2.2. Isu Strategis Provinsi Papua

Terdapat 10 Permasalahan pokok yang merupakan isu strategis di Provinsi Papua yang harus ditangani dengan cepat, bertahap dan efektif dalam upaya mewujudkan transformasi pembangunan secara optimal dalam periode 20 tahun kedepan.

Gambar 2.21
Isu Strategis Domestik Papua



Sumber:
Kajian Retrospektif & Propektif Transformasi Pembangunan Provinsi Papua, Tahun 2024

1) Potensi Sumber Daya Pembangunan

Provinsi Papua sebagai wilayah otonomi khusus dalam kerangka Otonomi Khusus yang akan dijalankan selama 20 tahun mendatang, tentunya akan mendapatkan sumber Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, yang diprediksi dari tahun 2025 hingga 2045 secara kumulatif bisa mencapai ± 71,14 triliun rupiah di seluruh wilayah Papua.

Sumberdaya finansial ini tentunya menjadi modal untuk mencapai tujuann pembangunan yang antara lain: (1) meningkatkan kapasitas dan daya saing OAP; (2) mengembangkan ekonomi berbasis SDA lokal serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan OAP yang berkeadilan dan berkelanjutan; (3) mempercepat pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu, khususnya di daerah- daerah pemukiman OAP; (4) meningkatkan dan melestarikan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon, serta (5) mempercepat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2) Mempertahankan dan Menghormati Keragaman Budaya Masyarakat Papua

Kondisi Proporsi penduduk Non-OAP (bukan Orang Asli Papua) pada tahun 2020, sesuai data Dinas Sosial, Kependudukan, P3A Propinsi Papua, proporsi penduduk Non-OAP sebesar 43,85%, yang sebagian besar terkonsentrasi di daerah-daerah dataran rendah dan kota-kota besar di Papua. Dimasa depan dengan semakin bertambahnya kota-kota pusat pertumbuhan baru, akan mendorong peningkatan proporsi penduduk Non-OAP, yang diperkirakan pada tahun 2045 proporsinya bisa mencapai 60-65%.

Dengan semakin bertambahnya penduduk Non-OAP,

tentunya hazanah budaya di Papua akan semakin beragam. Sehingga bukan hanya budaya Papua saja yang berkembang, tetapi juga budaya lainnya yang dibawa oleh penduduk migrasi Non-OAP. Dampak positif keberagaman budaya merupakan peluang yang perlu dikelola guna mendukung pembangunan.

Sedangkan dampak negatifnya akan menjadi tantangan dimasa depan, antara lain : (1) adanya sikap etnosentrisme, yaitu sebuah sikap atau pandangan yang bertumpu pada kebudayaan sendiri, yang akan menimbulkan perasaan atau sikap meremehkan suatu suku atau kebudayaan lain; (2) adanya stereotip, yang menimbulkan pandangan yang negatif terhadap suatu kelompok budaya, dikarenakan adanya perbedaan budaya; (3) terjadinya konflik sosial dan budaya, yang disebabkan primordialisme, yaitu suatu sikap yang menganggap jika sukunya lebih baik dibanding suku lainnya; (4) cepatnya perubahan sosial dan budaya sebagai dampak dari kemajuan pembangunan dan teknologi, yang dapat mendegradasi nilai-nilai dan norma sosial budaya masyarakat Papua.

3) Demografi, Urbanisasi dan Keterkaitan Kota-Kampung

Jumlah penduduk Papua akan semakin bertambah dengan suku atau etnik yang beragam dan arus migrasi ke Papua, penduduk semakin terkonsentrasi di kota, dan keterkaitan ekonomi kampung-kota di Papua semakin bertambah kuat dan meningkat. Berdasarkan data antar-SP (Sensus Penduduk) dari BPS Provinsi Papua (2023), cenderung penduduk Papua terus mengalami peningkatan yang cukup fluktuatif. Misalkan pada SP1990 penduduk Papua mengalami pertumbuhan rata-rata 1,63% per tahun jika dibandingkan SP1980. Selanjutnya di SP2000 agak melambat menjadi 1,52% per tahun bila dibandingkan SP1990.

Kemudian kembali cepat pada SP2000 sebesar 2,70% pertahun dibandingkan SP1990. Dan terakhir di SP2020 melambat lagi menjadi 2,11% per tahun dibandingkan SP2000. Tercatat pada SP2020 ini (sebelum DOB) jumlah penduduk Papua sudah mencapai 4.303.707 jiwa. Selain faktor kelahiran (Fertility), penyebab bertambahnya jumlah penduduk di wilayah Papua selama ini adalah migrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap.

Merujuk pada data BPS Provinsi Papua, selama periode SP1980 sampai dengan SP2020, rata-rata penduduk migrasi seumur hidup mengalami peningkatan kurang lebih 2,40% per tahun, dan tercatat pada SP2020 jumlah penduduk migrasi seumur hidup di Papua sebesar 471.686 jiwa, atau 10,96% dari total penduduk Papua. Selain migrasi, mobilitas penduduk di Papua dapat juga dicermati pada arus urbanisasi dari kampung ke kota, yang diindikasikan dengan rasio derajad urbanisasi. Jika beranjak pada data antar-SP, derajad urbanisasi di Papua cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari 25,96% pada SP2010 menjadi 30,20% pada SP2020. Peningkatan pembangunan yang menciptakan kota-kota pusat pertumbuhan baru, tentunya akan meningkatkan arus mobilitas penduduk (migrasi dan urbanisasi) di Papua.

Peningkatan arus mobilitas penduduk akan membawa pengaruh baik pengaruh negative maupun positif terhadap pembangunan daerah. Pengaruh negatife timbul jika tidak dilakukan penanganan yang terkendali, seperti : (1) semakin minimnya lahan kosong, dan harga tanah yang terus naik; (2) menambah pencemaran lingkungan; (3) permukiman kumuh bertambah, dan bisa menjadi penyebab bencana alam; (4) tingkat

kriminalitas meningkat; (5) bertambahnya golongan masyarakat miskin; (6) ketimpangan pendapatan meningkat, baik itu secara spasial, sektoral maupun personal.

Namun disisi lain, apabila urbanisasi ditangani dengan baik bisa memberi dampak positip terhadap keterkaitan antara kampung-kota, antara lain : (1) meningkatknya kesejahteraan penduduk di kampung karena mendapatkan berbagai hal yang tak ada di desa seperti teknologi, informasi, dan lain-lain; (2) mempercepat pembangunan kampung karena adanya berbagai informasi yang diperoleh dari kota; (3) meningkatnya jumlah tenaga kerja di kota, terutama tenaga buruh yang berasal dari kampung; (4) kota dapat menjadi agen perubahan yang bisa ditiru pembangunan kampung agar semakin maju.

4) Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berorientasi pada zero poverty dan zero inequality. RIPPP mentargetkan pada tahun 2041 tingkat kemiskinan di Provinsi Papua berada pada interval 2,82-5,81%. Sedangkan dalam Visi Indonesia Emas 2045, ditargetkan kemiskinan Papua mengarah pada zero poverty diantara 1,01-2,50% pada tahun 2045. Baik itu target RIPPP 2041 maupun Indonesia Emas 2045, keduanya merupakan tantangan besar bagi Provinsi Papua dalam mentransformasi pembangunan, khususnya dalam mereduksi kemiskinan.

Hal ini disebabkan, kemampuan Provinsi Papua dalam menurunkan tingkat kemiskinan sepanjang tahun 2005-2023 masih sangat rendah, hanya mampu sebesar -0,82% per tahun, yang mana tingkat kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 26,03%. Jika angka kemiskinan tahun 2023 tersebut dijadikan sebagai baseline, maka untuk mencapai tingkat kemiskinan di tahun 2045 sebesar 2,5% (angka maksimum target Indonesia Emas 2045) dibutuhkan akselerasi penurunan kemiskinan di Papua yang lebih cepat lagi berkisar 1,01-1,23% per tahun sepanjang periode 2030-2045.

Dengan demikian pemerintah provinsi Papua dimasa depan perlu menetapkan kebijakan pembangunan *pro-poor* yang efektif, inovatif dan integratif baik itu secara sektoral, spasial maupun personal. Selain kemiskinan, tan-tangan besar lainnya adalah kondisi ketimpangan pendapatan sektoral dan spasial yang sangat tinggi, masing-masing mencapai 1,6233 dan 1,4377 poin per tahun sepanjang periode 2016-2022. Sementara ketimpangan pendapatan antar personal di tahun 2023 yang di-representasikan Gini Ratio masih di atas batas ketimpangan rendah, yaitu 0,386 poin. Berhadapan dengan angka-angka ketimpangan yang tinggi ini, Provinsi Papua akan menghadapi tantangan yang berat untuk mewujudkan distribusi pendapatan yang mengarah pada zero inequality dimasa depan.

5) Ekonomi Daerah dan Ketenagakerjaan

Provinsi Papua memiliki potensi SDA (Sumber Daya Alam) yang sangat kaya dan beragam, seperti pertanian dan perkebunan, mulai dari tanaman palawija, buah-buahan, sayur-sayuran hingga tanaman keras seperti kakao, cengkeh, kayu merbau, dan lain-lain, semuanya tersedia. Begitu juga dengan sumber daya perikanan, baik itu perikanan darat maupun perikanan laut, yang dibudidayakan atau pun ditangkap, potensinya sangat besar tersedia di Papua. Namun demikian, semua potensi SDA tersebut belum dapat memberikan nilai tambah yang lebih banyak kepada masyarakat. Oleh karena sebagian besar hasil SDA pertanian dan perikanan dipasarkan dalam bentuk bahan-bahan mentah. Hal ini

diindikasinoleh nilai kontribusi sektor industri terhadap pembentukan nilai tambah regional Papua selama periode 2010-2022, rata-rata hanya 1,97% per tahun pada PDRB Dengan Tambang, dan sebesar 3,40% untuk PDRB Tanpa Tambang. Agar transformasi ekonomi terwujud maka perubahan struktur ekonomi yang fundamental dari sektor-sektor ekonomi ekstratif (seperti pertanian dan tambang) ke sektor manufaktur atau industry harus terjadi, yang dibarengi dengan kenaikan pendapatan per kapita yang lebih tinggi.

Sesuai dengan potensi bahan baku yang banyak tersedia, industry berbasis pertanian dan perikanan harus dijadikan motor penggeraknya, yang didukung oleh tenaga kerja yang terampil dan memiliki keahlian sesuai kebutuhan pasar industri. Dimana untuk hal tersebut, Pemerintah Provinsi Papua harus mampu mengubah struktur tenaga kerja yang selama ini lebih dominan pada tenaga kerja yang berpendidikan rendah (SD dan kebawah), ke tenaga kerja yang berpendidikan SMA/SMK dan ke atas hingga pendidikan tinggi. Sekurang- kurangya angka proporsi tenaga kerja berpendidikan ini harus mencapai 40-50% dalam komposisi pasar tenaga kerja Papua dimasa depan.

6) Pendidikan dan Kesehatan

Pembangunan dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar yang sangat penting dalam membentuk modal manusia (human capital) dalam artian pembangunan ekonomi investasi jangka panjang. Sebagaimana diketahui bahwa dengan tingkat pendidikan lebih tinggi, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan yang pendidikannya lebih rendah, dan apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin tinggi pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas, sehingga hasilnya perekonomian akan meningkat sejalan dengan peningkatan produktivitas.

Terkait dengan kesehatan, bahwa kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sehingga kesehatan juga dapat dilihat sebagai komponen produktivitas tenaga kerja dan pembangunan ekonomi yang vital sebagai input produksi agregat, peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Implikasi dari penerapan teori human capital dibidang pendidikan dan kesehatan ini adalah perlunya Provinsi Papua untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dimasa depan, dalam upaya meningkatkan dan memperbesar produktifitas tenaga kerja.

Hal ini harus dilakukan karena dari kualitas pendidikan penduduk Papua, jika dilihat dari Rata-Rata Lama Sekolah sangat rendah, yaitu 7,2 tahun di tahun 2023, yang terlihat hanya bertambah 0,1 poin per tahun dari tahun 2010. Kondisi tersebut akhirnya berdampak terhadap tingkat produktifitas tenaga kerja Papua juga rendah, rata-rata selama periode 2010-2023 hanya 77,36 juta rupiah per tenaga kerja per tahun, dengan pertumbuhannya sangat lambat sebesar 0,46% per tahun. Sama halnya dengan kualitas kesehatan penduduk Papua, yang dapat dicermati pada perkembangan indikator Angka Harapan Hidup, cenderung meningkat sangat lambat, rata-rata hanya 0,1 poin per tahun selama periode 2010-2023. Dengan kondisi kualitas pendidikan dan kesehatan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua akan menghadapi tantangan yang berat dimasa depan dalam upaya meningkatkan produktifitas tenaga kerja melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

7) Disrupsi Teknologi dan Inovasi

Dalam era disrupsi teknologi saat ini membuat segala hal menjadi instan, mudah dan modern. Gaya hidup masyarakat Papua secara berangsur mulai mengalami perubahan yang cukup drastis, yang cenderung sangat bergantung pada berbagai gadget (gawai) yang setiap waktu terus mengalami perubahan, contohnya smartphone. Melalui smartphone semua informasi dan komunikasi dapat diakses dan disebar secara mudah, dengan jarak dan jangkauan yang tak terbatas. Dampaknya, saat ini telah muncul konsumen baru yaitu *social-customer* yang tahu segalanya dan terkoneksi secara intens tanpa ada batasan mengenai informasi produk atau layanan yang diinginkan.

Sebagai indikasinya dapat dilihat pada data Susenas BPS Provinsi Papua antara tahun 2015 dan 2023 yang menunjukan adanya lonjakan yang tinggi dalam penggunaan internet pada penduduk Papua, yaitu dari 8,98% di tahun 2015 menjadi 29,87% pada tahun 2023, dimana sekitar 97,68% diakses melalui smartphone. Guna menghadapi era disrupsi teknologi yang semakin masif dimasa depan, harus mampu beradaptasi, berkreasi dan inovatif untuk selalu merekayasa IPTEK menjadi lebih berkualitas dalam upaya memberikan pelayanan publik yang prima.

8) Pengelolaan SDA dan Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan berbasis ekonomi hijau merupakan keniscayaan di Papua, mengingat semakin tidak terkendalinya kerusakan hutan lingkungan akibat dari pembangunan. Data yang dipublikasikan BPS RI (2023) menunjukan bahwa selama periode 2013/2014 sampai dengan 2021/2022 rata-rata deforestasi netto di Provinsi Papua mencapai 24.111,39 hektar per tahun, dengan kontribusi tertinggi berasal dari APL (Areal Penggunaan Lain) sebesar 56,83%, sedangkan dari kawasan hutan sebesar 43,17%.

Ekonomi hijau dalam 10 tahun terakhir telah menjadi arus utama pemikiran ekonomi wilayah di Papua, akan tetapi hal tersebut masih sebatas pada tataran normatif, dan belum sepenuhnya dilaksanakan dalam pembangunan daerah, cenderung implementasinya masih didasarkan pada asumsi bussiness as usual. Selain ekonomi hijau, Provinsi Papua juga sangat berpotensi untuk menerapkan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep yang menggabungkan pemanfaatan sumber daya laut dengan pendekatan berkelanjutan, yang mencakup berbagai sektor dan bidang antara lain : perikanan, energy terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, mitigasi perubahan iklim. Jika dikelola dengan visi berkelanjutan, sektor dan bidang pemba-ngunan ekonomi biru tersebut dapat menjadi pilar penting dalam mewu-judkan masyarakat Papua yang sejahtera, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian ekosistem laut, serta menciptakan lapangan kerja.

9) Transformasi Birokrasi dan Manajemen ASN

Masyarakat Papua yang kini mulai beralih menjadi *social-customer* memiliki sosok yang lebih cerdas, kritis, dan menuntut kepuasan yang lebih tinggi. Kondisi ini akhirnya merubah karakteristik masyarakat yang menuntut lebih tinggi terhadap pelayanan publik dari pemerintah. Pemerintah Provinsi Papua harus dapat mengubah orientasi pelayanan publiknya secara bertahap, dari *supplier-oriented* (mengejar target) ke *consumer-oriented* (kepentingan masyarakat) dan terakhir ke *customer- oriented* (sesuai kebutuhan masyarakat)

Untuk itu transformasi birokrasi dan manajemen ASN harus dilaksanakan seoptimal mungkin dimasa depan. Transfor-masi birokrasi adalah perubahan perilaku birokrat yang memberi kesa-daran baru, pemerintah dibentuk tidak untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat sesuai kebutuhannya. Sedangkan transformasi manajemen ASN melingkupi penguatan budaya kerja, per-cepatan peningkatan kapasitas ASN, hingga peningkatan kinerja. Tidak hanya transformasi pada tingkat instansi, setiap individu ASN dapat ber-inovasi untuk meningkatkan kinerja selama tidak melanggar aturan.

10) Perdagangan Antardaerah dan Global yang Kompetitif

Perdagangan antardaerah atau antarpulau adalah perdagangan dan pendistribusian barang dari satu daerah ke daerah lain untuk memenuhi kebutuhan di daerah tersebut. Secara umum perdagangan antardaerah terjadi karena dua faktor, yakni perbedaan actor produks dan tingkat harga antardaerah.

Adapun manfaat dari perdagangan antar daerah maupun global adalah: (1) menambah devisa negara untuk perdagangan global, dan menambah pendapatan daerah untuk perda gangan antar pulau; (2) meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi domestik; (3) menyediakan berbagai faktor-faktor produksi sebagai modal pemba-ngunan; (4) meningkatkan produktifitas regional; (5) mendorong inves-tasi dan pertumbuhan ekonomi; (6) menyerap lapangan kerja; (7) mensta-bilkan harga; (8) memperkuat kerjasama antardaerah dan antar negara; (9) meningkatkan daya saing daerah; (10) mengurangi ketimpangan pemba-ngunan antar daerah; (11) memperluas jangkauan pasar; (12) memper-cepat alih teknologi. Gambaran perdagangan antar daerah pada tahun 2018- 2021 rata-rata defisit perdagangan Papua mencapai -3,16 triliun rupiah dengan kenaikannya sekitar 86,11% per tahun, yang mana defisit terbesar rata-rata terjadi pada perdagangan dengan Jawa Timur, Jawa Tengah dan DKI Jakarta (diolah dari data BPS RI, 2023).

2.6.2.3. Isu Strategis Kabupaten Keerom

1. Penelaahan RTRW Kabupaten Keerom

Berdasarkan hasil interpretasi citra oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan tahun 2020, Tutupan lahan di Kabupaten Keerom didominasi oleh tutupan hutan berhutan dengan luas 879.864 ha (92,80%) sedangkan sisanya terdiri dari penggunaan lahan non hutan dengan luas 68.248 ha (7,20%). Jika dilihat dari penutupan lahan yang diatas Kabupaten Keerom dalam memanfaatkan lahan untuk pertanian masih belum maksimal, karena jika dilihat hasil interpertasi oleh KHLK kawasan yang digunakan untuk pertanian hanya 2,87% dari luas wilayah Kabupatenn (Revisi RTRW Kabupaten Keerom 2022-2041).

Jenis tanah memiliki peranan penting dalam perencanaan pe-ngembangan kawasan pertanian pangan. Tanah merupakan bagian dari kerak bumi yang tersusun dari bahan organik dan mineral. Tanah tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan dari proses pelapukan batuan maupun sisa tumbuhan dalam jangka waktu yang sangat lama (Revisi RTRW Kabupaten Keerom 2022-2041). Kabupaten Keerom terdiri dari enam jenis tanah di antaranya yaitu jenis tanah latosol, mediteran, podosolik, renzina dan tanah glei. Dari kelima jenis tanah tersebut semua cocok untuk lahan pertanian. Secara umum tanah yang tersbar di Kabupaten Keerom adalah jenis tanah latosol dengan luas 600.262 hektar atau 64,16% dari luas Kabupaten Keerom. Jenis tanah ini walau bukan bagian dari tanah regosol (tanah yang sangat cocok untuk tanaman

pertanian), namun tanah litosol ini masih bisa dikatakan bahwa ia masih saudara dengan tanah regosol. Karena keduanya sama-sama tergabung dalam ordo tanah entisol.

Distrik yang memiliki kawasan wilayah paling luas dan memiliki jenis tanah yang dapat dijadikan areal pertanian dan perkebunan sebagai pusat wilayah pertumbuhan. Kedalaman tanah merupakan bagian atas bumi yang telah mengalami pelapukan atau adanya aktivitas biologi. Dalam perencanaan pengembangan kawasan lahan pertanian perlunya informasi kedalaman tanah. Kabupaten Keerom memiliki kedalaman tanah <25 sampai >100 cm yang artinya memiliki cukup kedalaman tanah untuk lahan pertanian, namun ada daerah yang belam ada data kedalaman tanahnya atau yang belum diketahui kedalaman tanahnya (Revisi RTRW Kabupaten Keerom 2022-2041).

Distrik Arso sebagai ibukota Kabupaten menjadi pusat pengem-bangan ekonomi berupa sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, serta pembentukan kota minapolitan. Distrik-distrik lainnya, selain menjadi wilayah pengem-bangan utama sektor pertanian, juga akan merealisasikan program pembangunan infrastruktur dan program pemerintah pusat guna mendukung system pusat pelayanan maupun pada skala nasional, yang diarahkan sebagai pengembangan permukiman dengan memper hatikan sarana dan prasarana yang berbasis lingkungan hunian yang nyaman dan sehat.

2. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah

Strategi pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dapat di-jabarkan sebagai berikut:

Identifikasi Potensi dan Kekhasan Wilayah:

- Melakukan pemetaan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, budaya, dan ekonomi di setiap distrik.
- Mengidentifikasi keunggulan komparatif/kompetitif setiap distrik.
- Memetakan kesenjangan dan potensi pengembangan di setiap distrik.

Penetapan Pusat Pertumbuhan Wilayah:

- Menentukan distrik-distrik prioritas untuk pengembangan pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan potensi dan kekhasannya.
- Mempertimbangkan faktor aksesibilitas, infrastruktur ketersedia an lahan, dan daya dukung lingkungan.
- Melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam proses penetapan pusat pertumbuhan wilayah.

Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas:

- Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan di distrik pusat pertumbuhan wilayah.
- Meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet.
- Membangun infrastruktur penunjang lainnya seperti irigasi, bendungan, dan pembangkit listrik.

Pengembangan Ekonomi Lokal:

- Mengembangkan sektor unggulan di setiap distrik pusat pertum-buhan wilayah berdasarkan potensi sumber dayanya.
- Memberikan dukungan modal, pelatihan, dan pendampingan ke

pelaku usaha lokal.
- Membangun kawasan industri kecil dan menengah (IKM) di distrik-distrik pusat pertumbuhan wilayah.
- Mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di distrik-distrik yang memiliki potensi.

Pengembangan Sumber Daya Manusia:
- Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk meng-hasilkan SDM yang kompeten dan berdaya saing.
- Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Membangun kapasitas kelembagaan lokal untuk pengelolaan dan pengembangan wilayah.

Pelestarian Lingkungan dan Keberlanjutan:
- Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah.
- Melestarikan SDA dan menjaga kelestarian ling- kungan hidup.
- Mengembangkan energi terbarukan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

Distrik yang dapat dijadikan pusat pertumbuhan wilayah dan pengembangan pusat pertumbuhan, yaitu:
- Pusat pertumbuhan utama (inti ekonomi dan layanan) Distrik Arso dan Skanto: koridor terpadat penduduk, paling dekat ke Jayapura, akses jalan utama, dan simpul administrasi layanan. Basis komoditas kuat (sawit, kakao), pasar, dan konektivitas antardistrik terbaik. Cocok untuk penguatan perdagangan, agroindustri hulu-hilir, dan layanan publik menengah-tinggi. Distrik Arso Timur, Distrik Arso Barat, Distrik Mannem: perpan-jangan klaster Arso-Skanto dengan basis perkebunan sawit, kakao dan pembukaan lahan lama PIR; layak untuk satelit agroprocessing, gudang, dan logistik hasil kebun.
- Pusat pertumbuhan perbatasan (perdagangan lintas batas & keamanan pangan) Waris, Yaffi, Web, Towe: lima distrik yang langsung berbatasan dengan PNG. Fokuskan ke perdagangan perbatasan skala rakyat, sentra komoditas basis (kakao, ternak, hortikultura dataran sedang-tinggi), serta layanan logistik dan keamanan pangan wilayah terpencil. Infrastruktur dasar dan pasar perbatasan menjadi kunci.
- Pusat penyangga dan konektivitas Senggi: simpul jalan Trans/arteri dalam wilayah tengah, cocok sebagai hub logistik antarklaster, depo BBM mini, dan layanan alat mesin pertanian (alsintan). Kaisenar: penyangga sisi selatan-timur; dorong layanan dasar, pasar tani, dan konsolidasi komoditas rakyat untuk dipasok ke klaster Arso–Skanto.
- Pusat pertumbuhan pemerintahan di Distrik Waris Status ibukota (de jure): UU pemekaran menempatkan ibu kota Kabupaten Keerom di Waris. Praktiknya, banyak aktivitas pemerintahan masih terpusat di Arso; artinya Waris adalah kandidat alami untuk konsolidasi fungsi pemerintahan ke depan. Ini relevan untuk memperkuat kehadiran negara di perbatasan. Konteks perbatasan RI–PNG: Waris adalah distrik perbatasan langsung, strategis untuk urusan lintas batas, pengawasan, dan pelayanan dasar di kampung. Penetapan Waris sebagai node pemerintahan akan memudahkan koordinasi keamanan, logistik, dan pelayanan publik perbatasan. Arah pengembangan inti: (1) cluster perkantoran pemerin tahan kabupaten/OPD dan DPRK, (2) MPP/gerai layanan (Dukcapil, perizinan, bank/pos), (3) border

command center (kedaruratan, logistik, informasi), (4) upgrading puskesmas/ BLUD rujukan, sekolah/SMK perbatasan, (5) rumah dinas ASN/TNI-Polri, (6) air bersih, TIK/broadband, dan transport antar kampung. Penguatan ini sejalan dengan kebutuhan "keamanan" bagi warga Waris yang selama ini jauh dari layanan. Sinergi klaster: Waris mengisi peran yang berbeda dari Arso–Skanto dan Waris–Yaffi–Web–Towe (perdagangan rakyat lintas batas). Dengan menjadikan Waris simpul pemerintahan, arus layanan publik ke distrik perbatasan menjadi lebih pendek, sementara aktivitas ekonomi tetap bisa ditarik ke koridor Arso–Skanto sebagai pasar utama.

Hingga saat ini, pemerintah daerah masih menempati Distrik Arso sebagai pusat aktivitas/ibu kota faktual. Karena itu, rekomendasi ini realistis jika disertai *roadmap* pemindahan bertahap fungsi administrasi ke Waris berikut paket infrastruktur dasar dan pena-taan ruang. Pelaksanaan pengembangan pusat-pusat pertum-buhan wilayah ini harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan implementasi yang tepat, diharapkan konsep ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan Kabupaten Keerom sebagai beranda depan NKRI yang sejahtera, maju, berdaya saing, berkelanjutan, dan berbasis agroindustri.

3. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Keerom dalam dokumen RTRW 2022-2041 mencakup beberapa aspek utama, bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam penerapan kebijakan penataan ruang, diharap-kan dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan wilayah. Setiap kebijakan dirumuskan dengan kriteria yang jelas dan realistis, serta dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan yang ditetapkan. Berikut poin penting dari kebijakan penataan ruang.

Tujuan Penataan Ruang:

- Mewujudkan daerah yang berbasis pertanian, kehutanan, dan perikanan serta beranda depan negara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
- Menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal.
- Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional dan provinsi.

Sasaran Penataan Ruang

- Mengidentifikasi tujuan, kebijakan, dan strategi Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRP) Papua untuk disinergikan dan melihat pengaruhnya terhadap revisi RTRW Kabupaten Keerom.
- Menyusun peta dasar, peta tematik, dan peta rencana dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 untuk mendukung dan sebagai dasar dalam penyusunan RTRW.

Arah Kebijakan Penataan Ruang

- Pengembangan pusat permukiman dan kawasan strategis.
- Penyediaan jaringan infrastruktur yang memadai.
- Pelestarian kawasan lindung dan optimalisasi kawasan budidaya.

- Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengantisipasi perubah an tata ruang akibat pembangunan.

Strategi Penataan Ruang

- Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
- Penyediaan fasilitas dan layanan publik yang memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- Pengembangan kawasan strategis yang memiliki potensi ekonomi tinggi.
- Penerapan peraturan dan pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan ruang untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Penetapan Kawasan Strategis

- Kawasan strategis nasional dan provinsi: Mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi untuk mengembangkan wilayah yang memiliki potensi strategis tinggi, baik dari segi ekonomi maupun keamanan.
- Kawasan strategis kabupaten: Menentukan kawasan-kawasan di Kabupaten Keerom yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, seperti kawasan pertanian, kehutanan, dan perikanan.
- Rencana struktur ruang wilayah kabupaten: Mengatur distribusi penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan, termasuk permukiman, industri, pertanian, kehutanan, dan kawasan lindung.
- Rencana pola ruang wilayah kabupaten: Mengidentifikasi dan menetapkan zonasi berbagai kegiatan dan fungsi ruang, guna memastikan pemanfaatan ruang yang optimal dan berkelanjutan.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Ketentuan umum pengaturan zonasi: Menetapkan aturan-aturan dasar mengenai penggunaan lahan dan pengembangan wilayah.
- Ketentuan perizinan: Mengatur prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan izin pemanfaatan ruang.
- Ketentuan insentif dan disinsentif: Menyediakan mekanisme insentif untuk mendorong pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang dan disinsentif untuk menghindari pelanggaran.
- Arahan sanksi: Menetapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang untuk menjaga ketertiban dan keberlanjutan pembangunan.

4. Pengembangan Sistem Pusat Permukiman dan Kawasan Strategis

Pengembangan sistem pusat permukiman dan kawasan strategis di Kabupaten Keerom adalah langkah penting dalam merencanakan pertumbuhan wilayah secara terstruktur dan berkelanjutan.

Berikut ini beberapa aspek utama yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan:

Identifikasi Pusat PermukimanPusat Permukiman Utama:

- Ibukota Kabupaten: Waris, sebagai pusat pemerintahan.
- Distrik Arso sebagai pusat pengembangan pendidikan dan layanan kesehatan
- Kota Satelit: Pengembangan kota satelit disekitar Arso untuk

mengurangi tekanan dan kepadatan penduduk di pusat kota.
- Pusat Permukiman Sekunder: Distrik-Distrik: Pengembangan pusat permukiman di setiap distrik, seperti Senggi, Skanto, dan Waris, dengan menyediakan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar lokal.
- Kampung-Kampung: Memperkuat pusat-pusat permukiman di kampung dengan infrastruktur dasar dan layanan publik.

Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi
- Kawasan Industri: Pembangunan kawasan industri di daerah yang strategis untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
- Kawasan Pertanian dan Perkebunan: Mengembangkan kawasan pertanian modern dan perkebunan berkelanjutan, terutama untuk komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan kopi.
- Kawasan Strategis Pariwisata:
- Destinasi Wisata Alam: Mengembangkan potensi wisata alam seperti Taman Nasional dan situs-situs ekowisata.
- Kawasan Budaya: Mengembangkan kawasan wisata budaya yang menonjolkan kekayaan budaya dan tradisi lokal.
- Kawasan Strategis Infrastruktur:
- Transportasi: Meningkatkan konektivitas dengan membangun jalan utama, jalan penghubung antar desa, serta memperbaiki akses transportasi publik.
- Telekomunikasi: Memperluas jangkauan telekomunikasi dan internet untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.
- Energi: Pembangunan infrastruktur energi seperti listrik dan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

5. Penelaahan KLHS RPJMD Kabupaten Keerom 2025-2029

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan sebuah kajian yang mampu memberikan informasi dan juga isu pembangunan berkelanjutan terkait kondisi lingkungan hidup secara komprehensip baik itu berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi daya dukung dan data tampung lingkungan hidup ataupun berdasarkan hasil analisis terhadap capaian-capaian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah dicapai.

Rumusan Isu Strategis adalah proses mengidentifikasi dan mene-laah permasalahan atau tantangan paling krusial yang akan dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Keerom dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

Sumber-sumber isu strategis pembangunan daerah sangat beragam dan saling terkait. Namun setidaknya, untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Keerom pada masa mendatang ada 5 (lima) sumber isu strategis yang dapat dipetakan sebagai acuan dan rujukannya, yaitu : (1) isu Global; (2) isu nasional; (3) isu RIPPP; (4) isu Papua; dan (5) isu kewilayahan pembangunan Keerom.

Dengan mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu strategis yang berasal dari berbagai sumber tersebut, pemerintah Kabupaten Keerom dapat merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih tepat untuk mewujudkan visi pembangunan yang akan ditetapkan. Berdasarkan identifikasi isu strategis di atas, maka selanjutnya dikemukakan rumusan komprensif sebagai berikut:

Tabel 2.96
Perumusan Isu-Isu Strategis Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029
Berdasarkan Isu Global, Nasional, RIPPP, Provinsi Papua dan Kewilayahan

Isu-Isu Strategis Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029
Isu Global
Sustainable Development Goals; Megatrend Global; Anti-sipasi Perubahan Iklim Global; Disrupsi teknologi; Green Economy; Blue Economy; Masyarakat Ekonomi ASEAN
Isu Nasional
Aspek Demografi
• meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat
• tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas
Aspek Pendidikan
• Akses, pemerataan, dan mutu pendidikan
• Fasilitasi pendidikan dan ketersediaan guru
Aspek Kesehatan
• Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,
• Masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial
Aspek Tata Kelola Pemerintahan
• kerangka kerja kurang efektif untuk tiingkatkan pelayanan publik berkualitas
Aspek Politik
• integritas masih terjadi pada partai politik
Aspek Ekonomi:
• Tingkat produktivitas yang masih rendah
• Stabilitas makro yang mencakup aspek fiskal dan moneter masih menghadapi tantangan,
• ketakpastian ekonomi global dan keberlanjutan fiskal
• Pengangguran dan kemiskinan ekstrim
Aspek Infrastruktur
• Pembangunan infrastruktur telah meningkat pesat di berbagai wilayah, tetapi jauh di bawah kebutuhannya
Isu RIPPP
Kesehatan

Isu-Isu Strategis Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029
• Belum meratanya akses ke pelayanan kesehatan
• Rendahnya persentase rumah sakit (RS) dan puskesmas terakreditasi
• Masih banyak puskesmas yang belum memenuhi tenaga kesehatan sesuai standar mutu kesehatan
• Minimnya keter-sediaan dokter di Puskesmas
• Rendahnya pembudayaan olahraga
• Belum optimalnya keberlangsungan kegiatan pelayanan kesehatan
• Belum optimalnya tata kelola manajemen mutu dan risiko pada puskesmas
• Belum optimalnya regulasi antarsektor yang terintegrasi
Pendidikan
• Masih rendahnya akses dan mutu pendidikan
• Keterbatasan tenaga pendidik dan siswa dalam melaku-kan kegiatan belajar mengajar
• Belum optimalnya integrasi konektivitas, sehingga siswa dan tenaga pendidik mengalami keterbatasan dalam mengakses fasilitas pendidikan
• Masih terdapat ketimpangan gender dalam pendidikan
Ekonomi
• Belum optimalnya nilai realisasi investasi
• Tingginya biaya transaksi untuk berinvestasi di Papua
• Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan dari hulu ke hilir;
• Masih tingginya ketimpangan pendapatan,
• Belum optimalnya pemberdayaan UMKM
• Daya saing UMKM yang rendah
• Indeks kemahalan konstruksi di Papua masih relatif tinggi
• Belum terintegrasinya infrastruktur konektivitas jalan, darat, laut, dan udara untuk pertumbuhan ekonomi
• Tingginya risiko bencana, dan belum memdainya kapabi-litas penanganan dan mitigasi bencana
• Masih banyaknya pembalakan dan pembakaran hutan
• Belum diterapkannya ekonomi hijau dan ekonomi biru
• Reliensi terhadap bencana dan perubahan iklim masih sangat rendah
• Manajamen lingkungan hidup yang belum memadai
• Belum optimalnya pemanfaatan bioekonomi hutan
• Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan berbasis masyarakat

Isu-Isu Strategis Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029
• Rendahnya pengolahan limbah sampah rumah tangga dengan pendekatan 3R *(Reduce, Reuse, Recycle)*
• Masih tinggi gangguan keamanan dan ketertiban umum
• Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus
• Masih rendahnya penerapan tata kelola pemerintahan
• Rendahnya kapasitas aparatur dalam menjalankan siklus keuangan daerah yang berkualitas
• Belum optimalnya pelayanan publik yang prima
• Kurang kemampuan dan pelaksanaan evaluasi program- program pembangunan
• Rendah konsistensi, sinergitas, keselarasan dan integrasi perencanaan pembangunan antar sektor, waktu, wilayah dan kewenangan
Isu Papua
Aspek dana otsus:
• Tersedianya potensi sumber daya pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Papua;
Aspek budaya:
• adanya sikap etnosentrisme;
• adanya stereotip, yang menimbulkan pandangan yang negatif terhadap suatu kelompok budaya;
• terjadinya konflik sosial dan budaya, yang disebabkan primordialisme;
• kemajuan pembangunan dan teknologi yang dapat mendeg-radasi nilai-nilai dan norma sosial budaya masyarakat Papua.
Aspek demografi, urbanisasi dan keterkaitan kota-kampung.
• semakin minimnya lahan kosong, dan harga tanah yang terus naik;
• permukiman kumuh bertambah,
• menjadi penyebab bencana alam;
• tingkat kriminalitas meningkat;
• bertambahnya golongan masyarakat miskin;
• ketimpangan pendapatan meningkat, secara spasial, sektoral maupun personal.
Aspek Kemiskinan Dan Ketimpangan.
• Rendahnya kemampuan untuk mengakselerasi kemiskinan dan ketimpangan
• pendapatan baik antarpersonal, antarsektor, maupun antar wilayah
• Aspek ekonomi daerah dan ketenagakerjaan.
• Rendahnya nilai tambah dari sektor industri, dan dominan nya tenaga kerja yang berpendidikan rendah.
Aspek Pendidikan Dan Kesehatan.

Isu-Isu Strategis Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029
• Belum optimal nya akses, rendahnya mutu dan tata kelola di sektor pendidikan. Serta rendahnya akses, derajad dan sumber daya kesehatan.
• Disrupsi Teknologi Dan Inovasi.
• Rendahnya pemanfaatan teknlogi, serta belum optimalnya kemampuan untuk berinovasi.
• Pengelolaan SDA Dan Pembangunan Berkelanjutan.
• SDA belum semuanya dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan penduduk, dab belum berkelanjutan
• Transformasi Birokrasi Dan Manajemen ASN.
• Masih rendahnya profesionalisme, responsibilitas dan adap-tasi penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola keuang an daerah.
• Perdagangan Antardaerah Dan Global.
• Rendahnya daya saing perdagangan daerah, kondisi neraca perdagangan yang selalu defisit, serta tingginya biaya transaksi ekonomi.
Isu Kewilayahan Papua
• Pengembangan ekonomi yang belum inklusif;
• Kondisi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masya-rakat yang masih rendah;
• Aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah Papua yang masih rendah;
• Potensi energi hidro, energi surya, dan energi angin di Wilayah Papua belum dikembangkan dengan optimal;
• Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan digital di Wilayah Papua masih rendah dan belum merata;
• Pembangunan bidang infrastruktur dasar di Wilayah Papua juga belum optimal;
• Penyelenggaraan otonomi khusus dan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah otonomi baru;
• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan, penyelengga-raan pelayanan dasar, serta keterbukaan informasi publik;
• Rendahnya kemandirian fiskal menjadi isu krusial yang menghambat pertumbuhan;
• Kondisi keamanan dan ketertiban umum yang menyebab-kan cakupan pelayanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan belum optimal;
• Rendahnya perlindungan dan pengakuan terhadap masya-rakat hukum adat;
Isu Kewilayahan Pembangunan Keerom
• Melambatnya pertumbuhan ekonomi
• Tingginya ketimpangan distribusi pendapatan
• Belum optimalnya penurunan tingkat kemiskinan
• Melambat peningkatan kualitas pembangunan manusia
• Struktur tenaga kerja masih dominan pada sektor-sektor dengan tingkat upah yang rendah
• Kemandirian fiskal daerah yang masih rendah
• Perkembangan investasi daerah yang rendah

Isu-Isu Strategis Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029
• Rendahnya daya beli rumah tangga
• Masih tingginya tingkat kriminalitas
• Akses pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan gender yang belum memadai
• Ketimpangan pembangunan antar wilayah yang tinggi
• Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi, kualitas dan akses pelayanan publik.
• Belum maksimalnya upaya pengamanan dan pemanfaatan PLB *(Pos Lintas Batas)*
Rumusaan Isu Strategis Super Prioritas Jangka Menengah Keerom 2025-2029
Global :
• Sustainable Development Goals
• Disrupsi teknologi
• Green Economy
Nasional :
• Bonus Demografi
• Produktifitas regional
• Pelayanan pendidikan dan kesehatan
• Integritas partai politik
• Tata kelola
• Infratruktur dasar dan konektivitas
• Tingkat keamanan dan ketertiban umum
Otonomi Khusus (RIPPP)
• Kesehatan: pemerataan pelayanan kesehatan, sarana dan praarana kesehatan, dan sumber daya
• Pendidikan: pemerataan akses, mutu dan tata kelola pendidikan, integrasi konektivitas, ketimpangan gender dalam pendidikan
• Ekonomi: daya saing investasi dan perdagangan, indus-trialisasi, pemberdayaan UMKM, integrasi konektivitas
• Lingkungan Hidup: risiko bencana, pembalakan dan pembakaran hutan, penerapan ekonomi hijau, reliensi bencana dan perubahan iklim, pemanfaatan sumber daya hutan berbasis masyarakat, pengolahan limbah sampah rumah tangga dengan pendekatan *3R (Reduce, Reuse, Recycle)*
• Tata Kelola: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi
Provinsi Papua
• Pengelolaan dana otsus
• Keragaman budaya

Isu-Isu Strategis Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029
• Demografi dan urbanisasi
• Kemiskinan dan ketimpangan
• Ekonomi daerah dan tenaga kerja
• Pendidikan dan kesehatan
• Disrupsi teknologi
• Transformasi birokrasi
• Daya saing daerah
Kewilayahan Keerom
• Pertumbuhan ekonomi
• Kemiskinan dan distribusi pendapatan
• Kualitas pembangunan manusia
• Struktur tenaga kerja
• Kemandirian fiskal daerah
• Investasi daerah
• Daya beli rumah tangga
• Tingkat kriminalitas
• Akses pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan gender
• Pemerataan pembangunan wilayah
• Pelaksanaan reformasi birokrasi, kualitas dan akses pelayanan publik
• Pengembangan kawasan perbatasan dengan PNG

Hasil rumusan isu strategis di atas, diidentifikasi kembali untuk mengkompilasi isu-isu yang terlihat beda pernyataannya namun memiliki substansi atau makna yang sama, dan sekaligus dikelompokkan ke dalam beberapa aspek pembangunan, sebagai berikut:

1. Aspek Ekonomi dan Tenaga Kerja:
- Pertumbuhan Ekonomi
- Industrialisasi
- Pengembangan Umkm
- Penerapan Ekonomi Hijau
- Daya Saing Ekonomi Daerah
- Produktifitas Regional
- Struktur Tenaga Kerja
- Bonus Demografi
- Daya Beli Rumah Tangga

2. Aspek Sosial-Budaya:
- Pengelolaan Dan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan
- Pemberdayaan Gender
- Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan
- Kualitas Pembangunan Manusia
- Pembangunan Kebudayaan
- Integritas Partai Politik

3. Aspek Infrastruktur Dasar, Konektivitas dan Kewilayahan:
- Migrasi Dan Urbanisasi
- Integrasi Konektivitas Pada Pusat-Pusat Pertumbuhan
- Infrastruktur Dasar
- Pemerataan Pembangunan Wilayah
- Disrupsi Teknologi

4. Aspek Lingkungan:
- Sustainable Development Goals
- Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat
- Pengolahan Limbah Sampah Rumah Tangga Dengan Pendekatan 3r
- Pembalakan Dan Pembakaran Hutan
- Reliensi Bencana Dan Perubahan Iklim

5. Aspek Tata Kelola:
- Tingkat Keamanan Dan Ketertiban Umum
- Pengelolaan Dana Otsus
- Transformasi Birokrasi
- Kualitas Dan Akses Pelayanan Publik
- Kemandirian Fiskal Daerah

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi

Penyusunan rencana pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan dan program prioritas pembangunan daerah memerlukan argumentsi landasan filosofis sebagai pedoman dasar, sehingga memiliki kekuatan yang mengakar bersumber dari harmonisasi antara kepentingan negara, pemerintah dengan aspirasi kebutuhan masyarakat. Mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, cita-cita dan harapan, suasana kebatinan, falsafah berbangsa dan bermasyarakat.

Pada konteks itu, Pemerintah Kabupaten Keerom memiliki fungsi dan peran dalam batas kewenangannya sebagai bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di daerah ini. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Keerom bertindak sebagai penggerak, fasilitator dan dinamisator mewujudkan tujuan nasional di daerah, mewakili kepentingan masyarakatnya dan seluruh lapisan bangsa. Pembangunan diselenggarakan integratif bersama seluruh komponen, berkontribusi positif pada peningkatan kondisi kehidupan masyarakat seutuhnya, merata dan berkeadilan sosial. Melibatkan aspek kehidupan pada skala mikro (individu dan komunitas), dan pada makro secara agregat-nasional, berjenjang pada institusi pemerintahan level kampung/kelurahan, distrik, kabupaten, provinsi, nasional, dan tingkat global-internasional. Hal tersebut, sejalan dengan prinsip *"Kwembo Kentkei Girgura Kensuwri"* [Tuhan Menciptakan Kita yang Membangun] dan dengan motto "Keerom sebagai mutiara hijau di Bumi Papua", menjadi perlambang dari ikhtiar mencari keseimbangan antara pemerintah, masyarakat adat dan tokoh agama sebagai pilar harmoni sosial.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofis penye-lenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Keerom adalah perwujudan dari dimensi pandangan hidup berbangsa, nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Keerom, dan prinsip kemanusiaan universal. Landasan ini menjadi pijakan normatif dan moral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berpijak pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat yang mencerminkan solidaritas sosial, hubungan harmonis dengan alam (ekosentrisme) yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan, mengedepankan nilai adat dan hak ulayat dalam rangka pengelolaan SDM dan SDA.

Sehubungan dengan itu, pembangunan harus diselenggaakan secara simultan, berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut. untuk memacu peningkatan kemampuan daerah ini yang berdayasaing dan dapat berpanetrasi pada level nasional. Salah satu aspek dari perencanaan pembangunan adalah diterjemahkan dalam konteks RPJMD, yang disusun secara terpadu dalam kurun periodesasi 5 (lima) tahun sebagai pedoman yang memberikan kejelasan hukum dan arah tindak dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah. Dan, menjadi pedoman penyusunan rencana strategis satuan kerja teknis dan rencana kerja tahunan.

Visi Indonesia Emas 2045 yang tercantum RPJPN 2025-2045 menekankan pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM dan transformasi ekonomi berbasis teknologi dan inovasi. Secara keseluruhan, RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029 memastikan keselarasan dengan RPJPD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2045 singkronisasi dengan RPJPD provinsi Papua Tahun 2025-

2045, dan Visi Indonesia 2045. Target utamanya diarahkan pada transformasi ekonomi, peningkatan SDM dan pembangunan infrastruktur guna mencapai pemerataan pembangunan Indonesia ke seluruh daerah.

Di dalam dokumen RPJPD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2045, pernyataan visinya menggambaran keadaan diinginkan akhir periode perencanaan pembangunan. Rumusan Visi tersebut adalah Kabupaten Keerom sebagai Gerbang Timur NKRI yang Maju, Makmur, Merata, Mandiri, Transformatif dan Berkelanjutan Berbasis Agroindustri dan Ekonomi Kreatif. Dengan mengacu pada rumusan visi tersebut serta memperhatikan visi nasional, visi pembangunan Provinsi Papua, dan dengan mempertimbangkan kondisi faktual tentang kinerja daerah, isu-isu strategis, serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029 dirumuskan seperti berikut ini.

"Keerom Maju yang Transformatif, Mandiri, Bermartabat dan Berkelanjutan"

Kangdungan visi tersebut dialaskan pada PRINSIP "KWEMBO KENTKEI GIRGURA KENSUWRI [Tuhan Menciptakan Kita yang Membangun], dan dengan motto "Keerom sebagai mutiara hijau di Bumi Papua". Selanjutnya, Untuk memperjelas arah dan substansi pembangunan jangka menengah daerah, Visi Kabupaten Keerom dijabarkan ke dalam sejumlah pokok visi yang mencermin-kan nilai-nilai dasar, orientasi pembangunan, serta karakteristik lokal yang ingin diwujudkan. Pokok-pokok visi ini merupakan representasi dari kondisi ideal yang ingin dicapai dan menjadi dasar dalam perumusan misi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah. Adapun rincian pokok visi beserta penjabaran maknanya, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pokok dan Penjabaran Visi RPJMD Keerom Tahun 2025-2029

Pokok Visi	Penjabaran Visi
Keerom yang Maju	Masyarakat dan pemerintahan Keerom berkemajuan aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik. Kemajuan meningkat partisipasi masyarakat, pemerintahan efisien, transparan, akuntabel dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Keunggulan dimanfaatkan lumbung pangan nasional dan lokal serta sebagai daerah penyangga kawasan perbatasan.
Keerom yang Transformatif	Merupakan perubahan terencana dan sistematis kondisi adaptif terhadap dinamika Iptek dan aspirasi masyarakat lokal. Mencakup integrasi perkembangan spiritualitas, tata kelola pemerintahan dan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan demokrasi saling bersinergi untuk membentuk Keerom responsif dan proaktif terhadap perubahan zaman.
Keerom yang Mandiri	Keberdayaan masyarakat mengembangkan diri dan daerah secara berkelanjutan, melalui pengelolaan Potensi Unggulan Daerah. Penguatan sektor pertanian, konektivitas wilayah, industri kecil dan menengah, riset dan inovasi. Terutama teknologi pangan dan keunggulan kompetitif daerah.

Pokok Visi	Penjabaran Visi
Keerom yang Bermartabat	Masyarakat adat cerdas, sehat, religius, pelestarian nilai luhur sebagai identitas daerah. Menekankan kearifan lokal fondasi membangun karakter wawasan kebangsaan dan integrasi nasional.
Keerom yang Berkelanjutan	Membangun secara tepat, konsisten dan kesinambungan, kawasan perbatasan dan khusus, menjamin keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Mendorong ekonomi hijau, energi terbarukan dan ketahanan pangan serta kolaborasi antar wilayah

Sumber: Musrenbang RPJMD, Tahun 2025

Dari penjabaran visi tersebut, dapat dihubungkan dengan Indikator Umum Program (IUP) RPJPD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Keterkaitan Indikator Umum Program RPJPD 2025-2045
Dengan RPJMD Keerom Tahun 2025-2029

Pokok Visi RPJMD	IUP RPJPD	Target RPJMD		
		Satuan	Baseline	2029
Keerom yang Maju	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	1.13	3.51
	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	67.64	80.89
	Indeks Modal Manusia	Indeks	0.44	0.54
	Angka Harapan Hidup	Tahun	67.24	69.49
Keerom yang Transformatif	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2.80	3.12
	Indeks Inovasi Daerah	%	13.88	36.13
	Tingkat Kemiskinan	%	15.68	14.43
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1.50	1.41
Keerom yang Mandiri	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	%	31.68	38.94
	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun	Tahun	8.57	9.52
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	87.12	100
Keerom yang Bermartabat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	44.97	58.72
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	80.88	82.13
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	18.80	11.80
Keerom yang Berkelanjutan	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	69.31	79.31
	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	77.87	87.87
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68.11	73.69

Sumber: Dokumen RPJPD Keerom 2025-2029 dan BPS Keerom, 2025

Selain visi tersebut, terdapat 8 (delapan) aspek transformasi Keerom maju yang transformatif, mandiri, bermartabat dan berkelanjutan mencakup aspek transformasi. Transformasi Kabupaten Keerom bergerak menuju paradigma "Pembangunan Manusia Seutuhnya". Arah pendekatan transformasi tersebut, dimaksudkan untuk menuntun Keerom dari status "daerah tertinggal dan pinggiran" menuju "wilayah kabupaten perbatasan yang berdaya, beriman, dan berperadaban". Memiliki kandungan makna perubahan sistematis yang berakar pada spiritualitas dan budaya lokal, dikelola dengan tata kelola yang baik dan partisipatif, ditopang oleh ekonomi berkelanjutan dan inovasi

teknologi, serta berorientasi pada keseimbangan ekologis dan kedewasaan demokrasi. Dalam hal ini mencakup transformasi pada aspek-aspek:

1. **Transformasi Spiritualitas**: refleksi, hikmah dan kesadaran relijius setiap individu, untuk aktualisasi diri masyarakat Kabupaten Keerom. Melalui transformasi spiritual, setiap masyarakat mampu menumbuh kembangkan bakat dan kapasitasnya untuk kesejahteraan bersama. Pada saat yang sama, spiritual individual menghadirkan spiritual komunal Kabupaten Keerom, interaksi masyarakat Kabupaten Keerom lebih partisipasi dalam aktifitas sosial, politik dan budaya. Hal ini akan produktif dan konstruktif menuju masyarakat aman, damai, saling menghargai dan sejahtera.
   Indikator transformatif:
   - Meningkatnya tata kehidupan religius lintas iman yang damai, dan saling menghormati.
   - Integrasi nilai-nilai kasih, kejujuran, dan tanggung jawab dalam praktik birokrasi dan sosial.
   - Penguatan peran aktif tokoh agama dan adat dalam pendidikan moral masyarakat.

   Arah perubahan: dari keyakinan yang terfragmentasi menuju spiritualitas kolektif yang memperkuat harmoni sosial dan integritas aparatur.
   Contoh nyata: kegiatan lintas gereja–masjid di Arso dan Skanto, dan penguatan pendidikan karakter di sentra-sentra pendidikan dasar dan menengah di berbagai distrik. Dan, bahkan telah diselenggarakan pendidikan tinggi jenjang Sarjana (S1), kerjasama dengan Universitas Cenderawaih, khususnya Program Studi Teknologi Pangan dan Program Studi Ilmu Perikanan.

2. **Transformasi Tata Kelola:** mencakup perubahan terjadi tetapi hakikatnya meliputi fungsi, struktur atau karakteristik suatu kegiatan pembangunan Kabupaten Keerom. Terutama hubungan dengan kelembagaan dan birokrasi berintegritas, adaptif, untuk pelayanan publik berkualitas Kabupaten Keerom. Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, kualitas ASN, regulasi efektif, digitalisasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kinerja Pelayanan Publik diKabupaten Keerom. Menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas dan fungsi pemerintahan. Melandaskan kesejarahan, budaya dan sosial menjadi dasar pembangunan daerah Kabupaten Keerom. Transformasi tata kelola menekankan pergeseran dari birokrasi administratif ke pemerintahan yang kolaboratif, transparan, dan berdaya inovasi.
   Indikator transformatif:
   - Implementasi penuh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan e-Planning.
   - Peningkatan indeks reformasi birokrasi dan integritas ASN.
   - Keterlibatan masyarakat adat dan perempuan dalam forum perencanaan daerah.

   Arah perubahan: dari pemerintahan tertutup dan hierarkis menuju tata kelola inklusif dan berbasis data.
   Contoh nyata: digitalisasi perencanaan pembangunan, Musrenbang distrik berbasis partisipasi, dan penguatan fungsi pengawasan DPRD.

3. **Transformasi Sosial:** meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, agar setiap individu dapat meningkatkan harkat dan martabatnya sebagi masyarakat Kabupaten Keerom. Mewujudkan pemerataan dan peningkatan akses, kualitas pendidikan, pelatihan dan pengembangan, penguatan etos kerja, Iptek dan inovasi serta peningkatan layanan Publik secara adil bagi seluruh masyarakat Kabupaten Keerom. Transformasi sosial dimaksud, berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan penguatan solidaritas antar-komunitas (Papua dan non-Papua).
   Indikator transformatif:

- Penurunan angka kemiskinan ekstrem dan peningkatan IPM.
- Akses pendidikan dan kesehatan dasar yang merata antardistrik.
- Penguatan lembaga sosial komunitas (karang taruna, kelompok perempuan, LMA).

Arah perubahan: dari ketimpangan sosial dan keterisolasian menuju masyarakat yang inklusif, berdaya, dan solid.
Contoh nyata: program pemberdayaan perempuan di Arso Timur, pelatihan wirausaha muda di Towe Hitam, dan peningkatan fasilitas sekolah di kawasan perbatasan.

4. **Transformasi Ekonomi:** pemanfaatan sumberdaya alam sebagai daya saing produk dan jasa memiliki nilai tambah Kabupaten Keerom. Periode jangka pendek dan menengah mengembangkan industri pengolahan berbasis sumberdaya alam, sesuai komoditas atau sektor unggulan khususnya sektor pertanian. Hilirisasi sumberdaya alam, diprioritaskan Kabupaten Keerom, memiliki keterkaitan kuat dengan ketahanan daerah, antara lain: ketahanan pangan dan keberlanjutan sumberdaya. Sehingga kemampuan ekonomi regional Kabupaten Keerom, akan mendorong inovasi dan produktifitas berbasis teknologi dan inovasi. Transformasi ekonomi menandai perubahan struktur dari ekonomi berbasis konsumsi dan pertanian subsisten menjadi ekonomi produktif, inovatif, dan berkelanjutan.
   Indikator transformatif:
   - Peningkatan kontribusi sektor pengolahan dan jasa dalam PDRB.
   - Pertumbuhan UMKM, koperasi, dan klaster ekonomi lokal.
   - Penguatan kebijakan nasional ekonomi koperasi merah-putih,
   - Penguatan konektivitas ekonomi lintas batas dengan PNG.

   Arah perubahan: dari ekonomi ekstraktif dan tergantung transfer fiskal menuju ekonomi mandiri, bernilai tambah, dan terintegrasi pasar regional.
   Contoh nyata: pengembangan klaster kakao, kopi, dan perikanan air tawar; serta pembentukan zona ekonomi perbatasan.

5. **Transformasi Budaya:** melakukan adaptasi terhadap perubahan sedang terjadi di Kabupaten Keerom. Dimana perubahan mendasar dalam nilai-nilai kehidupan sosial, keyakinan, sikap dan perilaku mendorong pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Keerom, agar bergerak maju lebih cepat secara kolektif, menjadikan Kabupaten Keerom sejajar dengan daerah lain di Provinsi Papua bahkan secara Nasional, tanpa kehilangan nilai-nilai budaya lokal Kabupaten Keerom. Transformasi budaya ini bermakna revitalisasi identitas lokal (tanah adat Keerom) sebagai dasar pembangunan modern.
   Indikator transformatif:
   - Revitalisasi kesenian dan bahasa lokal di sekolah dan komunitas.
   - Integrasi nilai-nilai adat dalam perencanaan pembangunan desa.
   - Peningkatan peran lembaga adat dalam mediasi sosial dan pelestarian hutan.

   Arah perubahan: dari budaya yang terpinggirkan dan pasif menuju budaya yang produktif, adaptif, dan menjadi sumber inspirasi pembangunan.
   Contoh nyata: festival budaya perbatasan, pelatihan batik motif Keerom, dan pelestarian rumah adat (honai modern).

6. **Transformasi Iptek:** mengintegrasikan teknologi digital untuk proses pelayanan publik Kabupaten Keerom, mengadopsi teknologi digital inovatif untuk mendukung budaya dan operasional yang adaptif dengan perubahan. Mengimplementasikan teknologi, talenta dan proses baru secara tetap, sehingga menunjukkan keunggulan daya saing Kabupaten Keerom dalam aktifitas proses dan kinerja pelayanan publik Kabupaten Keerom. Transformasi ipteks ditandai dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam mengadopsi teknologi untuk kesejahteraan.
   Indikator transformatif:

- Pemanfaatan teknologi digital untuk layanan publik, pendidikan, dan pertanian.
- Terbentuknya pusat inovasi daerah dan kerja sama dengan perguruan tinggi di lingkup LLDIKTI-IV
- Akses internet desa dan literasi digital meningkat signifikan.

Arah perubahan: dari keterbelakangan teknologi dan rendahnya literasi digital menuju masyarakat yang cerdas teknologi dan kreatif digital.
Contoh nyata: sekolah digital di Arso, aplikasi layanan publik "SAPA Keerom", dan pendampingan pertanian cerdas iklim oleh universitas mitra.

7. **Transformasi Ekologi Lingkungan:** etika dan spiritualitas kmenjadi kesatuan hubungan harmonis manusia, alam dalam ekosistem lingkungan hidup. Mengadaptasi, meningkatkan dan memprioritaskan keselarasan pola pro-duksi, konsumsi dan berkelanjutan Pelayanan Publik Kabupaten Keerom. Ekologi ingkungan menuju kesadaran kolektif Kabupaten Keerom, untuk aksi keterpaduan berbagai pihak: pemerintah, swasta, maupun masyarakat Kabupaten Keerom. Transformasi ekologis mencerminkan kesadaran kolektif untuk menjaga keseimbangan alam sambil memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan.
   Indikator transformatif:
   - Penurunan deforestasi dan degradasi lahan.
   - Pengelolaan sampah berbasis komunitas dan energi terbarukan.
   - Peningkatan ruang terbuka hijau dan konservasi DAS.

   Arah perubahan: dari eksploitasi sumber daya dan degradasi hutan menuju ekonomi hijau dan harmoni ekologis.
   Contoh nyata: program "Hutan Adat Waris", pengembangan agroforestri masyarakat, dan inisiatif "Keerom Hijau".

8. **Transformasi Demokrasi:** meningkatkan kualitas dan ketahanan demokrasi Kabupaten Keerom, menghadapi tantangan perubahan zaman, melalui meningkatkan partisipasi politik dan inklusi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil, membangun sistem lebih transparan dan akuntabel, adaptif dan responsif kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Keerom. Transformasi demokrasi menegaskan kematangan politik masyarakat dalam berpartisipasi, mengawasi, dan menjaga stabilitas perbatasan.
   Indikator transformatif:
   - Meningkatnya partisipasi pemilih dan keterwakilan kelompok rentan dalam politik lokal.
   - Penguatan lembaga masyarakat sipil dan media komunitas.
   - Kolaborasi masyarakat dengan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban perbatasan.

   Arah perubahan: dari demokrasi prosedural dan pasif menuju demokrasi partisipatif dan berkarakter kewargaan aktif.
   Contoh nyata: pembentukan forum warga perbatasan, peningkatan kapasitas LSM lokal, dan pendidikan politik damai di distrik-distrik terpencil.

Indikator transformatif di atas menandai pergeseran Kabupaten Keerom dari "daerah pinggiran yang bergantung" menjadi "wilayah perbatasan yang berdaya dan produktif". Transformasi ini bersifat struktural (ekonomi dan kelembagaan), kultural (sosial dan adat), dan spasial (konektivitas wilayah) untuk dapat *mewujudkan Keerom yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.*

Selanjutnya, guna menyelaraskan pembangunan daerah di Kabupaten Keerom, di dalam dolmen RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029 dirumuskan 8 (delapan) agenda transformasi sebagai fondasi dan pedoman starategis pembangunan daerah, direlevansikan secara harmonis agenda

prioritas Astacita Nasional Adapun Transformasi Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sinergitas Asta Cita Nasional Dengan Transformasi Keerom

Asta Cita Nasional RPJMN Tahun 2025-2029	Transformasi Keerom RPJMD Tahun 2025-2029
1. Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Tr.1. Spritualitas Tr.8. Demokrasi
2. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional.	Tr.8. Demokrasi
3. Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan.	Tr.4. Ekonomi Tr.6. Ipteks
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender.	Tr.3. Sosial Tr.5. Budaya
5. Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi.	Tr.4. Ekonomi Tr.6. Ipteks
6. Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi.	Tr.2. Tatakelola Tr.4. Ekonomi
7. Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba.	Tr.2. Tatakelola Tr.8. Demokrasi
8. Harmoni Lingkungan, Budaya dan Toleransi Beragama.	Tr.1. Spritualitas Tr.7. Ekologi-Lingkungan

Sumber: Musrenbang RPJMD, Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Keerom konsisten berupaya menyusun arah kebijakan pembangunan daerah terintegrasi dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam delapan butir Asta Cita. Transformasi daerah dirancang mencerminkan respon lokal terhadap tantangan nasional, baik dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, maupun lingkungan hidup. Keterkaitan ini, menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak berjalan secara terpisah, tetapi menjadi utuh dari kerangka pembangunan nasional inklusif dan berkelanjutan.

Transformasi daerah tidak hanya sekadar proses internalisasi kebijakan, melainkan sebagai wujud konkrit dari adaptasi nilai-nilai nasional ke dalam konteks lokal Kabupaten Keerom. Memiliki karakteristik geografis, demografis, dan sosiokultural unik. Oleh karena itu, setiap langkah pembangunan di Kabupaten Keerom disusun dengan memperhatikan arahan strategis nasional, agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat lokal sekaligus berkontribusi pencapaian tujuan nasional.

Dalam konteks perencanaan RPJMD Kabupaten Keerom 2025–2029, keselarasan menjadi fondasi penyusunan tujuan, sasaran, hingga program dan kegiatan prioritas daerah memiliki Keterkaitan antara transformasi dan ASTA CITA. Memperkuat sinergi lintas sektor dan memastikan bahwa pembangunan dilakukan bersifat integratif, tidak tumpang tindih, serta mendukung efisiensi penggunaan sumber daya. Kabupaten Keerom mampu membangun ekosistem pembangunan berpihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Responsif dinamika global, adaptif perkembangan teknologi dan tantangan masa depan. Keselarasan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah, membuka peluang partisipasi publik, swasta dan mitra pembangunan lainnya, untuk Kemajuan Kabupaten Keerom

Pada konteks makro, indikator transformatif pembangunan di Kabupaten Keerom merupakan ukuran yang menandai terjadinya perubahan struktural, kelembagaan, dan perilaku sosial-ekonomi yang

bersifat jangka menengah-panjang. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025–2029, tercatat indikator yang mencakup berbagai bidang pembangunan seperti berikut ini.

Tabel 3.4.
Deskripsi Indikator Transformatif Pembangunan Keerom Menurut Bidang

Bidang	Indikator Transformatif	Deskripsi
Ekonomi	Perubahan struktur ekonomi dari primer ke sekunder dan tersier	Peralihan dari dominasi sektor pertanian subsisten ke agroindustri, perdagangan lintas perbatasan, dan jasa publik; ditandai peningkatan kontribusi PDRB sektor non-pertanian ≥ 40% pada 2029.
Kelembagaan & Tata Kelola	Reformasi tata kelola berbasis digital dan transparansi publik	Penerapan *e-planning*, *e-budgeting*, dan *open data perbatasan*; meningkatnya partisipasi masyarakat adat dalam Musrenbang distrik dan pengawasan pembangunan.
Sosial-Budaya	Penguatan kapasitas masyarakat adat sebagai subjek pembangunan	Integrasi peran Dewan Adat Keerom dalam mediasi konflik lahan, penentuan wilayah adat, dan advokasi lingkungan hidup.
Lingkungan	Transisi menuju ekonomi hijau & rendah karbon	Peningkatan investasi energi terbarukan (PLTS, bioenergi), rehabilitasi 1.000 ha lahan kritis, dan skema *carbon offset* berbasis hutan adat.
Kesejahteraan	Penurunan stunting & kemiskinan ekstrem sebagai outcome lintas sektor	Prevalensi stunting <14% dan kemiskinan ekstrem <1% pada 2029 melalui pendekatan integratif pangan–gizi–air–sanitasi.

Sumber: Dokumen KLHS, Tahun 2025

Indikator transformatif pembangunan Kabupaten Keerom, pada prinsipnya mengedepankan perubahan signifikan pada sektor-sektor unggulan dengan mendorong terselenggaranya aspek-aspek seperti:

1. Transformasi Struktur Ekonomi yang ditandai dengan pergeseran dari ketergantungan pada sektor primer (pertanian subsisten dan kehutanan tradisional) menuju ekonomi yang lebih produktif, berorientasi nilai tambah, dan berkelanjutan.
   - Ciri utama: meningkatnya kontribusi sektor pengolahan hasil pertanian, perdagangan, dan jasa terhadap PDRB daerah.
   - Contoh konkret: pengembangan klaster pertanian produktif di Arso dan Skanto (komoditas kakao, kopi, hortikultura), serta tumbuhnya sentra perdagangan lintas batas di Waris dan Senggi.
   - Dampak transformasi: terbukanya lapangan kerja non-pertanian, naiknya pendapatan masyarakat, dan berkurangnya ketimpangan antar-distrik.

2. Transformasi Pelayanan Publik, diukur dari kemampuan Pemda Kabupaten Keerom dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis data.
   - Ciri utama: implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan data pembangunan, dan sinergi perencanaan lintas OPD.

- Contoh konkret: penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* yang mulai diintegrasikan dengan sistem keuangan daerah, serta meningkatnya partisipasi masyarakat adat dalam forum Musrenbang distrik.
- Dampak transformasi: penguatan kepercayaan publik, efisiensi belanja, dan peningkatan kualitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, dan administrasi kependudukan).

3. Transformasi Sosial dan Modal Manusia, mengarah pada peningkatan kualitas SDM dan penguatan kohesi sosial lintas komunitas.
   - Ciri utama: naiknya angka partisipasi sekolah, menurunnya angka kemiskinan ekstrem, dan meningkatnya peran perempuan serta pemuda dalam kegiatan ekonomi dan pemerintahan.
   - Contoh konkret: program beasiswa daerah dan pelatihan kewira-usahaan bagi generasi muda perbatasan, serta peningkatan fasilitas pendidikan menengah di Arso Timur dan Towe.
   - Dampak transformasi: terbentuknya masyarakat yang lebih adaptif terhadap perubahan, serta berkurangnya kesenjangan sosial antar-wilayah dan antar-etnis.

4. Transformasi Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah, yang ditunjuk-kan dari adanya penignakatan keterhubungan antar-distrik dan konektivitas ke pusat ekonomi Papua serta ke perbatasan PNG.
   - Ciri utama: pembangunan jalan strategis lintas perbatasan, jembatan penghubung antardistrik, dan peningkatan jaringan listrik serta telekomunikasi.
   - Contoh konkret: jalur Trans-Papua yang melintasi Arso–Waris–Towe, serta penyediaan listrik desa melalui program Papua Terang.
   - Dampak transformasi: menurunnya biaya logistik, meningkatnya akses pasar bagi hasil pertanian, dan terbukanya peluang investasi swasta.

5. Transformasi Ekologi dan Ketahanan Lingkungan, menjadi penopang utama keberlanjutan pembangunan Keerom yang berbatasan langsung dengan bentang hutan tropis Papua.
   - Ciri utama: penerapan ekonomi hijau, konservasi hutan adat, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal.
   - Contoh konkret: inisiatif hutan adat di Waris dan Yaffi, serta program agroforestri berbasis masyarakat.
   - Dampak transformasi: menjaga keseimbangan ekologis, mengurangi deforestasi, dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim.

6. Transformasi Integrasi Kewilayahan dan Lintas Batas. Sebagai kabupaten perbatasan dengan Papua Nugini, transformasi Keerom juga terlihat dari kemampuan mengelola wilayah perbatasan secara produktif dan aman.
   - Ciri utama: peningkatan koordinasi keamanan dan ekonomi lintas batas, serta penguatan diplomasi ekonomi lokal.
   - Contoh konkret: pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Waris, program kerjasama ekonomi mikro dengan desa-desa di PNG, dan pengawasan perdagangan lintas batas yang lebih tertib.
   - Dampak transformasi: stabilitas sosial-politik perbatasan, pening-katan daya saing produk lokal, serta pengakuan Keerom sebagai “beranda depan negara”.

7. Transformasi Pembiayaan Pembangunan, yang tercermin dari diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan.

- Ciri utama: pergeseran dari ketergantungan pada Dana Otsus dan DAU menuju optimalisasi PAD, kemitraan publik-swasta (KPBU), dan kerjasama internasional.
- Contoh konkret: eksplorasi proyek KPBU untuk air minum dan energi mikrohidro, serta peluang pendanaan dari World Bank dan ASEAN untuk program pembangunan perbatasan hijau.
- Dampak transformasi: keberlanjutan fiskal, inovasi pendanaan, dan percepatan capaian pembangunan daerah.

3.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, maka diperlukan langkah-langkah strategis, terarah dan berkesinambungan. Oleh karena itu, misi pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, sebagai pedoman operasional menjadi dasar perumusan tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029. Misi RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Terintegrasi dan Melayani.**

Membangun tata kelola pemerintahan bersih, transparan, terbuka, dan terintegrasi, menekankan pada pentingnya birokrasi yang responsif, efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, hingga ke kampung terpencil. Pemerintah Kabupaten Keerom menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan sistem pemerintahan modern, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Pemantapan tata kelola diarahkan menciptakan pemerintahan terintegrasi kelembagaan, perencanaan, penganggaran, maupun pengawasan dan mampu memberikan pelayanan cepat, transparan, partisipatif, berkeadilan kepada seluruh masyarakat. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diarahkan prinsip *one data, one planning, dan one budgeting* tercipta efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik.

Pemerintahan terintegrasi melalui peningkatan sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), penerapan sistem digital pemerintahan berbasis elektronik *(e-government)* dan konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelayanan publik dengan membangun sistem layanan mudah diakses, cepat, terstandar, responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Keerom berkomitmen memperluas jangkauan layanan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif. Prinsip *good governance*, tata kelola pemerintahan mencakup peningkatan integritas aparatur sipil negara, penguatan sistem pengawasan internal, penegakan kode etik pelayanan publik.

2. **Memantapkan Mutu Sumber Daya Manusia Putra-Putri Papua yang Berkualitas, Menguasai IPTEK, Berintegritas, Kreatif dan Inovatif, Berdaya Saing Global dan Inovatif**.

Peningkatan mutu pendidikan semua jenjang, pengembangan pelatihan vokasional berbasis kebutuhan dunia kerja dan pemberdayaan generasi muda sebagai agen perubahan daerah. Melalui SDM unggul, Keerom mampu membangun masa depan kompetitif, inklusif dan berkelanjutan. Pada konteks mutu pendidikan dimaksudkan sebagai standart kompetensi SDM dicapai melalui penguasaan IPTEKS.

Pemerintah Kabupaten Keerom menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai Fokus strategis adalah memantapkan mutu sumber daya manusia putra-putri Papua, menjadi pelaku utama pembangunan daerah dan nasional. Upaya mencakup peningkatan kualitas pendidikan formal dan nonformal, penguatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK),

serta pembentukan karakter berintegritas. Pembangunan SDM diarahkan meningkatkan capaian akademik, tetapi juga untuk menumbuhkan kreativitas, inovasi dan keterampilan relevan kebutuhan dunia kerja.

Dalam kerangka ini, generasi muda Kabupaten Keerom, tidak hanya menjadi objek tetapi subjek pembangunan aktif, kreatif dan adaptif dalam menghadapi tantangan global. Pengembangan potensi lokal didorong melalui pelatihan vokasional, kewirausahaan, pemanfaatan teknologi digital sebagai alat transformasi sosial dan ekonomi. Komitmen memperluas akses pendidikan wilayah perbatasan dan terpencil.

Program-program afirmatif pendidikan, siswa, mahasiswa dan tenaga pendidik asli Papua diperkuat, termasuk beasiswa, pelatihan, fasilitasi magang dan kerja sama antar lembaga. Pembangunan SDM Keerom unggul, kreatif dan inovatif merupakan modal utama dalam menciptakan daya saing daerah berkelanjutan. Kabupaten Keerom berupaya membentuk generasi emas Papua siap menghadapi era revolusi industri 4.0 dan mampu bersaing secara global, tanpa kehilangan jati diri dan nilai luhur budaya lokal.

3. Memantapkan Sistem Demokrasi, Hukum dan Hukum Adat.

Sistem politik agar membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik dan pengambilan keputusan. Penegakan hukum dilaksanakan secara adil, konsisten dan bebas diskriminasi, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Keberadaan hukum adat sebagai nilai dan tata kehidupan masyarakat lokal terus dilindungi, difasilitasi dan dikembangkan, tetap relevan sesuai perkembangan zaman serta mampu bersinergi dengan sistem hukum nasional.

Pemantapan sistem demokrasi dilakukan melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik, transparansi informasi pemerintahan, serta fasilitasi ruang dialog antara pemerintah dan warga secara inklusif. Pemerintah daerah juga terus mendorong keberfungsian lembaga legislatif daerah serta peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu, agar tercipta proses politik yang sehat, akuntabel, dan mencerminkan aspirasi rakyat.

Di sisi lain, penegakan hukum agenda penting mewujudkan keadilan sosial, mencegah penyalahgunaan kewenangan serta perlindungan hukum untuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten Keerom, berupaya memperkuat koordinasi aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang hukum, memastikan akses masyarakat terhadap bantuan hukum, khususnya kelompok rentan. Hukum adat diposisikan sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, menghormati nilai-nilai lokal, norma budaya, serta kearifan tradisional masyarakat adat di Kabupaten Keerom.

Pemerintah daerah, berupaya menjaga eksistensi hukum adat melalui pengakuan terhadap hak-hak ulayat, fasilitasi kelembagaan adat, dan integrasi dalam sistem penyelesaian konflik sosial secara damai. Dengan demikian, pemantapan demokrasi, hukum dan adat bukan hanya instrumen tata kelola, melainkan fondasi moral dan struktural mewujudkan masyarakat Kabupaten Keerom demokratis, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, baik dalam perspektif negara maupun kearifan lokal.

Integrasi hukum adat di Kabupaten Keerom mencerminkan perjalanan menuju model pluralisme hukum yang konstruktif, di mana hukum negara dan hukum adat tidak saling meniadakan, tetapi saling melengkapi dalam menjaga keadilan sosial, harmoni, dan identitas lokal. Dengan langkah yang konsisten, Keerom dapat menjadi model nasional integrasi hukum adat di wilayah perbatasan berlandaskan prinsip pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan. Pada konteks itu, integrasi hukum adat berakar pada pengakuan konstitusional bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai

perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI dan tercermin dalam undang-undang otonomi khusu bagi Provinsi Papua dan terjemahannya di dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang memberi ruang legal bagi eksistensi lembaga adat dan hukum adat. Dengan dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Keerom memiliki legitimasi untuk mengintegrasikan norma, lembaga, dan praktik hukum adat dalam sistem pemerintahan dan hukum nasional.

4. Meningkatkan Moda Transportasi, Konektifitas Antara Wilayah dan Infrastruktur Dasar.

Untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan membangun jaringan transportasi andal dan terintegrasi, khususnya wilayah terpencil, terluar dan perbatasan. Prioritas diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan akses terhadap listrik, air bersih, sanitasi layak, serta perluasan konektivitas digital melalui jaringan internet. Dengan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, diharapkan tercipta konektivitas yang efektif antar wilayah untuk mendukung distribusi logistik, pelayanan dasar, dan pemerataan pembangunan antar distrik.

Pemerintah Kabupaten Keerom menempatkan infrastruktur, moda transportasi dan konektivitas antarwilayah, sebagai salah satu prioritas strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Infrastruktur yang memadai tidak hanya menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi, tetapi juga memainkan peran penting memperkuat integrasi wilayah, mempercepat pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di daerah terpencil, perbatasan dan pedalaman.

Peningkatan moda transportasi darat dan udara dilakukan untuk mengatasi keterisolasian wilayah, memperkuat aksesibilitas antar kampung, distrik, dan pusat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki dan membangun jalan strategis kabupaten, sarana transportasi umum yang terjangkau dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan konektivitas antarwilayah juga diarahkan untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, membuka akses pasar hasil pertanian dan UMKM, serta mendukung mobilitas tenaga kerja dan kegiatan sosial masyarakat. Konektivitas yang baik juga memperkuat integrasi antara pusat pelayanan dasar dengan wilayah hinterland, sehingga mempercepat pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan pemerintahan.

Dari aspek jaringan telekomunikasi seluler dengan telkomsel, setelah diresmikan BTS 4G di Desa Sawyatami, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom oleh BAKTI Kominfodari sebanyak 91 kampung, hampir 50 kampung telah terpasang internet (akses jaringan 4G), belum mencapai akses 5G. Sementara itu, Pemerintah Provinsi telah juga mengumpulkan data rumah tidak layak huni di kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Keerom) dalam konteks program 3 Juta Rumah. Dan, melalui program TMMD di Kampung Yuwainda, Distrik Waris, Keerom, dibangun 13 unit rumah layak huni pada 2019.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan telekomunikasi menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Keerom secara bertahap akan memperluas cakupan layanan dasar ini, dengan prioritas pada wilayah yang selama ini masih tertinggal atau minim akses infrastruktur. Dengan demikian, peningkatan moda transportasi, konektivitas, dan infrastruktur dasar menjadi landasan utama dalam membangun daya saing wilayah, memperkuat inklusi sosial, serta mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di seluruh pelosok Kabupaten Keerom.

5. Memantapkan Inovasi Dan Daya Saing.

Dengan mendorong terbentuknya ekosistem inovatif kolaboratif dan inklusif, melibatkan generasi muda, pelaku usaha, kalangan akademisi, serta lembaga penelitian dan pengembangan. Inovasi diarahkan untuk mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperkuat kapasitas pelaku ekonomi lokal. Upaya ini didukung dengan pengembangan produk-produk unggulan berbasis potensi lokal memiliki nilai tambah dan daya saing, sehingga mampu menjangkau pasar lebih luas baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Inovasi menjadi pendorong utama mempercepat efisiensi pelayanan publik, mendukung tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi, serta menciptakan solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan di daerah perbatasan dan wilayah tertinggal. Pemerintah daerah berupaya membangun ekosistem inovasi yang inklusif melalui penguatan peran perguruan tinggi, lembaga riset, sektor swasta dan masyarakat sipil. Di sisi lain, peningkatan daya saing dilakukan dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, seperti potensi pertanian, perikanan, pariwisata berbasis budaya dan kekayaan alam lainnya. Pemerintah Kabupaten Keerom, mendorong hilirisasi komoditas unggulan, digitalisasi UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar terbuka.

Penguatan kapasitas inovatif juga diarahkan pada kalangan muda, pelaku usaha mikro melalui pelatihan, inkubasi bisnis, serta adopsi teknologi sesuai dengan karakteristik lokal. Dukungan terhadap paten lokal, desain kreatif dan teknologi tepat guna, menjadi bagian penting strategi daerah meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi.

Dengan demikian, pemantapan inovasi dan daya saing tidak hanya dipahami sebagai upaya peningkatan teknologi dan produksi, tetapi juga sebagai landasan budaya kerja baru progresif, adaptif dan berorientasi hasil. Transformasi diharapkan mampu mendorong Keerom menjadi daerah tumbuh berkelanjutan, inklusif dan siap menghadapi tantangan masa depan secara mandiri.

6. Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan yang Berkelanjutan.

Percepatan pembangunan ekonomi berbasis sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, kehutanan serta ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Pengembangan ekonomi dilakukan secara terpadu dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Pemerintah daerah memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat, mendorong hilirisasi produk lokal dan memperluas akses pasar melalui inovasi serta digitalisasi.

Pembangunan ekonomi yang berorientasi keberlanjutan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menjaga daya dukung lingkungan untuk generasi mendatang. Kabupaten Keerom memiliki berbagai potensi strategis, sektor pertanian, peternakan, perikanan air tawar, serta sumber daya kehutanan dan pariwisata alam-budaya. Seluruh potensi ini diarahkan untuk dikelola secara produktif dan bernilai tambah melalui penguatan kelembagaan petani dan nelayan, peningkatan akses terhadap teknologi dan permodalan, serta dukungan infrastruktur ekonomi dan pasar terintegrasi.

Percepatan pembangunan ekonomi, menyasar pengembangan kawasan ekonomi lokal, kawasan ekonomi kampung dan potensi perbatasan negara sebagai simpul pertumbuhan baru. Pemerintah daerah akan mendorong terjadinya kolaborasi multipihak dalam pengembangan agrobisnis, agroindustry dan ekonomi kreatif. Keberlanjutan menjadi fondasi utama dalam

pembangunan ekonomi Keerom, dengan memastikan bahwa pertumbuhan tidak mengorban-kan lingkungan hidup, memperhatikan keberlanjutan sosial budaya, menjamin keberlangsungan antar generasi. Oleh karena itu, setiap program pembangunan ekonomi akan dilengkapi dengan pendekatan pengelolaan risiko lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan penguatan sistem pemantauan.

Dengan demikian, percepatan pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan berkelanjutan tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan PDRB daerah, tetapi membangun struktur ekonomi yang tangguh, berdaya saing dan berwawasan lingkungan, guna mewujudkan Keerom sebagai daerah yang mandiri secara ekonomi dan berdaya secara sosial.

7. Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Kawasan Khusus.

Sebagai daerah di wilayah strategis nasional, Kabupaten Keerom memiliki tanggung jawab sekaligus peluang dalam mengelola kawasan perbatasan dan kawasan khusus sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian ini, diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, memperkuat keamanan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Pembangunan kawasan, dilakukan dengan pendekatan afirmatif dan holistik melibatkan seluruh pemangku kepentingan, guna memastikan kehadiran negara secara nyata dan merata hingga ke titik terluar wilayah. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan kawasan khusus diharapkan dapat memperkuat posisi strategis Keerom, meningkatkan integrasi nasional, menumbuhkan pusat pertumbuhan baru inklusif dan berdaya saing.

Pemerintah Kabupaten Keerom secara strategis menempatkan percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan kawasan khusus sebagai agenda prioritas dalam kerangka pemerataan pembangunan, penguatan kedaulatan negara, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai daerah berbatasan langsung dengan PNG, Keerom memiliki posisi geopolitik memerlukan perhatian khusus pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, ekonomi lokal dan keamanan wilayah.

Kawasan perbatasan, menghadapi tantangan keterisolasian, ketimpangan akses terhadap pelayanan publik, terbatasnya peluang ekonomi. Oleh karena itu, percepatan pembangunan difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, fasilitas pendidikan dan kesehatan, jaringan komunikasi menjangkau seluruh kampung di wilayah perbatasan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Keerom memperkuat pembangunan ekonomi lokal di kawasan perbatasan melalui pengembangan sentra produksi pertanian, peternakan, UMKM dan perdagangan lintas batas yang legal dan berdaya saing. Penguatan sistem logistik, pasar lokal, dan pemberdayaan masyarakat adat menjadi strategi utama dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berbasis pada potensi lokal. Kawasan khusus seperti wilayah adat, wilayah rawan bencana, dan wilayah dengan kerentanan sosial mendapatkan perlakuan afirmatif perencanaan pembangunan. Pendekatan yang digunakan bersifat holistik, berbasis partisipasi masyarakat dan mengedepan-kan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya.

Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan kawasan khusus merupakan bentuk nyata kehadiran negara, yang tidak hanya berorientasi pembangunan fisik, tetapi memperkuat integrasi sosial, memperluas akses keadilan dan menumbuhkan rasa bangga sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, mekanisme koordinasi formal untuk program lintas batas dikoodinasikan secara intensif dengan Pemerintah Provinsi Papua, termasuk kerjasama kemitraan dengan Pemerintah dan masyarakat Papua Nugini.

3.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan RPJMD Kabupaten Keerom, merupakan pernyataan umum menggambarkan kondisi ideal berdasarkan penjabaran misi pembangunan Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029. Mencerminkan arah strategis Kabupaten Keerom dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan aktual dan tantangan jangka menengah Tahun 2025-2029. Sementara itu, sasaran pembangunan daerah dirumuskan sebagai hasil yang lebih spesifik, terukur ditetapkan secara hirarkis berdasarkan tujuan pembangunan Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029.

Tabel 3.5.
Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Keerom dalam Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029

Visi: "Keerom Maju yang Transformatif, Mandiri, Bermartabat dan Berkelanjutan"	
Misi-1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Terintegrasi dan Melayani.	
Tujuan-1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan secara Terintegrasi, Profesional dan Adaptif	
Sasaran-1	Terwujudnya Kualitas Layanan Publik, didukung dengan Perluasan Layanan Publik Melalui Pemekaran Kampung dan Distrik, serta Adaptif Berbasis E-Government
Sasaran-2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Efektifitas
Misi-2. Memantapkan Mutu Sumber Daya Manusia Putra-Putri Papua yang Berkualitas, Menguasai IPTEK, Berintegritas, Kreatif dan Inovatif, Berdaya Saing Global dan Inovatif.	
Tujuan-1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Menjangkau Putra-Putri Papua	
Sasaran-1	Terwujudnya Tatakelola, Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan Berkualitas dan Merata
Sasaran-2	Terwujudnya Derajat Kesehatan Untuk Semua Masyarakat
Tujuan-2 Mewujudkan Daya Saing Sosial dan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendidikan Kreatif dan Pengembangan Skill Berbasis IPTEK	
Sasaran-1	Terwujudnya Produktifitas Sumber Daya Manusia Melalui Pemanfaatan Inovasi Daerah
Sasaran-2	Terwujudnya Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Afirmatif bagi Masyarakat
Misi-3. Memantapkan Sistem Demokrasi, Hukum dan Hukum Adat.	
Tujuan-1 Mewujudkan Demokrasi, Hukum, Ke-tentraman dan Ketertiban Berbasis pada Kohesifitas Sosial dan Harmonisasi Keberagaman Potensi Kehidupan Masyarakat	
Sasaran-1	Terwujudnya Ruang Demokrasi dan Hukum dalam Pembangunan Daerah
Sasaran-2	Terwujudnya Keamanan, Ketertiban, Keharmonisan dan Kohesivitas Masyarakat
Sasaran-3	Terwujudnya Masyarakat yang mengedepankan Nilai-Nilai Kebudayaan dan Kearifan Lokal
Misi-4. Meningkatkan Moda Transportasi, Konektifitas Antara Wilayah dan Infrastruktur Dasar.	
Tujuan-1 Mewujudkan Akses Infrastruktur Dasar, untuk mendukung Daya Saing Daerah dan Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Khusus	
Sasaran-1	Terwujudnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar
Sasaran-2	Terwujudnya Uttilitas Infrastruktur Pemerintahan, Perkotaan dan Produktifitas Ekonomi Daerah
Misi-5. Memantapkan Inovasi Dan Daya Saing.	
Tujuan-1 Mewujudkan Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Pelayanan Publik	
Sasaran-1	Terwujudnya Inovasi Pelayanan Publik Untuk Mengurangi Ketimpangan Pembangunan antar Kampung, Distrik dan Ibukota

Misi-6. Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan yang Berkelanjutan.	
Tujuan-1 Mewujudkan Struktur Perekonomian Daerah secara Inklusif di Topang dengan Inovasi Sektor Unggulan	
Sasaran-1	Terwujudnya Produktifitas Sektor Unggulan Ramah Lingkungan dan Inklusif
Sasaran-2	Terwujudnya Distribusi Barang dan Jasa melalui Daya Saing Perdagangan
Sararan-3	Terwujudnya Pengendalian dan Stabilitas Ekonomi, serta Nilai Modal Investasi Daerah
Tujuan-2 Mewujudkan Ekonomi Daerah Berbasis Ekologi dan Pengawasan Lingkungan Hidup	
Sasaran-1	Terwujudnya Kesadaran Ekosistem dan Pengendalian Lingkungan Hidup
Sasaran-2	Terwujudnya Resiliensi Masyarakat Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Misi-7. Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Kawasan Khusus.	
Tujuan-1 Mewujudkan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Sentra Pertanian dan Pangan Berbasis Afirmatif dan Holistik	
Sasaran-1	Terwujudnya Afirmasi Tata Kelola Perbatasan RI-PNG, melalui Pemberdayaan Pemerintah Distrik serta Pemenuhan Pelayanan Dasar
Sasaran-2	Sentra Produksi Sektor Unggulan dan Produk Pangan, didukung dengan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Pendukung serta Riset dan Inovasi Teknologi

Sumber: Musrenbang RPJMD, Tahun 2025

Strategi ini merupakan upaya kongkrit menuju puncak hirarki Visi Pembangunan Keerom 2025-2029, Tujuan dan Sasaran Pembangunan ditetapkan berdasarkan statement spesifik dari Misi Pembangunan. Tujuan memberikan implikasi adanya pendekatan THIS perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Keerom. Sedangkan penetapan hirarki Sasaran pembangunan adalah wujud kongkrit pendektan spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Sasaran Pembangunan konsekuensi hasil akhir konkret dan menjadi panduan untuk mencapai puncak hirarki Visi Pembangunan Keerom 2025-2029.

Sasaran Pembangunan menjadi dasar dalam mengukur keberhasilan implementasi tujuan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program prioritas. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dikedepankan aspek manajemen risiko sebagai tindak lanjut dalam koordinasi pembangunan nasional dan daerah di Kabupaten Keerom, sebagaimana diatur di dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2023. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, mendorong proaktivitas entitas, mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta memberikan keyakinan dalam menghadapi ketidakpastian melalui penerapan sistem manajemen risiko yang terintegrasi di berbagai tingkatan pemerintahan. Pada konteks ini, dikembangkan strategi pembangunan budaya risiko untuk membangun budaya risiko yang kuat di seluruh instansi pemerintah dengan penyusun pedoman dan kerangka kerja di dalam MRPN (Matriks Rencana Pembangunan Nasional) lintas sektor, serta penentuan *pilot project.*

Tabel 3.6
Tujuan dan Sasaran Misi 1 RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan & Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline	Target Kinerja 2025-2030						Urusan Pemerintahan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
T1	**Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan secara Terintegrasi, Profesional dan Adaptif**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**1.13**	**1.61**	**2.08**	**2.56**	**3.03**	**3.51**	**3.99**	
		Indeks Pelayanan Publik	**Indeks**	**42.06**	**42.85**	**43.64**	**47.03**	**51.42**	**55.81**	**60.20**	
		Indeks Akses Keuangan Daerah	**Indeks**	**2.50**	**2.82**	**3.14**	**3.60**	**4.06**	**4.53**	**4.99**	
S1	Terwujudnya Kualitas Layanan Publik, didukung dengan Perluasan Layanan Publik Melalui Pemekaran Kampung dan Distrik, serta Adaptif Berbasis E-Government	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	71.00	71.32	73.65	75.98	78.31	80.64	82.97	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DRPD	%	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
		Indeks SPBE	Indeks	1.14	1.69	1.94	2.29	2.64	2.99	3.34	Komunikasi dan Informatika
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	Indeks	100	100	100	100	100	100	100	Kearsipan
		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	1.12	1.22	1.32	1.64	1.96	2.29	2.61	Keuangan
S2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Efektifitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	100	100	100	100	100	100	100	Perencanaan
		Persentase Keselarasan RPJMD terhadap RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	Perencanaan
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Keuangan
		Ketepatan Penetapan Perda APBD	Kriteria	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Sekretariat DPRD
		Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Kriteria	2.29	2.408	2.526	2.644	2.842	3.020	3.128	Pengawasan
		Indeks Pembangunan Stististik	Indeks	100	100	100	100	100	100	100	Statistik

Sumber: Musrenbang RPJMD, Tahun 2025

Tabel 3.7
Tujuan dan Sasaran Misi 2 RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan & Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline	Target Kinerja 2025-2030						Urusan Pemerintahan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
T1	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Menjangkau Putra-Putri Papua**	**Indeks Modal Manusia**	**Indeks**	**0.44**	**0.46**	**0.48**	**0.50**	**0.52**	**0.54**	**0.56**	
		Harapan Lama Sekolah	**Tahun**	**12.46**	**12.61**	**12.76**	**12.91**	**13.06**	**13.21**	**13.36**	
		Umur Harapan Hidup	**Tahun**	**67.24**	**67.62**	**68.00**	**68.38**	**68.76**	**69.14**	**69.52**	
S1	Terwujudnya Tatakelola, Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan Berkualitas dan Merata	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi dan Numerasi	%	37.06	40.81	44.56	48.31	52.06	55.81	59.56	Pendidikan
		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.57	8.73	8.89	9.05	9.21	9.37	9.53	Pendidikan
		Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	40.22	42.22	44.22	46.22	48.22	50.22	52.22	Pendidikan
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	67.34	68.32	69.3	70.28	71.26	72.24	73.22	Perpustakaan
S2	Terwujudnya Derajat Kesehatan Untuk Semua Masyarakat	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	18.80	18.80	17.50	16.30	15.20	14.20	11.80	Kesehatan
		Angka Kematian Ibu	per 10.000	4	0	0	0	0	0	0	Kesehatan
		Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.78	≥0.80	≥0.80	≥0.80	≥0.80	≥0.80	≥0.80	Kesehatan
		Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	100	100	100	100	100	100	100	Kesehatan
		Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	40.00	42.50	44.50	46.00	50.00	51.50	54.00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Nilai	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan & Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline	Target Kinerja 2025-2030						Urusan Pemerintahan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
T2	**Mewujudkan Daya Saing Sosial dan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendidikan Kreatif dan Pengembangan Skill Berbasis IPTEK**	Tingkat Kemiskinan	%	15.68	15.23	14.98	14.53	14.40	14.27	14.14	
		Indeks Literasi Digital	Indeks	1.84	1.96	2.07	2.19	3.58	3.78	3.88	
S1	Terwujudnya Produktifitas Sumber Daya Manusia Melalui Pemanfaatan Inovasi Daerah	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	%	43.35	48.35	53.35	58.35	63.35	68.35	73.35	Tenaga Kerja
		Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	87.12	89.62	92.12	94.62	97.12	99.62	100	Tenaga Kerja
		Persentase UMKM yang menggunakan Aplikasi Digital	%	21.70	26.70	31.70	36.70	41.70	46.70	51.70	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Komunikasi dan Informatika
S2	Terwujudnya Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Afirmatif bagi Masyarakat	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	18.84	16.27	15.42	14.56	11.99	10.28	9.42	Sosial
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	63.87	66.37	68.37	69.87	73.87	75.37	77.87	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber: Musrenbang RPJMD, Tahun 2025

Tabel 3.8
Tujuan dan Sasaran Misi 3 RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan & Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline	Target Kinerja 2025-2030						Urusan Pemerintahan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
T1	**Mewujudkan Demokrasi, Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Berbasis pada Kohesifitas Sosial dan Harmonisasi Keberagaman Potensi Kehidupan Masyarakat**	**Indeks Demokrasi Indonesia**	**Indeks**	**67.64**	**69.97**	**72.30**	**76.63**	**78.96**	**81.29**	**81.62**	
		Indeks Reformasi Hukum	**Indeks**	**70.00**	**76.33**	**82.66**	**86.99**	**89.32**	**100**	**100**	
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	**Indeks**	**44.97**	**49.18**	**53.39**	**57.60**	**62.81**	**64.97**	**67.18**	
S1	Terwujudnya Ruang Demokrasi dan Hukum dalam Pembangunan Daerah	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	68.88	69.91	71.15	73.38	75.61	77.26	78.29	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	76.46	77.49	78.73	80.96	83.19	83.87	84.90	Pemerintahan Umum
		Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	63.44	64.47	65.71	67.94	70.17	76.66	77.69	Kepemudaan dan Olahraga
		Indeks Partisipasi Olahraga	Indeks	53.33	54.36	55.60	57.83	60.06	66.55	67.58	Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	Pemerintahan Umum
S2	Terwujudnya Keamanan, Ketertiban, Keharmonisan dan Kohesifitas masyarakat	Persentase Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	69.31	71.64	73.97	77.30	80.63	86.69	87.52	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase Perda atau Perkada yang	%	47.44	49.77	52.10	55.43	58.76	63.22	64.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan & Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline	Target Kinerja 2025-2030						Urusan Pemerintahan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		ditegakkan									Serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Tanah Ulayat yang di Tetapkan	%	58.8	72.13	85.46	98.79	100	100	100	Pertanahan
S3	Terwujudnya Masyarakat yang mengedepankan Nilai-Nilai Kebudayaan dan Kearifan Lokal	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	52.21	56.42	60.63	64.84	70.05	72.21	74.42	Kebudayaan
		Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	40.50	44.71	48.92	53.13	58.34	60.50	62.71	Kebudayaan
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang di Tetapkan	%	42.70	46.91	51.12	55.33	60.54	62.70	64.91	Kebudayaan

Sumber: Musrenbang RPJMD, Tahun 2025

Tabel 3.9
Tujuan dan Sasaran Misi 4 RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan & Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline	Target Kinerja 2025-2030						Urusan Pemerintahan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
T1	**Mewujudkan Akses Infrastruktur Dasar, untuk mendukung Daya Saing Daerah dan Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Khusus**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	**Indeks**	**3.06**	**3.138**	**3.22**	**3.29**	**3.37**	**3.45**	**3.53**	
S1	Terwujudnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	Persentase Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	%	63.2	65.76	68.32	70.88	73.44	76	78.56	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Rumah Tangga Terhadap Hunian Layak	%	83.31	85.87	88.43	90.99	93.55	96.11	98.67	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan	%	57.22	59.78	62.34	64.9	67.46	70.02	72.58	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik (PLN dan non PLN)	%	75.55	78.33	81.11	83.90	86.68	89.46	92.24	Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Telepone dan Internet	%	50.14	54.37	58.59	62.82	67.05	71.28	75.50	Komunikasi dan Informatika
		Mobilitas penduduk	Per 10.000 Penduduk	0.503	0.536	0.568	0.600	0.633	0.665	0.698	Perhubungan

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan & Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline	Target Kinerja 2025-2030						Urusan Pemerintahan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
S2	Terwujudnya Uttilitas Infrastruktur Pemerintahan, Perkotaan dan Produktifitas Ekonomi Daerah	Rasio Aksesibilitas	Per 10.000 Penduduk	0.4802	0.513	0.545	0.577	0.610	0.642	0.675	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Pemukiman Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Uttilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100	100	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah Perkotaan	%	≥30%	≥30%	≥30%	≥30%	≥30%	≥30%	≥30%	Lingkungan Hidup
		Persentase Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	%	52.30	56.53	60.76	64.99	69.22	73.45	77.68	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber: Musrenbang RPJMD, Tahun 2025

Tabel 3.10
Tujuan dan Sasaran Misi 5 RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan & Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline	Target Kinerja 2025-2030						Urusan Pemerintahan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
T1	**Mewujudkan Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Pelayanan Publik**	**Indeks Inovasi Daerah**	**Indeks**	**44.55**	**45.89**	**50.23**	**56.57**	**57.91**	**62.25**	**66.59**	
		Indeks Daya Saing Daerah	**Indeks**	**3.060**	**3.084**	**3.108**	**3.132**	**3.156**	**3.180**	**3.304**	
		Indeks Gini	**Indeks**	**0.396**	**0.372**	**0.348**	**0.334**	**0.320**	**0.296**	**0.292**	
S1	Terwujudnya Inovasi Pelayanan Publik Untuk Mengurangi Ketimpangan Pembangunan antar Kampung, Distrik dan Ibukota	Persentase UMKM yang menggunakan Aplikasi Digital	%	30.00	35.34	42.68	48.02	55.36	62.70	70.04	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata
		Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Rp Juta	32,258,065	33,670,530	35,082,995	46,495,460	57,907,925	69,320,390	80,732,855	Tenaga Kerja
		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	1.900	1.923	2.135	2.348	2.661	2.974	3.286	Komunikasi dan Informatika
		Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	43.22	44.56	49.90	56.24	60.58	66.92	73.26	Penelitian dan Pengembangan
		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Penelitian dan Pengembangan
		Persentase Usulan Musrenbang Distrik terakomodir dalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	Perencanaan, Kewilayahan
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	18.89	25.41	41.69	61.24	84.04	93.81	100.00	Sosial

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan & Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline	Target Kinerja 2025-2030						Urusan Pemerintahan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Persentase Usia Lanjut Terlantar Kebutuhan Dasarnya	%	12.99	15.54	25.48	38.22	76.43	89.17	100.00	Sosial
		Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	100	Pertanahan
		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	25.00	25.00	30.00	35.00	45.00	50.00	60.00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	50.00	50.00	75.00	100	100	100	100	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Kampung Mandiri	Kampung	1	2	5	8	11	14	14	Pemberdayan Masyarakat dan Kampung

Sumber: Musrenbang RPJMD, Tahun 2025

Tabel 3.11
Tujuan dan Sasaran Misi 6 RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan & Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline	Target Kinerja 2025-2030						Urusan Pemerintahan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
T1	**Mewujudkan Struktur Perekonomian Daerah secara Inklusif di Topang dengan Inovasi Sektor Unggulan**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**3.20**	**3.34**	**3.48**	**3.55**	**3.63**	**3.71**	**3.89**	
		PDRB Perkapita	**Rp Juta**	**32.148**	**37.292**	**40.275**	**42.692**	**44.399**	**46.619**	**49.416**	
		Angka Deflator PDRB	**Nilai**	**157.63**	**155.03**	**152.43**	**149.83**	**147.23**	**144.63**	**142.03**	
		Kontribusi Terhadap PDRB Provinsi Papua	**%**	**4.34**	**4.47**	**4.51**	**4.58**	**4.66**	**4.74**	**4.81**	
S1	Terwujudnya Produktifitas Sektor Unggulan Ramah Lingkungan dan Inklusif	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian Terhadap PDRB	%	30.23	34.99	39.74	44.50	49.25	54.01	58.77	Pertanian
		Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	5.52	5.66	5.80	5.97	6.35	6.73	7.10	Industri
		Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Terhadap PDRB	%	0.98	1.12	1.26	2.43	3.61	3.79	4.96	Pariwisata
		Kontribusi Komoditas Peternakan Terhadap PDRB	%	20.23	24.99	29.74	35.24	40.74	46.24	51.74	Pertanian
		Angka Konsumsi Ikan	Per Kapita	38.483	38.48	40.48	40.48	42.48	44.48	46.48	Kelautan dan Perikanan
S2	Terwujudnya Distribusi Barang dan Jasa melalui Daya Saing Perdagangan	Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB	%	8.37	13.97	19.57	25.17	30.77	36.37	41.97	Perdagangan
		Kontribusi UMKM dan Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB	%	25.70	30.46	35.21	39.97	44.72	49.48	54.24	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata
		Persentase kebijakan berbasis bukti dalam pengembangan potensi	%	35.50	41.10	46.70	52.30	57.90	63.50	69.10	Penelitian dan Pengambangan

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan & Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline	Target Kinerja 2025-2030						Urusan Pemerintahan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		unggulan daerah									
S3	Terwujudnya Pengendalian dan Stabilitas Ekonomi, serta Nilai Modal Investasi Daerah	Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Kriteria	23.40	28.16	32.91	37.67	42.42	47.18	51.94	Sekretariat Daerah
		Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	67.22	69.82	72.42	75.02	77.62	80.22	82.82	Perdagangan
		Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB	%	36.56	41.32	46.07	50.83	55.58	60.34	60.34	Penanaman Modal
T2	**Mewujudkan Ekonomi Daerah Berbasis Ekologi dan Pengawasan Lingkungan Hidup**	**Indeks Ekonomi Hijau Daerah**	**Indeks**	**72.45**	**73.75**	**75.05**	**76.35**	**77.65**	**78.95**	**80.25**	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**Indeks**	**68.11**	**69.04**	**69.97**	**70.90**	**71.83**	**72.76**	**73.69**	
S1	Terwujudnya Kesadaran Ekosistem dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Nilai	59.28	57.98	56.68	54.38	52.08	49.78	47.48	Lingkungan Hidup
		Efektifitas partisipasi masyarakat adat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pplh	%	40.20	47.50	54.80	62.10	69.40	84.70	100	Lingkungan Hidup
		Persentase Sampah yang dikelola TPA/TPST Regional	%	60.14	65.44	70.74	76.04	81.34	86.64	86.97	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase penyelesaian kasus penyelenggaraan pemanfaatan ruang	%	100	100	100	100	100	100	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan & Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline	Target Kinerja 2025-2030						Urusan Pemerintahan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
S2	Terwujudnya Resiliensi Masyarakat Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks risiko bencana	Indeks	127.03	121.73	116.43	111.13	105.83	100.53	95.23	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		Efektifitas pengelolaan hutan adat	Kriteria	38.80	54.10	69.40	84.70	100	100	100	Lingkungan Hidup
		Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	100	100	100	100	100	100	100	Sosial
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Sumber: Musrenbang RPJMD, Tahun 2025

Tabel 3.12
Tujuan dan Sasaran Misi 7 RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan & Sasaran pembangunan	Satuan	Baseline	Target Kinerja 2025-2030						Urusan Pemerintahan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
T1	**Mewujudkan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Sentra Pertanian dan Pangan Berbasis Afirmatif dan Holistik**	**Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP)**	**Indeks**	**0.134**	**0.143**	**0.159**	**0.204**	**0.295**	**0.340**	**0.396**	
S1	Terwujudnya Afirmasi Tata Kelola Perbatasan RI-PNG, melalui Pemberdayaan Pemerintah Distrik serta Pemenuhan Pelayanan Dasar	Cakupan penguatan ideologi dan karakter kebangsaan wilayah perbatasan	%	87.45	88.494	89.934	91.374	92.814	94.254	95.694	Unsur Pemeritahan Umum
		Persentase aparatur pemerintah distrik kawasan perbatasan, mendapatkan pengembangan kompetensi dasar dan manajerial	%	23.45	26.24	31.03	34.82	39.61	45.40	51.19	Unsur Pendidikan dan Pelatihan
		Tingkat Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan RI-PNG	Kriteria	Cukup Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Pengelolaan Perbatasan
		Tingkat pengawasan pelayanan pendidikan dan kesehatan kawasan perbatasan	Kriteria	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Kewilayahan
S2	Terwujudnya Kawasan Sentra Produksi Sektor Unggulan dan Produk Pangan, didukung dengan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Pendukung serta Riset	Indeks ketahanan pangan	Indeks	76-100	76-100	76-100	76-100	76-100	76-100	76-100	Pangan
		Produktifitas tanaman pangan dan holtikultura	Ton/Ha	0.04	0.33	0.62	0.91	1.20	1.49	1.50	Pertanian
		Produktifitas pangan hewani	Ton	0.18	0.47	0.76	1.05	1.34	1.63	1.92	Pangan
		Persentase produk inovasi pertanian dan pangan yang dimanfaatkan	%	31.45	34.83	42.06	44.48	47.03	49.74	52.60	Urusan Pertanian

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan & Sasaran pembangunan	Satuan	Baseline	Target Kinerja 2025-2030						Urusan Pemerintahan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dan Inovasi Teknologi	Persentase izin usaha pertanian dan pangan yang di terbitkan	%	32.00	35.12	38.54	42.30	46.43	50.95	55.92	Perindusterian
		Persentase promosi produk lokal pertanian dan pangan yang di fasilitasi/ dilaksanakan	%	45.50	46.75	48.50	50.81	52.21	53.64	55.12	Perdagangan

Sumber: Musrenbang RPJMD, Tahun 2025

3.4. Strategi dan Arah Kebijakan

3.4.1. Strategi

Dalam rangka menciptakan pembangunan Kabupaten Keerom lima tahun kedepan 2025-2029 lebih terarah dan berdampak pada "Percepatan dan Pemerataan" bagi lapisan masyarakat, terlebih khusus masyarakat asli Kabupaten Keerom. Maka substansi perumusan strategi dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, berdasarkan pada pemetaan permasalahan dan isu strategis daerah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua dan Nasional.

Grand Strategi pembangunan daerah Kabupaten Keerom periode tahun 2025-2029 didasarkan pada suatu rangkaian intervensi mengarah pada perwujudan **"Keerom Maju yang Transformatif, Mandiri, Bermartabat dan Berkelanjutan"** perumusan strategi pembangunan Kabupaten Keerom, memperhatikan beberapa nilai dasar pembangunan yaitu Religius, Karya Karsa, dan Sosial Budaya, sesuai dengan semangat Kwembo Kentkei, Girgura Kensuwri.

Gambar 3.1
Skenario Strategi Pembangunan Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029



Sumber: Musrenbang RPJMD, Tahun 2025

Skenario dasar strategi pembangunan tahun 2025-2029 mendatang di Kabupaten Keerom ialah: (1) Perlindungan dan Keberpihakan, (2) Pemberdayaan dan Pendampingan, (3) Kewilayahan Strategis, (4) Digitalisasi Pelayanan Publik dan (5) Keberlanjutan. Konsistensi rumusan dasar RPJMD Keerom Tahun 2025-2029 mengacu pada Strategi Utama pada dokumen RPJPD Keerom Tahun 2025-2045 dan Rumusan Strategi Operasional berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Keerom Tahun 2025-2029.

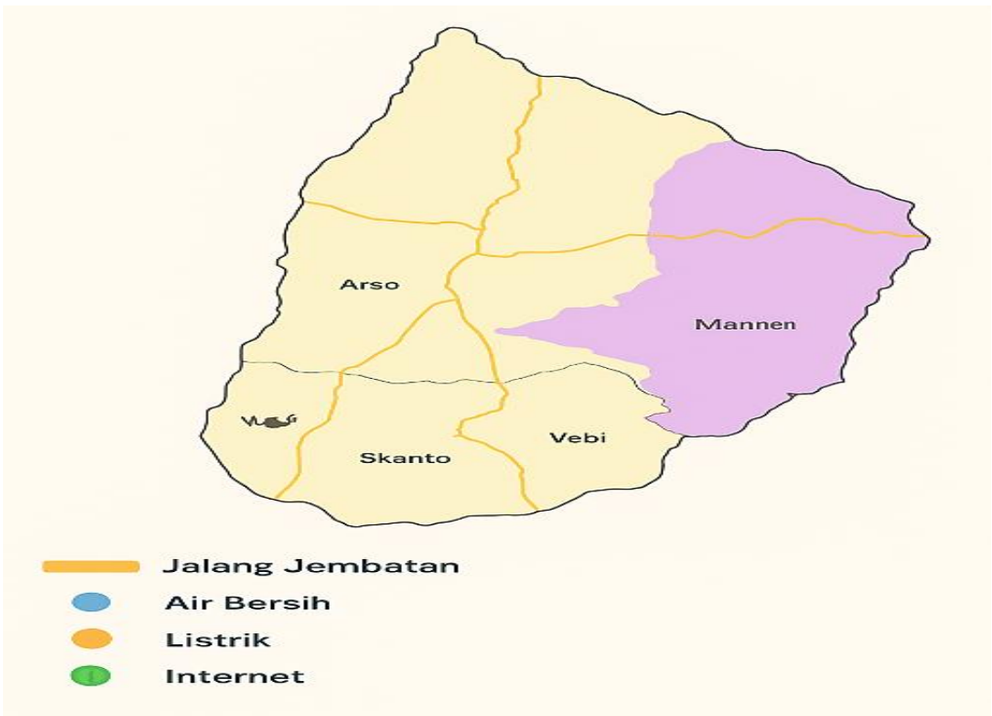
3.4.1.1. Strategi dan Pendekatan RPJPD Keerom Tahun 2025-2045

Untuk memastikan bahwa Kabupaten Keerom menjadi daerah yang tangguh secara ekonomi, inovatif, dan berkelanjutan, serta mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan nasional.

Untuk Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Keerom, melalui strategi dasar: Mengadopsi teknologi hijau dan digitalisasi untuk mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata. Memberdayakan OAP sebagai pelaku utama dalam pengembangan ekonomi lokal Kabupaten Keerom dengan meningkatkan keterampilan, akses permodalan, dan inovasi. Pendekatan Dasar: Penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif, dengan fokus pada keterlibatanOAP sebagai penggerak utama; pengembangan pariwisata berbasis ekowisata yang melibatkan OAP dalam manajemen dan promosi, serta melindungi kearifan lokal dan budaya Kabupaten Keerom.

Untuk Pengembangan Infrastruktur di Kabupaten Keerom, melalui Strategi Dasar: Membangun dan memperkuat infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah Kabupaten Keerom, seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, energi, dan telekomunikasi, dengan memprioritaskan akses bagi OAP di daerah terpencil Kabupaten Keerom. Pendekatan Dasar: Peningkatan konektivitas infrastruktur yang menghubungkan komunitas OAP pada tingkat Kampung, wilayah adat dengan pusat-pusat ekonomi; pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan energi terbarukan di wilayah terpencil, memastikan akses yang merata bagi OAP Kabupaten Keerom.

Gambar 3.2
Strategi Operasional dan Teknis Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029



Sumber: Pemerintah Kabupaten Keerom, Tahun 2025

Strategi operasional dan teknis luntuk pengembangan telekomunikasi pedesaan dan energi tenaga surya (PLTS/PLTS-microgrid/SHS) di distrik-distrik Kabupaten Keerom yang belum terjangkau jaringan PLN, dijelaskan tujuannya Adalah memperluas akses digital (4G/Internet dasar) ke kampung-kampung 3T sebagai prasyarat layanan publik digital, pendidikan, kesehatan jarak jauh dan pemasaran UMKM, memberikan akses listrik andal berbasis PLTS/PLTS-hybrid untuk kebutuhan rumah tangga dasar dan kegiatan produktif skala kecil sampai ada jaringan PLN, serta menyusun model layanan berkelanjutan (teknis dan finansial) yang dapat dikelola oleh koperasi, Pokmas, Pokdarwis dengan dukungan OPD dan mitra.

Tabel 3.13
Peta tematik lokasi prioritas pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Keerom Basis kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten,

Sektor	Komponen Utama	Skala Prioritas
Transportasi Darat	Jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten strategis, dan jembatan penghubung lintas distrik	Prioritas Nasional & Provinsi
Air Bersih & Sanitasi	SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK), sumur bor, dan jaringan distribusi	Prioritas Provinsi

Sektor	Komponen Utama	Skala Prioritas
	air minum	
Energi & Kelistrikan	Jaringan PLN dan PLTS komunal di distrik belum berlistrik (Waris, Towe, Web, Yaffi)	Prioritas Nasional
Telekomunikasi & Internet	BTS 4G/5G program BAKTI Kominfo di kampung 3T dan wilayah perbatasan PNG	Prioritas Nasional
Perumahan & Permukiman	Rumah layak huni, kawasan padat, dan permukiman transmigrasi	Prioritas Provinsi
Kawasan Perbatasan & Ekonomi	Pos Lintas Batas Negara (PLBN Skouw-Waris), kawasan perdagangan dan pertanian berbasis batas negara	Prioritas Nasional

Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua, 2023, BPS Keerom 2024, Kementerian Kominfo / BAKTI, 2024, BNPP RI, 2023, Kementerian PUPR-Ditjen Bina Marga, 2024

Tabel 3.14
Peta Tematik Lokasi Prioritas Pembangunan Infrastruktur Per Distrik Di Kabupaten Keerom Basis Kebijakan Nasional, Provinsi & Kabupaten

Distrik	Fokus Infrastruktur	Status Prioritas
Arso	Akses jalan nasional dan jaringan air bersih perkotaan	Nasional
Skanto	Perumahan padat dan SPAM IKK Skanto	Provinsi
Waris	PLTS komunal dan BTS 4G	Nasional
Senggi	Jalan penghubung distrik dan jembatan gantung	Provinsi
Web	Air bersih dan jaringan PLTS	Nasional
Towe	BTS 4G, jalan desa, dan rumah layak huni	Nasional
Yaffi	Jembatan dan perumahan 3T	Provinsi
Kaisenar	Jalan produksi pertanian dan SPAM lokal	Kabupaten
Arso Timur	Akses lintas batas dan perumahan transmigrasi	Nasional

Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua, 2023, BPS Keerom 2024, Kementerian Kominfo / BAKTI, 2024, BNPP RI, 2023, Kementerian PUPR-Ditjen Bina Marga, 2024

Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Keerom, melalui Strategi Dasar: Meningkatkan kualitas SDM OAP Kabupaten Keerom melalui pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi masa depan, serta memperkuat nilai-nilai budaya lokal. Pendekatan Dasar: Meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas bagi OAP Kabupaten Keerom, serta memastikan keterlibatan mereka dalam pengembangan program pendidikan berbasis lokal; mendorong keterampilan kewirausahaan dan inovasi berbasis teknologi di kalangan anak muda OAP Kabupaten Keerom, khususnya di sektor ramah lingkungan dan keberlanjutan Kabupaten Keerom.

Untuk Pemerintahan dan Hukum di Kabupaten Keerom, melalui Strategi Dasar: Memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, dengan melibatkan OAP Kabupaten Keerom dalam pengambilan keputusan publik dan pelaksanaan pembangunan di Keerom. Pendekatan Dasar: Mendorong partisipasi aktif OAP Kabupaten Keerom dalam pemerintahan dan penegakan hukum, serta melibatkan mereka dalam program pembangunan wilayah berbasis adat Kabupaten Keerom; Pemberdayaan masyarakat OAP Kabupaten Keerom melalui pendekatan budaya dalam penyelesaian konflik, serta mendorong sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat OAP untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kabupaten Keerom.

3.4.1.2. Strategi RPJMD Keerom Tahun 2025-2029

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, dilaksanakan melalui strategi serta memiliki kaitan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi pembangunan ini merupakan panduan menentukan prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan Kabupaten Keerom. Rumusan Strategi Pembangunan pada RPJMD Kabupaten keerom Tahun 2025-2029 diseleraskan dengan Sasaran Pembangunan berdasarkan 7 misi pembangunan daerah Kabupaten Keerom.

Perumusan Strategi RPJMD Keerom Tahun 2025-2029, memiliki keterkaitan dengan skenario strategi dasar serta rumusan Strategi pencapaian RPJPD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2045, artinya 20 tahun mendatang Kabupaten Keerom Sebagai Beranda Terdepan NKRI yang Sejahtera, Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan Berbasis Agroindustri dan Ekonomi Kreatif. Sehingga sesuai periodesassi tahap 1 RPJMD Keerom Tahun 2025-2029 rumusan Visi Pembangunan Keerom Maju yang Transformatif, Mandiri, Bermartabat dan Berkelanjutan dengan prinsip aspek transformasi Kabupaten Keerom 2025-2029: (1) Spritual, (2) Tatakelola, (3) Sosial, (4) Ekonomi, (5) Budaya, (6) IPTEK, (7) Ekologi Lingkungan dan (8) Demokrasi, tentunya proses perumusan strategi RPJMD 2025-2029 akan selaras dengan Tema Fonadasi Trasformasi pada Tahap 1 RPJPD Kabupaten Keerom 2025-2045.

Gambar 3.3
Kerangka Perumusan Strategi Pembangunan Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029



Sumber: Musrenbang RPJMD, Tahun 2025

Rumusan strategi pembangunan merupakan panduan menentukan prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Keerom. Merujuk pada Inmendagri 2/2025 bahwa perumusan Strategi mempertimbangkan Isu Strategis Daerah telah dijabarkan dalam Pokok Visi dan Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, selain itu juga strategi memberikan fokus atas Pencapaian rumusan Sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029. Sehingga berdasarkan Kerangka Perumusan Strategi Pembangunan Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, ditetapkan berdasarkan Kinerja Sasaran Daerah yang disajikan berdasarkan 7 Misi pembangunan Daerah, sehingga serasi atau selaras dengan rumusan Kebijakan Daerah merujuk Inmendagri 2/2025.

Misi 1: Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Terintegrasi dan Melayani, rumusan strategi pada misi 1 untuk mencapai 1 Tujuan dan 2 Sasaran Pembangunan, sebagai berikut:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan, melalui Kualitas Layanan Publik didukung dengan Birokrasi Adaprif Berbasis E-Government;

2. Mendorong Partisipasi Masyarakat secara Inklusif untuk Berpartisipasi dalam Perencanaan dan Pengawasan Pelayanan Publik;
3. Mempertahankan Kinerja Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui Pengawasan Tatakelola APBD serta Kemandirian Keuangan Daerah.

Misi 2: Memantapkan Mutu Sumber Daya Manusia Putra-Putri Papua yang Berkualitas, Menguasai IPTEK, Berintegritas, Kreatif dan Inovatif, Berdaya Saing Global dan Inovatif, rumusan strategi pada misi 2 untuk mencapai 2 Tujuan dan 2 Sasaran Pembangunan, sebagai berikut:

1. Memantapkan Tatakelola, Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan Berkualitas dan Merata, khususnya bagi OAP pada wilayah terpencil dan Perbatasan;
2. Memantapkan Upaya dan Derajat Kesehatan Perorangan atau keluarga/RT, khususnya bagi OAP pada wilayah terpencil dan Perbatasan;
3. Mendorong Produktifitas dan Daya Saing Sosial dan Ekonomi, melalui Pemanfaatan Inovasi Daerah dan IPTEK;
4. Memberikan Jaminan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Afirmatif bagi Masyarakat, khususnya bagi OAP pada wilayah terpencil dan Perbatasan.

Misi 3: Memantapkan Sistem Demokrasi, Hukum dan Hukum Adat, rumusan strategi pada misi 3 untuk mencapai 1 Tujuan dan 3 Sasaran Pembangunan, sebagai berikut:

1. Merawat Ruang Demokrasi dan Hukum dalam Pembangunan Daerah, melalui Kerukunan Umat Beragama serta Partisipasi Komunitas Masyarakat Adat;
2. Memperkuat Sumber Daya Manusia Pemuda Khususnya Kaum Milenial, melalui Partisipasi dalam Pembangunan dan Prestasi Daerah;
3. Memberikan Jamian Keamanan, Ketertiban, Keharmonisan dan Kohesifitas masyarakat, melalui Perlindungan dan Penegakan Peraturan Daerah (PERDA);
4. Mempercepat Tatakelola Hak Kepemilikan Tanah, khususnya bagi komunitas/masyarakat Adat serta batas wilayah administrasi
5. Memberdayakan Masyarakat untuk mengedepankan Nilai-Nilai Kebudayaan dan Kearifan Lokal.

Misi 4: Meningkatkan Moda Transportasi, Konektifitas antara Wilayah dan Infrastruktur Dasar, rumusan strategi pada misi 4 untuk mencapai 1 Tujuan dan 2 Sasaran Pembangunan, sebagai berikut:

1. Memberikan Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur jalan, air bersih, sanitasi, sarana perhubungan dan listrik, melalui partisipasi masyarakat dan Swasta dan Pemanfaatan Teknologi;
2. Mendorong Ketersediaan Uttilitas Infrastruktur Pemerintahan, Perkotaan dan pendukung Produktifitas Ekonomi Daerah;

Misi 5: Memantapkan Inovasi dan Daya Saing, rumusan strategi pada misi 5 untuk mencapai 1 Tujuan dan 1 Sasaran Pembangunan, sebagai berikut:

1. Menciptakan Kepuasaan Masyarakat terhadap layanan Publik, melalui Digitalisasi Pelayanan berbasis Riset dan Penelitian;
2. Mengurangi Ketimpangan antar Kampung, Distrik dan Ibukota Kabupaten, melalui inovasi identitas kependudukan, kampung mandiri dan Lansia

Misi 6: Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan yang Berkelanjutan, rumusan strategi pada misi 6 untuk mencapai 2 Tujuan dan 5 Sasaran Pembangunan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan up-skilling dan re-skilling SDM tenaga kerja lokal khususnya OAP, utamanya terkait pertanian;
2. Memperluas Area Tanam sesuai Tata Ruang, serta memantapkan Distribusi Benih dan Pupuk yang berkualitas pendukung Produktifitas Komoditas pertanian;
3. Mengendalikan Penyakit dan Hama serta penggunaan Teknologi Pertanian;
4. Memperkuat Akses Infrastruktur Pendukung Pertanian, peran distribusi dan Pemasaran Produk Pertanian;
5. Meningkatkan Industri Komoditas Unggulan Daerah, sebagai Daya Saing Struktur Ekonomi;
6. Menciptakan Tata Kelola Distribusi Barang dan Jasa, serta Menjaga Akses dan Jangkauan Kebutuhan Pokok;
7. Menstabilkan Harga Pangan, Kebutuhan Pokok melalui Pengendalian Inflasi Daerah;
8. Meningkatkan Peranan Pertumbuhan Ekonomi, berbasis Modal Tetap Bruto sebagai Keunggulan Daerah;
9. Meningkatkan Pengendalian dan Pencermaran Lingkungan, Melalui Kepatuhan Pemanfaatan Ruang dan Kesadaran Masyarakat;
10. Memantapkan kemampuan suatu komunitas atau kelompok masyarakat untuk Adaptasi Terhadap Lingkungan.

Misi 7: Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Kawasan Khusus, rumusan strategi pada misi 7 untuk mencapai 1 Tujuan dan 2 Sasaran Pembangunan, sebagai berikut:

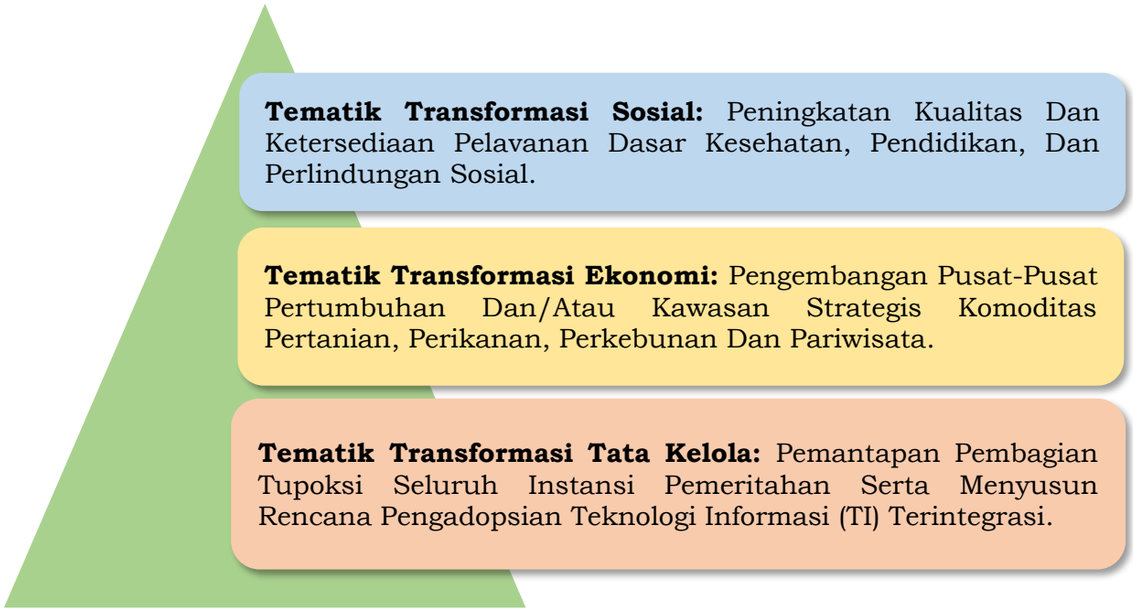
1. Meningkatkan Ideologi dan Karakter Kebangsaan Masyarakat, khususnya wilayah Perbatasan;
2. Memberikan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial untuk seluruh Aparatur Pemerintah Distrik;
3. Mempertahankan Ketahanan Pangan bagi Seluruh Masyarakat, Khususnya Bayi/Balita dan Usia Lansia;
4. Meningkatkan Inovasi Produksi Pertanian Berbasis Pada Komoditas dan Sektor Unggulan;
5. Membangun Sarana dan Prasarana di Kawasan Perbatasan RI-PNG

3.4.2. Arah Kebijakan

3.4.2.1. Arah Kebijakan RPJMD Keerom Tahun 2025-2029

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, disusun melalui kerangka kerja pencapaian Visi Keerom Maju yang Transformatif, Mandiri, Bermartabat dan Berkelanjutan. Penyusunan arah Kebijakan serasi dengan Strategi Pembangunan serta memperhatikan Fokus, Prioritas dan Tematik Tahapan 1 RPJPD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2045 dan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029.

Gambar 3.4
Tematik Membangun Fondasi Transformasi dan
Kebijakan Umum Kabupaten Keerom Tahap 1 Tahun 2025-2029



Sumber: Musrenbang RPJMD, Tahun 2025

RPJPD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2045 memberikan Tematik dan arah kebijakan Umum Tahap 1 untuk Membangun fondasi pembangunan yang kuat, terutama di sektor infrastruktur dasar, guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan stabilitas ekonomi, melalui Fokus Pembangunan:

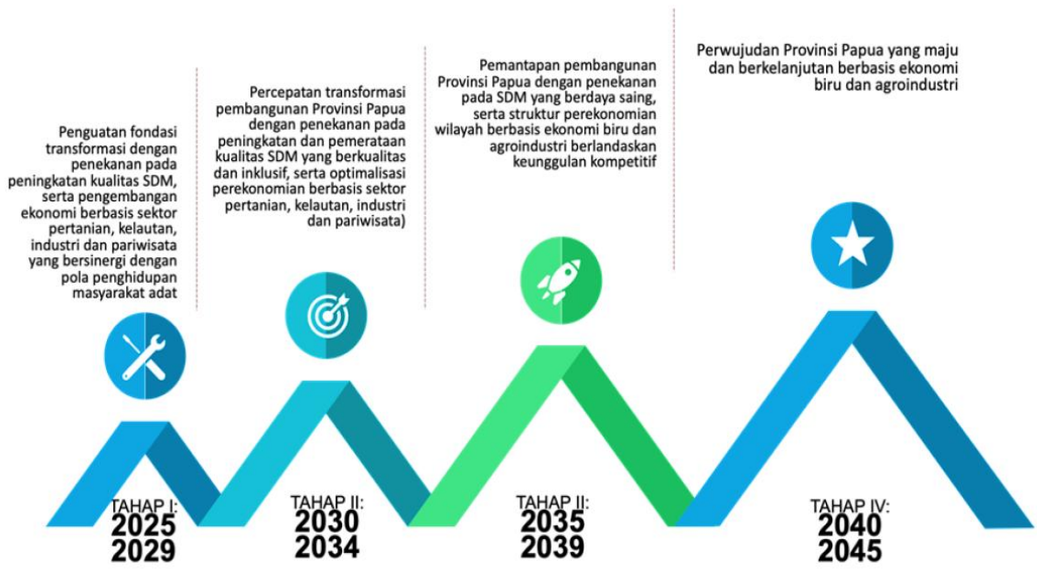
1. **Pengembangan Infrastruktur:** Pembangunan jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan sanitasi di daerah pedesaan dan terpencil. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah, mendukung aktivitas ekonomi, serta memperbaiki akses terhadap layanan dasar.

2. **Kesehatan dan Pendidikan:** Penyediaan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih merata, terutama di daerah terpencil. Peningkatan jumlah pusat kesehatan dan sekolah akan menjadi prioritas dalam mendukung kesejahteraan sosial masyarakat.

3. **Sosial dan Ekonomi:** Pelatihan keterampilan bagi masyarakat dalam sektor pertanian dan perikanan, serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan produktivitas lokal dan membuka akses ke pasar yang lebih luas.

4. **Lingkungan Hidup:** Konservasi lingkungan dengan mengutama-kan pelestarian hutan dan sumber daya alam sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Gambar 3.5
Tematik Membangun Fondasi Transfo5masi dan Kebijakan Umum Provinsi Papua Tahap 1 Tahun 2025-2029



Sumber: Pemerintah Provinsi Papua, RPJPD Tahun 2025-2045

Tahap pertama Provinsi Papua terwujud pada RPJMD Tahun 2025-2029, dengan **Tema Penguatan Fondasi Transformasi**: penekanan pada peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan ekonomi berbasis sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata yang bersinergi dengan pola penghidupan masyarakat adat. **Transformasi Sosial** akan berfokus pada upaya Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. **Transformasi Ekonomi** akan difokuskan pada upaya untuk Penguatan klaster-klaster ekonomi pertanian, kelautan, industri dan pariwisata dengan penekanan pada hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, pada saat yang sama juga akan diperkuat adanya **Transformasi Tata kelola** dengan Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

Berdasarkan rumusan strategi dan memperhatikan Tematik Tahap pertama RPJPD Kabupaten Keerom **Membangun Fondasi Transformasi** melalui arah kebijakan Umumuntuk Membangun fondasi pembangunan yang kuat, terutama di sektor infrastruktur dasar, guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan stabilitas ekonomi. Sedangkan Tematik RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029, dengan **Tema Penguatan Fondasi Transformasi**: penekanan pada peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan ekonomi berbasis sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata yang bersinergi dengan pola penghidupan masyarakat adat. Sehingga Arah kebijakan Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029 merupakan Fokus, Prioritas dan Tematik menjadi Pedoman dalam Penyusunan dokumen RKPD dan RENJA OPD Kabupaten Keerom periodesasi 2025-2029.

Selanjutnya, skema tematik pembangunan Kabupaten Keerom per tahun tersusun dengan mempertimbangkan program prioritas di atas. Pada tahapan pembangunan periode-I RPJPD Kabupaten Keerom untuk kurun waktu Tahun 2025-2029, berfokus pada pada penekanan pada peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan ekonomi berbasis sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata yang bersinergi dengan pola penghidupan masyarakat adat. Tercakup di dalam nya, berkenaan dengan intervensi kebijakan umum tentang aspek-aspek kesehatan dan pendidikan, sosial dan ekonomi, pengembangan

infrastruktur, dan lingkungan hidup. Dengan demikian, tahapan pembangunan jangka menengah periode I RPJPD Kabupaten Keerom, dirancang menurut kurun waktu tahunan secara bersinambungan, sebagaimana ditunjukkan berikut

Gambar 3.6
Tahapan Pembangunan Tematik Fondasi Transformasi
Kabupaten Keerom, Tahun 2025-2029



Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2025

Selanjutnya, untuk merelevansikan keterkaitan hubungan antara program prioritas dan isu strategis Kabupaten Keerom, dilakukan sikronisasi secara umum, sebagai berikut:

Tabel 3.15.
Keterhubungan Program Prioritas dan Isu Strategis Kabupaten Keerom

Prioritas Pembangunan	Kabupaten Keerom
1. Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik berbasis digital (SPBE) 2. Reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan secara adaptif dan fungsional 3. Peningkatan kapasitas aparatur dan penerapan sistem merit ASN 4. Perluasan akses layanan dasar di distrik perbatasan dan daerah tertinggal 5. Peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, dan gizi masyarakat 6. Perluasan jaminan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, anak, disabilitas) 7. Peningkatan literasi digital, vokasi, dan pendidikan karakter 8. Penguatan pelayanan dasar berbasis kampung dan distrik	• Akses Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Dan Pemberdayaan Gender Yang Belum Memadai • Melambatnya Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia • Masih Tingginya Tingkat Kriminalitas • Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimalnya Penurunan Tingkat Kemiskinan • Kemandirian fiskal daerah yang masih rendah • Rendahnya Daya Beli Rumah Tangga • Struktur Tenaga Kerja Masih Dominan Pada

Prioritas Pembangunan	Kabupaten Keerom
9. Pembangunan jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan internet hingga wilayah 3T Pemantapan infrastruktur transportasi umum dan fasilitas logistik daerah 10. Penyediaan hunian layak dan sanitasi berbasis kawasan 11. Pengembangan ruang publik hijau dan utilitas kawasan perkotaanPenguatan ketahanan pangan dan pengembangan sentra pertanian terpadu 12. Peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan UMKM serta promosi ekonomi kreatif 13. Hilirisasi produk unggulan berbasis desa dan digitalisasi UMKM 14. Penguatan koperasi, pasar rakyat, dan kewirausahaan 15. Penguatan ekosistem inovasi daerah melalui riset dan teknologi tepat guna 16. Penerapan prinsip ekonomi hijau dan energi terbarukan di sektor publik dan swasta 17. Integrasi data sektoral dan layanan publik berbasis satu data daerah 18. Transformasi pelayanan publik digital secara terstandar dan terintegrasi 19. Peningkatan kemandirian ekonomi kawasan perbatasan melalui sektor pangan dan energi 20. Penguatan ketangguhan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim 21. Penyediaan layanan dasar universal di wilayah terpencil 22. Evaluasi capaian RPJMD dan sinkronisasi awal RPJPD 2025-2029	Sektor-Sektor Dengan Tingkat Upah Yang Rendah • Perkembangan Investasi Daerah Yang Rendah • Tingginya Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Sumber: Musrenbang RPJMD, Tahun 2025

Tabel 3.16
Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Keerom dalam Pencapaian Sasaran Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029

Visi: Keerom Maju yang Transformatif, Mandiri,Bermartabat danBerkelanjutan					
Misi		**Sasaran**		**Strategi**	
1	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Terintegrasi dan Melayani	1	Terwujudnya Kualitas Layanan Publik, didukung dengan Perluasan Layanan Publik Melalui Pemekaran Kampung dan Distrik, serta Adaptif Berbasis E-Government	1	Memperkuat tata kelola pemerintahan, melalui Kualitas Layanan Publik didukung dengan Birokrasi Adaprif Berbasis E-Government;
		2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Efektifitas	2	Mendorong Partisipasi Masyarakat secara Inklusif untuk Berpartisipasi dalam Perencanaan dan Pengawasan Pelayanan Publik;
				3	Mempertahankan Kinerja Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui Pengawasan Tatakelola APBD serta Kemandirian Keuangan Daerah.
2	Memantapkan Mutu Sumber Daya Manusia Putra-Putri Papua yang Berkualitas, Menguasai IPTEK, Berintegritas, Kreatif dan Inovatif, Berdaya Saing Global dan Inovatif	1	Terwujudnya Tatakelola, Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan Berkualitas dan Merata	4	Memantapkan Tatakelola, Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan Berkualitas dan Merata, khususnya bagi OAP pada wilayah terpencil dan Perbatasan
		2	Terwujudnya Derajat Kesehatan Untuk Semua Masyarakat	5	Memantapkan Upaya dan Derajat Kesehatan Perorangan atau keluarga/RT, khususnya bagi OAP pada wilayah terpencil dan Perbatasan
		3	Terwujudnya Produktifitas Sumber Daya Manusia Melalui Pemanfaatan Inovasi Daerah	6	Mendorong Produktifitas dan Daya Saing Sosial dan Ekonomi, melalui Pemanfaatan Inovasi Daerah dan IPTEK
		4	Terwujudnya Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Afirmatif bagi Masyarakat	7	Memberikan Jaminan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Afirmatif bagi Masyarakat, khususnya bagi OAP pada wilayah terpencil dan Perbatasan

Visi: Keerom Maju yang Transformatif, Mandiri,Bermartabat danBerkelanjutan					
Misi		**Sasaran**		**Strategi**	
3	Memantapkan Sistem Demokrasi, Hukum dan Hukum Adat	1	Terwujudnya Ruang Demokrasi dan Hukum dalam Pembangunan Daerah	8	Merawat Ruang Demokrasi dan Hukum dalam Pembangunan Daerah, melalui Kerukunan Umat Beragama serta Partisipasi Komunitas Masyarakat Adat;
				9	Memperkuat Sumber Daya Manusia Pemuda Khususnya Kaum Milenial, melalui Partisipasi dalam Pembangunan dan Prestasi Daerah
		2	Terwujudnya Keamanan, Ketertiban, Keharmonisan dan Kohesifitas masyarakat	10	Memberikan Jamian Keamanan, Ketertiban, Keharmonisan dan Kohesifitas masyarakat, melalui Perlindungan dan Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)
		3	Terwujudnya Masyarakat yang mengedepankan Nilai-Nilai Kebudayaan dan Kearifan Lokal	11	Mempercepat Tatakelola Hak Kepemilikan Tanah, khususnya bagi komunitas/masyarakat Adat serta batas wilayah administrasi
				12	Memberdayakan Masyarakat untuk mengedepankan Nilai-Nilai Kebudayaan dan Kearifan Lokal.
4	Meningkatkan Moda Transportasi, Konektifitas antara Wilayah dan Infrastruktur Dasar	1	Terwujudnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	13	Memberikan Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur jalan, air bersih, sanitasi, sarana perhubungan dan listrik, melalui partisipasi masyarakat dan Swasta dan Pemanfaatan Teknologi;
		2	Terwujudnya Uttilitas Infrastruktur Pemerintahan, Perkotaan dan Produktifitas Ekonomi Daerah	14	Mendorong Ketersediaan Uttilitas Infrastruktur Pemerintahan, Perkotaan dan pendukung Produktifitas Ekonomi Daerah
5	Memantapkan Inovasi dan Daya Saing	1	Terwujudnya Produktifitas Sektor Unggulan Ramah Lingkungan dan Inklusif	15	Menciptakan Kepuasaan Masyarakat terhadap layanan Publik, melalui Digitalisasi Pelayanan berbasis Riset dan Penelitian;
				16	Mengurangi Ketimpangan antar Kampung, Distrik dan Ibukota Kabupaten, melalui inovasi identitas kependudukan, kampung mandiri dan Lansia

Visi: Keerom Maju yang Transformatif, Mandiri,Bermartabat danBerkelanjutan					
Misi		**Sasaran**		**Strategi**	
6	Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan yang Berkelanjutan	1	Terwujudnya Produktifitas Sektor Unggulan Ramah Lingkungan dan Inklusif	17	Meningkatkan up-skilling dan re-skilling SDM tenaga kerja lokal khususnya OAP, utamanya terkait pertanian;
				18	Memperluas Area Tanam sesuai Tata Ruang, serta memantapkan Distribusi Benih dan Pupuk yang berkualitas pendukung Produktifitas Komoditas pertanian;
				19	Mengendalikan Penyakit dan Hama serta penggunaan Teknologi Pertanian;
				20	Meningkatkan Industri Komoditas Unggulan Daerah, sebagai Daya Saing Struktur Ekonomi;
		2	Terwujudnya Distribusi Barang dan Jasa melalui Daya Saing Perdagangan	21	Menciptakan Tata Kelola Distribusi Barang dan Jasa, serta Menjaga Akses dan Jangkauan Kebutuhan Pokok;
				22	Memperkuat Akses Infrastruktur Pendukung Pertanian, peran distribusi dan Pemasaran Produk Pertanian;
				23	Menstabilkan Harga Pangan, Kebutuhan Pokok melalui Pengendalian Inflasi Daerah;
		3	Terwujudnya Pengendalian dan Stabilitas Ekonomi, serta Nilai Modal Investasi Daerah	24	Meningkatkan Peranan Pertumbuhan Ekonomi, berbasis Modal Tetap Bruto sebagai Keunggulan Daerah;
		4	Terwujudnya Kesadaran Ekosistem dan Pengendalian Lingkungan Hidup	25	Meningkatkan Pengendalian dan Pencermaran Lingkungan, Melalui Kepatuhan Pemanfaatan Ruang dan Kesadaran Masyarakat;
		5	Terwujudnya Resiliensi Masyarakat Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	26	Memantapkan kemampuan suatu komunitas atau kelompok masyarakat untuk Adaptasi Terhadap Lingkungan.
7	Percepatan Pembangunan	1	Terwujudnya Afirmasi Tata Kelola Perbatasan RI-PNG,	27	Meningkatkan Ideologi dan Karakter Kebangsaan Masyarakat, khususnya wilayah Perbatasan;

Visi: Keerom Maju yang Transformatif, Mandiri,Bermartabat danBerkelanjutan					
Misi		**Sasaran**		**Strategi**	
	Kawasan Perbatasan dan Kawasan Khusus		melalui Pemberdayaan Pemerintah Distrik serta Pemenuhan Pelayanan Dasar	28	Memberikan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial untuk seluruh Aparatur Pemerintah Distrik;
				29	Membangun Sarana dan Prasarana di Kawasan Perbatasan RI-PNG
		2	Terwujudnya Kawasan Sentra Produksi Sektor Unggulan dan Produk Pangan, didukung dengan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Pendukung serta Riset dan Inovasi Teknologi	30	Mempertahankan Ketahanan Pangan bagi Seluruh Masyarakat, Khususnya Bayi/Balita dan Usia Lansia;
				31	Meningkatkan Inovasi Produksi Pertanian Berbasis Pada Komoditas dan Sektor Unggulan;

Sumber: Musrenbang RPJMD, Tahun 2025

Tabel 3.17
Tema dan Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Keerom

Tahun	Tema	Makna Tema	Prioritas Pembangunan	
RKPD 2025	Pemantapan Kualitas Kehidupan Menuju Masyarakat Keerom yang Sejahtera, Bermartabat, dan Berkelanjutan	Tema ini menegaskan pentingnya pembangunan fondasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inklusif sebagai landasan utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tahun 2025 difokuskan sebagai periode konsolidasi awal, di mana arah pembangunan diarahkan pada peningkatan efektivitas birokrasi, perluasan layanan dasar di wilayah perbatasan, serta penguatan sistem data dan perencanaan yang berkeadilan.	1	Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik berbasis digital (SPBE)
			2	Reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan secara adaptif dan fungsional
			3	Peningkatan kapasitas aparatur dan penerapan sistem merit ASN
			4	Perluasan akses layanan dasar di distrik perbatasan dan daerah tertinggal
RKPD 2026	Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM Menuju Keerom yang Cerdas, Sehat, dan Tangguh Sosial	Tahun ini difokuskan pada peningkatan investasi pembangunan manusia melalui layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Keerom mendorong pemenuhan hak dasar seluruh warga, terutama kelompok rentan, dengan memperkuat intervensi gizi, pemberdayaan perempuan, dan akses layanan sosial inklusif.	5	Peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, dan gizi masyarakat
			6	Perluasan jaminan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, anak, disabilitas)
			7	Peningkatan literasi digital, vokasi, dan pendidikan karakter
			8	Penguatan pelayanan dasar berbasis kampung dan distrik
RKPD 2027	Pemerataan Akses Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Menuju Keerom yang Terhubung dan Setara	Fokus pembangunan tahun 2027 diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, terutama di daerah pedalaman dan perbatasan. Hal ini dimaksudkan untuk membuka isolasi wilayah dan menggerakkan aktivitas ekonomi lokal.	9	Pembangunan jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan internet hingga wilayah 3T
			10	Pemantapan infrastruktur transportasi umum dan fasilitas logistik daerah
			11	Penyediaan hunian layak dan sanitasi berbasis kawasan
			12	Pengembangan ruang publik hijau dan utilitas kawasan perkotaan
RKPD	Penguatan Ekonomi	Tahun ini diarahkan pada pengembangan sektor riil,	13	Penguatan ketahanan pangan dan pengembangan

Tahun	Tema	Makna Tema	Prioritas Pembangunan	
2028	Lokal dan UMKM untuk Kemandirian dan Daya Saing Daerah	terutama pertanian, UMKM, dan ekonomi kreatif lokal. Pemerintah daerah berfokus pada penciptaan nilai tambah, akses pasar, dan pembiayaan inklusif guna memperkuat struktur ekonomi daerah yang inklusif dan berbasis potensi lokal.		sentra pertanian terpadu
			14	Peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan UMKM serta promosi ekonomi kreatif
			15	Hilirisasi produk unggulan berbasis desa dan digitalisasi UMKM
			16	Penguatan koperasi, pasar rakyat, dan kewirausahaan
RKPD 2029	Transformasi Inovasi Daerah dan Implementasi Ekonomi Hijau Berbasis Teknologi	Tahun 2029 ditandai dengan akselerasi transformasi digital dan inovasi dalam pelayanan publik serta penerapan prinsip ekonomi hijau. Pemerintah mendorong tata kelola berbasis data, energi terbarukan, dan efisiensi sumber daya untuk keberlanjutan pembangunan.	17	Penguatan ekosistem inovasi daerah melalui riset dan teknologi tepat guna
			18	Penerapan prinsip ekonomi hijau dan energi terbarukan di sektor publik dan swasta
			19	Integrasi data sektoral dan layanan publik berbasis satu data daerah
			20	Transformasi pelayanan publik digital secara terstandar dan terintegrasi
RKPD 2030	Kemandirian Wilayah Perbatasan dan Ketangguhan Daerah Menghadapi Perubahan Global	Sebagai tahun konsolidasi akhir RPJMD, 2030 difokuskan untuk memperkuat kemandirian kawasan perbatasan RI-PNG melalui ketersediaan pangan, energi, dan layanan dasar. Pemerintah juga memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim serta menyiapkan transisi menuju RPJPD 2045.	21	Peningkatan kemandirian ekonomi kawasan perbatasan melalui sektor pangan dan energi
			22	Penguatan ketangguhan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim
			23	Penyediaan layanan dasar universal di wilayah terpencil
			24	Evaluasi capaian RPJMD dan sinkronisasi awal RPJPD 2025-2029

Sumber: Musrenbang RPJMD, Tahun 2025

Tabel 3.17
Arah Kebijakan Berdasarkan Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029

Misi		Arah Kebijakan		Keterangan
1	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Terintegrasi dan Melayani	1	Penguatan askes layanan publik pemekaran kampung dan/atau distrik	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		2	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital dan responsif	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		2	Penataan organisasi yang ramping dan adaptif	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		3	Penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		4	Penguatan manajemen ASN dan zona integritas	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		5	Penerapkan sistem merit dalam manajemen ASN dan menyusun rencana pengembangan kompetensi secara berkelanjutan	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		6	Pelaksanakan evaluasi dan reformasi kelembagaan untuk mendukung birokrasi yang adaptif dan responsif	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		7	Meningkatkan standar pelayanan kesekretariatan dan mengembangkan sistem penilaian kepuasan DPRD secara periodik	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		8	Penyediakan infrastruktur dan SDM TIK yang memadai serta memperluas adopsi layanan digital pemerintah	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		9	Pengintegrasikan aplikasi layanan publik dalam satu portal SPBE dan memperkuat tata kelola teknologinya	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		10	Penetapan kebijakan afirmatif peningkatan pendidikan ASN dan memberikan dukungan beasiswa	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		11	Penyediaan sistem monitoring dan evaluasi kearsipan serta penguatan SDM pengelola arsip daerah	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		12	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		13	Penggunaan data sektoral dalam penyusunan perencanaan dan memutakhirkan basis data pembangunan	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		14	Penerapan sistem monitoring perencanaan daerah secara digital dan memperkuat peran Bapprinda	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		15	Peningkatan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah dan penguatan	Prioritas Tujuan dan Sasaran

Misi		Arah Kebijakan		Keterangan
			pengawasan internal	
		16	Peningkatan efisiensi siklus perencanaan dan penganggaran serta mendorong kepatuhan regulasi	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		17	Peningkatan SPIP Level 3 melalui pembinaan intensif dan penguatan budaya integritas ASN	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		18	Penyediaan portal data statistik daerah dan meningkatkan koordinasi antar-OPD dalam pengelolaan data	Prioritas Tujuan dan Sasaran
2	Memantapkan Mutu Sumber Daya Manusia Putra-Putri Papua yang Berkualitas, Menguasai IPTEK, Berintegritas, Kreatif dan Inovatif, Berdaya Saing Global dan Inovatif	1	Penyediaan fasilitas perpustakaan dan pelatihan literasi digital	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		2	Pengembangan sumber daya manusia berdaya mengusai IPTEKS	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		3	Penyediaan kesehatan murah, terjangkau dan berkualitas;	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		4	Pemenuhan afirmasi pendidikan kedinasan, beasiswa dan komunitas	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		5	Pemberiaan jaminan ibu hamil dan persalinan	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		6	Pemberiaan jaminan hidup bagi lansia	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		7	Pembangunan sekolah unggulan SMP dan SMU	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		8	Pemberiaan jaminan social security OAP berbasis OTSUS	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		9	Pengembangan UMKM, KUR dan KUBE berbasis OTSUS	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		10	Pengembangan afirmasi pendidikan kedinasan, beasiswa dan komunitas	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		11	Pengembangan subsidi produktifitas petani	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		12	Pengembangan program keluarga harapan	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		13	Pembinaan anak terlantar dan penyandang masalah sosial	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		14	Pembangunan sekolah baru, peningkatan kompetensi guru, dan penyediaan beasiswa	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		15	Kolaborasi lintas sektor untuk pendidikan, kesehatan dan sosial	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		16	Penyediaan fasilitas perpustakaan dan pelatihan literasi digital	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		17	Optimalisasi layanan Puskesmas, imunisasi, dan gizi balita	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		18	Kolaborasi lintas sektor untuk pendidikan, kesehatan dan sosial	Prioritas Tujuan dan Sasaran

Misi		Arah Kebijakan		Keterangan
3	Memantapkan Sistem Demokrasi, Hukum dan Hukum Adat	19	Peningkatan cakupan layanan KB, penyediaan alat kontrasepsi gratis, edukasi perencanaan keluarga	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		20	Program padat karya, bantuan sosial terintegrasi, dan pelatihan keterampilan	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		21	Penyediaan fasilitas perpustakaan dan pelatihan literasi digital	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		22	Kolaborasi lintas sektor untuk pendidikan, kesehatan dan sosial	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		23	Pelatihan digitalisasi UMKM dan penyediaan akses internet	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		24	Perluasan akses pendidikan dan perlindungan perempuan dan anak	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		1	Pemberiaan jaminan akses hukum adat untuk perlindungan hak ulayat tanah;	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		2	Pemenuhan kerukunan antar umat beragama dan masyarakat	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		3	Penyediaan asuransi kesehatan dan insentif imam dan hamba-hamba tuhan	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		4	Pembentukan satlinmas kampung dan sistem deteksi dini gangguan ketertiban umum	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		5	Ruang dialog keagamaan serta dukungan fasilitator moderasi beragama	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		6	Forum kepemudaan daerah dan memberikan dukungan pelatihan dan kewirausahaan	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		7	Pembangunan infrastruktur olahraga yang merata dan program olahraga masyarakat	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		8	Pemberian pendampingan Ormas untuk berkontribusi pada pembangunan sosial	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		9	Peningkatan sistem keamanan lingkungan berbasis RT/RW dan patroli terpadu	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		10	Evaluasi tahunan terhadap efektivitas pelaksanaan perda dan penguatan peran Satpol PP	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		11	Pusat layanan terpadu korban kekerasan dan memperkuat jejaring lintas sektor	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		12	Inventarisasi tanah ulayat dan mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik agraria	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		13	Penyediaan dana untuk kegiatan seni budaya lokal dan peningkatan kapasitas seniman daerah	Prioritas Tujuan dan Sasaran

Misi		Arah Kebijakan		Keterangan
		14	Penyediaan unit pelestarian budaya di OPD terkait dan mendorong partisipasi komunitas budaya	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		15	Integrasi data cagar budaya dengan sistem informasi daerah dan menetapkan SK kepala daerah	Prioritas Tujuan dan Sasaran
4	Meningkatkan Moda Transportasi, Konektifitas antara Wilayah dan Infrastruktur Dasar	1	Pemantapan infrastruktur daerah penopang perekonomian daerah	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		2	Penyediaan akses kawasan pemukiman untuk petani	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		3	Pengembangan status bandara udara Senggih	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		4	peningkatan akses jalan dua jalur perkotaan Arso dan Waris	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		5	Penyediaan alun-alun, taman rekreasi dan kuliner kota	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		6	Modernisasi infrastrukur kawasan pemerintahan daerah hingga kampung	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		7	Pengelolaan moda transportasi publik perkotaan	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		8	Pengembangan kawasan ekonomi perkotaan	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		9	Penyediaan akses nternet gratis di area publik	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		10	Peningkatan akses air minum aman melalui pembangunan dan rehabilitasi sistem penyediaan air minum	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		11	Pengembangan hunian layak dan terjangkau melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan BUMN	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		12	Pemeliharaan dan peningkatan kemantapan jalan serta jembatan strategis antar wilayah	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		13	Penyediaan akses listrik merata hingga daerah terpencil melalui energi terbarukan dan jaringan PLN	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		14	Peningkatan akses dan kualitas layanan telekomunikasi dan internet bagi Publik	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		15	Penguatan layanan transportasi umum untuk meningkatkan mobilitas masyarakat	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		16	Rehabilitasi dan perawatan bangunan gedung milik pemerintah daerah secara berkala	Prioritas Tujuan dan Sasaran

Misi		Arah Kebijakan		Keterangan
		17	Pembangunan permukiman lengkap dengan PSU melalui perencanaan terpadu	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		18	Penyediaan dan perlindungan ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		19	Penertiban administrasi bangunan melalui peningkatan pelayanan perizinan bangunan	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		20	Pengembangan konektivitas wilayah melalui pembangunan jaringan transportasi integratif	Prioritas Tujuan dan Sasaran
5	Memantapkan Inovasi dan Daya Saing	1	Pengembangan dan penerapan riset dan inovasi daerah sebagai dasar pelaksanaan layanan pubkik	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		2	Pengembangan pusat kreativitas kaum milenial (creativity hub)	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		3	Pengembangan wirausaha muda dan usaha berbasis teknologi digital (start up)	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		4	Pengembangan kompetisi kreativitas, inovasi, olah raga dan seni	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		5	Pemanfaatan aplikasi digital untuk mendukung produktivitas dan pasar UMKM	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		6	Pengembangan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan digital dan inovatif	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		7	Peningkatan infrastruktur dan literasi TIK untuk mendorong pembangunan berbasis digital	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		8	Mendorong pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk mendukung program pembangunan	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		9	Penguatan peran pemerintah daerah dalam fasilitasi dan pembinaan inovasi lokal	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		10	Peningkatkan kualitas perencanaan partisipatif melalui Musrenbang berbasis digital	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		11	Penguatan layanan sosial bagi anak terlantar melalui integrasi program dan database kependudukan	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		12	Perluasan jaminan sosial dan layanan kesehatan bagi lansia terlantar	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		13	Penyelesaian konflik pertanahan melalui mediasi, advokasi, dan digitalisasi data	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		14	Peningkatan cakupan kepemilikan identitas digital sebagai basis pelayanan dasar	Prioritas Tujuan dan Sasaran

Misi		Arah Kebijakan		Keterangan
		15	Peningkatan cakupan administrasi kependudukan anak untuk perlindungan hak sipil	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		16	Pemberdayaan kampung berbasis potensi lokal dan integrasi program lintas sektor	Prioritas Tujuan dan Sasaran
6	Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan yang Berkelanjutan	1	Pengembangan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan lokal;	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		2	Pengembangan ketahanan ekologi dan adaptasi perubahan iklim;	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		3	Pengembangan ekonomi hijau berbasis komoditas lokal;	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		4	Pengembangan peremajaan sawit rakyat;	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		5	Pengembangan bidang unggulan perikanan, peternakan, pertanian dan holtikultura	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		6	Peningkatan industri pengolahan pendukung komoditas unggulan	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		7	Peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM tenaga kerja lokal khususnya OAP, utamanya terkait pertanian;	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		8	Perluasan area tanam sesuai tata ruang, serta memantapkan distribusi benih dan pupuk yang berkualitas pendukung produktifitas komoditas pertanian;	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		9	Pengendalian penyakit dan hama serta penggunaan teknologi pertanian;	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		10	Perkuat akses infrastruktur pendukung pertanian, peran distribusi dan pemasaran produk pertanian;	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		11	Penigkatan industri komoditas unggulan daerah, sebagai daya saing struktur ekonomi;	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		12	Peningkatan objek pariwisata berbasis alam dan kebudayaan	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		13	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana akomoditasi dan promosi penunjang objek pariwisata	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		14	Pemenuhan akses konsumsi ikan bagi masyarakat, sebagai akses gizi dan kesehatan masyarakat	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		15	Pemenuhan akses konsumsi daging masyarakat, sebagai akses kecukupan gizi dan kesehatan masyarakat	Prioritas Tujuan dan Sasaran

Misi		Arah Kebijakan		Keterangan
		16	Pengembangan kawsasan agrowisata berkelanjutan	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		17	Pemenuhan tata kelola, sarana prasarana pasar	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		18	Peningkatan ases kebutuhan pokok kehidupan sosial masyarakat	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		19	Pemanfaatan media berbasis online promosi dan perdagangan komoditas unggulan	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		20	Percepatan ekonomi kreatif bagi UMKM, untuk mendukung perdagangan komoditas unggulan	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		21	Pelaksanaan penelitian, pengembangan, riset model ekonomi kreatif berbasis produk lokal	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		22	Peningkatan kebijakan pengelolaan dan pembangunan perekonomian daerah	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		23	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		24	Penguatan kelembagaan dan pembiayaan berkelanjutan	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		25	Peningkatan riset dan inovasi, untuk nilai tambah produk unggulan daerah	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		26	Pengembangan kawasan atau sentra produksi dan industri komoditas unggulan daerah	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		27	Peningkatan akses dan iklim investasi yang kondusif dan menjalin kerjasama antar pemerintah dan daerah	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		28	Pengendalian, pengawasan dan perlindungan kawasan konserwati	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		29	Pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam perlindungan hayati	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		30	Partisipasi masyarakat adat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		31	Penyediaan ruang terbuka hijau area perkotaan	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		32	Pengelolaan sampah rumah tangga dan industri	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		33	Pengendalian ketaatan pembangunan daerah sesuai dengan RTRW, dengan mengacu pada prinsip keberlanjutan	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		34	Pendidikan, sosialisasi dan pengendalian risiko bencana	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		35	Peningkatan partisipasi masyarakat adat untuk pengelolaan hutan adat	Prioritas Tujuan dan Sasaran

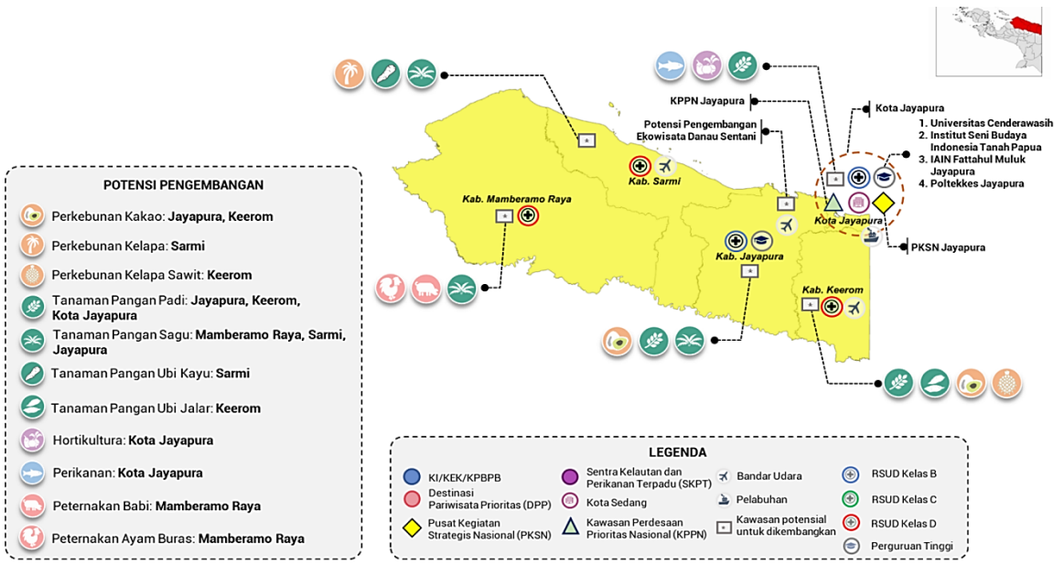
Misi		Arah Kebijakan		Keterangan
		36	Pendidikan dan sosialisasi masyarakat di daerah rawan bencana	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		37	Peningkatan tata kelola penanganan tanggap darurat bencana	Prioritas Tujuan dan Sasaran
7	Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Kawasan Khusus	1	Pembangunan kawasan perbatasan dan kawasan khusus	Utama Bupati dan Wakil Bupati
		2	Peningkatan pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan bagi seluruh masyarakat, dengan prioritas wilayah perbatasan	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		3	Mempercepat pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan RI-PNG	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		4	Pengawasan pelayanan pendidikan dan kesehatan kawasan perbatasan	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		5	Pelaksanaan pelatihan kompetensi bagi seluruh aparatur pemerintah distrik	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		6	Pengawasan pelaksanaan pelayanan publik dasar di seluruh kampung	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		7	Pengawasan pelayanan pendidikan dan kesehatan kawasan perbatasan	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		8	Pemenuhan ketersediaan dan akses distribusi pangan bagi masyarakat	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		9	Pemanfaatan, stabilitas dan pengetahuan masyarakat tentang praktik kebutuhan pangan dan gizi	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		10	Pengendalian harga faktor produksi pertanian dan pangan	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		11	Pemenuhan akses infrastruktur pendukung untuk produktifitas komoditas unggulan	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		12	Pemenuhan riset dan inovasi teknologi untuk mendukung produktifitas pangan dan pertanian	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		13	Pelaksanaan promosi dan izin usaha produk lokal pertanian dan pangan	Prioritas Tujuan dan Sasaran
		14	Penyedian kuliner pangan lokal untuk mendukung ekonomi kreatif	Prioritas Tujuan dan Sasaran

Sumber: Musrenbang RPJMD, Tahun 2025

3.4.2.2. Arah Kebijakan Kewilayahan

Dokumen RIPPP memuat uraian visi dan misi percepatan pembangunan Papua, indikator sasaran percepatan pembangunan Papua, arah kebijakan dan strategi percepatan pembangunan Papua, kondisi perlu, pengarusutamaan, arah kebijakan dan strategi percepatan pembangunan tiap wilayah adat, serta tahapan percepatan pembangunan Papua. Dokumen RIPPP juga memuat uraian prioritas dan fokus pembangunan selama tahun 2022-2041 dalam rangka mencapai sasaran Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif (termasuk kondisi perlu) dan lokasi prioritas pembangunan wilayah adat.

Gambar 3.7
Peta Pengembangan Wilayah Mamta



Sumber: Perpres No.23 Tahun 2023 (Lampiran 1.RIPPP)

Papua memiliki wilayah adat mencakup 2 wilayah berada di ruang darat dan maupun laut yaitu Wilayah adat Mamta dan wilayah adat Saireri Secara budaya, keduanya memiliki otoritas dalam kepemilikan dan penguasaan Wilayah Adat tersebar beberapa kabupaten/kota. Kabupaten Keerom Termasuk pada Wilayah Adat Mamta. Perpres Nomor 23 Tahun 2023 Wilayah Adat ini memiliki Karakteristik geografis: pesisir dan dataran rendah, Potensi wilayah: kakao, kelapa, kelapa sawit, padi, sagu, ubi kayu, ubi jalar, hortikultura, perikanan, peternakan, industri, perdagangan, jasa dan pariwisata.

Arah kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, merupakan keselarasan dengan dokumen Spasial RTRW Kabupaten Keerom Tahun 2023-2042. Perumusan arah Kebijakan Kewilayahan menjadi konsekuensi perwujudan struktur ruang dan pola ruang kawasan yang produktif, berdaya saing dan beridentitas. Konteks ini sesuai makna Pokok Visi Keerom Berkelanjutan 2025-2029. Menata pembangunan daerah secara konsisten dan berkesinambungan, termasuk kawasan perbatasan dan khusus, menjamin keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Sesuai arahan kebijakan strategis RTRW Kabupaten Keerom Tahun 2023-2042.

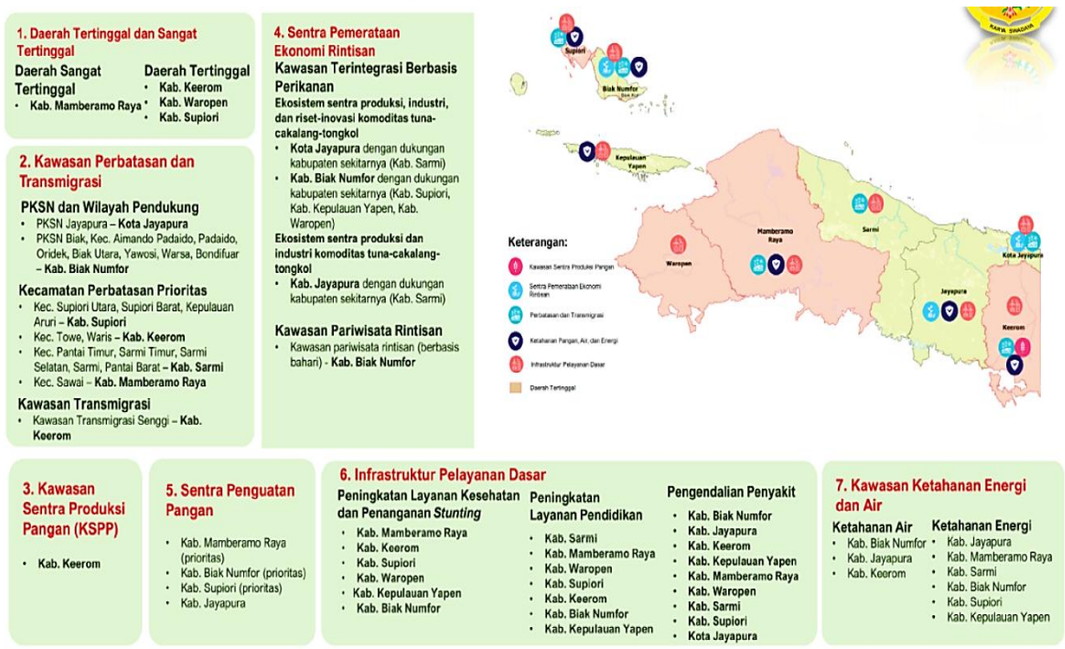
Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertum-buhan Ekonomi terdiri atas:
1. Kawasan Perkotaan Arso;
2. Kawasan Pariwisata Yowong;
3. Kawasan Ekonomi Senggi;
4. Kawasan Batas Negara Waris-Towe;

Arahan pengembangan Kawasan Strategis berupa kawasan budaya Waris, untuk mewujudkan Kawasan Budaya Waris sebagai warisan budaya di Provinsi Papua dengan melibatkan masyarakat adat setempat terdiri atas:
1. Pengembangan kawasan budaya Waris sebagai kawasan Cagar Budaya;
2. Pengembangan desa wisata budaya;

Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas;
1. Pemantapan kawasan;
2. Pembentukan lembaga pengelola/unit;
3. Penyelenggaraan pengelola kawasan;
4. Program kemitraan;
5. Pemberdayaan masyarakat adat.

Kawasan strategis Kabupaten Keerom merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan mempunyai pengaruh besar terhadap: pengembangan penataan ruang di kawasan sekitarnya Kabupaten Keerom, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau peningkatan Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Keerom. Penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap perkembangan Kabupaten Keerom. Untuk itu Perumusan Arah Kebijakan Kewilayahan, memperhatikan arahan dari RTRW Provinsi Papua, terdapat indikasi prioritas RTRW yang dapat dijadikan arahan dalam RPJPD Provinsi Papua 2025-2045, dengan indikasi rencana prioritas sehingga menjadi arahan dalam Perumusan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2039.

Gambar 3.8
Lokasi Prioritas Arah Kebijakan Provinsi Papua
Untuk Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029

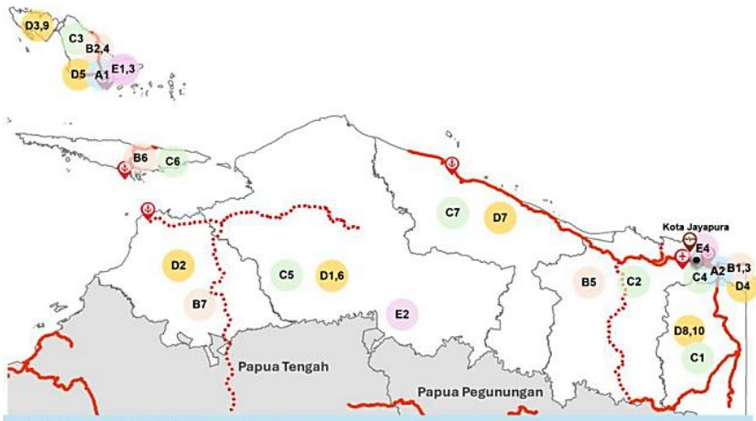


Sumber: Bapperinda Provinsi Papua Tahun 2025

Lokasi Prioritas Arah Kebijakan Provinsi Papua Untuk Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029 yaitu (1) Kawasan Sentra produksi Pangan (KSPP); (2) Kawasan Perbatasan dengan lokus Distrik Towe dan Waris, sedangkan (3) Kawasan Transmigrasi memiliki lokus Distrik Senggi; (3) Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan Stunting, pengendalian penyakit; (4) Kawasan Ketahanan Air. Pemanfaatan ruang Provinsi Papua berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang, dengan memperhatikan hak ulayat dan karakteristik masyarakat adat. Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Papua

dilaksanakan melalui penyusunan indikasi program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya. Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), investasi swasta maupun kerja sama pendanaan. Adapun kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku.

Gambar 3.9
Lokasi Prioritas Arah Kebijakan Nasional
Untuk Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029



A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Pariwisata
1. Kawasan Pariwisata Biak - Teluk Cenderawasih – Kab. Biak Numfor

Kawasan Perkotaan
2. Kawasan Perkotaan Sedang Jayapura – Kota Jayapura

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sentra Industri Berbasis Komoditas TCT
1. Kota Jayapura
2. Kab. Biak Numfor

Sentra Produksi Berbasis Komoditas TCT
3. Kota Jayapura
4. Kab. Biak Numfor
5. Kab. Jayapura
6. Kab. Kepulauan Yapen
7. Kab. Waropen

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

1. Kab. Keerom: KSPP
2. Kab. Jayapura: potensial pangan, potensial air
3. Kab. Biak Numfor: potensial pangan
4. Kota Jayapura: potensial pangan, potensial energi
5. Kab. Mamberamo Raya: potensial energi, potensial air
6. Kab. Kepulauan Yapen: potensial pangan
7. Kab. Sarmi: potensial pangan

D. Kawasan Afirmasi

Daerah Tertinggal*
1. Kab. Mamberamo Raya
2. Kab. Waropen
3. Kab. Supiori

**) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal*

Kawasan Perbatasan
PKSN dan Wilayah Pendukung
4. PKSN Jayapura – Kota Jayapura
5. PKSN Biak – Kec. Aimando Padaido, Kec. Padaido, Kec. Oridek, Kec. Biak Utara, Kec. Yawosi, Kec. Warsa, dan Kec. Bondifuar – Kab. Biak Numfor

Kecamatan Perbatasan Prioritas
6. Kec. Sawai – Kab. Mamberamo Raya
7. Kec. Pantai Timur, Kec. Sarmi Timur, Kec. Sarmi Selatan, Kec. Sarmi, Kec. Pantai Barat – Kab. Sarmi
8. Kec. Towe, Kec. Waris – Kab. Keerom
9. Kec. Supiori Utara, Kec. Supiori Barat, Kec. Kepulauan Aruri – Kab. Supiori

Kawasan Transmigrasi
10. KT Senggi – Kab. Keerom

E. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

Kawasan Konservasi
1. TN Teluk Cenderawasih –Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori, Kab. Waropen, dan Kab. Kepulauan Yapen
2. TN Mamberamo Foja –Kab. Mamberamo Raya, Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi
3. KKN Padaido – Kab. Biak Numfor

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi
4. Kota Jayapura

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 (Lampiran IV RPJMN)

Sesuai RPJMN 2025-2029 lokasi prioritas arah kebijakan nasional untuk kabupaten keerom tahun 2025-2029 antara lain: (1) Kawasan Potensial Swasembada Pangan melalui intervensi prioritas Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) dengan dukungan kawasan transmigrasi. Serta dukungan infrastruktur bandara Senggi Kabupaten Keerom untuk mendukung KSPP; (2) Kawasan Rawan Air melalui peningkatan akses sumber air baku alternatif; (3) Kawasan perbatasan dengan Lokus Distrik Towe dan Waris melalui

peningkatan tata kelola Pemerintahan; (4) Kawasan Transmigrasi dengan lokus distrik Senggi; (5) Kawasan Konservasi;

3.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berkaitan interfensi strategi pembangunan RPJMD Kabupaten Keerom 2025-2029, tentunya perlu adanya terobosan inovasi perencanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang mencerminkan Prioritas Janji Politik bagi seluruh Masyarakat Kabupaten Keerom. Program Prioritas Pembangunan Daerah dilakukan telaah substansi dalam Musrenbang RPJMD untuk dilakukan konversi Program sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Kebijakan alokasi belanja program perangkat daerah Kabupaten Keerom 2025-2029 dilakukan secara proporsional, selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1. **Program Utama Bupati dan Wakil Bupati:** (1) unggulan dan prioritas daerah; (2) pro rakyat; (3) afrimasi oap; (4) ikon kota sebagai pusat pertumbuhan; (5) generasi muda-kaum milenials dan pembangunan.

Unggulan dan Priotas Daerah:

- Jaminan akses hukum adat untuk perlindungan hak ulayat tanah;
- Pemekaran kampung dan/atau distrik;
- Sumber daya manusia berdaya mengusai IPTEKS;
- Ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan lokal;
- Infrastruktur daerah
- Kesehatan murah, terjangkau dan berkualitas;
- Pembangunan kawasan perbatasan dan kawasan khusus;
- Ketahanan ekologi dan adaptasi perubahan iklim;
- Sekolah unggulan SMP dan SMU;
- Ekonomi hijau berbasis komoditas lokal;
- Peremajaan sawit rakyat;
- Bidang unggulan perikanan, peternakan, pertanian dan holtikultura
- Riset dan inovasi;
- Kerukunan antar umat beragama dan masyarakat;

Pro Rakyat:

- Pemukiman petani;
- Program food estate;
- Jaminan ibu hamil dan persalinan;
- Jaminan hidup bagi lansia;
- Santunan kematian bagi keluarga miskin;
- Asuransi kesehatan dan insentif imam dan hamba-hamba tuhan;
- Pembinaan anak terlantar dan penyandang masalah sosial;

Afirmasi OAP:

- *Social Security OAP* Berbasis OTSUS,
- UMKM, KUR dan KUBE berbasis OTSUS;
- Afirmasi pendidikan kedinasan, beasiswa dan komunitas
- Subsidi produktifitas petani;
- Program keluarga harapan;

Ikon Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan:

- Status bandara udara senggih;
- Jalan dua jalur;

- Alun-alun kota, taman rekreasi dan kuliner kota;
- Modernisasi infrastrukur kawasan pemerintahan
- Moda transportasi publik perkotaan
- Kawasan ekonomi perkotaan
- Pengendalian sampah

Program utama Bupati dan Wakil Bupati Generasi Muda-Kaum Milenials dan Pembangunan:

- Pengembangan pusat kreativitas kaum milenial *(creativity hub)*
- Wirausaha muda dan usaha berbasis teknologi digital *(start up)*
- Kompetisi kreativitas, inovasi, olah raga dan seni
- Internet gratis area publik;

2. Program Prioritas Urusan Perangkat Daerah Untuk Memenuhi Indikator Kinerja Kunci.

Kelompok program ini berisi program urusan Perangkat Daerah yang dimandatkan untuk mengerjakan urusan pemerintahan, meskipun tidak secara langsung terkait dengan sasaran Utama Bupati dan Wakil Bupati. Namun mendukung pencapaian indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029.

3. Program Prioritas Rekomendasi KLHS.

Integrasi *Sustainable Development Goals (SDGs)* ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan: (i) program diarahkan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); (ii) program perangkat daerah dengan indikator kinerja program dan target capaian serta lokasi programnya dan penanggung jawab Perangkat Daerah; (iii) indikasi pendanaan pelaksanaan program perangkat daerah. Program pembangunan yang pro SDGs berarti konten program tersebut diarahkan untuk 17 tujuan SDGs Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029.

4. Program Prioritas Mandat RTRW.

RPJMD Kabupaten Keerom mengakomodir rekomendasi program spasial berdasarkan RTRW Kabupaten Keerom. Rekomendasi RTRW disajikan program utama dan dikonversi pada urusan relevan dengan program nomenklaturnya. Penjabaran lebih lanjut dalam kegiatan dan sub kegiatan diatur dalam dokumen RENSTRA atau dokumen rencana aksi sektoral, sebagai integrasi rekomendasi program pembangunan spasial RTRW Kabupaten Keerom dengan nomeklatur Program Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

5. Mandat Prioritas SPM dalam Program Nomenklatur.

Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Kabupaten Keerom, sesuai SPM diamanatkan untuk ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, sebagai prioritas belanja Daerah Kabupaten Keerom sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengintegrasian SPM dalam RPJMD Kabupaten Keerom tahun 2025-2029 diwujudkan melalui strategi mapping atau persandingan kriteria SPM dengan Program Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, untuk memenuhi target SPM. Penjabaran indikator SPM dan bagaimana kegiatan dan sub kegiatan untuk memenuhi target SPM dijabarkan pada dokumen RENSTRA Kabupaten Keerom tahun 2025-2029.

Tabel 3.18
Program Prioritas Utama Bupati dan Wakil Bupati Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Kinerja Prioritas Outcome	Program	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
Misi 1: Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Terintegrasi dan Melayani	Menguatnya pelayanan publik melalui reformasi birokrasi secara terintegrasi, profesional dan adaptif	Terwujudnya kualitas layanan publik, didukung dengan birokrasi adaptif berbasis e-Government	Adanya akses Layanan Publik hingga ke distrtik dan kampung terjauh	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional	Meningkatnya ASN yang profesional	Program peningkatan kapasitas aparatur	Badan Kepegawaian daerah
		Terwujudnya pemekaran distrik dan kampun	Adanya pemekaran Kampung dan Distrik	Program Penataan Distrik dan Kampung	Dinas Pemberdayaan Masy. dan Kampung
Misi 2: Memantapkan Mutu Sumber Daya Manusia Putra-Putri Papua yang Berkualitas, Menguasai IPTEK, Berintegritas, Kreatif dan Inovatif, Berdaya Saing Global dan Inovatif;	Mewujudkan SDM berkualitas, menjang-kau putra-putri papua	Terwujudnya tatakelola, akses dan mutu pelayanan pendidikan berkualitas dan merata	Meningkatnya SDM yang mengusai ipteks	Program Pengelolaan Infor-masi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Tersedianya sekolah unggulan SMP/SMU	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Adanya afirmasi pendidikan kedinasan, beasiswa dan komunitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Adanya afirmasi pendidikan kedinasan, beasiswa dan komunitas	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Terwujudnya derajat kesehatan untuk semua masyarakat	Penyediaan kesehatan murah, terjangkau dan berkualitas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

Misi	Tujuan	Sasaran	Kinerja Prioritas Outcome	Program	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
			Tersedianya jaminan ibu hamil dan persalinan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Adanya jaminan hidup bagi lansia	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
		Terwujudnya produktifitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan inovasi daerah	Berkembangnya sdm yang dapat berinovasi	Program pembinaan inovasi daerah	Dinas Perindustriian, Dinas Perdagangan, dan Koperasi
		Terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan sosial afirmatif bagi masyarakat	Berkembangnya program keluarga harapan	Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
			Adanya jaminan social security OAP berbasis OTSUS	Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
			Terbinanya anak terlantar dan penyandang masalah sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
Misi 3: Memantapkan Sistem Demokrasi, Hukum dan Hukum Adat;	Mewujudkan Demokrasi, Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Berbasis pada Kohesifitas Sosial dan Harmonisasi Keberagaman	Terwujudnya keamanan, ketertiban, keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	Adanya jaminan akses hukum adat untuk perlindungan hak ulayat tanah;	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Terwujudnya ruang demo-krasi dan hukum dalam pembangunan daerah	Adanya kerukunan antar umat beragama dan masyarakat	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terwujudnya	Adanya jaminan	Program pembinaan	Badan Kesatuan

Misi	Tujuan	Sasaran	Kinerja Prioritas Outcome	Program	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
	Potensi Kehidupan Masyarakat	kamtibmas yang harmonis dan kohesif	kamtibmas	Kamtibmas	Bangsa dan Politik
		Terwujudnya masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	Terkondisinya masyarakat yang mengedepankan nilai adat dan kearifan lokal	Program pembinaan budaya dan kearifan lokal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Misi 4: Meningkatkan moda transportasi, konektifitas antara wilayah dan infrastruktur dasar;	Mewujudkan Akses Infrastruktur Dasar, untuk mendukung Daya Saing Daerah dan Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Khusus	Terwujudnya Utilitas Infrastruktur Pemerintahan, Perkotaan dan Produktifitas Ekonomi Daerah	Mantapnya Infrastruktur Daerah yang Penopang Perekonomian Daerah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Tersedianya alun-alun, taman rekreasi dan kuliner kota	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Adanya modernisasi infrastrukur kawasan pemerintahan daerah hingga kampung	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Berkembangnya kawasan ekonomi perkotaan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Terwujudnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	Tersedinya akses kawasan pemukiman untuk petani	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Meningkatnya akses jalan dua jalur perkotaan arso	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Terkelolanya moda transportasi publik perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Tersedianya akses	Program Pengelolaan Infor-	Dinas Komunikasi dan

Misi	Tujuan	Sasaran	Kinerja Prioritas Outcome	Program	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
			nternet gratis di area publik	masi Dan Komunikasi Publik	Informatika
Misi 5: Memantapkan Inovasi dan Daya Saing;	Mewujudkan Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Pelayanan Publik	Terwujudnya inovasi pelayanan publik untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar kampung dan distrik	Berkembangnya penerapan riset dan inovasi daerah sebagai dasar pelaksanaan layanan pubkik	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan, Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
			Berkembangnya wirausaha kreatif kaum milenial dan Gen-Z berbasis teknologi digital *(start up)*	Program pembinaan kewirausahaan generasi muda	Dinas Perindustrian
			Berkembangnya kompetisi kreativitas, inovasi, olah raga dan seni	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata
		Terwujudnya produktifitas SDM melalui pengembangan ekonomi koperasi yang inovatif	Berkembangnya UMKM, KUR dan KUBE berbasis OTSUS	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Misi 6: Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan yang Berkelanjutan;	Mewujudkan struktur perekonomian daerah secara inklusif di topang dengan inovasi sektor unggulan	Terwujudnya produktifitas sektor unggulan ramah lingkungan dan inklusif	Produktifitas sektor unggulan ramah lingkungan dan inklusif	Program pelestarian lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Adanya distribusi barang dan jasa melalui daya saing perdagangan	Program peningkatan transportasi arus barang dan jasa	Dinas Perhubungan
			Adanya pengendalian dan stabilitas ekonomi	Program tatakelola ekonomi daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Kinerja Prioritas Outcome	Program	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
		Terwujudnya pengembangan ekonomi hijau yang unggul dan produktif	Berkembangnya ekonomi hijau dan ketahanan pangan lokal berbasis berbasis masyarakat	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Berkembangnya peremajaan sawit rakyat;	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Dinas Pertanian
			Berkembangnya bidang unggulan perikanan, peternakan, pertanian dan holtikultura	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Dinas Pertanian
		Terwujudnya pengendalian dan stabilitas ekonomi, serta nilai modal investasi daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor riil	Program percepatan pembangunan ekonomi unggulan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
			Meningkatnya pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat	Program peningkatan penerimaan PAD dan pembinaan ekonomi rakyat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Meningkatnya permodalan investasi	Program kerjsama investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Mewujudkan ekonomi daerah berbasis ekologi dan pengawasan lingkungan hidup	Terwujudnya kesadaran ekosistem dan pengendalian lingkungan hidup	Meningkatnya kesadaran ekosistem dan pengen-dalian lingkungan hidup	Program Peningkatan mutu lingkungan hidup	Dinas Lingkungan HIdup
			Pengembangan ekonomi hijau berbasis komoditas lokal;	Program pengembangan ekonomi hijau	Dinas Pertanian

Misi	Tujuan	Sasaran	Kinerja Prioritas Outcome	Program	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
		Terwujudnya resiliensi masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya ketahanan ekologi dan adaptasi perubahan iklim; Berkembangnya ekonomi hijau berbasis komoditas lokal;	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas lingkungan hidup, ketahanan pangan dan perikanan Dinas lingkungan hidup, ketahanan pangan dan perikanan
Misi 7: Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Kawasan Khusus;	Mewujudkan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Sentra Pertanian dan Pangan Berbasis Afirmatif dan Holistik	Terwujudnya afirmasi tata kelola perbatasan RI-PNG, melalui pemberdayaan pemerintah distrik serta pemenuhan pelayanan dasar Terwujudnya kawasan sentra produksi sektor unggulan dan produk pangan, didukung dengan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung serta riset dan inovasi teknologi	Berkembangnya kawasan perbatasan dan kawasan khusus	Program pengelolaan perbatasan 1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Badan pengelola kawasan perbatasan daerah Dinas Pertanian

Sumber: Musrenbang RPJMD, Tahun 2025

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Penyusunan dan penenetapan Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, untuk mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan Kabupaten Keerom tahun 2025-2029. Selain itu juga, sebagai singkronisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom guna mendukung pencapaian prioritas Provinsi Papua dan Nasional.

Program Perangkat Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, telah menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Kebijakan alokasi belanja Program Perangkat Daerah Kabupaten Keerom tahun 2025-2029 secara proporsional, selaras Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Khususnya untuk Perencanaan Program Perangkat Daerah Tahun 2030, sebagai pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2025-2030, memiliki keterkaitan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Strategi dan Kebijakan RPJMD ditetapkan, serta memperhatikan beberapa arahan substansi Program dan Pendanaan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

1. Penyusunan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah menurut Urusan Pemerintahan memperhatikan kapasitas rill APBD Kabupaten Keerom, dengan indikatif pagu prioritas untuk Urusan Wajib, serta mendukung Program Prioritas Bupati dan Wakil. Proyeksi kerangka pendanaan 2025-2030 bersifat indikatif dan penyelerasan dokumen Renstra OPD Kabupaten Keerom.
2. Pagu indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030, melalui proses penyelarasan dengan nilai realisasi Program berdasarkan Dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten Keerom. Selain itu, asumsi Proyeksi APBD normatif tidak terjadi surplus/defisit. Adanya dimasa peridoe RPJMD terjadi tekanan fiskal (risiko fiskal), stabilitas APBD dilakukan Pemerintah Kabupaten Keerom melalui mempertankan pertumbuhan ekonomi, memperketat kebijakan efisiensi dan efektifitas APBD dan mempercepat peran Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Kabupaten Keerom.
3. RPJMD menjadi Pedoman Koordinasi berjenjang Dokumen perencanaan tingkat RENSTRA. Singkronisasi RPJMD dipedomani hingga pada proses Penyusunan RKPD dan APBD Periode Tahun 2025-2030.
4. Evaluasi Program Perangkat Daerah, untuk memastikan Kinerja Program berdasarkan Urusan Pemerintahan kondisi *on the track* Periode Tahun 2025-2030. Konteks pelaksanaan evaluasi perlu dilakukan pertengahan dan akhir masa RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2030, memandang urgensi pelaksanaan metode evaluasi sumatif dan formatif pembangunan Daerah.

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2025-2030

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1			**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**															
1	**1**		**Bidang Urusan Pemerintahan Pendidikan**															
1	1	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pengembangan Sekolah Unggulan SMP dan SMU	100	100	100	100	100	100	100	7,233	7,378	7,525	7,676	7,829	7,986	Pendidikan
				Persentase Beasiswa Afirmasi Pendidikan dan Komunitas	100	100	100	100	100	100	100							Pendidikan
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas	100	100	100	100	100	100	100							Pendidikan
				Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi dan Numerasi	37.06	40.81	44.56	48.31	52.06	55.81	59.56							Pendidikan
				Angka Partisipasi Murni jenjang SD/sederajat	85.39	86.41	87.45	88.50	89.56	90.64	91.73							Pendidikan
				Angka Partisipasi Murni jenjang SMP/sederajat	71.66	72.52	73.39	74.27	75.16	76.06	76.98							Pendidikan
				Angka Partisipasi Murni jenjang SMA/sederajat	60.44	61.17	62.51	63.26	64.02	64.79	65.57							Pendidikan

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	1	2	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	55.00	56.76	58.58	60.45	62.39	64.38	66.44	1,975	2,015	2,055	2,096	2,138	2,181	Pendidikan
1	1	3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru	49.00	49.59	50.18	50.79	56.88	63.71	71.35	4,500	4,590	4,682	4,775	4,871	4,968	Pendidikan
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	67.00	68.55	70.14	72.47	74.16	76.62	79.16							Pendidikan
1	1	4	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	100	100	100	100	100	100	100	3,000	3,060	3,121	3,184	3,247	3,312	Pendidikan
1	**2**		**Bidang Urusan Pemerintahan Kesehatan**															
1	2	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	100	100	100	100	100	100	100	7,783	7,939	8,097	8,259	8,425	8,593	Kesehatan
				Angka Kematian Ibu	4	0	0	0	0	0	0							Kesehatan
				Jumlah Kematian Balita	2	0	0	0	0	0	0							Kesehatan
				Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	100	100	100	100	100	100	100							Kesehatan
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	14.66	18.8	17.5	16.3	15.2	14.2	14							Kesehatan
				Cakupan imunisasi bayi lengkap	98	80	80	80	80	80	80							Kesehatan
				Angka keberhasilan pengobatan TB	73	78	83	88	93	98	98							Kesehatan

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22.22	23.33	24,50	25.72	27.01	28.36	28.36							Kesehatan
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar	95	95	95	95	95	95	95							Kesehatan
				Presentase orang dengan HIV mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar	89	89	89	89	89	89	89							Kesehatan
				Cakupan Angka API	588.93	588.88	588.83	588.78	588.73	588.68	588.68							Kesehatan
				Persentase Rumah Ber PHBS	70	70	70	70	70	70	70							Kesehatan
				Persentase Obesitas > 18 Tahun	20.2	19.19	18.2305	17.31898	16.45303	15.63037	15.63037							Kesehatan
				Persentase merokok penduduk 10-21 Tahun	18.8	17.86	16.97	16.12	15.31	14.55	14.55							Kesehatan
				Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.	2	0	0	0	0	0	0							Kesehatan
1	2	2	Program Peningkatan Kapasitas	Cakupan SDM Kesehatan yang terlatih	100	100	100	100	100	100	100	5,462	5,571	5,683	5,796	5,912	6,030	Kesehatan

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya	100	100	100	100	100	100	100							Kesehatan
				Persentase Faskes Melakukan RME (Rekam Medic Elektronik)	100	100	100	100	100	100	100							Kesehatan
1	2	3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	96.29	100	100	100	100	100	100	2,100	2,142	2,185	2,229	2,273	2,319	Kesehatan
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	96.29	100	100	100	100	100	100							Kesehatan
				Presentase Obat Pada Fasilitas Layanan Kesehatan	54.67	80	80	80	80	80	100							Kesehatan
1	2	4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Penguatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	100	100	100	100	100	100	100	1,000	1,020	1,040	1,061	1,082	1,104	Kesehatan
1	**3**		**Bidang Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**															
1	3	1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	63.20	65.76	68.32	70.88	73.44	76.00	78.56	6,000	6,120	6,242	6,367	6,495	6,624	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah	53.20	55.76	58.32	60.88	63.44	66.00	65.56							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	40.00	42.00	44.00	46.00	48.00	50.00	55.00	4,500	4,590	4,682	4,775	4,871	4,968	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	45.00	47.00	50.00	52.00	55.00	57.00	60.00							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	30.00	33.00	36.00	39.00	42.00	45.00	50.00	2,000	2,040	2,081	2,122	2,165	2,208	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	4	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	57.22	59.78	62.34	64.09	67.46	70.02	72.58	95,000	96,900	98,838	100,815	102,831	104,888	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Panjang jalan poros antar kampung dan distrik yang dibangun	47.22	49.78	51.34	53.09	55.46	57.02	59.58							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase peningkatan konektivitas antar kampung dan distrik	37.22	40.78	42.34	44.09	47.46	50.02	53.58							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Jumlah ruas jalan strategis daerah yang	35.22	36.78	37.34	38.09	39.46	40.02	42.58							Pekerjaan Umum dan

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				terhubung dengan jaringan jalan nasional/provinsi														Penataan Ruang
1	3	5	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	52.30	56.53	60.76	64.99	69.22	73.45	77.68	500	510	520	531	541	552	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	52.30	56.53	60.76	64.99	69.22	73.45	77.68	9,500	9,690	9,884	10,081	10,283	10,489	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	100	100	100	100	100	100	100							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	50	55	60	65	70	75	80	2,000	2,040	2,081	2,122	2,165	2,208	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	40	45	50	55	60	65	70							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**4**		**Bidang Urusan Pemerintahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**															
1	4	1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	84.00	89.00	94.00	99.00	100	100	100	9,639	9,832	10,028	10,229	10,434	10,642	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU(Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	100	100	100	100	100	100	100	2,370	2,417	2,466	2,515	2,565	2,617	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	**5**		**Bidang Urusan Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**															
1	5	1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	100	100	100	100	100	100	100	1,200	1,224	1,248	1,273	1,299	1,325	Perlindungan Masyarakat
1	5	2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah	100	100	100	100	100	100	100	900	918	936	955	974	994	Perlindungan Masyarakat
1	**6**		**Bidang Urusan Pemerintahan Sosial**															
1	6	1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial Yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	1,440	1,469	1,498	1,528	1,559	1,590	Sosial

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Persentase Keluarga pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan pemberdayaan sosial, Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	8.13	6.10	12.19	18.29	24.39	30.48	36.80							Sosial
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	25.64	25.64	46.15	51.28	86.20	82.05	100							Sosial
				Persentase lembaga dibidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sisoal	20.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100	100							Sosial
1	6	2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	14.23	14.23	14.23	14.23	14.23	14.23	14.23	1,325	1,352	1,379	1,406	1,434	1,463	Sosial
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	28.56	28.56	29.86	31.16	32.45	33.75	35.00							Sosial
				Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	18.84	18.84	19.01	19.70	20.13	20.56	20.99							Sosial

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	6	3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	100	100	100	100	100	100	100	500	510	520	531	541	552	Sosial
1	6	4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	31.12	46.69	54.47	62.25	70.03	85.60	100	950	969	988	1,008	1,028	1,049	Sosial
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	18.89	25.41	41.69	61.24	84.04	93.81	100							Sosial
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	12.99	15.54	25.48	38.22	76.43	89.17	100							Sosial
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	17.79	23.72	34.69	48.03	76.94	89.54	100							Sosial
				Indeks Kesejahteaan Sosial	18.84	21.41	23.98	26.55	29.12	31.69	34.26							Sosial
1	6	5	Program Penanganan Bencana Alam	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap	100	100	100	100	100	100	100	550	550	550	550	550	550	Sosial

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Darurat Bencana														
				Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	100	100	100	100	100	100	100							Sosial
				Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	100	100	100	100	100	100	100							Sosial
2			**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**															
2	**1**		**Bidang Urusan Pemerintahan Tenaga Kerja**															
2	1	1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	43.35	48.35	53.35	58.35	63.35	68.35	73.35	1,994	2,034	2,075	2,116	2,158	2,202	Tenaga Kerja
2	1	2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Presentase Izin Usaha Pertanian dan Pangan yang di Terbitkan	32.00	35.12	38.54	42.3	46.43	50.95	55.92	450	459	468	478	487	497	Tenaga Kerja
2	**2**		**Bidang Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**															
2	2	1	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi jejaring kelembagaan perempuan	60.00	62.00	64.00	66.00	68.00	70.00	72.00	355	362	369	377	384	392	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	2	2	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798	814	830	847	864	881	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2	3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100	100	100	100	100	100	100	400	408	416	424	433	442	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2	4	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100	1,122	1,144	1,167	1,191	1,214	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2	5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kampung layak anak	70.00	73.00	76.00	79.00	82.00	85.00	88.00	365	372	380	387	395	403	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**3**		**Bidang Urusan Pemerintahan Pangan**															
2	3	1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	86.2	88.5	90.8	93.1	95.4	97.7	100	1,500	1,530	1,561	1,592	1,624	1,656	Pangan
2	3	2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan	0.60	0.58	0.56	0.54	0.52	0.49	0.49	1,200	1,224	1,248	1,273	1,299	1,325	Pangan
2	**4**		**Bidang Urusan Pemerintahan Pertanahan**															

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	4	1	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100	1,000	1,020	1,040	1,061	1,082	1,104	Pertanahan
2	4	2	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	1,000	1,020	1,040	1,061	1,082	1,104	Pertanahan
2	4	3	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	100	100	100	100	100	100	100	1,000	1,020	1,040	1,061	1,082	1,104	Pertanahan
2	4	4	Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Ditetapkannya Hak Atas Tanah Dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100	1,000	1,020	1,040	1,061	1,082	1,104	Pertanahan
2	4	5	Program Penanganan Konflik, Sengketa, Dan Perkara Petanahan	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	100	100	100	100	100	100	100	1,000	1,020	1,040	1,061	1,082	1,104	Pertanahan
2	**5**		**Bidang Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup**															
2	5	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan hidup yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	900	918	936	955	974	994	Lingkungan Hidup

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	5	2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	30.00	30	30	30	30	30	30	1,900	1,938	1,977	2,016	2,057	2,098	Lingkungan Hidup
2	5	3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH	70.00	73.00	76.00	79.00	82.00	85.00	88.00	569	580	592	604	616	628	Lingkungan Hidup
2	5	4	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan area pelayanan sampah	50.00	53.00	56.00	59.00	62.00	65.00	68.00	4,788	4,884	4,981	5,081	5,183	5,286	Lingkungan Hidup
2	5	5	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Persentase Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	45.00	48.00	53.00	58.00	63.00	68.00	73.00	1,500	1,530	1,561	1,592	1,624	1,656	Lingkungan Hidup
2	5	6	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaksanaan Pengujian dan Pengawasan dan Pengendalian IKA dan IKU	100	100	100	100	100	100	100	4.111	4.111	4.111	4.111	4.111	4.111	Lingkungan Hidup
2	**6**		**Bidang Urusan Pemerintahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**															

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	6	1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	25.00	25.00	30.00	35.00	45.00	50.00	60.00	1,950	1,989	2,029	2,069	2,111	2,153	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	6	2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	50.00	50.00	75.00	100	100	100	100							Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	6	3	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	45.00	45.00	75.00	90.00	100	100	100	950	969	988	1,008	1,028	1,049	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	45.00	45.00	55.00	75.00	85.00	95.00	100							Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Kepemilikan Akta Kematian	45.00	45.00	55.00	75.00	85.00	95.00	100							Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	6	4	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	96.00	96.00	100	100	100	100	100	1,500	1,530	1,561	1,592	1,624	1,656	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Perekaman Biometrik bagi Penduduk Wajib KTP	99.00	99.00	100	100	100	100	100							Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
																		Sipil
				Persentase Kepemilikan KTP bagi penduduk Wajib KTP	97.00	97.00	100	100	100	100	100							Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Penduduk OAP yang terdata dalam SIAK Plus	50.00	50.00	90.00	100	100	100	100							Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Jumlah Instansi Pemerintah yang menandatangani kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00							Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**7**		**Bidang Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**															
2	7	1	Program Penataan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Admistrasi Pemerintah Kampung	77.77	78.78	79.78	80.79	85,80	90.85	95.90	1,200	1,224	1,248	1,273	1,299	1,325	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	7	2	Program Admistrasi Pemerintahan Desa	PersentasePengelolaan Keuangan Kampung yang berbasis sistem Informasi	100	100	100	100	100	100	100	940	959	978	998	1,017	1,038	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Persentase kampung yang tertib dokumen admistrasi perencanaan dan pengangaran kampung	60.51	61.03	62.05	63.06	64.05	70.05	75.06							Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Presentase BUMKAM aktif	70.51	73.53	75.60	80.54	84.56	87.67	88.67							Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	7	3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPM)	73.41	74.45	75.46	77.48	78.51	80.55	85.59	527	538	548	559	570	582	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**8**		**Bidang Urusan Pemerintahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**															
2	8	1	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proposi Kebutuhan KB yang terpenuhi	45,6	20	66,89	67,8	69,12	70,28	71,47	1,200	1,224	1,248	1,273	1,299	1,325	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	2	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	58.20	61.87	60.40	62.10	63.80	65.50	67.20	3,500	3,570	3,641	3,714	3,789	3,864	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	3	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total FertilitybRate/ TFR)	2,54	2,6	2,49	2,48	2,47	2,47	2,47	3,788	3,864	3,941	4,020	4,100	4,182	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Indeks Lansia Berdaya	20.00	56,99	61,25	61,25	61,75	62	62,25							Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
																		Berencana
				Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	58.20	61.87	60.40	62.10	63.80	65.50	67.20							Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**9**		**Bidang Urusan Pemerintahan Perhubungan**															
2	9	1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	33.81	12.94	25.88	46.08	62.94	87.05	100	1,275	1,301	1,327	1,353	1,380	1,408	Perhubungan
2	9	2	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penurunan biaya logistik dan transportasi barang/penumpang ke daerah terpencil	0.00	16.67	33.33	50.00	66.67	83.33	100	845	862	879	897	915	933	Perhubungan
2	9	3	Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase bandara yang memenuhi standar keselamatan	0.00	16.67	33.33	50.00	66.67	83.33	100	350	357	364	371	379	386	Perhubungan
2	**10**		**Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika**															
2	10	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	79.80	79.85	80.75	81.25	83.40	85.50	85.70	1,420	1,448	1,477	1,507	1,537	1,568	Komunikasi dan Informatika
2	10	2	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indekx SPBE	2.90	2.95	2.95	2.98	3.00	3.00	3.20	1,600	1,632	1,665	1,698	1,732	1,767	Komunikasi dan Informatika
2	**11**		**Bidang Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**															

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	11	1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi Yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	25.00	25.00	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00	450	459	468	478	487	497	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	11	2	Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	Persentase Koperasi yang terfasilitasi mendapatkan akta notaris	25.00	25.00	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00	760	775	791	807	823	839	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	11	3	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	30.00	31.00	32.00	33.00	34.00	35.00	35.00	1,450	1,479	1,509	1,539	1,570	1,601	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	11	4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	67.67	67.67	68.13	68.60	69.88	69.53	70.00	650	663	676	690	704	718	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	11	5	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	10.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	632	645	658	671	684	698	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	11	6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	10.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	350	357	364	371	379	386	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	11	7	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	10.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	3,890	3,968	4,047	4,128	4,211	4,295	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	11	8	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan Fasilitasi Pelatihan	15.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	1,345	1,372	1,399	1,427	1,456	1,485	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	11	9	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang bertransformasi dari Informal ke Formal	5.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	34,029	34,710	35,404	36,112	36,834	37,571	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**12**		**Bidang Urusan Pemerintahan Penanaman Modal**															
2	12	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	271,709	271,80	271,90	272,00	272,109	272,20	272,30	1,200	1,224	1,248	1,273	1,299	1,325	Penanaman Modal
2	12	2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi	30.00	30.00	32.00	34.00	36.00	38.00	40.00	1,900	1,938	1,977	2,016	2,057	2,098	Penanaman Modal
2	12	3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	40.00	40.00	42.00	44.00	46.00	48.00	50.00	950	969	988	1,008	1,028	1,049	Penanaman Modal
2	12	4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Terhadap Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	55.00	55.00	56.00	57.00	58.00	59.00	60.00	1,000	1,020	1,040	1,061	1,082	1,104	Penanaman Modal
2	12	5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Penanaman Modal	0.00	0.00	50.00	51.00	52.00	53.00	54.00	2.600	3	3	3	3	3	Penanaman Modal
2	12	6	Program Kerja Sama Penanaman Modal	Persentase Kerjasama Penanaman Modal Yang Ditindaklanjuti	0.00	0.00	46.00	47.00	48.00	49.00	50.00	1,450	1,479	1,509	1,539	1,570	1,601	Penanaman Modal

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	**13**		**Bidang Urusan Pemerintahan Kepemudaan dan Olahraga**															
2	13	1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pembangunan Pemuda yang di Laksanakan	55.00	56.00	57.00	58.00	59.00	60.00	61.00	900	918	936	955	974	994	Kepemudaan dan Olahraga
2	13	2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100	100	100	100	100	100	100	675	689	702	716	731	745	Kepemudaan dan Olahraga
2	13	3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Event Keolahragaan yang Dilaksanakan	2 Ivent	2 Ivent	2 Ivent	2 Ivent	2 Ivent	2 Ivent	2 Ivent	1,200	1,224	1,248	1,273	1,299	1,325	Kepemudaan dan Olahraga
2	**14**		**Bidang Urusan Pemerintahan Statistik**															
2	14	1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	100	100	100	100	100	100	100	950	969	988	1,008	1,028	1,049	Statistik
2	**15**		**Bidang Urusan Pemerintahan Persandian**															
2	15	1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase arus informasi pemerintah daerah yang lancar, aman dan terjaga kerahasiaannya	100	100	100	100	100	100	100	750	765	780	796	812	828	Persandian
2	**16**		**Bidang Urusan Pemerintahan Kebudayaan**															

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	16	1	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam pengembangan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah (PPKD)	20.00	20.00	25.00	30.00	40.00	50.00	60.00	2,500	2,550	2,601	2,653	2,706	2,760	Kebudayaan
				Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	20.00	30.00	32.00	34.00	36.00	38.00	40.00							Kebudayaan
2	16	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	3 lokasi	3 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	1,400	1,428	1,457	1,486	1,515	1,546	Kebudayaan
2	16	3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang di Tetapkan	1 cagar budaya	1 cagar budaya	1 cagar budaya	1 cagar budaya	1 cagar budaya	1 cagar budaya	1 cagar budaya	2,100	2,142	2,185	2,229	2,273	2,319	Kebudayaan
2	**17**		**Bidang Urusan Pemerintahan Perpustakaan**															
2	17	1	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi	8.11	12.00	18.00	20.00	25.00	30.00	31.00	1,652	1,685	1,719	1,753	1,788	1,824	Perpustakaan
				Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	50.80	51.50	52.00	52.50	53.00	54.00	55.00							Perpustakaan
2	17	2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Presentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	20.00	20.00	50.00	80.00	100.00	100.00	100.00							Perpustakaan
2	**18**		**Bidang Urusan Pemerintahan Kearsipan**															
2	18	1	Program Pengelolaan Arsip	Kriteria Hasil Pengawasan Kearsipan pada	Tidak Diberikan Opini	Tidak Diberikan	D	D	C	CC	CC	1,350	1,377	1,405	1,433	1,461	1,491	Kearsipan

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Lingkup Pemerintah Daerah		Opini												
				Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	75.00	76.20	76.80	77.00	77.20	77.50	77.80							Kearsipan
2	18	2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	52.00	53.00	55.00	58.00	60.00	62.00	63.00	1,800	1,836	1,873	1,910	1,948	1,987	Kearsipan
2	18	3	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	20.00	20.00	23.00	25.00	26.00	28.00	30.00	500	510	520	531	541	552	Kearsipan
3			**Urusan Pemerintahan Pilihan**															
3	**1**		**Bidang Urusan Pemerintahan Kelautan dan Perikanan**															
3	1	1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	97.19	47.50	47.50	52.13	57.21	62.79	68.92	2,500	2,550	2,601	2,653	2,706	2,760	Kelautan dan Perikanan
3	1	2	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	38.48	38.48	40.48	40.48	42.48	44.48	46.48	1,000	1,020	1,040	1,061	1,082	1,104	Kelautan dan Perikanan
3	**2**		**Bidang Urusan Pemerintahan Pariwisata**															
3	2	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Objek Destinasi yang di Kembangkan	2	2	2	2	2	2	2	5,300	5,406	5,514	5,624	5,737	5,852	Pariwisata

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	2	2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	100	100	100	100	100	100	100	1,900	1,938	1,977	2,016	2,057	2,098	Pariwisata
3	**3**		**Bidang Urusan Pemerintahan Pertanian**															
3	3	1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	60.00	62.00	64.00	65.00	67.00	68.00	70.00	6,916	7,054	7,195	7,339	7,486	7,636	Pertanian
				PersentasePeningkatan Produksi Hortikultura	85.50	89.50	92.50	95.50	99.50	100	100							Pertanian
				Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	57.91	57.91	59.07	60.25	61.45	62.68	63.94							Pertanian
3	3	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana PertanianLainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	55	57	59	61.5	63	65	68	5,267	5,372	5,480	5,589	5,701	5,815	Pertanian
3	3	3	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	40.00	0.00	45.00	47.00	49.00	50.00	52.00	1,450	1,479	1,509	1,539	1,570	1,601	Pertanian
3	3	4	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	35.50	37.00	38.50	40.00	42.00	43.50	45.00	1,557	1,588	1,620	1,652	1,685	1,719	Pertanian

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	30.50	32.00	33.50	35.00	36.00	38.00	40.00							
3	3	5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	67.21	68.55	69.93	71.32	72.75	74.21	75.69	1,360	1,387	1,415	1,443	1,472	1,502	Pertanian
3	**4**		**Bidang Urusan Pemerintahan Perdagangan**															
3	4	1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitasasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	78.00	78.00	79.00	80.00	81.00	82.00	83.00	5,813	5,929	6,048	6,169	6,292	6,418	Perdagangan
				Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya	67.00	67.00	68.00	69.00	70.00	71.00	72.00							Perdagangan
				Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100	100	100	100	100	100	100							Perdagangan
3	4	2	Program Pengembangan Ekspor	Persentase UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	100	100	100	100	100	100	100	3,555	3,626	3,699	3,773	3,848	3,925	Perdagangan
				Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100							Perdagangan

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	4	3	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	70	75	80	85	90	95	100	3,625	3,698	3,771	3,847	3,924	4,002	Perdagangan
3	4	4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan khususnya pasar yang terkelola	90	90	100	100	100	100	100	51,508	52,538	53,589	54,661	55,754	56,869	Perdagangan
3	4	5	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko	87	90	97	100	100	100	100	5,029	5,130	5,232	5,337	5,444	5,552	Perdagangan
3	**5**		**Bidang Urusan Pemerintahan Perindustrian**															
3	5	1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Presentase Realisasi Inventasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,500	1,530	1,561	1,592	1,624	1,656	Perindustrian
3	5	2	Program Hubungan Industrial	Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	87.12	89.62	92.12	94.62	97.12	99.62	100	1,500	1,530	1,561	1,592	1,624	1,656	Perindustrian
3	**6**		**Bidang Urusan Pemerintahan Transmigrasi**															
3	6	1	Program Pembangunan Kawasan	Presentase Program Transmigrasi Yang Dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	1,870	1,907	1,946	1,984	2,024	2,065	Transmigrasi

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Transmigrasi	Presentase Luas Kawasan Trasnmigrasi yang Berkembang	32.00	35.12	38.54	42.30	46.43	50.95	55.92							Transmigrasi
				Presentase Transmigran yang dibina dan diberdayakan	32.00	35.12	38.54	42.30	46.43	50.95	55.92							Transmigrasi
4			**Urusan Pemerintahan Unsur Pendukung**															
4	**1**		**Bidang Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah**															
4	1	1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	100	100	100	100	100	100	13,360	13,627	13,900	14,178	14,461	14,751	Sekretariat Daerah
				Persentase Penetapan Batas Wilayah Administrasi Administrasi Kampung, Distrik dan Kabupaten	100	100	100	100	100	100	100							
				Persentase Jalinan Kerjasama Pembangunan Daerah Antar Kabupaten	100	100	100	100	100	100	100							
4	1	2	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	100	100	100	100	100	100	3,204	3,268	3,333	3,400	3,468	3,537	Sekretariat Daerah
				Kriteria EPPD	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi							Sekretariat Daerah
4	**2**		**Bidang Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD**															
4	2	1	Program Dukungan Pelaksanaan	Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD	100	100	100	100	100	100	100	13,459	13,728	14,003	14,283	14,568	14,860	Sekretariat DPRD

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Raperda diterbitkan dan Perda yang ditetapkan	100	100	100	100	100	100	100							Sekretariat DPRD
5			**Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang**															
5	**1**		**Bidang Urusan Pemerintahan Perencanaan**															
5	1	1	Proram Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD terhadap RKPD	100	100	100	100	100	100	100	1,150	1,173	1,196	1,220	1,245	1,270	Perencanaan
				Persentase Keselarasan RPJMD terhadap Renstra PD	100	100	100	100	100	100	100							Perencanaan
				Persentase Usulan Musrenbang Distrik terakomodir dalam RKPD	100	100	100	100	100	100	100							Perencanaan
5	1	2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	100	100	100	100	1,150	1,173	1,196	1,220	1,245	1,270	Perencanaan
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100	100	100	100	100							Perencanaan
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang	100	100	100	100	100	100	100							Perencanaan

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Infrastruktur dan Kewilayahan														
5	**2**		**Bidang Urusan Pemerintahan Keuangan**															
5	2	1	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Alokasi Belanja Pegawai Dari TKDD di luar Tunjangan Profesi Guru (Di Bawah 30% dari Pagu APBD)	27.51	28.42	29.60	29.10	28.60	28.10	27.60	154,096	157,178	160,321	163,528	166,798	170,134	Keuangan
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Minimal 40%	42.10	43.00	44.00	44.50	45.00	45.50	46.00							Keuangan
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	88.13	92.00	93.00	94.00	95.00	96.00	97.00							Keuangan
				Persentase Pelaporan Syarat Salur Pendapatan Transfer Pusat dan Daerah	100	100	100	100	100	100	100							Keuangan
				Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100							Keuangan
5	2	2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Realisasi Nilai Aset Tetap dari pagu belanja modal Per Tahun	87.61	88.00	89.00	90.00	91.00	92.00	93.00	1,000	1,020	1,040	1,061	1,082	1,104	Keuangan
				Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Per tahun	7.67	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25							Keuangan

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Persentase Penertiban dan Pelelangan Kendararaan Dinas Per Tahun	0.00	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50							Keuangan
5	2	3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertambahan Wajib Pajak Baru	0.00	12.00	16.00	20.00	24.00	28.00	31.00	11, 266	11, 491	11, 721	11, 956	12,195	12,439	Keuangan
				Persentase Realisasi Pajak	100	100	100	100	100	100	100							Keuangan
				Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	22.00	27.00	33.00	38.00	44.00	49.00	54.60							Keuangan
				Nilai Indikator MCP KPK Area Pajak Daerah	100	100	100	100	100	100	100							Keuangan
				Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	75.00	75.00	75.00	95.00	100	100	100							Keuangan
				Persentase Transaksi Penerimaan Pajak Melalui Kanal Digital	68.00	73.68	78.00	82.00	85.00	90.00	94.24							Keuangan
				Jumlah Sistem Pembayaran Pajak Berbasis Elektronik	30.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	76.67							Keuangan
5	**3**		**Bidang Urusan Pemerintahan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**															
5	3	1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar	98	99	100	100	100	100	100	2,303	2,349	2,396	2,444	2,493	2,543	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	3	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional*	85.00	85.00	85.00	100	100	100	100	4,701	4,795	4,891	4,989	5,089	5,190	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	50.00	60.00	80.00	90.00	100	100	100							Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	**4**		**Bidang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan**															
5	4	1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kebijakan berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah*	35.50	41.10	46.70	52.30	57.90	63.50	69.10	6,956	7,095	7,237	7,382	7,529	7,680	Penelitian dan Pengembangan
				Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan*	31.45	34.83	42.06	44.48	47.03	49.74	52.60							Penelitian dan Pengembangan
				Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi Daerah*	100	100	100	100	100	100	100							Penelitian dan Pengembangan
5	**5**		**Bidang Urusan Pemerintahan Pengelolaan Perbatasan Daerah**															
5	5	1	Program Pengelolaan Perbatasan	Tingkat Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan RI-PNG*	Cukup Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	4,655	4,748	4,843	4,940	5,039	5,139	Pengelolaan Perbatasan Daerah
				Persentase kerjasama kawasan perbatasan yang terfasilitasi (tapal batas, perijinan	100	100	100	100	100	100	100							Pengelolaan Perbatasan Daerah

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				keluar masuk, dll)														
6			**Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan**															
6	**1**		**Bidang Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan**															
6	1	1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Maturitas SPIP	2.313	3.000	3.100	3.200	3.220	3.230	3.250	3,468	3,537	3,608	3,680	3,754	3,829	Pengawasan
				Level Kapabilitas APIP	3.000	3.100	3.200	3.300	3.320	3.330	3.350							Pengawasan
				Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	73.89	75.00	78.00	80.00	81.00	82.00	84.00							Pengawasan
6	1	2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)	38.00	73.00	75.99	78.00	80.99	83.00	85.99	1,905	1,943	1,982	2,022	2,062	2,103	Pengawasan
				Manajemen Resiko Indeks (MRI)	1.813	1.450	1.650	1.750	1.850	2.000	2.150							Pengawasan
				Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2.062	2.065	2.07	2.072	2.074	2.075	2.078							Pengawasan
7			**Urusan Pemerintahan Fungsi Kewilayahan**															
7	**1**		**Pemerintahan Distrik Web**															
7	1	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Pengawasan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Kawasan Perbatasan*	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	700	714	728	743	758	773	Kewilayahan
				Persentase Pengawasan Hak Ulayat Tanah Masyarat Adat*	100	100	100	100	100	100	100							Kewilayahan
7	1	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Distrik dan Kampung	100	100	100	100	100	100	100	447	456	465	474	484	494	Kewilayahan

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	1	3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	100	100	100	100	100	100	100	150	153	156	159	162	166	Kewilayahan
7	**2**		**Pemerintahan Distrik Towe**															
7	2	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Pengawasan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Kawasan Perbatasan*	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	700	714	728	743	758	773	Kewilayahan
				Persentase Pengawasan Hak Ulayat Tanah Masyarat Adat*	100	100	100	100	100	100	100							Kewilayahan
7	2	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Distrik dan Kampung	100	100	100	100	100	100	100	447	456	465	474	484	494	Kewilayahan
7	2	3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	100	100	100	100	100	100	100	150	153	156	159	162	166	Kewilayahan
7	**3**		**Pemerintahan Distrik Waris**															
7	3	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Pengawasan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Kawasan Perbatasan*	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	700	714	728	743	758	773	Kewilayahan
				Persentase Pengawasan Hak Ulayat Tanah Masyarat Adat*	100	100	100	100	100	100	100							Kewilayahan

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	3	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Distrik dan Kampung	100	100	100	100	100	100	100	447	456	465	474	484	494	Kewilayahan
7	3	3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	100	100	100	100	100	100	100	150	153	156	159	162	166	Kewilayahan
7	**4**		**Pemerintahan Distrik Arso Timur**															
7	4	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Pengawasan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Kawasan Perbatasan*	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	700	714	728	743	758	773	Kewilayahan
				Persentase Pengawasan Hak Ulayat Tanah Masyarat Adat*	100	100	100	100	100	100	100							Kewilayahan
7	4	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Distrik dan Kampung	100	100	100	100	100	100	100	447	456	465	474	484	494	Kewilayahan
7	4	3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	100	100	100	100	100	100	100	150	153	156	159	162	166	Kewilayahan
7	**5**		**Pemerintahan Distrik Yafi**															
7	5	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan	Tingkat Pengawasan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Kawasan Perbatasan*	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	700	714	728	743	758	773	Kewilayahan

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Publik	Persentase Pengawasan Hak Ulayat Tanah Masyarat Adat*	100	100	100	100	100	100	100							Kewilayahan
7	5	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Distrik dan Kampung	100	100	100	100	100	100	100	447	456	465	474	484	494	Kewilayahan
7	5	3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	100	100	100	100	100	100	100	150	153	156	159	162	166	Kewilayahan
7	**6**		**Pemerintahan Distrik Arso**															
7	6	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	100	100	100	100	100	100	100	700	714	728	743	758	773	Kewilayahan
7	6	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Distrik dan Kampung	100	100	100	100	100	100	100	447	456	465	474	484	494	Kewilayahan
7	6	3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	100	100	100	100	100	100	100	150	153	156	159	162	166	Kewilayahan
7	**7**		**Pemerintahan Distrik Arso Barat**															
7	7	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	100	100	100	100	100	100	100	700	714	728	743	758	773	Kewilayahan

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Publik															
7	7	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Distrik dan Kampung	100	100	100	100	100	100	100	447	456	465	474	484	494	Kewilayahan
7	7	3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	100	100	100	100	100	100	100	150	153	156	159	162	166	Kewilayahan
7	**8**		**Pemerintahan Distrik Skanto**															
7	8	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	100	100	100	100	100	100	100	700	714	728	743	758	773	Kewilayahan
7	8	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Distrik dan Kampung	100	100	100	100	100	100	100	447	456	465	474	484	494	Kewilayahan
7	8	3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	100	100	100	100	100	100	100	150	153	156	159	162	166	Kewilayahan
7	**9**		**Pemerintahan Distrik Senggi**															
7	9	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	100	100	100	100	100	100	100	700	714	728	743	758	773	Kewilayahan

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	9	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Distrik dan Kampung	100	100	100	100	100	100	100	447	456	465	474	484	494	Kewilayahan
7	9	3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	100	100	100	100	100	100	100	150	153	156	159	162	166	Kewilayahan
7	**10**		**Pemerintahan Distrik Kaisenar**															
7	10	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	100	100	100	100	100	100	100	700	714	728	743	758	773	Kewilayahan
7	10	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Distrik dan Kampung	100	100	100	100	100	100	100	447	456	465	474	484	494	Kewilayahan
7	10	3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	100	100	100	100	100	100	100	150	153	156	159	162	166	Kewilayahan
7	**11**		**Pemerintahan Distrik Mannem**															
7	11	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	100	100	100	100	100	100	100	700	714	728	743	758	773	Kewilayahan
7	11	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	447	456	465	474	484	494	Kewilayahan

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Dan Kelurahan	Distrik dan Kampung														
7	11	3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	100	100	100	100	100	100	100	150	153	156	159	162	166	Kewilayahan
8			**Urusan Pemerintahan Umum**															
8	**1**		**Bidang Urusan Pemerintahan Umum**															
8	1	1	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	100	100	100	100	100	1,000	1,020	1,040	1,061	1,082	1,104	Pemerintahan Umum
8	1	2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Etnis, Suku, Agama, Ormas, Kader Partai dan LSM yang Memahami Pendidikan Politik	100	100	100	100	100	100	100	1,700	1,734	1,769	1,804	1,840	1,877	Pemerintahan Umum
8	1	3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	1,100	1,122	1,144	1,167	1,191	1,214	Pemerintahan Umum

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome Berdasarkan Program	Target Kinerja Outcome 2025-2030							Pagu Indikatif Program 2025-2030 (Rp.Jutaan)						Penanggung Jawab Bidang Urusan
					Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Penanganan Konflik Sosial															
8	1	4	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan *	100	100	100	100	100	100	100	1,000	1,020	1,040	1,061	1,082	1,104	Pemerintahan Umum
8	1	5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Presentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan*	100	100	100	100	100	100	100	8,117	8,279	8,445	8,614	8,786	8,962	Pemerintahan Umum

Sumber: Musrenbang RPJMD, Tahun 2025

4.2. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029 berdasarkan ukuran Kuantitatif untuk menilai akhir peridesasi RPJMD Kabupaten Keerom dari segi Kontribusi OPD, capaian Program Perangkat Daerah ataupun stakeholder lainnya yang terlibat langsung dan tidak langsung mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029. Sehingga untuk memastikan, pihak berkepentingan memiliki kesepahaman, maka Penetapan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029 bertujuan untuk sebagai alat ukur yang objektif, memperjelas tujuan dan sasaran, pedoman pelaksanaan mengukur, menganalisis dan mengevaluasi kinerja evaluasi pembangunan Kabupaten Keerom.

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, dicerminkan melalui keberhasilan tolak ukur kinerja layanan publik. Sehingga, terdapat 2 (dua) parameter pencapaian kinerja Kabupaten Keerom melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Penetapan indikator kinerja memperhatikan kaidah SMART, dalam artian bahwa kerangka kerja indikasi Kinerja Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029 mencirikan indikator Spesifik: dalam artian indikator IKU dan IKD spesifik dan terdefenisi berdasarkan regulasi yang mengaturnya, Terukur: mengutaman pengukuran kuantitatif, Dapat Dicapai: penetapan proyeksi indikator melalui Proses penyusunan RPJMD Keerom sesuai Inmendagri 2/2025, Relevan: memuat dan mencirikan visi dan misi daerah serta keterkaitan dengan strata dokumen perencanaan lainnya, dan Terikat Waktu: periodesasi tahun 2025-2029 menetapkan basis proyeksi target melalui evaluasi realisasi Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Keerom Periode Sebelumnya.

Sejalan dengan Inmendagri No.2 Tahun 2025 memberikan arahan bahwa IKU merupakan parameter menunjukkan pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, selanjutnya terdapat penegasan bahwa indikator tersebut terpilih berdasarkan skala prioritas, penetapan IKU Tahun 2025-2029 melalui kriteria (1) relevansi terhadap arah pembangunan dan indikator kinerja pada RPJPD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2045, (2) hubungan antara outcome prioritas dengan program perangkat daerah.

Sedangkan Kinerja IKD sebagai parameter keberhasilan penyelenggaran pemerintahan daerah, menurut urusan pembangunan dan kewenangan Kabupaten Keerom merujuk pada Permendagri No.86 Tahun 2017, Inmendagri No.2 Tahun 2025 dan memperhatikan prioritas pembangunan sektoral lainnya menurut RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Keerom Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja 2025-2030					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	1.606	2.082	2.558	3.034	3.51	3.986
2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	42.85	43.64	47.03	51.42	55.81	60.20
3	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	2.821	3.142	3.603	4.064	4.525	4.986
4	Indeks Modal Manusia	Indeks	0.46	0.48	0.5	0.52	0.54	0.56
5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.61	12.76	12.91	13.06	13.21	13.36
6	Umur Harapan Hidup	Tahun	67.62	68	68.38	68.76	69.14	69.52
7	Tingkat Kemiskinan	%	15.23	14.98	14.53	14.4	14.27	14.14
8	Indeks Literasi Digital	Indeks	1.957	2.074	2.191	3.58	3.78	3.88
9	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	69.97	72.3	76.63	78.96	81.29	81.62
10	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	76.33	82.66	86.99	89.32	100	100
11	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	49.18	53.39	57.6	62.81	64.97	67.18
12	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	3.138	3.216	3.294	3.372	3.45	3.528
13	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	45.89	50.23	56.57	57.91	62.251	66.591
14	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.084	3.108	3.132	3.156	3.1801	3.3041
15	Indeks Gini	Indeks	0.372	0.348	0.334	0.32	0.2959	0.2919
16	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3.338	3.476	3.553	3.63	3.707	3.89
17	PDRB Perkapita	Rp Juta	37.292	40.275	42.692	44.399	46.619	49.416
18	Angka Deflator PDRB	Nilai	155.03	152.43	149.83	147.23	144.63	142.03
19	Kontribusi Terhadap PDRB Provinsi Papua	%	4.4739	4.5069	4.5839	4.6609	4.7379	4.8149
20	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	73.75	75.05	76.35	77.65	78.95	80.25
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69.04	69.97	70.9	71.83	72.76	73.69
22	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP)	Indeks	0.1431	0.1588	0.2045	0.2947	0.3404	0.3961
23	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	1.22	1.32	1.64	1.96	2.29	2.61
25	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja 2025-2030					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
26	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	18.8	17.5	16.3	15.2	14.2	11.8
27	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.73	8.89	9.05	9.21	9.37	9.53
28	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	77.493	78.726	80.959	83.192	83.87	84.903
29	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	64.473	65.706	67.939	70.172	76.66	77.693
30	Indeks Partisipasi Olahraga	Indeks	54.363	55.596	57.829	60.062	66.55	67.583
31	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100
32	Persentase Perda atau Perkada yang ditegakkan	%	49.77	52.1	55.43	58.76	63.22	64.053
33	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	56.42	60.63	64.84	70.05	72.21	74.42
34	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Telepone dan Internet	%	54.367	58.594	62.821	67.048	71.275	75.502
35	Persentase Rumah Tangga Terhadap Hunian Layak	%	85.87	88.43	90.99	93.55	96.11	98.67
36	Persentase UMKM yang menggunakan Aplikasi Digital	%	35.34	42.68	48.02	55.36	62.701	70.041
37	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	44.56	49.9	56.24	60.58	66.921	73.261
38	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	25.00	30.00	35.00	45.00	50.00	60.00
39	Jumlah Kampung Mandiri	Kampung	2	5	8	11	14	14
40	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69.04	69.97	70.9	71.83	72.76	73.69
41	Kontribusi UMKM dan Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB	%	30.456	35.212	39.968	44.724	49.48	54.236
42	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	5.658	5.796	5.973	6.35	6.727	7.104
43	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian Terhadap PDRB	%	34.99	39.74	44.50	49.25	54.01	58.77
44	Tingkat Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan RI-PNG	Kriteria	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
45	Cakupan Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan Wilayah Perbatasan	%	88.49	89.93	91.37	92.81	94.25	95.69

Sumber: Musrenbang RPJMD, Tahun 2025

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2025-2030

No	Indikator Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Aspek Pembangunan	Satuan	Target Kinerja 2025-2030					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**Aspek Geografi dan Demografi**							
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	76-100	76-100	76-100	76-100	76-100	76-100
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69.04	69.97	70.9	71.83	72.76	73.69
3	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Nilai	57.98	56.68	54.38	52.08	49.78	47.48
4	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	73.75	75.05	76.35	77.65	78.95	80.25
5	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	25.00	30.00	35.00	45.00	50.00	60.00
7	Persentase Penduduk OAP yang terdata dalam SIAK Plus	%	50.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	Cakupan area pelayanan sampah	%	53.00	56.00	59.00	62.00	65.00	68.00
9	Indeks Risiko Bencana	Indeks	121.73	116.43	111.13	105.83	100.53	95.23
II	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**							
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3.338	3.476	3.553	3.63	3.707	3.89
11	PDRB Perkapita	Rp Juta	37.29168	40.27501	42.69152	44.39918	46.61913	49.41628
12	Angka Deflator PDRB	Nilai	155.03	152.43	149.83	147.23	144.63	142.03
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.61	12.76	12.91	13.06	13.21	13.36
14	Umur Harapan Hidup	Tahun	67.62	68.00	68.38	68.76	69.14	69.52
15	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	69.91	71.15	73.38	75.61	77.26	78.29
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	77.49	78.73	80.96	83.19	83.87	84.90
17	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam pengembangan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah (PPKD)	%	20.00	25.00	30.00	40.00	50.00	60.00
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.89	2.78	2.67	2.56	2.45	2.34
III	**Aspek Daya Saing Daerah**							
19	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	5.66	5.80	5.97	6.35	6.73	7.10

No	Indikator Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Aspek Pembangunan	Satuan	Target Kinerja 2025-2030					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
20	Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Terhadap PDRB	%	1.12	1.26	2.43	3.61	3.79	4.96
21	Kontribusi UMKM dan Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB	%	30.46	35.21	39.97	44.72	49.48	54.24
22	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	69.82	72.42	75.02	77.62	80.22	82.82
23	Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB	%	41.32	46.07	50.83	55.58	60.34	60.34
24	Rasio Aksesibilitas	Per 10.000 Penduduk	0.51	0.54	0.58	0.61	0.64	0.67
25	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP)	Indeks	0.14	0.16	0.20	0.29	0.34	0.40
IV	**Aspek Pelayanan Umum**							
26	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	1.61	2.08	2.56	3.03	3.51	3.99
27	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	42.85	43.64	47.03	51.42	55.81	60.2
28	Indeks SPBE	Indeks	1.69	1.94	2.29	2.64	2.99	3.34
29	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	≥0.80	≥0.80	≥0.80	≥0.80	≥0.80	≥0.80
30	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	16.27	15.42	14.56	11.99	10.28	9.42
31	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	66.37	68.37	69.87	73.87	75.37	77.87
32	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	77.49	78.73	80.96	83.19	83.87	84.90
33	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	45.89	50.23	56.57	57.91	62.25	66.59

Sumber: Musrenbang RPJMD, Tahun 2025

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Keerom Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Kunci Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah	Satuan	Target Kinerja 2025-2030					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**Pendidikan**							
	Persentase Pengembangan Sekolah Unggulan SMP dan SMU	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Beasiswa Afirmasi Pendidikan dan Komunitas	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi dan Numerasi	%	40.81	44.56	48.31	52.06	55.81	59.56
II	**Kesehatan**							
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	Cakupan	100	100	100	100	100	100
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	18.80	17.50	16.30	15.20	14.20	14.00
III	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
	Tingkat Kemantapan Jalan	%	59.78	62.34	64.09	67.46	70.02	72.58
IV	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**							
	Persentase Rumah Layak Huni	%	89	94	99	100	100	100
	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU(Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100
V	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**							
	Persentase Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	%	100	100	100	100	100	100
VI	**Sosial**							
	Persentase Keluarga pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan pemberdayaan sosial, Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	%	6.10	12.19	18.29	24.39	30.48	36.80
VII	**Tenaga Kerja**							
	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	%	48.35	53.35	58.35	63.35	68.35	73.35
	Presentase Izin Usaha Pertanian dan Pangan yang di Terbitkan	%	35.12	38.54	42.30	46.43	50.95	55.92
VIII	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							

No	Indikator Kinerja Kunci Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah	Satuan	Target Kinerja 2025-2030					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase kampung layak anak	%	73.00	76.00	79.00	82.00	85.00	88.00
IX	**Pangan**							
	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Skor	88.50	90.80	93.10	95.40	97.70	100
X	**Pertanahan**							
	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100
	Ditetapkannya Hak Atas Tanah Dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100
XI	**Lingkungan Hidup**							
	Cakupan area pelayanan sampah	Cakupan	53.00	56.00	59.00	62.00	65.00	68.00
	Persentase Pelaksanaan Pengujian dan Pengawasan dan Pengendalian IKA dan IKU	%	100	100	100	100	100	100
XII	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	25.00	30.00	35.00	45.00	50.00	60.00
	Persentase Penduduk OAP yang terdata dalam SIAK Plus	%	50	90	100	100	100	100
XIII	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							
	Presentase BUMKAM aktif	%	73.53	75.6	80.54	84.56	87.67	88.67
	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPM)	%	74.45	75.46	77.48	78.51	80.55	85.59
XIV	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	%	61.87	60.40	62.10	63.80	65.50	67.20
XV	**Perhubungan**							
	Persentase bandara yang memenuhi standar keselamatan	%	16.67	33.33	50.00	66.67	83.33	100
XVI	**Komunikasi dan Informatika**							
	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	%	79.85	80.75	81.25	83.40	85.50	85.70
XVII	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**							
	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	%	31.00	32.00	33.00	34.00	35.00	35.00
	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00

No	Indikator Kinerja Kunci Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah	Satuan	Target Kinerja 2025-2030					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
XVIII	**Penanaman Modal**							
	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Rp Jutaan	271,809	271,908	272,008	272,108	272,208	272,308
XIX	**Kepemudaan dan Olahraga**							
	Persentase Pembangunan Pemuda yang di Laksanakan	%	56.00	57.00	58.00	59.00	60.00	61.00
XX	**Statistik**							
	Persentase Ketersediaan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	%	100	100	100	100	100	100
XXI	**Persandian**							
	Persentase arus informasi pemerintah daerah yang lancar, aman dan terjaga kerahasiaannya	%	100	100	100	100	100	100
XXII	**Kebudayaan**							
	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam pengembangan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah (PPKD)	%	20.00	25.00	30.00	40.00	50.00	60.00
XXIII	**Perpustakaan**							
	Indeks Pembangunan Literasi	%	12.00	18.00	20.00	25.00	30.00	31.00
XXIV	**Kearsipan**							
	Kriteria Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	Kriteria	Tidak Diberikan Opini	D	D	C	CC	CC
XXV	**Kelautan dan Perikanan**							
	Jumlah produksi perikanan budidaya	Angka	47.500	47.500	52.125	57.207	62.790	68.924
	Jumlah Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	Angka	38.483	40.483	40.483	42.483	44.483	46.483
XXVI	**Pariwisata**							
	Jumlah Objek Destinasi yang di Kembangkan	Angka	2	2	2	2	2	2
XXVII	**Pertanian**							
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	62.00	64.00	65.00	67.00	68.00	70.00
	PersentasePeningkatan Produksi Hortikultura	%	89.50	92.50	95.50	99.50	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah	Satuan	Target Kinerja 2025-2030					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	57.91	59.07	60.25	61.45	62.68	63.94
XXXI	**Perdagangan**							
	Persentase Stabilitasasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	78.00	79.00	80.00	81.00	82.00	83.00
	Persentase UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	100	100	100	100	100	100
XXXII	**Perindustrian**							
	Presentase Realisasi Inventasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	100	100	100	100	100	100
XXXIII	**Transmigrasi**							
	Presentase Transmigran yang dibina dan diberdayakan	%	35.12	38.54	42.30	46.43	50.95	55.92
XXXIV	**Sekretariat Daerah**							
	Persentase Penetapan Batas Wilayah Administrasi Administrasi Kampung, Distrik dan Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Jalinan Kerjasama Pembangunan Daerah Antar Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100
XXXV	**Sekretariat DPRD**							
	Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Raperda diterbitkan dan Perda yang ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100
XXXVI	**Perencanaan**							
	Persentase Keselarasan RPJMD terhadap RKPD	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Keselarasan RPJMD terhadap Renstra PD	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Usulan Musrenbang Distrik terakomodir dalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100
XXXVII	**Keuangan**							
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	92.00	93.00	94.00	95.00	96.00	97.00
	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Per tahun	%	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25

No	Indikator Kinerja Kunci Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah	Satuan	Target Kinerja 2025-2030					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
XXXVIII	**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**							
	Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar	%	99.00	100	100	100	100	100
	Persentase ASN Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	%	85.00	85.00	100	100	100	100
XXXIX	**Penelitian dan Pengembangan**							
	Persentase Kebijakan berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	%	41.10	46.70	52.30	57.90	63.50	69.10
	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan*	%	34.83	42.06	44.48	47.03	49.74	52.60
XL	**Pengelolaan Perbatasan Daerah**							
	Tingkat Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan RI-PNG	Kriteria	Cukup Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Persentase kerjasama kawasan perbatasan yang terfasilitasi (tapal batas, perijinan keluar masuk, dll)	%	100	100	100	100	100	100
XLI	**Inspektorat**							
	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)	Indeks	73.00	75.99	78.00	80.99	83.00	85.99
	Manajemen Resiko Indeks (MRI)	Indeks	1.450	1.650	1.750	1.850	2.000	2.150
	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	2.065	2.07	2.072	2.074	2.075	2.078
XLII	**Kecamatan**							
	Tingkat Pengawasan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Kawasan Perbatasan	Kriteria	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Distrik dan Kampung	%	100	100	100	100	100	100
XLIII	**Kesatuan Bangsa dan Politik**							
	Persentase Etnis, Suku, Agama, Ormas, Kader Partai dan LSM yang Memahami Pendidikan Politik	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Musrenbang RPJMD, Tahun 2025

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Umum

Secara keseluruhan, RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025–2029 menjadi peta jalan pembangunan lima tahunan untuk mewujudkan daerah yang mandiri secara fiskal dan ekonomi, maju dalam pelayanan publik dan SDM, berdaya saing di wilayah perbatasan negara, dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan. Sekaligus merupakan perwujudan implementasi pendekatan *transformative governance,* dengan menekankan kolaborasi multi-pihak, partisi-pasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pembangunan daerah. RPJMD ini merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyeleng-garaan pembangunan di Kabupaten Keerom lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, ter-padu dan searah dengan pembangunan Provinsi Papua dan pemba-ngunan Nasional. Dengan implementasi RPJMD yang konsisten, kolaboratif, dan berbasis bukti, diharapkan Kabupaten Keerom akan menjadi wilayah perbatasan yang maju, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus menjadi simbol kehadiran negara di tapal batas timur Indonesia.

Melalui Perumusan visi RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Keerom, merujuk kondisi faktual Kabupaten Keerom menjelaskan tentang kinerja daerah dan isu-isu strategis dan mempertimbangkan visi dan misi Bupati terpilih Periode 2025-2029, ditetapkan rumusan visi pembangunan Kabupaten Keerom yaitu: "Keerom Maju yang Transformatif, Mandiri, Bermartabat Dan Berkelanjutan". Serta memiliki substansi aspek transformasi Kabupaten Keerom 2025-2029:

Secara substansial, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Keerom Tahun 2025–2029 memberikan penekanan pada tiga pilar utama pembangunan daerah yang saling terintegrasi, saling memperkuat, dan menjadi landasan strategis dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah. Ketiga pilar tersebut disusun komprehensif menjawab tantangan pembangunan daerah, memperkuat kapasitas wilayah, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1. Penegasan landasan filosofis, yuridis, dan empiris penyusunan RPJMD Kabupaten Keerom. RPJMD disusun sebagai penjabaran visi dan misi Bupati–Wakil Bupati terpilih, sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD Tahun 2025–2045) dan nasional (RPJPN Tahun 2025–2045). Menggambarkan tujuan penyusunan RPJMD, yaitu untuk menetapkan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan 5 tahun. RPJMD Keerom bukan sekadar dokumen administratif, tetapi kontrak sosial pembangunan yang memadukan aspirasi masyarakat, kebijakan pusat, dan potensi daerah dalam satu kerangka terintegrasi dan berbasis bukti (*evidence and fact based planning*).

2. Evaluasi menyeluruh terhadap kondisi eksisting Kabupaten Keerom mencakup aspek geografi, demografi, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, infrastruktur, lingkungan, serta pelayanan publik. Analisis menunjukkan bahwa Keerom memiliki letak

strategis sebagai beranda timur NKRI dengan potensi sumber daya alam dan posisi perbatasan yang bernilai ekonomi dan geopolitik tinggi. Namun, masih terdapat tantangan besar seperti keter-isolasian wilayah pedalaman, keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya kemandirian fiskal, serta ketimpangan antar distrik. Pembangunan Keerom perlu diarahkan untuk memperkuat konek-tivitas dan aksesibilitas antar wilayah, meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan dasar, serta meng-optimalkan ekonomi lokal berbasis potensi pertanian, perbatasan, dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Isu-isu strategis yang menjadi dasar penen-tuan arah kebijakan RPJMD. Permasalahan utama Keerom men-cakup: Keterbatasan kapasitas fiskal dan ketergantungan pada transfer pusat, Kesenjangan pelayanan dasar di bidang pendi-dikan, kesehatan, air minum, dan perumahan, Keterhubungan infrastruktur antar distrik yang belum merata, Tantangan penge-lolaan wilayah perbatasan dan keamanan sosial, serta Kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Dari analisis SWOT dan identifikasi faktor transformasi, Bab ini menyimpulkan bahwa arah pembangunan harus difokuskan pada penguatan ekonomi lokal yang inklusif, reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital, percepatan pembangunan wilayah perbatasan, serta pe-ngelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

3. Menegaskan orientasi strategis pembangunan 5 tahun mendatang dalam konteks Visi dan pembangunan Keerom, tujuan dan sasaran, atrah kebijakan, dan program pembangunannya. Kemu-dian, diterjemahkan ke dalam indikator kinerja) yang terukur yang menjadi “kompas” ke arah seluruh kebijakan dan program daerah agar selaras dengan visi besar Keerom 2025–2045. Strategi utama diarahkan pada 8(delapn) pilar transformasi pembangunan Keerom, di mana setiap strategi diterjemahkan ke dalam program daerah.

4. Gambaran tentang program perangkat daerah dan kinerja pe-nyelengaraan pemerintah daerah yang menjadi acuan utama dalam menidentifikasi dan memberikan bobot riil ke dalam Program Perangkat Daerah, Pagu Indikatif dan Target Kinerja. Selanjutnya, menginformasikan Indikator Kinerja IKU dan IKD Kabupaten Keerom.

5.1.2. Fokus Khusus

Berdasar pada dimensi tranformatif yang diusung, mencakup transformasi
Spritualitas, Tatakelola, Sosial, Ekonomi, Budaya, Ipteks, Ekologi-lingkungan, dan Demokrasi, serta memperhatikan isu-isu strategis yang mengedepan berdasarkan konteks dunia, nasional, dan provinsi, maka aspek-asoek berikut ini menjadi sangat penting diberikan perhatian khusus.

1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Keerom menetapkan peningkatan kua-litas hidup masyarakat sebagai prioritas utama dalam arah pemba-ngunan jangka menengah daerah. Upaya ini diwujudkan melalui strategi peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan

infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, serta transportasi wilayah pedalaman. Sektor pendidikan, kebijakan diarahkan untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, peningkatan kualitas guru, serta perluasan akses pendidikan bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat dan anak-anak di wilayah terpencil.

Bidang kesehatan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mem-perkuat layanan kesehatan primer dengan memperluas cakupan pelayanan Puskesmas, meningkatkan ketersediaan tenaga medis, serta memperkuat upaya promotif dan preventif melalui program kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular, serta perbaikan gizi masyarakat. Selain itu, sistem rujukan akan diperkuat untuk memastikan keterhubungan pelayanan dari tingkat dasar hingga lanjutan secara efektif.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur dasar akan difokus-kan pada pengurangan kesenjangan antarwilayah, khususnya di distrik dan kampung yang selama ini tertinggal. Peningkatan konek-tivitas antarwilayah tidak hanya bertujuan untuk mempercepat mobilitas orang dan barang, tetapi juga untuk mendukung pemerataan akses terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Tak kalah penting, penguatan sistem perlindungan sosial juga menjadi bagian integral dari strategi peningkatan kualitas hidup. Program perlindungan sosial akan diarahkan untuk menjamin peme-nuhan hak-hak dasar warga negara, memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta menanggulangi dampak ketimpangan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat Keerom yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan sosial.

2. Penguatan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan dan Ekonomi Hijau

Penguatan ekonomi daerah menjadi prioritas strategis dalam RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025–2029. Arah kebijakan pem-bangunan ekonomi daerah difokuskan pada optimalisasi dan hilirisasi potensi unggulan lokal, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan yang merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat. Pemerintah daerah berkomit-men untuk membangun sistem ekonomi yang inklusif dan ber-ke-lanjutan, melalui penguatan kapasitas pelaku usaha lokal, pengem-bangan UMKM, serta penciptaan ekosistem investasi yang kondusif. Pendekatan ekonomi hijau menjadi pilar utama, dengan menekankan pada prinsip keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya alam, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi diarahkan untuk tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga pemerataan hasil pembangunan, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Peningkatan nilai tambah melalui pengembangan industri kecil dan menengah, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta penguatan rantai pasok akan menjadi strategi kunci untuk meningkatkan daya saing daerah. Disamping itu, konektivitas antarwilayah dan pemba-ngunan infrastruktur ekonomi seperti jalan produksi, pasar rakyat, serta pusat distribusi logistik akan terus didorong untuk mendukung mobilitas barang dan jasa. Dengan pendekatan tersebut, Keerom diharapkan mampu tumbuh sebagai kawasan ekonomi yang pro-duktif, tangguh, dan ramah lingkungan.

Pilar ketiga dari RPJMD ini menegaskan pentingnya reformasi birokrasi sebagai fondasi dalam menciptakan tata kelola pemerin-tahan yang efektif, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masya-rakat. Pemerintah Kabupaten Keerom memandang birokrasi yang adaptif dan berintegritas sebagai prasyarat utama dalam memper-cepat pencapaian tujuan pembangunan.

Langkah-langkah reformasi diarahkan pada penyederhanaan struktur organisasi, peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), serta penerapan sistem merit dalam manajemen SDM aparatur. Selain itu, transformasi digital dalam layanan publik juga menjadi agenda utama, dengan mendorong implementasi sistem pemerin-tahan berbasis elektronik (SPBE) secara menyeluruh dan terintegrasi.

Pemerintah daerah juga menempatkan akuntabilitas, trans-paransi, dan partisipasi publik sebagai prinsip utama dalam penye-lenggaraan pemerintahan. Mekanisme pelaporan kinerja, pengawasan internal, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran akan diperkuat guna membangun kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Melalui reformasi birokrasi yang konsisten dan terarah, Kabupaten Keerom diharapkan mampu membangun aparatur negara yang profesional, adaptif terhadap dinamika pembangunan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

3. Tantangan dan peluang pembangunan ke depan.

Pada level nasional maupunn level Provinsi Papua dan manca-negara, Kabupaten Keerom yang memiliki perbatasan antar negara, dipandang memiliki fungsi sebagai kawasan strategis. Letak geografis sebagai beranda depan NKRI di timur, memiliki tantangan besar dalam pemerataan pembangunan, penguatan ketahanan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selai itu, Kabupaten Keerom menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal, infrastruktur dasar, dan kualitas sumber daya manusia, namun memiliki potensi ekonomi wilayah yang sangat besar, terutama di bidang pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pariwisata alam.

Oleh karena itu, ke depan, kebijakan dan program Pembangunan nya diarahkan pada transformasi menuju pada kondisi Keerom maju yang transformatif, mandiri, bermartabat dan berkelanjutan. Dengan posisi strategis dan potensi besar yang dimilikinya, Kabupaten Keerom memiliki peluang untuk tumbuh sebagai pusat ekonomi hijau dan ketahanan perbatasan negara di timur Indonesia. Namun, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dunia usaha, dan pemerintah pusat dalam membangun Keerom secara terencana, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Peluang pembangunan Kabupaten Keerom ke depan dengan posisi strategis sebagai wilayah perbatasan negara adalah adanya kebijakan nasional dan provinsi untuk mendukung pengelolaan potensi SDA dan pertanian berkelanjutan, dukungan kebijakan otonomi khusus Papua dan alokasi dana perbatasan, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pemerintahan, potensi pariwisata alam dan budaya (ekowisata berbasis budaya dan konservasi lingkungan, peningkatan kerjasama regional dan internasional yang dapat memperkuat kapasitas Pembangunan, serta adanya

kemitrraan strategis antar kawasan dan investasi Pembangunan. Selain itu, ada dukungan kebijakan nasional penguatan wilayah perbatasan (BNPP, Kemenko Polhukam) membuka peluang infrastruktur, perdagangan, dan pendidikan lintas batas, kebijakan nasonal pengembangan lumbung pangan, pengembangan kawasan strategis ekonomi perbatasan (KPPN Skouw–Wutung) yang bisa dimanfaatkan Keerom. Program pemerintah pusat: food estate, perhutanan sosial, SDGs Desa, dan Dana Otsus Plus, kebangkitan ekonomi hijau dan ekowisata: potensi hutan adat, agroforestry, dan wisata alam di Distrik Senggi, Web, dan Towe, kerja sama lintas batas dengan PNG untuk perdagangan hasil bumi, bahan bangunan, dan kebutuhan pokok.dan Kebijakan nasional pengembangan kawasan hijau (dan biru), pengembangan SDGs, dan lingkungan hidup yang didukung oleh dunia internasional

Tetapi, sebaliknya Kabupaten Keerom juga menghadapi tantangan yang harus dapat dikelola dengan baik, seperti: keterbatasan infrastruktur dan aksesi-bilitas wilayah, ketergantungan tinggi terhadap transfer fiskal pusat, kualitas SDM dan pelayanan dasar yang belum merata, disparitas sosial-ekonomi antar distrik dan kampung, tantangan keamanan dan pengelolaan wilayah perbatasan, kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam, lemahnya kapasitas kelembagaan dan tata kelola. Juga termasuk kerusakan lingkungan dan deforestasi akibat ekspansi sawit, tambang ilegal, dan food estate tanpa pengawasan, Ancaman keamanan di wilayah perbatasan (pergerakan kelompok bersenjata dan penyelundupan barang), ketimpangan pembangunan antar distrik, terutama antara Arso–Skanto (padat) dengan Kaisenar–Towe (terpencil), perubahan iklim yang meningkatkan risiko kekeringan dan banjir musiman di daerah rendah, migrasi keluar tenaga muda akibat rendahnya peluang kerja lokal, serta ketergantungan ekonomi tunggal pada sektor primer (pertanian mentah) tanpa pengolahan lanjutan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

5.2.1. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Keerom Tahun 2025–2029 dilakukan dengan menjunjung prinsip-prinsip dasar pembangunan yang menjamin keberlanjutan, inklusivitas, efektivitas, dan akuntabilitas. Diperlukan adanya komitmen, kolaborasi, dan tata kelola yang kuat. Dengan sistem implementasi yang terarah, dukungan sumber daya yang memadai, serta sinergi antar pemangku kepentingan, RPJMD ini akan menjadi panduan nyata bagi percepatan transformasi Keerom.

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Keerom merupakan pedoman operasional yang menjabarkan bagaimana arah, strategi, dan program pemba-ngunan daerah dilaksanakan secara efektif dan terukur. Kaidah ini menjamin bahwa seluruh tahapan implementasi RPJMD berjalan selaras, sinergis, dan terintegrasi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, DPRK, masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memas-tikan bahwa RPJMD tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjadi instrumen penggerak perubahan sosial-ekonomi dan tata kelola pemerintahan.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, RPJMD Keerom ini, maka dalam pelaksanaannya harus berlandaskan pada prinsip:

1. Keterpaduan antar dokumen perencanaan, sektor, wilayah, dan level pemerintahan.
2. Partisipatif, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, lembaga adat, dan dunia usaha.
3. Akuntabilitas dan transparansi, di mana setiap program harus memiliki indikator dan laporan capaian yang terbuka.
4. Berbasis Bukti dan fakta, diman kebijakan disusun berdasarkan data, analisis, dan hasil evaluasi sebelumnya.
5. Berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kesinambungan fiskal.
6. Inklusif dan berkeadilan yang menjamin pemerataan manfaat pembangunan hingga ke kampung terluar dan masyarakat adat.

Prinsip-prinsip tersebut, menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, hingga evaluasi capaian pembangunan. Dalam hal itu, peran keterlibatan para pihak dalam pelaksanaannya dapat diatur sebagai berikut:

1. Bupati/Wakil Kabupaten Keerom. Bertindak sebagai enanggung jawab utama pelaksanaan RPJMD; menetapkan kebijakan strategis, melakukan koordinasi lintas sektor, dan memastikan capaian sasaran pembangunan.
2. DPRK Kabupaten Keerom. Melakukan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran terhadap pelaksanaan RPJMD serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pembangunan. Keterlibatan aktif DPRK dan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sangat penting untuk men-jaga transparansi, memperkuat legitimasi, serta mendorong akun-tabilitas publik. Forum-forum partisipatif seperti Musrenbang, Forum Konsultasi Publik, dan media pengaduan publik akan dimanfaatkan secara optimal untuk menampung aspirasi dan masukan masyarakat.
3. Bapperinda Kabupaten Keerom. Sebagai koordinator perencanaan, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan RPJMD lintas perangkat daerah.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Keerom. Pelaksana teknis program dan kegiatan sesuai Renstra dan Renja masing-masing, dengan indikator kinerja terukur dan target tahunan.
5. Kampung dan Distrik. Menerjemahkan prioritas RPJMD ke dalam Rencana Pembangunan Kampung (RKP Kampung), memperkuat partisipasi masyarakat akar rumput.
6. Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua. Memberikan dukungan kebijakan, pembiayaan, dan asistensi teknis untuk program lintas wilayah dan lintas kewenangan.
7. Masyarakat dan Lembaga Adat. Mitra pemerintah dalam perencanaan partisipatif, pelaksanaan pembangunan berbasis kearifan lokal, dan pengawasan sosial. Pelibatan masyarakat secara aktif diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki, memperkuat transparansi, serta menjamin keberlanjutan program pembangunan.
8. Dunia Usaha dan Swasta. Berperan dalam investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang sinergis dengan prioritas RPJMD.
9. Perguruan Tinggi dan LSM. Mendukung riset kebijakan, inovasi, dan pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan program berbasis data dan bukti.

Selanjutnya, penting pula diperhatikan aspek-aspek prinsipil berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas

Seluruh proses pembangunan diarahkan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya daerah secara optimal. Prinsip efisiensi menekankan pada pengelolaan anggaran dan sumber daya secara hemat, tepat guna, serta berorientasi pada hasil. Sementara efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan strategis daerah secara tepat sasaran, dengan memprioritaskan kegiatan yang memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Keerom akan memperkuat perencanaan berbasis data, manajemen kinerja, serta evaluasi berbasis hasil (result-based monitoring and evaluation) untuk mewujudkan pembangunan yang produktif dan terukur.

2. Integrasi Lintas Sektor dan Kewilayahan

Pelaksanaan RPJMD tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi lintas sektor serta lintas wilayah. Sinkronisasi antar perangkat daerah, antar distrik, dan antar program prioritas menjadi keharusan agar pembangunan berlangsung harmonis dan saling memperkuat. Integrasi ini juga mencakup kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pusat, dunia usaha, akademisi dan organisasi masyarakat sipil dalam kerangka pembangunan kolaboratif (collaborative governance) yang mendorong efisiensi dan efektivitas lintas sektor.

3. Keselarasan dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi

RPJMD Kabupaten Keerom disusun dengan tetap memperhatikan keterpaduan dan kesinambungan arah pembangunan nasional (RPJMN 2025–2029) serta RPJMD Provinsi Papua. Keselarasan ini penting untuk menjamin sinergi program lintas tingkat pemerintahan, memperkuat daya dukung kebijakan pusat dan provinsi terhadap pembangunan daerah, serta menghindari tumpang tindih program dan pemborosan sumber daya. Selain itu, keterpaduan dokumen ini juga memungkinkan akses pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otsus, dan skema pendanaan non-APBD.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Setiap tahapan pelaksanaan pembangunan daerah dituntut untuk dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab, dan dapat diaudit oleh publik. Pemerintah Kabupaten Keerom berkomitmen untuk memperkuat sistem informasi manajemen perencanaan dan pelaporan, mengembangkan mekanisme pelaporan kinerja secara real time, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan DPRD dalam fungsi pengawasan. Akuntabilitas juga dijamin melalui penguatan kapasitas kelembagaan, penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja, dan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah.

5. Sinergitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen RPJMD Keerom Tahun 2025-2029 menjadi pedoman utama dalam penyunan Kinerja Tahunan pada dokumen APBD, RKPD dan RENJA. Secara khusus RKPD masa transisi di tahun 2030 menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode saat ini 2025-2029, dikarenakan dalam penyusunan dokumen RPJMD

Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029 memuat hingga tahun 2030, sehingga Tahun Rencana 2030 menjadi target kinerja Kepala Daerah berikutnya.

5.2.2. Mekanisme Implementasi RPJMD

Pelaksanaan RPJMD ini dilakukan melalui mekanisme berlapis yang menghubungkan rencana strategis jangka menengah daerah dengan rencana tahunan dan operasional perangkat daerah. Mekanismenya mencakup beberapa tahapan utama:

1. Penjabaran dalam Dokumen Perencanaan Tahunan. Diarahkan untuk kesinambungan antara RPJMD, RKPD, Renstra OPD, Renja OPD yang menjadi kunci keterpaduan implementasi
   - RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.
   - RKPD menjadi dasar penyusunan KUA–PPAS dan RAPBD.
   - Program dan kegiatan dalam RKPD harus mengacu langsung pada arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan indikator kinerja RPJMD.
2. Penguatan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dalam rangka integrasi vertikal (RPJMD dan OPD) serta horizontal (antar OPD)
   - Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator sesuai RPJMD.
   - Renstra menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD.
   - Penganggaran program dan kegiatan OPD harus sinkron dengan prioritas pembangunan daerah dan pagu indikatif yang disepakati dalam RKPD.
3. Sinkronisasi dengan Perencanaan Nasional dan Provinsi. Sebagai bentuk penyelarasan lintas level pemerintahan memastikan efektivitas pendanaan dan kesinambungan program pusat–daerah.
   - Implementasi RPJMD harus selaras dengan RPJMN, RPJPD Provinsi Papua, dan Rencana Strategis K/L yang relevan, terutama untuk sektor perbatasan, keamanan, dan infrastruktur strategis.
   - Pemerintah Kabupaten Keerom perlu aktif dalam Forum Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lintas Wilayah (Musrenbangnas dan Musrenbangprov) agar prioritas lokal diakomodasi dalam kebijakan pusat.
4. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pelaksanaan
   - Bappelitbangda Keerom menjadi koordinator utama dalam pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan RPJMD.
   - Dilakukan secara berkala (semesteran dan tahunan) dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).
   - Hasil evaluasi dituangkan dalam Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), serta Evaluasi RPJMD Tahunan.

5.3 Pengendalian Dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan siklus pembangunan daerah. Dalam konteks pelaksanaan RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025–2029, pengendalian dan evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur terhadap capaian pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen

manajemen strategis untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program dengan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah dirumuskan.

Secara umum, pengendalian dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, sedangkan evaluasi digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil pembangunan yang dicapai memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam implementasinya diterapkan sistem monitoring berbasis GIS/online, terutama untuk memantau pembangunan jalan, air bersih, listrik dan telekomunikasi

5.3.1. Pengendalian Pelaksanaan RPJMD

Pengendalian RPJMD dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi secara sistematis yang melibatkan seluruh pemangku kepen-tingan di tingkat pemerintah daerah. Dilakukan secara berkala (semesteran dan tahunan) dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Tujuannya adalah untuk memantau kesesuaian pelaksanaan program dengan peren-canaan, mengidentifikasi deviasi, serta mengambil tindakan korektif secara cepat dan tepat. Dalam hal ini, Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan, pihak Bapperinda Kabupaten Keerom menjadi koordinator utama dalam pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan RPJMD. Hasil evaluasi dituangkan dalam Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), serta Evaluasi RPJMD Tahunan. Secara rinci dikemukakan berikut ini:

1. Monitoring Capaian Kinerja Daerah

Monitoring dilakukan secara berkala, baik triwulanan maupun tahunan, terhadap indikator kinerja utama daerah (IKU), indikator kinerja sasaran RPJMD, serta indikator kinerja perangkat daerah (IKPD). Proses ini dilakukan melalui mekanisme pelaporan kinerja secara elektronik menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), e-Monev, serta sistem pelaporan internal daerah.

2. Evaluasi Program dan Kegiatan

Evaluasi mencakup penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan, pencapaian target output dan out-come, efisiensi penggunaan anggaran, serta dampaknya terhadap sasaran pembangunan. Evaluasi dilakukan oleh Baperinda bersama dengan Inspektorat Daerah, Perangkat Daerah teknis, dan pihak terkait lainnya. Proses ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi praktik-praktik baik, mengatasi permasalahan implementasi, serta merekomendasikan perbaikan kebijakan ke depan.

3. Reviu dan Penyesuaian Kebijakan

Dalam menghadapi dinamika eksternal yang signifikan seperti bencana alam, konflik sosial, perubahan regulasi nasional, pandemi, atau krisis ekonomi global, pemerintah daerah perlu melakukan reviu terhadap RPJMD. Reviu ini bertujuan untuk menilai kelayakan kebijakan dan program dalam konteks perubahan tersebut, dan bila perlu, menyusun dokumen Perubahan RPJMD dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penguatan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas

Pengendalian juga mencakup peningkatan kualitas pengawasan internal melalui optimalisasi peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Di samping itu, sistem pelaporan kinerja berbasis elektronik akan dikembangkan untuk mempercepat akses data, meningkatkan akurasi pelaporan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy).

5.3.2. Evaluasi Kinerja dan Pelaporan

Evaluasi terhadap RPJMD dilakukan dalam dua kerangka waktu, yaitu evaluasi tahunan dan evaluasi akhir periode, dengan tujuan utama untuk menilai keberhasilan pembangunan daerah dan menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan perencanaan ke depan.

1. Evaluasi Tahunan

Evaluasi ini dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun setiap akhir tahun. LKPD berfungsi untuk menilai capaian tahunan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, dan menyusun rekomendasi perbaikan yang relevan untuk tahun anggaran berikutnya.

2. Evaluasi Akhir Periode RPJMD

Evaluasi menyeluruh dilakukan pada akhir periode lima tahunan RPJMD dalam bentuk Laporan Akhir RPJMD. Evaluasi ini bersifat retrospektif dan berorientasi pada hasil, dengan mencakup analisis efektivitas kebijakan, efisiensi program, keberlanjutan dampak pembangunan, serta kesesuaian pelaksanaan terhadap visi, misi, dan tujuan RPJMD. Laporan akhir ini menjadi bahan utama dalam penyusunan RPJMD periode selanjutnya serta sebagai bagian dari pertanggungjawaban akhir kepala daerah. Melalui pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang sistematis, adaptif, dan partisipatif, Pemerintah Kabupaten Keerom berkomitmen untuk menjaga kualitas pelaksanaan pembangunan, meningkatkan kinerja birokrasi daerah, dan memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029 menjadi dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Keerom yang telah disepakati bersama oleh seluruh stakeholder pembangunan, sehingga seluruh pimpinan perangkat daerah dan stakeholder pembangunan, memberikan kontribusi langsung dan komitmen bersama untuk Pelaksanaan seluruh program Prioritas terkandung pada RPJMD Keerom Tahun 2025-2029. Hal ini, sebagai wujud kolaborasi untuk bersama membangun Kabupaten Keerom Tahun 2025-2029, dengan semangat motto: “KWEMBO KENTKEI, GIRGURA KENSUWRI” Tuhan menciptakan, Kita yang Membangun.

Arso, November 2025

BUPATI KEEROM

PITER GUSBAGER, S.Hut., MUP